



PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KABUPATEN MOJOKERTO
2021-2026





BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
dan
BUPATI MOJOKERTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Agustus 2021



Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 26 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,
PROVINSI JAWA TIMUR 136-9/2021

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2021-2026**

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi "Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu:

- a. Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan
- b. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegras, akuntabel, bersih, transparan
- d. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan.

RPJMD selanjutnya menjadi acuan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Sebagaimana amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RPJMD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun yang memuat tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta bersifat indikatif berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan yang disusun dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 dapat dikatakan sebagai hulu dari seluruh alur pelaksanaan pembangunan yang wajib dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholders yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO NOMOR 7



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sekaligus juga menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintahan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sampai dengan tahun 2026. Dalam pencapaian target pembangunan RPJMD melibatkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Mojokerto, mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi, serta mendorong peran aktif seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 ini, kami ucapkan terimakasih.

Mojokerto, 26 Agustus 2021

BUPATI MOJOKERTO,





DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-17
1.5 Sistematika Penulisan	I-18

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-27
2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-50
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-206

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu.....	III-4
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-5
3.1.2 Neraca Daerah	III-19
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-30
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-31
3.2.2 Analisis Pembiayaan.....	III-33
3.3 Kerangka Pendanaan	III-37
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.....	III-38
3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan	III-46

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan	III-1
4.2 Isu-Isu Strategis.....	III-17

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1 Visi	III-1
5.2 Misi	III-1
5.3 Tujuan.....	III-3

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN dan PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX PENUTUP



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Cakupan Luas Area Tiap Kebutuhan Daerah	II-1
Tabel 2.2 Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto.....	II-3
Tabel 2.3 Cakupan Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Mojokerto .	II-5
Tabel 2.4 Luas Lahan Berdasarkan Letak Ketinggian	II-6
Tabel 2.5 Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto.....	II-7
Tabel 2.6 Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto	II-8
Tabel 2.7 Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto.....	II-9
Tabel 2.8 Luas Lahan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mojokerto.....	11
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	II-20
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016- 2020	II-20
Tabel 2.11 Banyaknya Kematian Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	II-21
Tabel 2.12 Banyaknya Penduduk yang Datang dan Pindah Keluar Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	II-22
Tabel 2.13 Penduduk Menurut Agama yang dianut Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2020	II-23
Tabel 2.14 Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-24
Tabel 2.15 Penduduk Menurut Jenis Pendidikan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2020	II-26
Tabel 2.16 Penduduk Menurut Jenis Disabilitas di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-27
Tabel 2.17 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	II-29



Tabel 2.18 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020	II-31
Tabel 2.19 Distribusi Persentase Produk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-32
Tabel 2.20 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020.....	II-35
Tabel 2.21 PDRB Per Kapita Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku	II-36
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-38
Tabel 2.23 Table Indeks Daya Beli Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-41
Tabel 2.24 IPM Kabupaten Mojokerto dan Indeks Komposit Pembentuk IPM Menurut Gender Tahun 2016 - 2020	II-43
Tabel 2.25 Berikut data capaian IPG Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2020	II-45
Tabel 2.26 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Mojokerto Tahun 2016– 2020 II-46	
Tabel 2.27 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-48
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Olahraga dan Budaya Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.29 Angka Partisipasi Murni (APM)Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-51
Tabel 2.30 Angka PartisipasiKasar (APK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-51
Tabel 2.31 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2020.....	II-52
Tabel 2.32 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2020	II-53
Tabel 2.33 Jumlah Guru yang Sudah Bersertifikas tahun 2016-2020.....	II-54



Tabel 2.34	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 .	II-54
Tabel 2.35	jumlah Pesein Akibat Penyakit Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan tahun 2016-2020	II-63
Tabel 2.36	Jumlah Desa ODF di Kabupaten Mojokerto	II-64
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 ..	II-64
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-69
Tabel 2.39	Capaian Indikator Kinerja Urusan perumahan dan Permukiman	II-71
Tabel 2.40	Capaian Indikator SPM perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2020.....	II-72
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-73
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	II-74
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-75
Tabel 2.45	Jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terdaftar tahun 2016-2020.....	II-76
Tabel 2.46	Jumlah masyarakat yg rentan pelanggaran HAM tahun 2016-2020.....	II-76
Tabel 2.47	Indeks Resiko bencana Kabupaten Mojokerto	II-77
Tabel 2.48	Kejadian Bencana Kabupaten Mojokerto 2019-2020	II-77
Tabel 2.49	Kejadian Kebakaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020	II-78
Tabel 2.50	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016 – 2020	II-79
Tabel 2.51	Data Terpadu kesejahteraan Sosial Kabupaten Mojokerto 2019-2020	II-80



Tabel 2.52	Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-81
Tabel 2.53	Jumlah Kepemilikan Akte Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020.....	II-83
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-83
Tabel 2.55	Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2016-2020.....	II-86
Tabel 2.56	Jumlah Shelter Untuk PMI 2016 – 2020	II-86
Tabel 2.57	Data Dukung Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Mojokerto 2016-2020 .	II-87
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-87
Tabel 2.59	Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A Tahun 2016 – 2020	II-89
Tabel 2.60	Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	II-92
Tabel 2.61	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan ..	II-94
Tabel 2.62	Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Mojokerto	II-96
Tabel 2.63	Perbandingan IKA, IKU IKTL dan IKLH antara Nasional, Propinsi dan Kabupaten Mojokerto	II-99
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 2016-2020.....	II-100
Tabel 2.65	Berat Sampah Yang masuk TPA Belahan Tengah.....	II-103
Tabel 2.66	Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2020	II-104
Tabel 2.67	Penindakan Permasalahan Pencemaran Lingkungan Tahun 2020	II-105
Tabel 2.68	Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto	II-106
Tabel 2.69	Luas Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Mojokerto.....	II-108
Tabel 2.70	Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto	II-108



Tabel 2.71	Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mojokerto	II-109
Tabel 2.72	Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Mojokerto	II-110
Tabel 2.73	Kualitas Udara Ambien Di Kabupaten Mojokerto 2020	II-111
Tabel 2.74	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.75	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.76	Data Dukung Bumdes Kabupaten Mojokerto	II-116
Tabel 2.77	Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020.....	II-116
Tabel 2.78	Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2019	II-117
Tabel 2.79	Target Capaian TFR, ASFR15-19, mCPR dan Unmet Need KB	II-117
Tabel 2.80	Cakupan keaktifan anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR).....	II-118
Tabel 2.81	Cakupan Perkawinan pertama penduduk Wanita Usia di bawah 20 Tahun	II-119
Tabel 2.82	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	II-119
Tabel 2.83	Pencapaian Peserta KB Aktif Menggunakan MKEJ	II-121
Tabel 2.84	Pencapaian Peserta KB Aktif Menggunakan Non MKEJ	II-122
Tabel 2.85	Cakupan Pasangan usia Subur yang tidak ingin anak tetapi tidak ber-KB (Unmeet Need)	II-123
Tabel 2.86	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020	II-124
Tabel 2.87	Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.88	Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020	II-126
Tabel 2.89	Data Koperasi Berdasarkan Jumlah Anggotanya.....	II-129
Tabel 2.90	Data Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro	II-130



Tabel 2.91	Data Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro	II-131
Tabel 2.92	Data Usaha Mikro Menurut Aset dan Omset.....	II-131
Tabel 2.93	Aspek Bidang Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2020	II-133
Tabel 2.94	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2016-2020	II-134
Tabel 2.95	Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.96	Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-138
Tabel 2.97	Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-142
Tabel 2.98	Jumlah Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016– 2020.....	II-144
Tabel 2.99	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-144
Tabel 2.100	Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-146
Tabel 2.101	Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-147
Tabel 2.102	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020.....	147
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020..	II-148
Tabel 2.104	Capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-149
Tabel 2.105	Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 – 2020.....	II-149
Tabel 2.106	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-150
Tabel 2.107	Perkembangan Kenaikan Kelas Kelompok Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-150



Tabel 2.108 Potensi Wisata Tahun 2020 Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam	II-152
Tabel 2.109 Potensi Wisata Tahun 2020 Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi.....	II-153
Tabel 2.110 Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Berdasarkan	II-153
Tabel 2.111 Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Berdasarkan	II-154
Tabel 2.112 Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Berdasarkan	II-155
Tabel 2.113 Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-157
Tabel 2.114 Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Palawija Kabupaten Mojokerto ..	159
Tabel 2.115 Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2019 – 2020	II-159
Tabel 2.116 Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias Tahun 2018 – 2020.....	II-160
Tabel 2.117 Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah Tahun 2018 – 2020	II-160
Tabel 2.118 Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020	II-161
Tabel 2.119 Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 – 2020	II-161
Tabel 2.120 Perkembangan Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Mojokerto	II-162
Tabel 2.121 Capaian Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Kabupaten Mojokerto..	163
Tabel 2.122 Capaian Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan	II-164
Tabel 2.123 Perkembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner	II-164
Tabel 2.124 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020..	165
Tabel 2.125 Nilai Tukar Petani Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020	II-167
Tabel 2.126 Capaian Kinerja Sektor Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-168



Tabel 2.127	Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Komoditi	II-169
Tabel 2.128	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020...	II-171
Tabel 2.129	Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-172
Tabel 2.130	Capaian Kinerja Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB.....	II-173
Tabel 2.131	Data Jenis Industri Berdasarkan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2020.....	II-174
Tabel 2.132	Capaian Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2016 – 2021.....	II-175
Tabel 2.133	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018-2020	II-176
Tabel 2.134	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020	II-177
Tabel 2.135	Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 -2020..	II-178
Tabel 2.136	Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2020.....	II-184
Tabel 2.137	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-191
Tabel 2.138	Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-191
Tabel 2.139	Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 .	II- 192
Tabel 2.140	Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Tahun 2020	II-193
Tabel 2.141	Aspek Bidang Kinerja Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 .	II- 194
Tabel 2.142	Jumlah data nilai Maturitas dan SDM untuk pengawasan	II-194
Tabel 2.143	Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-195
Tabel 2.144	Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020	II-195
Tabel 2.145	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Kabupaten Mojokerto	II-196



Tabel 2.146	Realisasi Pemberian Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS	II-196
Tabel 2.147	Realisasi Eselon PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2016–2020	II-197
Tabel 2.148	Aspek Bidang Kinerja Kepegawaian dan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-197
Tabel 2.149	Aspek Bidang Kinerja Kepegawaian dan Pendidikan Tahun 2016-2020	II-198
Tabel 2.150	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-199
Tabel 2.151	Realisasi Kerjasama Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020 ...	II-201
Tabel 2.152	Realisasi Bidang Pembangunan Hukum Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-202
Tabel 2.153	Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020 ..	II-202
Tabel 2.154	Realisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto Tahun 2016– 2020	II-203
Tabel 2.155	Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016–2020	II-204
Tabel 2.156	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2020	II-206
Tabel 2.157	Jumlah Arus Penumpang Terangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun) ...	II-210
Tabel 2.158	Jumlah Terminal Bis Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020	II-210
Tabel 2.159	Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020 ...	II-211
Tabel 2.160	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020....	II-212
Tabel 2.161	Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-212
Tabel 2.162	Jumlah Investasi PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-213
Tabel 2.163	Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-213
Tabel 2.164	Hasil Analisis Gambaran Umum Konsisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto	II-214
Tabel 3.1 (T-C.2)	Pendapatan Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	III-9



Tabel 3.2 (T-C-2) Belanja Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	III-13
Tabel 3.3 (T-C.2) Pembiayaan Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3.4 (T-C.3) Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mojokerto 2016 - 2020	III-24
Tabel 3.5 Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto	III-30
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Tidak Langsung Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-32
Tabel 3.7 (T-B.7) Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	III-30
Tabel 3.8 (T-C.4) Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	III-31
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016-2020.....	III-31
Tabel 3.10 Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	III-32
Tabel 3.11 (T-C.5) Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015-2020	III-34
Tabel 3.12 (T-C.6) Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	III-35
Tabel 3.13 (T-C.7) Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	III-36
Tabel 3.14 (T-C.8) Proyeksi Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022-2026	III-40
Tabel 3.15 (T-C.8) Proyeksi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022-2026.....	III-43
Tabel 3.16 (T-C.8) Proyeksi Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022-2026	III-45



Tabel 3.17 (T-C.9) Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026.....	III-48
Tabel 3.18 (T-C.10) Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026.....	III-49
Tabel 4.1 Identifikasi Permasalahan Pembangunan	IV-2
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Miskin (P0) dan Jumlah penduduk Miskin (000) tahun 2015 s.d 2020 Kabupaten Mojokerto	IV-29
Tabel 4.3 Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS.....	IV-39
Tabel 5.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto.....	V-4
Tabel 6.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi KabupatenMojokerto	VI-2
Tabel 6.2 Arah Kebijakan Pembangunan KabupatenMojokerto.....	VI-10
Tabel 6.3 Program Prioritas Bupati terpilih	VI-11
Tabel 6.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto	VI-19
Tabel 7.1 Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto.....	VII-3
Tabel 7.2 Proporsi Anggaran Program Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas Alokasi Belanja Daerah.....	VII-3
Tabel 7.3 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026	VII-4
Tabel 7.4 Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.....	VII-5
Tabel 8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto	VIII-1
Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto.....	VIII-2



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Keterkaitan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Dokumen lainnya- 9	
Gambar 2.1 Perkembangan Rata – rata Curah Hujan (mm) per Bulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 II-..... 10	
Gambar 2.2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 –2020 II-23	
Gambar 2.3 Capaian IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 II-28	
Gambar 2.4 Data Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto – Provinsi – Nasional Tahun 2016 - 2020..... II-34	
Gambar 2.5 Net Ekspor dan Impor (ADHB) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2020.. II-37	
Gambar 2.6 Inflasi Kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020..... II-40	
Gambar 2.7 Perkembangan IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 II-42	
Gambar 2.8 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Mojokerto, IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional Tahun 2016 – 2020 II-44	
Gambar 2.9 Indeks Gini Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020..... II-45	
Gambar 2.10 Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020..... II-47	
Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020..... II-48	
Gambar 2.12 Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 II-55	
Gambar 2.13 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020 II-56	
Gambar 2.14 Jumlah Kasus Kematian Bayi di kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. II-57	
Gambar 2.15 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020..... II-58	
Gambar 2.16 Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2020 II-59	
Gambar 2.17 Prevalensi Stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018– 2020 II-60	
Gambar 2.18 Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Medis, Paramedis dan lainnya di Kabupaten Mojokerto..... II-61	



Gambar 2.19	Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-62
Gambar 2.20	Realisasi Kondisi Jalan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-67
Gambar 2.21	Jenis dan Jumlah Jembatan Tahun 2016-2020	II-68
Gambar 2.22	Jumlah pelanggan air bersih rumah tangga di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-69
Gambar 2.23	Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah Tangga di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020	II-73
Gambar 2.24	Kasus Kejadian Gangguan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto.....	II-75
Gambar 2.25	Penerbitan dokumen administrasi penduduk	II-82
Gambar 2.26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020.....	II-84
Gambar 2.27	Tingkat Pengguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	85
Gambar 2.28	Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020	II-86
Gambar 2.29	Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	II-90
Gambar 2.30	Proporsi Ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan	II-93
Gambar 2.31	Perbandingan Skor PPH dengan Skor Riil dan Skor Maksimal Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Berdasarkan Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2021 (%).....	II-95
Gambar 2.32	Angka Kecukupan Energi (AKE).....	II-96
Gambar 2.33	Peta Pelayanan Sampah Kabupaten Mojokerto	II-103
Gambar 2.34	Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Tahun 2020.....	II-115
Gambar 2.35	Jumlah Kendaraan yang Melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020	II-125



Gambar 2.36 Jumlah Koperasi Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020	II-128
Gambar 2.37 Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan.....	II-132
Gambar 2.38 Kegiatan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020.....	II-145
Gambar 2.39 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga- 207	
Gambar 2.40 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020	II-208
Gambar 2.41 Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020	II-211



BAB I

PENDAHULUAN





1.1 Latar Belakang

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusun untuk memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 260 mengamanatkan bahwa agar daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun rencana pembangunan.

Berdasarkan pada pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, pada Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pengertian (Definisi) RPJMD berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pengalokasian program dan anggaran sesuai dengan target sasaran dan kebijakan pembangunan daerah. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam jangka waktu selama 5 tahun, RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Kemendagri 050.3499.SJ menyatakan bahwa masa berlaku RPJMD selama 5 Tahun sesuai PERMENDAGRI 86. Dokumen RPJMD ini dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. Selanjutnya sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dinyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Adapun RPJMD diterjemahkan kedalam Renstra Perangkat Daerah (PD). Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis



operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan RKPD diterjemahkan kedalam Rencana kerja (Renja) perangkat daerah tahunan.

Selanjutnya tahapan penyusunan sampai dengan penetapan peraturan daerah tentang RPJMD tersebut, digambarkan lebih detail dalam gambar berikut :

Gambar 1.1 Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RPJMD



Proses penyusunan RPJMD sebagai tahapan teknis penyusunan rencana pembangunan daerah ini mengacu pada ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD dengan tahapan sebagai berikut :

- persiapan penyusunan;
- penyusunan rancangan awal;
- penyusunan rancangan;
- pelaksanaan Musrenbang;
- perumusan rancangan akhir; dan
- penetapan.



Kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD berkaitan hal tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dituangkan ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah, dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 merupakan penjabaran lima tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh dan terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra jelaskan sebagai berikut. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Sedangkan RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Renja PD dan KUA-PPAS.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 mengamanatkan penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Rancangan Awal RPJMD merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD mencakup: a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD; b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah; c. perumusan tujuan dan sasaran; d. perumusan strategi dan arah kebijakan; e. perumusan program pembangunan daerah; f. perumusan program Perangkat Daerah; dan g. KLHS.

Bupati harus mengajukan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 kepada Gubernur untuk dikonsultasikan paling lambat 50 (lima puluh) hari sejak dilantik.



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia);



20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
24. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
25. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
26. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
27. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
28. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
29. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara



- Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 38. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
 43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan;Gender Di Daerah



44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
48. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
50. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032;
51. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 7);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

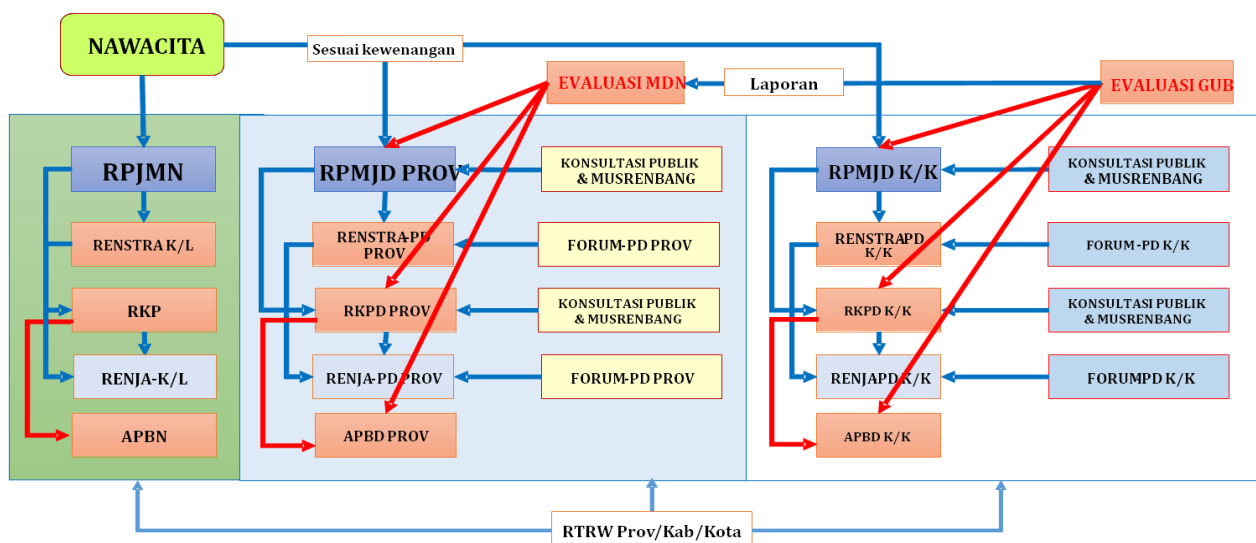
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergis antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

RPJMD sebagai dokumen perencanaan lima tahunan merupakan penjabaran RPJPD yang memiliki kurun waktu 20 tahun. RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah



Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Adapun keterkaitan hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya digambarkan dalam diagram dibawah ini.

Gambar 1.1
Diagram Keterkaitan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Dokumen lainnya



Sumber: Bahan paparan Dirjen Bina Pembangunan Daerah, 2016

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional)

RPJM Nasional menjadi rujukan dalam penyusunan RPJMD di daerah baik di pemerintah Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu perlu mengetahui visi dan agenda pembangunan nasional 2020-2024. Adapun yang menjadi Visi RPJMN adalah sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Ada 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik



Adapun penjabaran dari ke 7 agenda tersebut diatas sebagaimana dijelaskan dalam RPJMN adalah sebagai berikut:

A. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital

B. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- 1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah,
- 2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang,
- 3) Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif,
- 4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah, serta
- 5) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

C. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- 1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;



- 3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- 5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 6) Pengentasan kemiskinan; dan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

D. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
- 2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
- 3) Memperkuat moderasi beragama; dan
- 4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

E. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- 1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah,
- 2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan,
- 3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK,
- 4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien,
- 5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

F. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta
- 3) Pembangunan Rendah Karbon.



G. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- 1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
- 2) Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil,
- 3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
- 4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- 5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

1.3.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 - 2025.

Untuk mencapai sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mojokerto secara bertahap, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam RPJM Daerah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang. Setiap sasaran pokok dalam 6 (enam) misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat dijabarkan menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan.

Berdasarkan pelaksanaan dan pencapaian hasil pembangunan serta sebagai wujud keberlanjutan RPJPD, maka pada RPJMD ke-4 (Tahun 2021-2026) untuk lebih memantapkan pembangunan Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh dan terpadu dengan menekankan kepada percepatan, pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi perekonomian Kabupaten Mojokerto yang semakin maju dan kompetitif yang ditandai dengan kuatnya struktur ekonomi daerah yang berbasis pada sektor industri, jasa, pariwisata, koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah yang didukung oleh sektor pertanian yang handal akan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat berkembang lebih cepat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin mantap yang diwujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara bijak. Pelestarian lingkungan hidup terus dilakukan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya sumber



daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kesejahteraan masyarakat terus membaik tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan ini juga didorong oleh menguatnya pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi serta meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kualitas sumber daya manusia bertambah baik ditandai etos dan produktifitas kerja yang semakin baik.

Selanjutnya pembangunan hukum dan politik dalam rangka mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang maju, adil, tentram, dan beradab terus membaik ditandai dengan meningkatnya kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, berperannya hukum yang mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mewujudkan stabilitas politik, keamanan dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto.

1.3.3 RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur

Visi pembangunan Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah : “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris, Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Visi tersebut diuraikan dalam beberapa misi, yaitu :

1. Keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor maupun antar wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan;
3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan pendidikan serta membangun kedaulatan pangan;
4. Kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan dan keterhubungan wilayah;
5. Tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka dan partisipatoris;
6. Memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
7. Pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

Untuk mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan, substansi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan hasil penelaahan dari visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024.



1.3.4 RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur

Arah Pengembangan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah tentang rencana struktur pemanfaatan ruang wilayah, menggambarkan rencana sistem pusat pelayanan permukiman perdesaan dan perkotaan serta sistem jaringan sarana perwilayahan di Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan penetapan struktur pemanfaatan ruang tersebut mampu mendorong pemerataan pelayanan, khususnya pertumbuhan wilayah di perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Mojokerto sendiri maupun daerah lain di lingkup wilayah Jawa Timur. Perwilayahan Jawa Timur juga direncanakan dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dengan kedalaman penataan struktur pusat permukiman perkotaan yang dibagi dalam 8 SWP yaitu 1) SWP Gerbangkertosusila Plus, 2) SWP Malang Raya, 3) SWP Madiun dan sekitarnya, 4) SWP Kediri dan sekitarnya, 5) SWP Probolinggo, Lumajang, 6) SWP Blitar, 7) SWP Jember, dan 8) SWP Banyuwangi. Kabupaten Mojokerto termasuk dalam SWP 1 yakni Gerbangkertosusila.

1.3.5 RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan RTRW Kabupaten Mojokerto

Dalam mewujudkan rencana tata ruang diperlukan program yang bersumber dari pemerintah (*public investment*) dan program yang bersumber dari masyarakat dan swasta (*private investment*). Program yang bersumber dari pemerintah umumnya melalui mekanisme perencanaan yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan tahap akhir dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD). Program yang bersumber dari masyarakat dan swasta umumnya sulit diprogramkan tetapi harus selalu dibina dan diarahkan sejalan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Perumusan strategi pengembangan di Kabupaten Mojokerto sekurang-kurangnya dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- Perumusan masalah pembangunan dan pemanfaatan ruang dalam bentuk identifikasi masalah pembangunan dan arahan pemanfaatan ruang.
- Perumusan konsep dan strategi pengembangan tata ruang wilayah kabupaten.

Strategi pengembangan wilayah di Kabupaten Mojokerto dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah



Strategi pengembangan struktur tata ruang tersebut dilakukan melalui penetapan dan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.

2. Strategi pemantapan kawasan lindung.

Strategi yang ditempuh adalah pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi masing-masing, dan pengecualian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dalam batas-batas fungsi lindung yang ditetapkan.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya.

Strategi yang ditempuh adalah memanfaatkan setiap kegiatan pembangunan yang berimplikasi terhadap ruang secara optimal sesuai dengan kondisi daya dukung lahannya, sebagai upaya untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan karakteristik fisik wilayah dan prioritas program dalam rangka pemerataan pembangunan diseluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, serta terciptanya keseimbangan pembangunan daerah maka penetapan prioritas lokasi pembangunan diarahkan sebagai berikut :

1. Prioritas Pertama

Penanganan pembangunan di Kabupaten Mojokerto adalah pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri, pariwisata, pertanian dan jasa. Wilayah potensi strategis antara lain:

- Industri, terdapat di Kecamatan Mojoanyar, Ngoro dan Jetis.
- Pariwisata, terdapat di Kecamatan Pacet, Trawas dan Trowulan.
- Pertanian, terdapat di wilayah bagian selatan Sungai Brantas.
- Jasa, terdapat di masing-masing pusat Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Mojosari, Sooko, Gedeg dan Pacet.
- Penanganan daerah terpencil di Kecamatan Gondang dan Kecamatan Jatirejo.

2. Prioritas Kedua

Diarahkan pada wilayah dataran tinggi pada bagian utara dan timur meliputi Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Jetis, Gedeg dan Ngoro untuk dikembangkan kegiatan sekunder bagi industri peternakan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan alam.

3. Prioritas Ketiga



Wilayah pengembangan prioritas ketiga pada daerah dataran rendah bagian tengah dan selatan yang pada umumnya merupakan lahan subur yaitu pada wilayah Kecamatan Bangsal, Sooko, Dlanggu, Trowulan, Gondang, Jatirejo dan Pungging.

1.3.6 RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati terpilih dan RPJMD. Penyajian Renstra SKPD dilakukan secara sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas SKPD serta dilengkapi dengan indikator atau tolok ukur pencapaiannya.

1.3.7 RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

1.3.8 RPJMD Kabupaten Mojokerto dengan Beberapa Dokumen Lainnya

Guna mensinergiskan pembangunan kewilayahan dan sektoral, maka dalam Penyusunan dan penetapan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 juga memperhatikan keberadaan dokumen-dokumen lain diluar komponen perencanaan seperti halnya KLHS RPJMD. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam proses penyusunan RPJMD, yang mana dokumen KLHS salah satu yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunannya RPJMD. sehingga perlu adanya dokumen KLHS yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam proses penyusunannya. Adapun fungsi dari KLHS RPJMD ini adalah untuk memastikan bahwa isu-isu permasalahan strategis, dan sasaran strategis tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Mojokerto masuk dalam RPJMD. Selain itu penyusunan KLHS menjadi amanat dari Permendagri nomor 86



tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Berdasarkan hal inilah maka perlu adanya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Pada bagian lain, dokumen berupa perencanaan sektoral dan bersifat mikro juga perlu mengacu pada RPJMD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
2. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap Tahun Anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan daerah jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi dan program Bupati Mojokerto untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam periode 5 (lima) tahun mendatang;
2. Menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang (*sustainability development*) sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mojokerto;
3. Menjadi pedoman atau acuan dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) bagi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.



1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.3 Aspek Daya Saing

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu
 - 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2 Neraca Daerah
- 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2 Analisis Pembiayaan
- 3.3 Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 4.1 Permasalahan Pembangunan
- 4.2 Isu Strategis

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1 Visi
- 5.2 Misi
- 5.3 Tujuan Dan Sasaran

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kabupaten Mojokerto meliputi karakteristik Lokasi dan Wilayah. Potensi Pengembangan Wilayah, Wilayah Rawan Bencana dan demografi. Masing masing Karakteristik ini dijabarkan dengan detail guna memperlihatkan gambaran kondisi daerah maupun potensi yang ada di Kabupaten Mojokerto secara menyeluruh.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 111°20'13" sampai dengan 111°40'47" bujur timur dan antara 7°18'35" sampai dengan 7°47'30" lintang selatan dengan luas daerah seluruhnya 692,15 km² atau sekitar 2,09% dari luas Provinsi Jawa Timur. Secara geografis Kabupaten Mojokerto berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya:

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik

Sebelah Timur : Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kota Batu

Sebelah Barat : Kabupaten Jombang

Di sampingitu, wilayah Kabupaten Mojokerto juga mengitari wilayah Kota Mojokerto yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.1
Cakupan Luas Area Tiap Kebutuhan Daerah
Kabupaten Mojokerto

Area Penggunaan	Luas (Km ²)
Permukiman	132.440
Pertanian	371.010
Hutan	289.480
Rawa / Waduk	0.490
Perkebunan	170.000
LahanKritis	0.200
Padang Rumput	1.590
Semak / Alang-Alang	0.720

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto 2021

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat dilihat cakupan luas area tiap kebutuhan daerah dalam satu Kabupaten Mojokerto untuk area penggunaan lahan berupa pemukiman, pertanian, hutan, rawa/waduk, perkebunan, lahan kritis, padang rumput, dan semak/alang-alang. Dapat dilihat pada tabel 2.1, area penggunaan luas area terbesar terdapat pada area penggunaan pertanian yaitu sebesar 371.010 km² dan luas area terkecil terdapat pada area lahan kritis sebesar 0,200 km²

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara administrative Kabupaten Mojokerto masuk Wilayah Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Bojonegoro, sedangkan secara spatial Tata Ruang Jawa Timur adalah masuk dalam kawasan pengembangan “Gerbang Kertosusila”. Sebagaimana diketahui wilayah Gerbang Kertosusila merupakan kawasan andalan di Propinsi Jawa Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dan menjadi kawasan strategis nasional. Tingginya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini sejalan dengan fungsi dan perannya sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Jawa Timur, bahkan pengaruhnya hingga wilayah Indonesia Timur.

Tujuan dengan dibentuknya kawasan Gerbang kertosusila sebagai upaya membuat regionalisasi dengan menekankan kemandirian terhadap wilayah kabupaten/kota. Kawasan tersebut merupakan salah satu kawasan aglomerasi di Provinsi Jawa Timur. Peran wilayah Gerbang kertosusila yang semakin meningkat sebagai penggerak dan sekaligus contributor pembangunan ekonomi di Jawa Timur, tidak dapat dilepaskan dari kinerja pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto terdiri atas 18 Kecamatan, 299 Desa dan 5 Kelurahan sebagaimana tersaji pada table berikut:



Tabel 2.2
Jumlah Desa dan Kelurahan tiap Kecamatan Kabupaten Mojokerto

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah		Jumlah	
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa	Kel	Desa
1	Trowulan	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
2	Sooko	-	15	-	15	-	15	-	15	-	15
3	Puri	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
4	Bangsals	-	17	-	17	-	17	-	17	-	17
5	Mojoanyar	-	12	-	12	-	12	-	12	-	12
6	Gedeg	-	14	-	14	-	14	-	14	-	14
7	Kemlagi	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20
8	Dawarblandong	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
9	Jetis	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
10	Mojosari	5	14	5	14	5	14	5	14	5	14
11	Ngoro	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
12	Pungging	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
13	Kutorejo	-	17	-	17	-	17	-	17	-	17
14	Dlanggu	-	16	-	16	-	16	-	16	-	16
15	Jatirejo	-	19	-	19	-	19	-	19	-	19
16	Gondang	-	18	-	18	-	18	-	18	-	18
17	Pacet	-	20	-	20	-	20	-	20	-	20
18	Trawas	-	13	-	13	-	13	-	13	-	13
Jumlah		5	299	5	299	5	299	5	299	5	299

Sumber Data: Badan Pusat Statistik 2021



2.1.1.3 Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Mojokerto cenderung cekung di tengah dan tinggi di bagian selatan dan utara. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur, meliputi Kecamatan Pacet, Trawas, Gondang dan Jatirejo. Bagian tengah merupakan wilayah daratan, sedangkan bagian utara merupakan daerah perbukitan kapur yang cenderung kurang subur.



Tabel 2.3
Cakupan Tinggi dan Luas Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Mojokerto

No	Kecamatan	Tinggi Rata-Rata	Luas	Tinggi Rata-Rata	Luas	Tinggi Rata-Rata	Luas	Tinggi Rata-Rata	Luas	Tinggi Rata-Rata	Luas
		dari Permukaan Laut	Daerah	dari Permukaan Laut	Daerah	dari Permukaan Laut	Daerah	dari Permukaan Laut	Daerah	dari Permukaan Laut	Daerah
		(m)	*) (Km ²)	(m)	*) (Km ²)	(m)	*) (Km ²)	(m)	*) (Km ²)	(m)	*) (Km ²)
		2016		2017		2018		2019		2020	
1	Jatirejo	140	32,98	140	32,98	140	107,62	140	107,62	140	107,62
2	Gondang	240	39,11	240	39,11	240	98,62	240	98,62	240	98,62
3	Pacet	570	45,16	470	45,16	470	107,98	470	107,98	470	107,98
4	Trawas	800	29,86	600	29,86	600	58,00	600	58,00	600	58,00
5	Ngoro	25	57,48	120	57,48	120	70,50	120	70,50	120	70,50
6	Pungging	30	48,14	100	48,14	100	45,00	100	45,00	100	45,00
7	Kutorejo	500	42,83	170	42,83	170	43,50	170	43,50	170	43,50
8	Mojosari	36	26,65	100	26,65	100	28,85	100	28,85	100	28,85
9	Bangsalsari	30	24,06	60	24,06	60	25,84	60	25,84	60	25,84
10	Mojoanyar	23	23,02	54	23,02	54	23,37	54	23,37	54	23,37
11	Dlanggu	17	35,42	120	35,42	120	35,82	120	35,82	120	35,82
12	Puri	70	35,65	70	35,65	70	34,65	70	34,65	70	34,65
13	Trowulan	40	39,20	60	39,20	60	45,93	60	45,93	60	45,93
14	Sooko	64	23,46	64	23,46	64	19,30	64	19,30	64	19,30
15	Gedeg	26	22,98	36	22,98	36	26,18	36	26,18	36	26,18
16	Kemlagi	22	50,05	52	50,05	52	42,35	52	42,35	52	42,35
17	Jetis	35	57,17	60	57,17	60	53,05	60	53,05	60	53,05
18	Dawarblandong	75	58,93	75	58,93	75	102,80	75	102,80	75	102,80
Kabupaten Mojokerto		64	692,15	64	692,15	64	969,36	64	969,36	64	969,36

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021



Sekitar 30% dari seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto kemiringan tanahnya lebih dari 15°, sedangkan sisanya merupakan wilayah dataran dengan tingkat kemiringan lahan kurang dari 15°. Pada umumnya ketinggian wilayah kecamatan di Kabupaten Mojokerto rata-rata 64 m (<500 m) di atas permukaan laut, dan hanya Kecamatan Pacet dan Trawas merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang berbeda dari kecamatan lain yaitu Kecamatan Pacet 470 m dan Kecamatan Trawas 600 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan ketinggian lahan, wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 15 sampai dengan di atas 500 meter dari permukaan laut. Ketinggian lahan dari permukaan laut merupakan salah satu faktor yang menentukan jenis peruntukannya, oleh karena itu ketinggian lahan merupakan salah satu penentu dalam memetakan dan kemudian menetapkan wilayah tanah usaha. Adapun luas daerah Kabupaten Mojokerto berdasarkan ketinggian tempat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Luas Lahan Berdasarkan Letak Ketinggian

No.	KetinggianTempat (meter)	Luas ^{*)}	
		Ha	%
1.	0 – 500	84.998	87,69
2.	500 – 1.000	8.272	8,53
3.	1.000 – 4.000	3.666	3,78
	Total	96.936	100,00

Sumber Data: BPN Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

^{*)} Luas daerah termasuk hutan negara

- Ketinggian 0 – 500 meter di atas permukaan laut, merupakan daerah datar dan sedikit sekali daerah yang bergelombang dengan penggunaan lahan usaha pertanian/persawahan, meliputi hampir seluruh kecamatan;
- Ketinggian 500 – 1000 meter dari permukaan laut, merupakan daerah yang relative bergelombang dan berbukit. Daerah ini juga merupakan daerah persawahan dan tegal, dan yang termasuk dalam ketinggian ini hanya Kecamatan Trawas.



Kabupaten Mojokerto mempunyai bentang kemiringan lahan yang bervariasi, yang terdiri dari:

- Daerah landai dan bergelombang meliputi $\pm 48,78$ % dari luas wilayah;
- Daerah berbukit dengan kemiringan sampai 15° meliputi $22,63$ % dari luas wilayah;
- Daerah pegunungan dengan kemiringan antara $15^{\circ} - 40^{\circ}$ meliputi $8,69$ % dari luas wilayah;
- Daerah pegunungan dengan kemiringan lebih dari 40° meliputi $19,90$ % dari luas wilayah.

Berdasarkan kemiringan tanah, luas tanah di wilayah Kabupaten Mojokerto terbagi menjadi 4 (empat) kelompok kemiringan, yaitu:

Tabel 2.5
Kemiringan Tanah Kabupaten Mojokerto

No	Kemiringan	Luas	
		Ha	%
1	$0^{\circ} - 2^{\circ}$	45.886	47,34
2	$2^{\circ} - 15^{\circ}$	22.072	22,77
3	$15^{\circ} - 40^{\circ}$	8.474	8,74
4	di atas 40°	20.504	21,15
Total		96.936	100,00

Sumber Data : BPN Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

2.1.1.4 Geologi

Tekstur tanah di Wilayah Kabupaten Mojokerto digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu

- Tekstur Halus, tekstur tanah yang banyak terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu seluas $26.405,4$ Ha atau $27,24$ % dari luas wilayah keseluruhan yang tersebar merata kecuali Kecamatan Dlanggu, Gondang, Pacet, Kutorejo, Mojosari dan Trawas;
- Tekstur Sedang, seluas $70.530,6$ Ha atau $72,76$ % dari luas wilayah Kabupaten Mojokerto, yang tersebar merata kecuali Kecamatan Gedeg dan Kemlagi.



2.1.1.5 Hidrologi

Pola tata air sangat ditentukan oleh besarnya curah hujan, jumlah mata air atau sumber air dan pola aliran sungai serta keberadaan bendungan. Jumlah mata air yang terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto mencapai 161 buah, dari jumlah tersebut yang berfungsi sebanyak 153 mata air. Debit air tersebut rata-rata maksimum 19,42 liter/detik dan debit rata-rata minimum 7,60 liter/detik. Adapun keberadaan mata air tersebut sebagian besar sebarannya terdapat di wilayah Kabupaten Mojokerto bagian selatan.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi logis pada jenis jaringan irigasi panjang saluran serta pemanfaatannya untuk areal persawahan. Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 39 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik. Disamping itu kondisi irigasi yang ada di Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2014 seluruhnya dalam kondisi baik sepanjang 2.463,89 m.

Selain itu, Kabupaten Mojokerto mempunyai sungai natural sebanyak 61 buah yang sudah mempunyai nama, disamping masih banyak juga saluran tersier maupun kuarter yang belum memiliki nama. Sungai besar yang melewati wilayah Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah Sungai Brantas dengan debit air ± 10.031 liter/detik dan Sungai Marmoyo dengan debit ± 262 liter/detik. Sungai-sungai besar yang ada di Wilayah Kabupaten Mojokerto selengkapnya dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 2.6
Sungai Besar di Kabupaten Mojokerto

No.	Nama Sungai	Hulu	Muara
1.	Sungai Brantas	KabupatenJombang	Kecamatan Sooko, Jetis, Ngoro
2.	Kali Porong	Kabupaten Mojokerto	KecamatanMojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, Ngoro
3.	Kali Surabaya	Kabupaten Mojokerto	KecamatanJetis

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.7
Panjang Sungai di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Sungai	Panjang Sungai (Km)
1.	Sungai Sadar	22,998
2.	Sungai Cemporat	5,500
3.	Sungai Kintelan	13,182
4.	Sungai Gayaman	3,622
5.	Sungai Bangsal	13,125
6.	Sungai Judeg	12,500
7.	Sungai Bangsal II	5,555
8.	Sungai Tekuk	14,433
9.	Sungai SumberNgrayung	6,056
10.	Sungai SumberGlogok	8,906
11.	Sungai SumberWonosari	2,506
12.	Sungai SumberKembar	6,345
13.	Sungai SumberWonodadi	7,445
14.	Sungai Gembolo	31,631
15.	Sungai Cumpleng	14,982
16.	Sungai Made	12,414
17.	Sungai Bulu Kidul	3,480
18.	Sungai Jubel	12,595
19.	Sungai SumberPasinan	9,666
20.	Sungai Sumber Kali Urip	3,708
21.	Sungai Kanigoro	4,000
22.	Sungai Sumber Pandokan	2,500
23.	Sungai Janjing	14,378
24.	Sungai Jurang Jero	3,258
25.	Sungai Sumber Towo	7,775
26.	Sungai Kukupan	4,025
27.	Sungai Porong	28,290
28.	Sungai Curah Klengkeng	10,120
29.	Sungai Curah Panggul	4,350
30.	Sungai Kletak	1,744
31.	Sungai Dlundung	4,985
32.	Sungai Brantas	19,550
33.	Sungai Brangkal	14,890
34.	Sungai Jurang Cetot	33,625
35.	Sungai Coban	11,400
36.	Sungai Butek	2,900
37.	Sungai Manting	13,050
38.	Sungai Sumber Winong	15,000
39.	Sungai Landean	13,700
40.	Sungai Klorak	6,250
41.	Sungai Galuh	13,117
42.	Sungai Klopo	6,074
43.	Sungai Pikatan	22,319



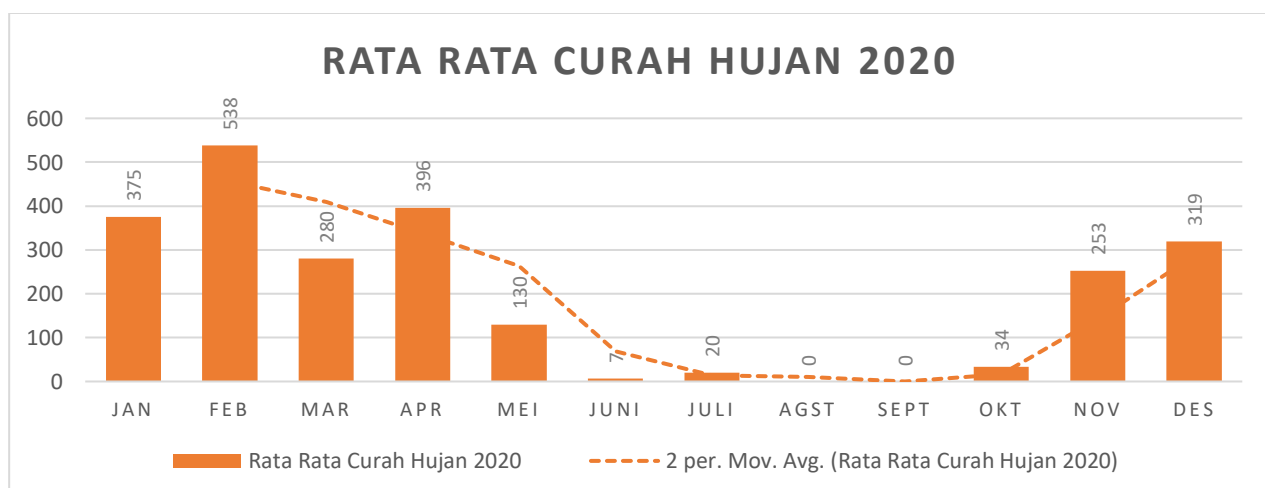
44.	Sungai Kromong	14,240
45.	Sungai Surabaya/Mas	7,500
46.	Sungai Marmoyo	20,450
47.	Sungai Asin	5,100
48.	Sungai Kwangen	7,200
49.	Sungai KedungSaro	13,350
50.	Sungai Sidoringin	4,900
51.	Sungai Gedeg	4,000
52.	Sungai Wonoayu	10,350
53.	Sungai Kedung Sumur	6,650
54.	Sungai Sumber Waru	5,700
55.	Sungai Polaman	2,300
56.	Sungai Curah Ngoro	2,500
57.	Sungai Curah Jedong	2,225
58.	Sungai Curah Lapangan	2,950
59.	Sungai Landak	5,250
60.	Sungai Landak II	2,450
61.	Sungai Curah Wates	3,225

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.1.1.6 Klimatologi

Curah hujan di wilayah Kabupaten Mojokerto diamati dari 25 titik stasiun pengamatan yang tersebar di semua kecamatan. Curah Hujan Tertinggi berlangsung pada januari mencapai 13443 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan juni, September dan oktober. Perkembangan curah hujan tahun 2019 bisa dilihat di gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Perkembangan Rata – rata Curah Hujan (mm) per Bulan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020



Sumber :BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Lahan merupakan bagian penting dalam kelangsungan hidup manusia, setiap kegiatan makhluk hidup sangat berkaitan dengan penggunaan lahan. Dalam pelaksanaan pembangunan saat ini berkaitan erat dengan pemanfaatan dan penggunaan lahan. Proses pemanfaatan lahan dan penggunaan lahan dapat merubah kondisi lingkungan biofisik yang cenderung merusak dan mempengaruhi kualitas lahan tersebut. Tata kelola penggunaan lahan yang buruk akan menimbulkan dampak negative baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Degradasi lahan ini akan berakibat terhadap penurunan kualitas lahan dan berdampak pada produktivitas pertanian di Kabupaten Mojokerto. Hal ini, akan memberikan efek terhadap ketahanan pangan.

Tabel 2.8
Luas Lahan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mojokerto

No	Penggunaan Lahan	(Ha)
1.	Lahan Sawah	36.323
2.	Lahan Bukan Sawah	35.152
3.	Lahan Non sawah	26.315
Jumlah		97.790

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021, 2021

Dari tabel di atas diketahui bahwa penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Mojokerto ialah lahan non pertanian. Aktivitas non pertanian meliputi perindustrian, perdagangan dan jasa, pendidikan dan lainnya. Sedangkan untuk luasan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto masih didominasi oleh lahan pertanian dan hutan.

Hutan merupakan salah satu tutupan lahan terluas di Kabupaten Mojokerto yang juga memberikan pengaruh kepada sumber alam lainnya. Pengaruh ini berkaitan dengan factor lingkungan yang saling berhubungan, seperti iklim, tanah serta ketersediaan air. Perubahan alih fungsi lahan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penurunan kualitas tanah dan degradasi sumber daya pertanian di Kabupaten Mojokerto.

.Alih fungsi lahan hutan menjadi penggunaan lain dapat memberikan dampak pada ekosistem lingkungan di Kabupaten Mojokerto. Wilayah yang menjadi perhatian pada alih fungsi hutan ialah pada hutan di kawasan pegunungan. Selain memiliki berbagai potensi sumber daya energi dan mineral, kawasan pegunungan juga memiliki kesuburan tanah yang tinggi. Bagian hulu pegunungan merupakan daerah yang sangat penting bagi tata kelola air. Jika kondisi tutupan lahan pada daerah ini mengalami perubahan maka nantinya akan berdampak pada



ketersediaan air bersih dan kualitas tanah pertanian di Kabupaten Mojokerto. Konsekuensi kegiatan alih fungsi lahan dapat menimbulkan bencana seperti bencana banjir dan tanah longsor.

Alih fungsi pada lahan pertanian ke pemanfaatan bagi non pertanian dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu factor penyebab bergesernya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian karena dinilai akan lebih menguntungkan. Perubahan kondisi lingkungan dan kualitas lahan akan menyebabkan degradasi lahan pertanian dan berdampak pada produktivitas pertanian yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini juga berdampak pada jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian selalu menurun setiap tahunnya. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor industri dan jasa cenderung meningkat.

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Beberapa potensi unggulan daerah yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Sektor industri : Ngoro Industri Persada (NIP), Industri Estate Mojokerto (di Kecamatan Mojoanyar) dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis) dan industri rumah tangga (industri alas kaki, kerajinan patung dan perak di Kecamatan Sooko dan Trowulan);
- b. Sektor pariwisata: agrowisata, wisata religi, wisata budaya/peninggalan Kerajaan Mojopahit diTrowulan serta wisata alam dan buatan di Kecamatan Pacet dan Trawas;
- c. Sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- d. Sektor perdagangan, terdapat sentra perdagangan sepatu dan kerajinan berbahan dasar kulit lainnya, yang disebut Pusat Perkulakan Sepatu Trowulan (PPST);
- e. Sektor kehutanan (hutan produksi di Jatirejo, Kemlagi, Pacet, Trawas, dan Trowulan)
- f. Sektor perhubungan (sarana transportasi);
- g. Sektor pertambangan (bahan galian golongan C di wilayah Kecamatan Ngoro, Jatirejo, Gondang dan Kutorejo).

Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang mendukung perekonomian yang ada di Kabupaten Mojokerto. Sektor-sektor tersebut perlu dilakukan pengelolaan dan perencanaan lebih khusus dan spesifik lagi agar dapat memberikan kontribusi dalam potensi unggulan daerah Kabupaten Mojokerto. Selain itu, terdapat juga pengembangan kawasan strategis di Kabupaten Mojokerto yang dibedakan untuk beberapa peruntukan kawasan, diantaranya sebagai berikut:

2.1.2.1 Kawasan Peruntukan Industri



Industri menengah meliputi:

- a. zona industri dan pergudangan sepanjang ruas Jalan By Pass Mojokerto yang terletak di Desa Kenanten dan Desa Balongmojo Kecamatan Puri serta Desa Jampirogo Kecamatan Sooko;
- b. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Pacing - Dlanggu yang terletak di Desa Sumberwono Kecamatan Bangsal;
- c. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari - Pacet yang terletak di Desa Tempuran, Desa Banjartanggul dan Desa Jatilangkung Kecamatan Pungging serta Desa Pesanggrahan dan Desa Sampangagung Kecamatan Kutorejo;
- d. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Mojosari-Trawas yang terletak di Desa Tempuran, Desa Banjartanggul, Desa Sekargadung dan Desa Mojorejo Kecamatan Pungging;
- e. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Awang-awang- Lebaksono - Pungging yang terletak di Desa Awang-awang Kecamatan Mojosari serta di Desa Lebaksono dan Desa Pungging Kecamatan Pungging;
- f. zona industri di sepanjang ruas Jalan Raya Purwojati-Kalipuro yang terletak di Desa Purwojati, Desa Lolawang, Desa Sedati, Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro serta Desa Randuharjo dan Desa Kalipuro Kecamatan Pungging;
- g. zona industri terletak di Desa Sukoanyar dan Desa Tanjangerono Kecamatan Ngoro serta Desa Kembangringgit Kecamatan Pungging;
- h. zona Industri terletak di sepanjang ruas Jalan Raya Sumengko-Jatirejo yang terletak di Desa Sumengko, Desa Gebangsari dan Jatirejo Kecamatan Jatirejo;
- i. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Jasem-Ngoro yang terletak di Desa Jasem, Desa Kembangsri, Desa Sedati dan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro;
- j. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Jasem-Ngoro yang terletak di Desa Jasem, Desa Kembangsri, Desa Sedati dan Desa Ngoro Kecamatan Ngoro;
- k. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Pekukuhan-Sumbertanggul yang terletak di Desa Sumbertanggul Kecamatan Mojosari;
- l. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Belahantengah-Awang-awang yang terletak di Desa Belahan tengah Kecamatan Mojosari;
- m. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Lingkar Utara Kota Mojosari yang terletak di Desa Bangun, Desa Ngrame dan Desa Tunggal pager Kecamatan Pungging;
- n. zona Industri di sepanjang ruas Jalan Raya Ngoro-Watukosek yang terletak di Desa Wotanmasjedong, Desa Watesnegoro, Desa Manduro manggunggajah dan Desa Wonosari Kecamatan Ngoro; dan
- o. zona industri terletak di sepanjang ruas Jalan Domas-Jambuwok di Desa Domas dan Desa Jambuwok Kecamatan Trowulan; serta



p. zona industri terletak di Desa Jatipasar Kecamatan Trowulan.

Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.

2.1.2.2 Kawasan Industrial Estate

Industri besar berupa Kawasan Industri meliputi:

- a. Kawasan industri di Kecamatan Ngoro seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar;
- b. Kawasan industri di Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Dawarblandong seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) hektar; dan
- c. Kawasan industri di Kecamatan Mojoanyar seluas kurang lebih 500 (lima ratus) hektar.

2.1.2.3 Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

1. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi: kawasan cepat tumbuh di Kecamatan Jetis, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pacet, dan Kecamatan Mojosari;
2. Sudut kepentingan sosial dan budaya: kawasan pengembangan pariwisata meliputi:
 - a. Wisata alam dipusatkan di Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Jatirejo Kecamatan Kemlagi, dan Kecamatan Ngoro;
 - b. Wisata budaya terletak di Kecamatan Trowulan, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, Kecamatan Pacet, Kecamatan Puri dan Kecamatan Sooko; dan
 - c. Wisata buatan di seluruh kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
3. Sudut kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi: penetapan KSK (Kawasan Strategis Kabupaten) dari sudut kepentingan sumber daya alam dan teknologi tinggi berupa pertambangan panas bumi terdapat di Gunung Arjuno Welirang.
4. Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: kawasan wisata alam di kawasan agropolitan Kecamatan Trawas, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang, Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Jatirejo;
5. Kawasan rawan bencana meliputi:
 - a. Kawasan rawan letusan Gunung Api Arjuno-Welirang terletak di Kecamatan Trawas dan Kecamatan Pacet;



- b. Kawasan rawan longsor terletak di Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Jatirejo, Kecamatan Gondang, Kecamatan Pacet, Kecamatan Trawas, Kecamatan Ngoro, dan Kecamatan Dawarblandong; dan
 - c. Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Bangsal, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pungging, Kecamatan Mojosari, Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Jetis, Kecamatan Kemlagi, Kecamatan Puri, Kecamatan Pacet, Kecamatan Gondang dan Kecamatan Trowulan
6. Pengembangan Taman Hutan Raya yang terletak di Kecamatan Pacet, Trawas, Jatirejo, dan Gondang.
7. Kawasan strategis lainnya.:
- a. Kawasan Perkotaan Interchange Mlirip/Kota Mandiri Canggus Kecamatan Jetis;
 - b. Kawasan Perkotaan Interchange Pagerluyung Kecamatan Gedeg;
 - c. Kawasan Perkotaan Dawar blandong sebagai pendukung Kawasan Industri Jetis, Kecamatan Dawarblandong; dan
 - d. Kawasan Perkotaan Airlangga City di Kecamatan Ngoro.

2.1.2.4 Kawasan Agropolitan

Beberapa wilayah di Kabupaten Mojokerto diarahkan sebagai kawasan agropolitan, karena memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang baik. Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Mojokerto diarahkan pada Kecamatan Pacet, Trawas dan Gondang. Untuk saat ini kawasan agropolitan berada di Kecamatan Pacet yang terdapat pada tujuh desa, yaitu Desa Kemiri, Desa Pacet, Desa Padusan, Desa Cepokolimo, Desa Claket, Desa Petak, dan Desa Sajen. Kawasan agropolitan dapat menjadi objek agrowisata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Adapun pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Kawasan agropolitan menjadi satu kesatuan dengan kegiatan perdesaan sebagai pemasuk komoditi agro terutama komoditi hortikultura.
2. Pengembangan agro industri, merupakan industri rumah tangga non polutif yang mengolah komoditi hasil pertanian yang ada.
3. Pengembangan sistem kegiatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung seperti terminal agribis, bank, balai penelitian dan pengembangan, sekolah kejuruan pertanian dsb.

Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan haruslah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi tepat guna. Sehingga alokasi sumber daya dan dana yang terbatas, dapat



menghasilkan output yang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan sumber daya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan aset-aset untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan.

2.1.2.5 Kawasan Kampung Organik

Kawasan Kampung Organik dapat dikembangkan melalui kegiatan :

1. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan;
2. Penguatan kelembagaan petani;
3. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agro input, pengolahan hasil, pemasaran dan penyedia jasa);
4. Pengembangan kelembagaan penyuluh pembangunan terpadu;
5. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi;
6. Peningkatan prasarana dan sarana umum dan;
7. Peningkatan prasarana dan sarana kesejahteraan sosial.

Sistem pertanian organik merupakan salah satu sistem yang dikembangkan untuk menjawab dampak lingkungan yang terjadi akibat sistem pertanian modern. Meskipun di beberapa negara maju sistem ini dianggap masih memiliki kelemahan berupa kualitas dan kuantitas hasil produksi dan ketahanan produk, tetapi di negara-negara berkembang khususnya yang terletak di daerah tropic dianggap masih cukup relevan untuk menjawab permasalahan degradasi (penurunan kualitas lingkungan). Hal ini terjadi karena di daerah tropik, produksi hasil dapat berjalan sepanjang tahun sehingga permasalahan daya simpan bukan merupakan masalah utama.

Pengembangan Kawasan Kampung Organik di Kabupaten Mojokerto diarahkan pada Kecamatan Trawas, yang terletak di Desa Penanggungan Kecamatan Trawas. Dengan didukung oleh 4 Desa Penyangga sebagai berikut:

1. Desa Selotapak Kecamatan Trawas;
2. Desa Sukosari Kecamatan Trawas;
3. Desa Kedungu di Kecamatan Trawas; dan
4. Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas.



2.1.2.6 Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian yang dikembangkan adalah Kawasan Pertanian yang berbasis Korporasi Petani. Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani merupakan Kawasan Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan petani.

Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani sebagai upaya untuk :

1. Memadukan rangkaian rencana dan implementasi kebijakan, program, kegiatan dan anggaran pembangunan Kawasan Pertanian; dan
2. Mendorong aspek pemberdayaan petani dalam suatu Kelembagaan Ekonomi Petani di daerah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian agar menjadi suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif system Usaha Tani.

2.1.2.7 Kawasan Pengembangan Perkotaan Baru

Kawasan Perkotaan baru yang direncanakan untuk dikembangkan dalam upaya untuk mengantisipasi perkembangan kawasan terbangun akibat dari semakin tingginya tingkat aksesibilitas Kabupaten Mojokerto adalah meliputi ;

1. Kawasan Perkotaan Interchange Mlirip/Kota Mandiri Canggus, Kecamatan Jetis
2. Kawasan Perkotaan Interchange Pagerluyung Kecamatan Gedeg
3. Kawasan Perkotaan Dawarblandong sebagai pendukung kawasan industri Jetis, Kecamatan Dawarblandong.
4. Kawasan Perkotaan Airlangga City, Kecamatan Ngoro.

Dalam perkembangannya diperlukan penyusunan rencana berupa masterplan yang dapat memberikan gambaran menyeluruh pada kawasan perkotaan baru yang disebut diatas.

2.1.2.8 Kawasan Pengembangan Pariwisata:

Potensi kegiatan wisata di Kabupaten Mojokerto telah diuraikan sebelumnya yang pada dasarnya berwujud obyek maupun kegiatan. Dalam konteks kawasan, kegiatan wisata yang mungkin dikembangkan sesuai potensi pemanfaatan ruang adalah jenis wisata alam, wisata budaya dan agrowisata.

Berdasarkan potensi wilayahnya, maka kawasan wisata di Kabupaten Mojokerto akan dikembangkan sebagai berikut ini.



1. Wisata alam, kawasan ini berada di Kec Trawas, Pacet, Ngoro, Jatirejo, Gondang berupa wisata alam pegunungan.
2. Wisata budaya dan peninggalan sejarah, dimana terdapat situs bersejarah yang memiliki nilai kultural yang tinggi yang lokasinya terdapat di Kecamatan Trowulan, yaitu situs bekas kerajaan Majapahit (cagar budaya) yang dikembangkan menjadi Mojopahit Park. Selain itu terdapat pula di Kecamatan Puri, Kecamatan Trawas, dan Kecamatan Pacet.
3. Wisata buatan ini terletak di Kecamatan Kemlagi dan Kecamatan Pacet.

2.1.2.9 Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

1. Kawasan Wisata Alam (Trawas, Pacet, Gondang, Ngoro, dan Jatirejo)
Pengembangan wisata alam diarahkan berupa kawasan agropolitan dimana komoditi yang dikembangkan berupa ; kopi, cengkeh, bungapotong, kakao, durian, alpokat, mete, dan rambutan.
2. Kawasan Rawan Bencana :
 - Kawasan Rawan Longsor (Kec. Jatirejo, Gondang, Pacet, Trawas dan Ngoro,serta sebagian Kec Dawarblandong).
 - Untuk mengatasi tanah yang rawan longsor, melalui program reboisasi, pembuatan teras siring, penginformasian kawasan rawan bencana, pelatihan tanggap bencana, relokasi permukiman.
 - Kawasan Rawan Banjir (Kec. Jetis, Kemlagi, Puri, Pacet dan Gondang). Untuk mengatasinya ditempuh pendekatan antara lain: penetapan sempadan sungai, pembangunan talud sungai, normalisasi sungai, penghijauan di bagian hulu, relokasi pada permukiman yang sering terlanda banjir, dan pengadaan sistem pompa.
 - Kawasan Rawan Air (Kec. Dawarblandong, Jetis, Kemlagi, Mojoanyar, Bangsal, Mojosari, Pungging, dan Ngoro). Arahannya berupa ;melakukan reboisasi dan pengembangan hutan kota, serta RTH (Ruang Terbuka Hijau) terutama di pertengahan musim penghujan. Mengembangkan biopori dan sumur resapan di tiap lahan terbangun. Mengadakan bantuan truk tangki air dalam keadaan darurat untuk mensuplai air bersih. Mengembangkan sumur pompa dalam dan dangkal secara komunal di lingkungan permukiman yang rawan air bersih
 - Kawasan Taman Hutan Raya (Kecamatan Gondang, Pacet, Trawas dan Jatirejo)

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam adalah suatu kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan



tanah, angin topan, dan kebakaran yang disebabkan oleh alam. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Mojokerto meliputi kawasan yang rawan terhadap bencana tanah longsor (rawan gerakan tanah), banjir dan kekeringan.

2.1.3.1 Bencana Longsor

Longsor tanah dipengaruhi oleh factor kemampuan tanah yang lain, terutama kemiringan tanah selain oleh curah hujan dan penutup tanah. Tanah tegalan mempunyai tingkat erosi yang lebih besardari pada tanah sawah, oleh karena itu usaha pertanian pada tanah tegalan yang berkelerengan relative tinggi perlu adanya tindakan pengawetan tanah.

Sebaran kawasan rawan tanah longsor terdapat di beberapa lokasi, yaitu di wilayah Kecamatan Ngoro, Pacet, Trawas, Gondang, dan Jatirejo. Pada kawasan rawan bencana longsor ini upaya penanganan yang akan ditempuh adalah;

1. Mengidentifikasi titik lokasi rawan longsor
2. Jika pada titik rawan longsor terdapat permukiman maka diupayakan dilakukan rekolokasi.
3. Pada lokasi rawan longsor dilakukan kegiatan perkuatan lereng secara mekanis dengan ; teras datar, teras kredit, teras pematang, dan teras bangku. Secara vegetative dengan ;penanaman dengan tanaman penutup tanah, penanaman dalam strip, penanaman berganda, pemakaian mulsa, dan reboisasi.
4. Program mitigasi bencana secara terpadu dan menyeluruh

2.1.3.2 Bencana Banjir

Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Mojokerto terdapat di beberapa kecamatan sebagai berikut ;

1. Kecamatan Bangsal (Kali Tekuk)
2. Kecamatan Sooko (Kali Brangkal)
3. Kecamatan Dawarblandong (Kali Lamong)

2.1.4 Demografi

Demografi dapat meliputi deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Analisis kependudukan dapat merujuk pada komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan criteria seperti pendidikan,



kewarganegaraan, agama, atau entitas tertentu. Adapun sumber data yang digunakan pada aspek demografi yaitu meliputi data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir. Data yang digunakan sebagai gambaran demografi disajikan pada table sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Jatirejo	23.579	22.767	46.346
2.	Gondang	21.676	22.525	45.389
3.	Pacet	31.001	30.642	61.643
4.	Trawas	16.017	15.983	32.000
5.	Ngoro	43.391	43.278	86.669
6.	Pungging	41.274	40.795	82.069
7.	Kutorejo	34.708	33.819	68.527
8.	Mojosari	41.631	40.943	82.574
9.	Dlanggu	27.273	26.853	59.102
10.	Bangsals	26.067	25.674	54.126
11.	Puri	29.800	29.302	80.622
12.	Trowulan	40.693	39.929	78.584
13.	Sooko	39.894	38.690	75.885
14.	Gedeg	38.169	37.716	60.770
15.	Kemlagi	30.428	30.342	61.782
16.	Jetis	30.951	30.831	89.266
17.	Dawarblandong	45.381	43.885	53.653
18.	Mojoanyar	26.662	26.991	51.741
Jumlah		589.783	580.965	1.170.748

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dari data di atas diketahui bahwa sebaran penduduk paling banyak berada pada kecamatan Jetis diikuti Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Mojosari. Perkembangan penduduk Kabupaten Mojokerto pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tersaji dalam table berikut :

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

No	Jenis Kelamin	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki- laki	562.684	573.415	570.899	584.209	589.783
2	Perempuan	554.720	564.847	562.884	575.384	580.965
	Jumlah	1.117.404	1.138.262	1.133.783	1.159.593	1.170.748

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mojokerto Tahun 2021



Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2020, jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto adalah 1.170.748 dengan laju pertumbuhan sebesar 1%. Pada tahun 2020, Sex Ratio penduduk Kabupaten Mojokerto adalah 101,51%. Hal ini berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Mojokerto lebih banyak dibanding penduduk perempuan.

Tabel 2.11
Banyaknya Kematian Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatirejo	61	44	105
2	Gondang	40	31	71
3	Pacet	60	38	98
4	Trawas	103	104	207
5	Ngoro	112	72	184
6	Pungging	103	85	188
7	Kutorejo	104	67	171
8	Mojosari	122	80	202
9	Bangsalsari	40	32	72
10	Mojoanyar	79	67	146
11	Dlanggu	98	72	170
12	Puri	151	139	290
13	Trowulan	117	58	175
14	Sooko	132	105	237
15	Gedeg	150	96	246
16	Kemlagi	254	189	443
17	Jetis	176	148	324
18	Dawarblandong	62	43	105
Jumlah		1.964	1.470	3.434

Sumber :BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.11 kematian penduduk terbesar terdapat pada Kecamatan Kemlagi yaitu terdiri dari kematian penduduk laki-laki sebesar 254 jiwa dan kematian penduduk perempuan sebesar 189 jiwa Jumlah penduduk dengan angka kematian terendah yaitu terdapat pada kecamatan Gondang.

Demografi sebagai gambaran tentang penduduk, juga meliputi migrasi penduduk. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu tempat (tempat asal) menuju ke tempat lain (tempat tujuan). Pada Kabupaten Mojokerto migrasi juga terjadi seperti pada kota/kecamatan lain. Data mengenai migrasi penduduk maka akan disajikan pada table sebagai berikut:



Tabel 2.12
Banyaknya Penduduk yang Datang dan Pindah Keluar Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No	Kecamatan	Penduduk yang Datang			Penduduk yang Pindah Keluar		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Jatirejo	421	384	805	318	311	629
2	Gondang	363	430	793	297	308	605
3	Pacet	398	430	828	337	326	663
4	Trawas	234	225	459	161	188	349
5	Ngoro	618	629	1.247	505	507	1.012
6	Pungging	624	616	1.240	489	466	955
7	Kutorejo	576	501	1.077	428	419	847
8	Mojosari	758	659	1.417	622	628	1.250
9	Bangsalsari	534	470	1.004	434	394	828
10	Mojoanyar	530	476	1.006	407	347	754
11	Dlanggu	826	850	1.676	551	569	1.120
12	Puri	731	701	1.432	560	620	1.180
13	Trowulan	830	899	1.729	697	642	1.339
14	Sooko	464	519	983	494	451	945
15	Gedeg	518	524	1.042	443	413	856
16	Kemlagi	827	762	1.589	645	574	1.219
17	Jetis	370	344	714	287	246	533
18	Dawarblandong	438	457	895	450	421	871
Total		10.060	9.876	19.936	8.125	7.830	15.955

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.12 banyaknya Penduduk yang pindah menurut jenis kelamin pada tahun 2020 diperoleh sebesar 15.955 yang terdiri dari 8.125 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 7.830 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan data penduduk diatas maka dapat diperoleh informasi bahwa kecamatan trowulan merupakan kecamatan dengan banyak penduduk yang datang paling tinggi terhadap penduduk keluar.

Selama tahun 2016-2020 jumlah penduduk yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, 2020 mengalami kenaikan sebanyak 11.155 jiwa yaitu dari sebanyak 1.117.404 jiwa pada tahun 2016 menjadi sebanyak 1.170.748 jiwa pada tahun 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 ini terdiri dari 589.783 penduduk laki-laki dan 580.965 penduduk perempuan atau 50,31% penduduk laki-laki dan 49,69% penduduk perempuan.

Selain Jumlah Penduduk, salah satu aspek sebaran Demografi adalah tentang Kemiskinan Makro pada suatu daerah. Kemiskinan Makro adalah konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa negara lain dalam mengukur kemiskinan. Pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan



dasar (makanan dan bukan makanan). Jadi, Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto mencapai 118,80 ribu jiwa (10,57 persen), bertambah 9,99 ribu jiwa dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 108,81 ribu jiwa (9,75 persen).

Jika dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Timur, persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mojokerto berada pada peringkat 21 dari 38 Kabupaten/Kabupaten. Kabupaten Mojokerto tercatat mempunyai persentase Penduduk Miskin terendah yakni 3,89 persen, sedangkan persentase tertinggi adalah Kabupaten Sampang (22,78 persen).

Gambar 2.2 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 –2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Perkapita/Bulan) (Rp.)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) (Indeks)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) (Indeks)	Perubahan Persentase Penduduk Miskin (%)
2016	330.940	115,38	10,61	1,53	0,35	0,38
2017	345.487	111.79	10,19	1.70	0,46	-3,96
2018	370.610	111,55	10,08	1,81	0,48	-1,08
2019	394.003	108,81	9,75	1,29	0,27	-3,27
2020	406.043	118,80	10,57	1,95	0,51	8,41

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Selanjutnya, Demografi Penduduk berdasarkan agama yang dianut pada Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.13 Penduduk Menurut Agama yang dianut Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No	Agama	2016	2017	2018	2019	2020
1	Islam	1.103.987	1.013.750	1.093.439	1.125.760	1.157.594
2	Protestan	10.426	7.786	8.850	8.726	10.246
3	Katolik	1.730	2.224	1.991	1.798	1.693
4	Hindu	617	601	1.372	1.496	590
5	Budha	599	423	335	389	559
6	Konghuchu	14	-	-	21	11

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto



Berdasarkan tabel 2.13 penduduk menurut agama yang dianut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 adalah beragama Islam dengan jumlah penganut sebesar 1.157.594 jiwa, kemudian Protestan dengan jumlah penganut sebesar 10.264 jiwa, Katolik dengan jumlah penganut sebesar 1.693 jiwa, Hindu dengan jumlah penganut sebesar 590 jiwa, Budha dengan jumlah penganut sebesar 559 jiwa dan Konghuchu dengan jumlah penganut sebesar 11 jiwa.

Sedangkan, Gambaran demografi penduduk dari jenis pekerjaan di kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.14
Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

NO	JENIS PEKERJAAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Belum/Tidak Bekerja	255,983	269,371	274,604	287,185	297,063
2	Mengurus Rumah Tangga	196,632	201,025	202,059	205,327	208,557
3	Pelajar/Mahasiswa	155,241	152,042	142,549	144,098	137,595
4	Pensiunan	5,841	5,836	5,758	5,746	5,679
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	12,430	12,386	12,127	12,091	11,957
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	3,045	3,069	3,045	3,100	3,120
7	Kepolisian Ri (Polri)	1,221	1,265	1,280	1,303	1,333
8	Perdagangan	2,816	2,796	2,726	2,712	2,699
9	Petani/Pekebun	87,355	87,387	85,944	85,598	85,283
10	Peternak	532	517	466	459	450
11	Nelayan/Perikanan	102	94	85	85	85
12	Industri	166	171	166	157	154
13	Konstruksi	317	300	276	275	270
14	Transportasi	183	179	179	178	175
15	Karyawan Swasta	190,819	195,506	197,369	202,676	206,037
16	Karyawan Bumh	967	1,004	1,032	1,072	1,081
17	Karyawan Bumd	173	175	174	181	178
18	Karyawan Honorer	1,078	1,066	1,078	1,083	1,075
19	Buruh Harian Lepas	8,467	8,414	8,180	8,072	8,050
20	Buruh Tani/Perkebunan	12,529	12,511	12,315	12,336	12,314
21	Buruh Nelayan/Perikanan	33	33	30	31	31
22	Buruh Peternakan	66	65	62	63	63
23	Pembantu Rumah Tangga	647	631	603	592	590
24	Tukang Cukur	67	66	63	62	61
25	Tukang Listrik	84	84	80	80	76
26	Tukang Batu	1,636	1,643	1,630	1,626	1,634
27	Tukang Kayu	572	572	562	558	551
28	Tukang Sol Sepatu	602	590	573	560	557



NO	JENIS PEKERJAAN	2016	2017	2018	2019	2020
29	Tukang Las/Pandai Besi	170	168	170	171	169
30	Tukang Jahit	887	878	888	895	894
31	Tukang Gigi	17	17	16	16	16
32	Penata Rias	82	78	78	77	77
33	Penata Busana	7	7	7	7	7
34	Penata Rambut	43	41	42	39	38
35	Mekanik	432	442	432	427	429
36	Seniman	145	143	145	146	146
37	Tabib	29	28	25	25	25
38	Paraji	8	8	7	7	7
39	Perancang Busana	2	2	2	2	2
40	Penterjemah	3	3	3	3	4
41	Imam Masjid	11	11	10	10	10
42	Pendeta	64	64	65	66	65
43	Pastor	1	1	1	1	1
44	Wartawan	54	53	51	50	50
45	Ustadz/Mubaligh	240	234	226	223	222
46	Juru Masak	31	30	29	29	26
47	Promotor Acara	1	1	1	1	0
48	Anggota Dpr Ri	2	2	1	1	1
49	Anggota Dpd Ri	3	3	3	3	3
50	Anggota Bpk	4	4	4	4	4
51	Presiden	0	0	0	0	0
52	Wakil Presiden	0	0	0	0	0
53	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0	0	0
54	Anggota Kabinet Kementrian	1	1	1	1	1
55	Duta Besar	0	0	0	0	0
56	Gubernur	0	0	0	0	0
57	Wakil Gubernur	0	0	0	0	0
58	Bupati	1	1	1	1	1
59	Wakil Bupati	1	0	1	1	0
60	Walikota	0	0	0	1	1
61	Wakil Walikota	0	0	0	0	0
62	Anggota Dprd Prop.	0	0	0	0	0
63	Anggota Dprd Kab./Kota	23	22	24	24	26
64	Dosen	379	409	430	459	483
65	Guru	7,974	8,215	8,567	8,890	9,028
66	Pilot	2	2	1	2	2
67	Pengacara	20	21	18	20	21
68	Notaris	8	7	9	9	9
69	Arsitek	17	17	21	20	17
70	Akuntan	4	6	6	9	9
71	Konsultan	33	32	29	29	31
72	Dokter	195	210	219	226	238
73	Bidan	533	583	629	664	682
74	Perawat	819	879	937	1,015	1,051
75	Apoteker	38	41	39	41	43



NO	JENIS PEKERJAAN	2016	2017	2018	2019	2020
76	Psikiater/Psikolog	0	0	1	2	2
77	Penyiar Televisi	2	2	1	1	1
78	Penyiar Radio	12	11	13	9	9
79	Pelaut	97	95	96	97	99
80	Peneliti	6	6	6	7	7
81	Sopir	3,848	3,880	3,846	3,894	3,910
82	Pialang	8	8	8	8	7
83	Paranormal	23	18	17	16	16
84	Pedagang	4,797	4,830	4,847	4,892	4,901
85	Perangkat Desa	2,162	2,175	2,194	2,214	2,235
86	Kepala Desa	248	251	239	233	236
87	Biarawan/Biarawati	18	16	15	14	15
88	Wiraswasta	154,189	155,402	154,256	157,197	158,668
89	Pekerjaan Lainnya	107	105	91	87	84
TOTAL		1,117,405	1,138,261	1,133,783	1,159,592	1,170,747

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2021

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun ke tahun dimana pertumbuhan penduduk semakin naik. Jumlah masyarakat yang belum/ tidak bekerja juga semakin naik, hal ini merupakan isu masalah penting untuk diselsaikan oleh pemerintah Daerah.

Demografi pekerjaan penduduk berhubungan erat dengan dengan taraf Pendidikan suatu penduduk pada waktu tertentu. Untuk latar belakang Pendidikan penduduk bisa dilihat pada table berikut:

Tabel 2.15
Penduduk Menurut Jenis Pendidikan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Jenis Pendidikan	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
TIDAK/BELUM SEKOLAH	216,235	233,045	243,998	258,476	271,181
BELUM TAMAT SD/ SEDERAJAT	133,177	131,835	125,475	126,057	122,908
TAMAT SD/ SEDERAJAT	295,065	294,011	286,468	286,785	284,399
SLTP/ SEDERAJAT	203,607	203,876	199,096	200,094	198,659
SLTA/ SEDERAJAT	228,561	232,873	234,477	241,443	245,176
D-I/II	3,217	3,196	3,104	3,093	3,089
AKADEMI/ D-III/ SARJANA MUDA	7,817	8,031	8,143	8,420	8,561
D-IV/ S-I	27,995	29,574	31,152	33,256	34,747
S-II	1,637	1,719	1,768	1,860	1,917
S-III	94	101	102	109	111
TOTAL	1,117,405	1,138,261	1,133,783	1,159,593	1,170,748

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2021



Pada Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Penduduk dengan jenis Pendidikan Tamat SD/Sederajat masih mendominasi dari segi jumlah dari Tahun 2016- tahun 2021. Selanjutnya diikuti jenis Pendidikan SLTA/Sederajat dan SLTP/Sederajat. Tentu hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah Daerah dimana program Pendidikan yang telah dilaksanakan kurang begitu efektif di Kabupaten Mojokerto.

Yang terakhir adalah demografi penduduk menurut jenis disabilitas di Kabupaten Mojokerto. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis disabilitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.16
Penduduk Menurut Jenis Disabilitas di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Jenis Disabilitas	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Fisik	147	165	134	141	143
Netra	63	69	56	59	57
Rungu	125	129	123	125	130
Mental	141	161	115	121	120
Fisik Dan Mental	57	58	48	51	50
Lainnya	74	82	73	73	73
Total	607	664	549	570	573

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2021

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

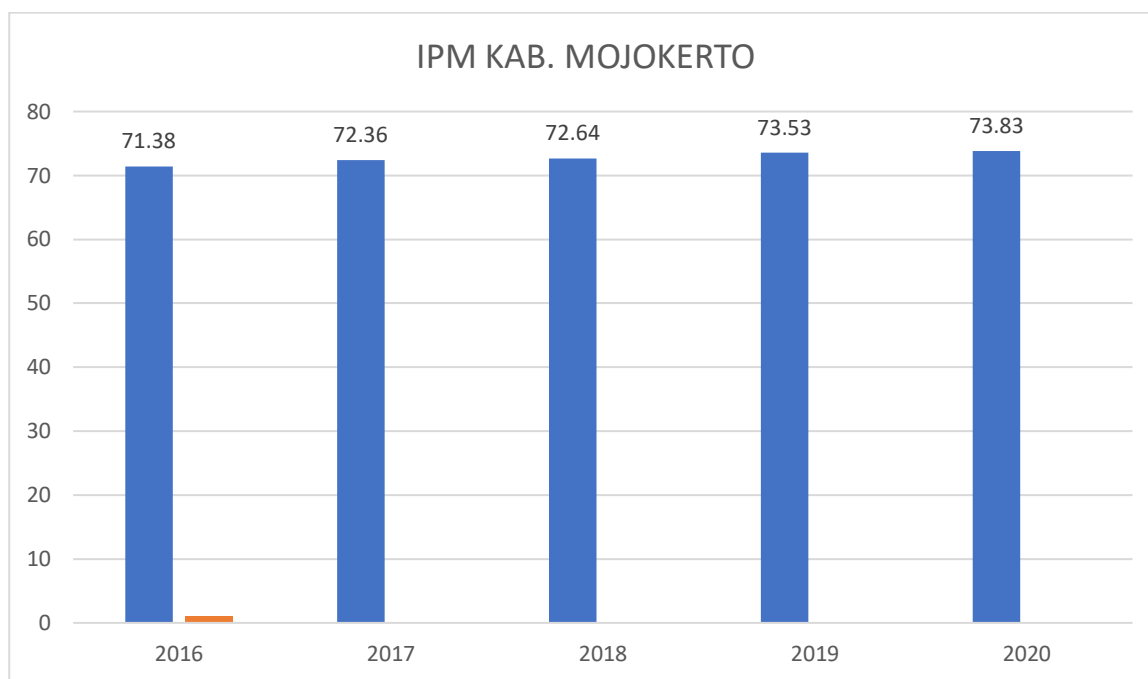
Salah Satu Pengukuran aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Adapun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Gambar 2.3
Capaian IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Seringkali angka pertumbuhan ekonomi dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi maka dimaknai semakin berhasil pemerintahan dalam melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan sebuah prestasi. Tapi pada hakikatnya tidak demikian, pembangunan ekonomi yang berkualitas yang harus menjadi tujuan utama dan tidak hanya tinggi secara kuantitas. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dari perkembangan PDRB atas dasar harga konstan. Sehingga angka pertumbuhan tidak dipengaruhi oleh factor perubahan harga, atau dapat diartikan riil disebabkan oleh kenaikan atau penurunan produksi (output) dari seluruh sektor ekonomi. Berikut merupakan tabel perkembangan Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020.



Tabel 2.17

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016 (Rp. Juta)	2017 (Rp. Juta)	2018 (Rp. Juta)	2019 (Rp. Juta)	2020 (Rp. Juta)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.925.564,7	6.101.986,9	6.234.214,66	6.417.782,09	6.522.865,3
2.	Pertambangan dan Penggalian	636.147,9	680.601,1	741.424,85	777.514,55	761.271,4
3.	Industri Pengolahan	34.129.479,4	37.566.647,7	41.007.107,19	44.349.866,05	44.708.444,3
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	37.317,3	44.799,5	49.458,41	53.307,39	52.543,2
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	40.284,3	43.647,4	46.660,23	48.346,71	50.733,3
6.	Konstruksi	6.586.757,5	7.086.578,5	7.616.566,07	7.988.986,36	7.366.414,9
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.693.874,3	7.344.571,2	7.980.210,98	8.666.788,88	8.254.290,3
8.	Transportasi dan Pergudangan	801.198,4	892.802,4	998.211,11	1.104.028,51	1.062.601,0
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.386.424,1	1.532.463,6	1.684.964,43	1.836.189,58	1.589.337,9
10.	Informasi dan Komunikasi	3.514.737,9	3.820.109,0	4.068.264,55	4.402.853,52	4.759.395,1
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.049.381,5	1.127.818,7	1.208.961,50	1.276.664,05	1.285.552,9
12.	Real Estate	979.474,2	1.052.767,7	1.152.213,38	1.238.276,16	1.282.365,0
13.	Jasa Perusahaan	103.009,8	111.929,2	123.635,82	135.662,68	131.227,7
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.538.994,7	1.638.261,4	1.810.687,57	1.997.280,08	2.033.359,5



No.	Lapangan Usaha	2016 (Rp. Juta)	2017 (Rp. Juta)	2018 (Rp. Juta)	2019 (Rp. Juta)	2020 (Rp. Juta)
15.	Jasa Pendidikan	883.231,8	946.091,8	1.012.231,31	1.075.740,27	1.105.879,3
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	245.485,8	268.714,4	290.367,50	322.222,71	359.147,9
17.	Jasa Lainnya	564.461,8	603.440,0	657.648,93	700.323,87	615.428,8
Total PDRB		65.114.184,2	70.861.499,1	76.682.828,50	82.391.833,47	81.940.857,9

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto 2021;



Tabel 2.18

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha 2016-2020

No.	Lapangan Usaha	2016 (Rp. Juta)	2017 (Rp. Juta)	2018 (Rp. Juta)	2019 (Rp. Juta)	2020 (Rp. Juta)
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.848.049,2	3.883.250,0	3.829.547,90	3.861.929,5	3.884.603,7
2.	Pertambangan dan Penggalian	453.564,6	475.102,7	485.874,1	495.865,6	479.353,3
3.	Industri Pengolahan	26.427.891,0	28.192.791,7	30.155.134,8	32.102.324,0	32.153.799,1
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	34.945,1	36.488,6	38.606,7	40.959,0	40.204,7
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	33.603,1	35.679,6	37.576,2	38.881,2	40.619,2
6.	Konstruksi	4.447.819,7	4.667.373,8	4.935.325,5	5.220.890,9	4.897.717,7
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.255.147,0	5.566.711,3	5.895.394,5	6.241.491,5	5.806.832,5
8.	Transportasi dan Pergudangan	583.060,0	621.234,0	675.937,1	735.264,3	699.109,1
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	950.991,7	1.022.249,6	1.091.882,9	1.162.883,8	1.011.488,8
10.	Informasi dan Komunikasi	3.248.969,7	3.462.497,8	3.679.413,3	3.933.969,5	4.230.197,4
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	741.327,0	767.830,5	803.671,5	837.544,7	839.773,3
12.	Real Estate	783.147,5	815.760,4	852.126,8	892.493,3	914.537,9
13.	Jasa Perusahaan	76.775,0	80.565,0	85.453,95	91.164,5	85.257,1
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.156.252,1	1.183.804,6	1.233.151,8	1.273.310,3	1.238.871,3
15.	Jasa Pendidikan	659.801,5	689.260,9	724.962,3	760.755,5	771.938,6
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	193.702,0	203.711,2	217.782,7	235.586,8	257.166,6
17.	Jasa Lainnya	465.547,6	488.521,3	514.765,7	541.833,9	466.952,4
Total PDRB		49.360.593,7	52.187.821,0	55.256.607,8	58.467.148,2	57.818.422,7

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai PDRB ADHK di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 5 (lima) tahun terakhir. Nilai kontribusi terbesar dihasilkan dari kategori lapangan usaha industri pengolahan, dimana pada Tahun 2020 sumbangan nilai PDRB ADHK dari lapangan usaha ini mencapai angka Rp.32.153.799,100.000 (atau sekitar 32,1 triliun rupiah). Sedangkan sumbangan terbesar kedua yaitu dari kategori lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dimana nilai PDRB ADHK nya pada Tahun 2020 mencapai angka Rp. 5.806.832,500.000. Posisi nilai PDRB ADHK terbesar ketiga yaitu kategori lapangan usaha konstruksi dengan nilai Rp 4.897.717,700.000.

Tabel 2.19
Distribusi Persentase Produk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No	Lapangan Usaha	2016 (%)	2017 (%)	2018(%)	2019(%)	2020(%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9,10	8,61	8,13	7,79	7,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,98	0,96	0,97	0,94	0,93
3.	Industri Pengolahan	52,41	53,01	53,48	53,83	54,56
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
6.	Konstruksi	10,12	10,00	9,93	9,70	8,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,28	10,36	10,41	10,52	10,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,26	1,30	1,34	1,30
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,13	2,16	2,20	2,23	1,94
10.	Informasi dan Komunikasi	5,40	5,39	5,31	5,34	5,81
11.	Jasa Keuangandan Asuransi	1,61	1,59	1,58	1,55	1,57
12.	<i>Real Estate</i>	1,50	1,49	1,50	1,50	1,56
13.	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,36	2,31	2,36	2,42	2,48
15.	Jasa Pendidikan	1,36	1,34	1,32	1,31	1,35
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,38	0,38	0,38	0,39	0,44
17.	Jasa lainnya	0,87	0,85	0,86	0,85	0,75
Total PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB jika dilihat dalam Tabel 2.19 terlihat bahwa selama lima tahun terakhir (Tahun 2016 – 2020) struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya Industri Pengolahan; Perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi, pertanian, kehutanan dan perikanan; dan informasi dan komunikasi.

Di antara kelima lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar tersebut, industri pengolahan mengalami peningkatan peran dimana pada Tahun 2020 memberikan kontribusi sebesar 54,56% terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto. Sebaliknya, konstruksi peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi tetapi cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 5%. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan meski masih menjadi kontributor terbesar keempat terhadap perekonomian, peranannya semakin berkurang. Pada Tahun 2020, saat terjadi pandemi Covid 19, kontribusi sektor ini meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi salah satu penyangga dalam perekonomian Kabupaten Mojokerto.

Laju pertumbuhan PDRB ADHK digunakan sebagai dasar untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan perubahan PDRB ADHK tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, nilai PDRB Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 menurun. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 atas dasar harga konstan 2010 mencapai 57.818.422,7 juta rupiah. Angka tersebut turun dari 58.467.148,2 juta rupiah pada Tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 terjadi kontraksi ekonomi dengan pertumbuhan sebesar -1,11 %, jauh lebih rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 5,81 %.

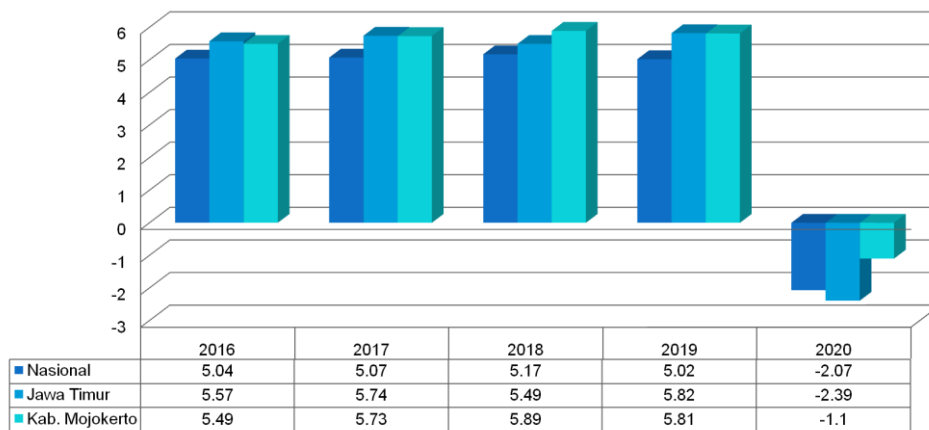
Perekonomian mengalami kontraksi selama Tahun 2020 karena adanya penurunan produksi akibat pandemi Covid-19. Kinerja sektor industri pengolahan signifikan menurun, namun tetap mampu tumbuh positif. Hal tersebut tentunya juga berdampak pada aktivitas perdagangan mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam. Kondisi perekonomian global yang kurang kondusif akibat pandemi Covid-19 juga menyebabkan terpuruknya ekspor ke luar negeri selama 2020. Selain itu, terjadi kontraksi signifikan pada sektor konstruksi sehingga berimbas pada kontraksi perekonomian Kabupaten Mojokerto.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 tersebut juga dialami oleh seluruh daerah bahkan seluruh negara. Namun, satu hal yang perlu dibanggakan adalah bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto dalam 5



(lima) tahun terakhir tercatat menunjukkan angka pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan nasional, dan tidak jauh dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur. Hal ini terlihat dalam grafik berikut.

Gambar 2.4
Data Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto –
Provinsi – Nasional Tahun 2016 - 2020



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto

Dalam grafik tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun terakhir jika dibandingkan dengan provinsi dapat dikatakan sangat baik, bahkan selalu lebih tinggi dibandingkan nasional. Pada Tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mencapai 5,49%, sedikit lebih rendah dibanding Provinsi 5,57% namun lebih tinggi dari nasional 5,04%. Selanjutnya di Tahun 2017, Kabupaten Mojokerto mencatatkan angka laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,73%, Provinsi 5,74% sedangkan nasional 5,07%. Tahun 2018, angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto sebesar 5,89% dan angka ini lebih tinggi dibandingkan provinsi 5,49% dan nasional 5,17%. Tahun 2019, angka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto sebesar 5,81% sedikit dibawah provinsi 5,82% dan masih lebih tinggi dari nasional sebesar 5,02%. Kemudian dalam masa pandemi covid 19 di Tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan angka yang lebih baik dibanding provinsi dan nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto terkontraksi sebesar -1,11% sedangkan Provinsi Jawa Timur sebesar -2,39% dan Nasional sebesar -2,07%.

Berikut akan disajikan laju pertumbuhan dari tiap lapangan usaha yang membentuk PDRB.



Tabel 2.20

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016- 2020

No.	Lapangan Usaha	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,84	0,79	-1,26	0,85	0,59
2.	Pertambangan dan penggalian	3,01	4,75	2,27	2,06	-3,33
3.	Industri pengolahan	5,73	6,68	6,96	6,46	0,16
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	3,40	4,42	5,81	6,09	-1,84
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,87	6,18	5,32	3,47	4,47
6.	Konstruksi	4,77	4,94	5,74	5,79	-6,19
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,82	5,93	5,95	5,89	-6,96
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,45	6,55	8,81	8,78	-4,92
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,20	7,49	6,81	6,5	-13,02
10.	Informasi dan Komunikasi	7,36	6,57	6,27	6,92	7,53
11.	Jasa Keuangandan Asuransi	6,90	3,58	4,67	4,22	0,27
12.	<i>Real Estate</i>	3,83	4,16	4,46	4,74	2,47
13.	Jasa Perusahaan	4,91	4,94	6,07	6,68	-6,48
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,67	2,38	4,17	3,26	-2,70
15.	Jasa Pendidikan	5,75	4,47	5,18	4,94	1,47
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,28	5,17	6,91	8,18	9,16
17.	Jasa lainnya	4,42	4,94	5,37	5,26	-13,82
PDRB		5,65	5,73	5,89	5,81	-1,1

Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dalam tabel tersebut di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi Tahun 2020 dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 9,16%. Penyebabnya adalah peningkatan kegiatan jasa kesehatan dan sosial yang merupakan dampak dari pandemi Covid 19. Dari 17 sektor lapangan usaha ekonomi yang ada, tidak seluruhnya mengalami pertumbuhan positif. Diantaranya sembilan lapangan usaha terlihat mengalami pertumbuhan negatif dan delapan sektor lainnya tumbuh positif.

Sembilan sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif tersebut yaitu sektor jasa lainnya sebesar -13,82%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -13,02%, Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar -6,96%, jasa



perusahaan sebesar -6,48%, konstruksi sebesar -6,19%, transportasi dan pergudangan sebesar -4,92%, pertambangan dan penggalian sebesar -3,33%, sektor lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar -2,70%, sektor pengadaan listrik dan gas sebesar -1,84%.

Sedangkan delapan sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif di Tahun 2020 adalah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,16%, informasi dan komunikasi sebesar 7,53%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,47%, real estate 2,47%, jasa pendidikan 1,47%, pertanian, kehutanan dan perikanan 0,59%, jasa keuangan dan asuransi 0,27%, dan sektor industri pengolahan sebesar 0,16%. Pada sektor yang tumbuh positif ini menunjukkan bahwa dalam masa pandemi Covid-19, selain jasa kesehatan yang secara pasti akan meningkat tajam, juga terlihat sektor informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam masa pandemi Covid 19, dimana banyak kebijakan pembatasan wilayah, maka hampir seluruh aktivitas di masyarakat beralih pada era penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik perdagangan secara online, maupun pendidikan online. Terlihat pula hal yang menggembirakan bahwa dalam masa pandemi Covid-19, sektor pertanian dan sektor industri pengolahan juga tetap mampu tumbuh positif. Hal ini semakin memperkuat posisi kedua sektor tersebut sebagai basis perekonomian di Kabupaten Mojokerto.

Selain laju pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator ekonomi makro terkait tingkat kemakmuran penduduk pada suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yaitu merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Berikut perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.21
PDRB Per Kapita Kabupaten Mojokerto atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2016-2020 (Rupiah)

Uraian	2016(Rp)	2017(Rp)	2018(Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
PDRB Per Kapita (ADHB)	59.735.179,14	64.359.175,09	69.159.461,92	73.712.797,38	72.746.306,72
PDRB Per Kapita (ADHK)	45.281.832,63	47.464.876,01	49.838.288,73	52.310.795,28	51.330.640,41
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	4,55 %	4,82 %	5,00 %	4,96 %	-1,87 %

Sumber Data : BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2018

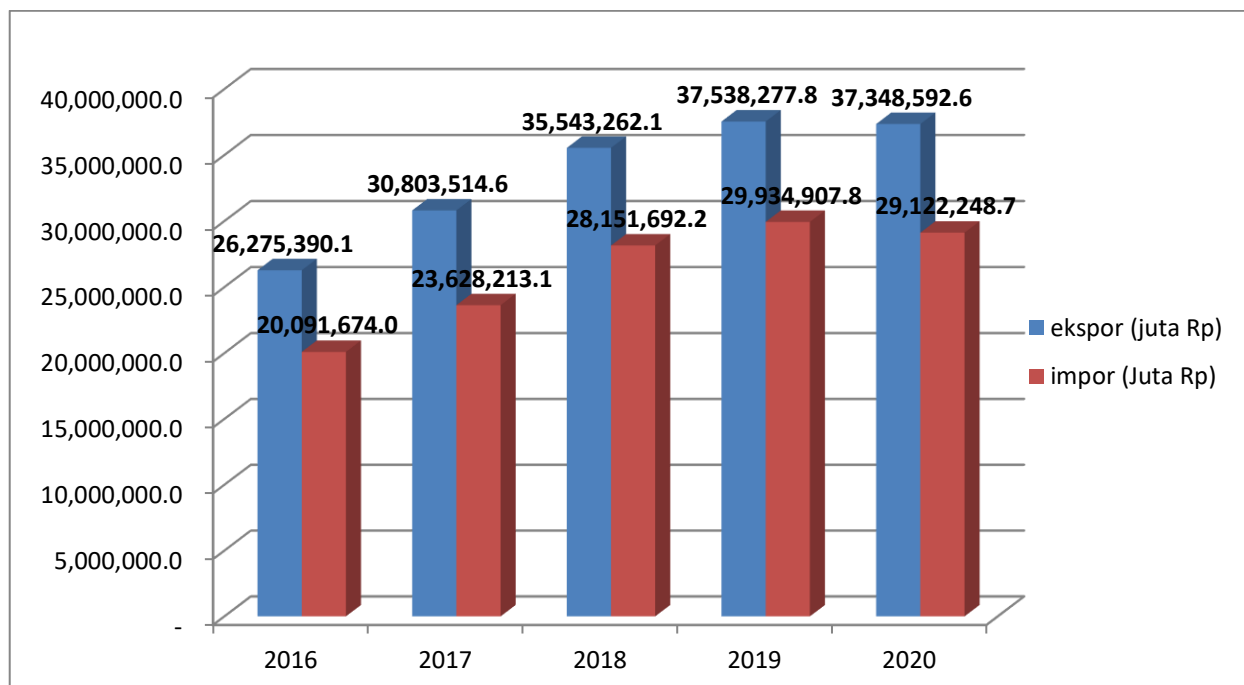


Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa Nilai PDRB per kapita Kabupaten Mojokerto atas dasar harga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 PDRB per kaita tercatat sebesar 73.712.797,38 rupiah. Secara nominal mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 72.746.306,72 rupiah. Angka PDRB per kapita ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi, yang tentunya juga sangat dipengaruhi adanya pandemi Covid-19.

Komponen lainnya yang berpengaruh dalam pengukuran PDRB adalah ekspor dan impor. Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Mojokerto, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kota lain di dalam satu provinsi, luar provinsi maupun luar negeri, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Disisi lain, berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, dimana komponennya termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchased*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Mojokerto di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa). Selanjutnya, untuk perkembangan neraca perdagangan yang ditunjukkan melalui kinerja ekspor dan impor Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 terlihat melalui gambar berikut :

Gambar 2.5
Net Ekspor dan Impor (ADHB) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021



Berdasarkan diagram tersebut di atas, terlihat bahwa secara total, dalam kurun waktu 2016 – 2020 nilai ekspor barang dan jasa di Kabupaten Mojokerto menunjukkan peningkatan setiap tahun. Pada Tahun 2016 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 26.275.390,1 juta rupiah meningkat menjadi 30.803.514,6 juta rupiah pada Tahun 2017. Selanjutnya, kondisi terus meningkat di Tahun 2018 sebesar 35. 543.262,1 juta rupiah, 37.538.277,8 juta rupiah di Tahun 2019. Nilai ekspor barang dan jasa mengalami sedikit penurunan di Tahun 2020 yaitu sebesar 37.348.592,6 akibat pengaruh pandemi Covid-19 dengan adanya berbagai kebijakan pembatasan wilayah baik domestik maupun mancanegara. Namun, nilai ekspor di Tahun 2020 dapat dikatakan masih cukup baik karena masih lebih tinggi dibandingkan Tahun 2018.

Di sisi lain, secara total nilai impor barang dan jasa di Kabupaten Mojokerto juga menunjukkan peningkatan tiap tahunnya dalam kurun waktu 2016 -2019. Pada Tahun 2016 nilai impor barang dan jasa ADHB mencapai 20.091.674,0 juta rupiah, kemudian meningkat di Tahun 2017 menjadi 23.628.213,1 juta rupiah; 28.151.692,2 juta rupiah pada Tahun 2018, Tahun 2019 menjadi 29.934.907,8 juta rupiah. Namun sebaliknya nilai impor barang dan jasa di Tahun 2020 mengalami penurunan drastis karena pandemi Covid 19 yang hanya mencapai 29.122.248,7 juta rupiah.

Gambaran kinerja ekspor dan impor tersebut menunjukkan masih perlu adanya intervensi kebijakan terutama dalam rangka pemulihan ekonomi di masa Pandemi ataupun pasca pandemi covid 19 nantinya, sehingga kinerja ekspor Kabupaten Mojokerto dapat terus meningkat dan di sisi lain impor dapat ditekan atau dikendalikan.

Salah satu sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi 5 terbesar terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan(PPH)	%	84,67	85,57	88,5	97,27	94,7
Penanganan Daerah Rawan Pangan	desa	2	4	5	2	5
Ketersediaan pangan utama	ton	208.562	209.264	213.449	335.944	82.553,68
Ketersediaan energi dan protein per kapita	kkal/kap/hari	protein 104,79, energi 4165	protein 105,56, energi 4247	protein 106,81 energi 4432	protein 109,77, energi 4682	protein 110,46, energi 4750
- beras	kkal/kap/hr	1489	1566	1667	1713	1245



Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
- jagung	kkal/kap/ hari	859	870	879	922	950
- gula pasir	kkal/kap/ hari	455	458	480	493	504
- telur	kkal/kap/ hari	1	1	1	1	1
- daging	kkal/kap/ hari	17	17	18	19	17
- ikan	kkal/kap/ hari	1	1	1	1	1
Perikanan Tangkap	Ton	165,29	163,36	164,45	166,30	156
Perikanan Budidaya	Ton	402,97	422,8	608,46	1.029,81	1217,78
Budidaya	ton	402,97	422,8	608,46	1.029,81	1217,78
Benih di BBI	ekor	2.121.000	2.586.000	2.658.000	2747000	3.003.070
Tangkap	ton	165,29	163,36	164,45	166,30	156
Olahan Hasil Perikanan	ton	838.998	840.800	911.700	950.677	954.013
Cakupan Bina Poklhasar	%	100	100	100	100	100
Cakupan bina kelompok nelayan	%	100	100	100	100	100
Jumlah konsumsi ikan (kg/per kapita/ tahun)	kg/per kapita/ tahun	32,65	33,23	34,93	36,01	40,22

Berdasarkan Tabel 2.22 menunjukkan bahwa skor PPH mengalami peningkatan dari 85,57 Tahun 2017 dan 97,27 pada tahun 2019, upaya peningkatan Skor PPH diantaranya dianggarkannya untuk kegiatan diversifikasi pangan, pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L), serta sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat untuk konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA). Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.

Pada Sektor Perikanan juga mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2016-2020 pada produksi perikanan budidaya yaitu sebesar 402,97 ton pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 1217,78 ton pada tahun 2020. Sedangkan perikanan tangkap pada tahun 2016 sebesar 165.29ton dan menurun menjadi 156 ton pada tahun 2020. Namun secara keseluruhan produksi perikanan di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan. Upaya peningkatan produksi perikanan di Kabupaten Mojokerto diantaranya dengan penyediaan benih berkualitas yang diproduksi di Balai Benih Ikan (BBI) Puri yang produksinya juga selalu naik setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 sebanyak 2.121.000 ekor dan Tahun 2020 sebanyak 3.003.070 ekor. Selain itu juga dilakukan pembinaan pada kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan kelompok pengolah dan pemasar (poklhasar). Peningkatan juga terjadi pada Angka Konsumsi Ikan (AKI) yaitu tahun 2016 sebesar 32.45 Kg/Kap/Thn dan tahun 2020 sebesar 40,22 Kg/Kap/Thn.

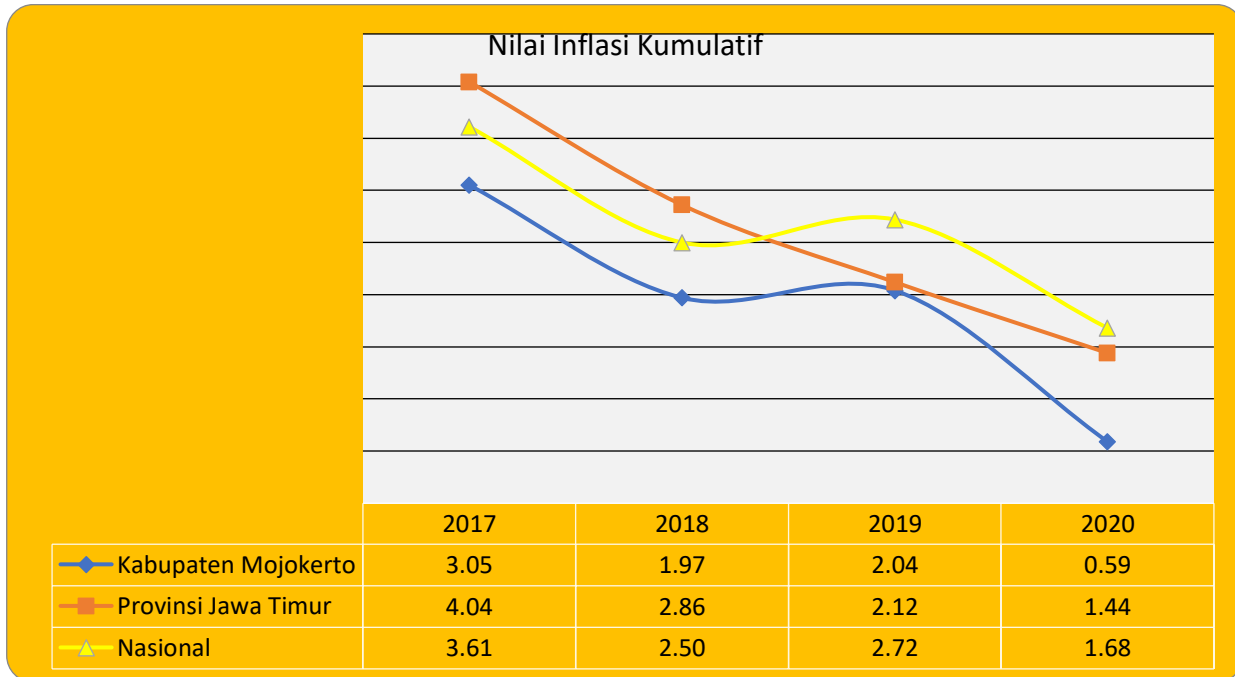


2.2.1.2 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari berbagai komoditi yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat.

Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung dari hasil pencatatan pergerakan harga ditingkat konsumen untuk beberapa komoditi secara periodik (mingguan). Kabupaten Mojokerto bukan menjadi Kabupaten/Kota sampel nasional penghitung IHK, sehingga tidak mempunyai angka IHK sendiri. Akan tetapi, Pemerintah Kabupaten Mojokerto sejak Tahun 2017 dan 2018 berinisiatif untuk melakukan survey IHK tersendiri, agar dapat mengetahui kondisi fluktuasi perkembangan harga konsumen di wilayah Kabupaten Mojokerto. Hasil penghitungan angka Inflasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020 terlihat sebagaimana pada gambar di bawah ini

Gambar 2.6
Inflasi Kumulatif Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020



Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan gambar 2.4 tersebut diatas terlihat bahwa Kumulatif Inflasi atau Laju Inflasi, merupakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) secara kumulatif di tahun yang bersangkutan, Laju inflasi atau inflasi kumulatif 2018 di Kabupaten Mojokerto sebesar 1.97 persen. Angka ini



lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Secara umum Inflasi Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2018 tidak ada yang terlalu tinggi dan terlalu rendah (deflasi) atau bisa dikatakan relative stabil, hal ini juga sebagai potret bahwa harga-harga di Kabupaten Mojokerto selama Tahun 2018 tidak ada yang terlalu bergejolak.

2.2.1.3 Indeks Daya Beli

Indeks Daya beli/ indeks Pengeluaran adalah indeks yang mengukur standar hidup layak dengan menghitung kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan. Indeks daya beli juga merupakan salah satu indeks pembentuk indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut adalah table indeks daya beli Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2020 :

Tabel 2.23
Table Indeks Daya Beli Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Tahun	Pengeluaran Per Kapita	Indeks daya beli
2016	11798	0.752
2017	12240	0.763
2018	12454	0.768
2019	12860	0.778
2020	12779	0.776

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai indeks daya beli pada tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 akibat adanya pandemic covid -19 nilainya turun menjadi 0.776 . Sesuai dengan arahan bapak presiden bahwa pemulihan ekonomi terus diupayakan maka, Pemerintah Daerah Perlu menyikapi hal ini dengan serius yaitu upaya upaya peningkatan daya beli masyarakat melalau program dan kegiatan .**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

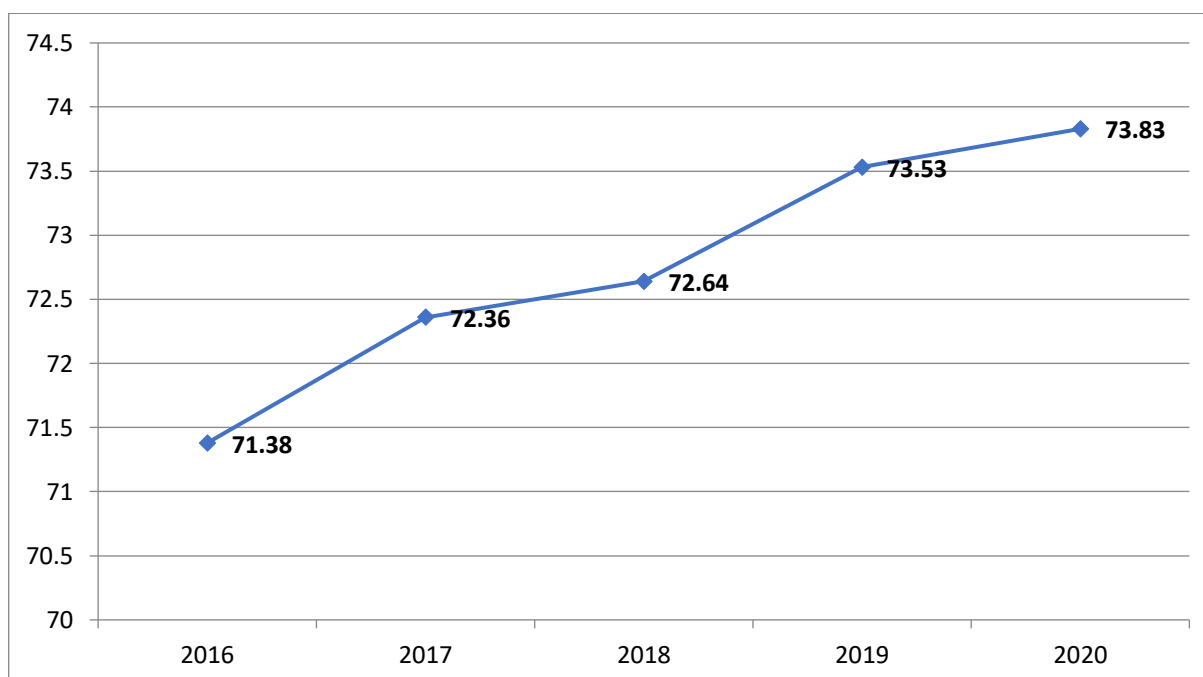
Secara umum, gambaran komprehensif mengenai keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia pada suatu wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota. Untuk memastikan relevansi capaian indeks pembangunan manusia, UNDP merubah metodologi penghitungan dan komponen indeks pembangunan manusia. Perubahan dilakukan dengan maksud agar dapat membuat suatu indeks



komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia. Perubahan terletak pada indikator yang digunakan pada dimensi pengetahuan/pendidikan dari angka melek huruf yang dianggap tidak relevan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia berganti menjadi harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah dengan acuan 15 tahun berganti menjadi rata-rata lama sekolah dengan acuan 25 tahun. Selanjutnya pada metode IPM yang lama menggunakan indikator pengeluaran per kapita dengan 27 komoditas berganti menjadi 96 komoditas. Selain itu, UNDP melakukan perubahan cara penghitungan indeks. Dari cara penghitungan yang lama menggunakan rata-rata aritmatik berganti menjadi rata-rata geometrik.

Berikut perkembangan angka IPM Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan metode penghitungan yang baru sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini :

Gambar 2.7
Perkembangan IPM Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021 2021

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto meningkat tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan pada dimensi pengetahuan /pendidikan, kesehatan dan dimensi pengeluaran/pengeluaran per kapita yang disesuaikan cukup baik. Selanjutnya capaian IPM Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebesar 73,83 termasuk kategori tinggi. Capaian IPM Kabupaten Mojokerto tersebut menduduki peringkat 12 dari 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dan termasuk peringkat ke-4 dari 29 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur setelah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik dan Kabupaten Magetan



Tabel 2.24
IPM Kabupaten Mojokerto dan Indeks Komposit Pembentuk IPM
Menurut Gender Tahun 2016 - 2020

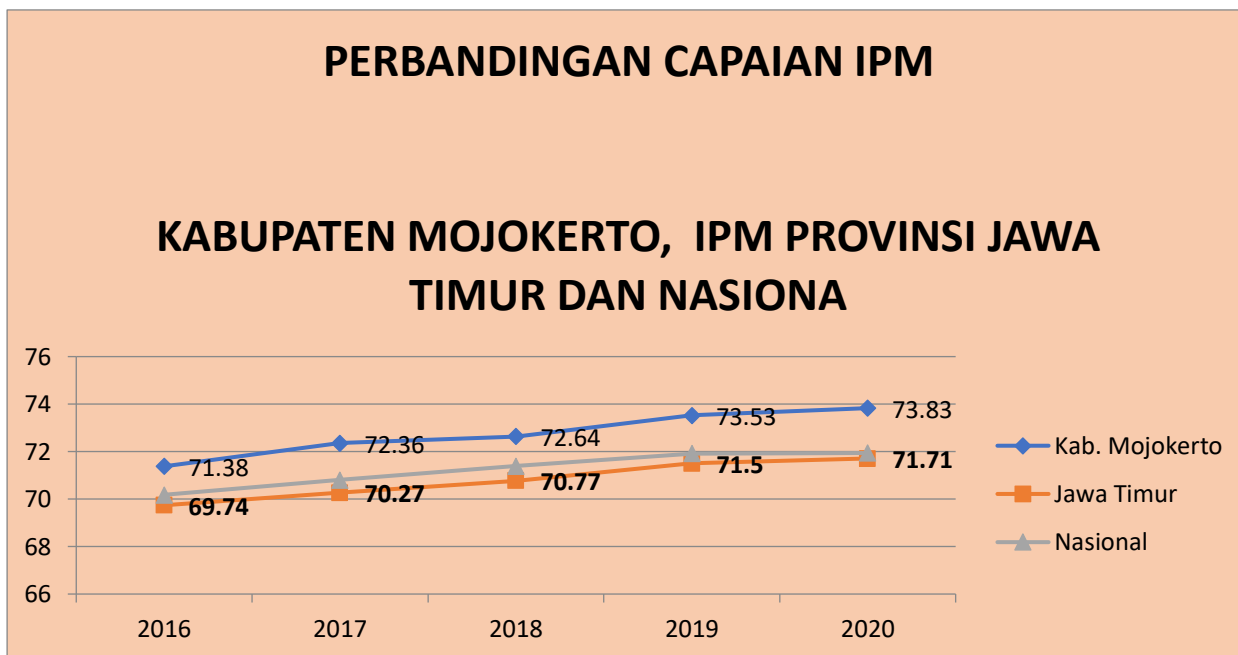
Kabupaten Mojokerto	2016	2017	2018	2019	2020
IPM	71,38	72,36	72,64	73,53	73,83
IPM Laki-laki	-	77,20	77,68	78,31	-
IPM Perempuan	-	69,78	70,03	70,99	-
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,03	72,10	72,24	72,43	72,53
AHH Laki-Laki	-	70,11	70,25	70,46	-
AHH Perempuan	-	73,97	74,12	74,30	-
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,44	12,52	12,53	12,61	12,88
HLS Laki-Laki	-	12,93	12,95	12,96	-
HLS Perempuan	-	12,52	12,53	12,61	-
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,76	8,15	8,18	8,49	8,51
RLS laki-Laki	-	8,91	8,92	9,11	-
RLS Perempuan	-	7,52	7,56	7,89	-
Pengeluaran per kapita (PPP)	Rp. 11.798.000	Rp. 12.240.000	Rp. 12.454.000	Rp. 12.860.000	Rp. 12.779.000

Sumber Data: BPS Kabupaten Mojokerto

Selanjutnya, adapun perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur dan Nasional kurun waktu tahun 2016 – 2020 sebagai berikut :



Gambar 2.8
Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Mojokerto,
IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional Tahun 2016 – 2020



Sumber :BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mojokerto selama 5 tahun terakhir lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

2.2.1.4 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan metodologi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru juga merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. IPG digunakan untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia yang sudah memasukkan aspek gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG.



Tabel 2.25
Berikut data capaian IPG Kabupaten Mojokerto tahun 2016 – 2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Mojokerto	-	90.39	90.15	90,65	91,10
Jawa Timur	90.72	90.76	90.77	90,91	91,07
Indonesia	90.82	90.96	90.99	91,07	91,06

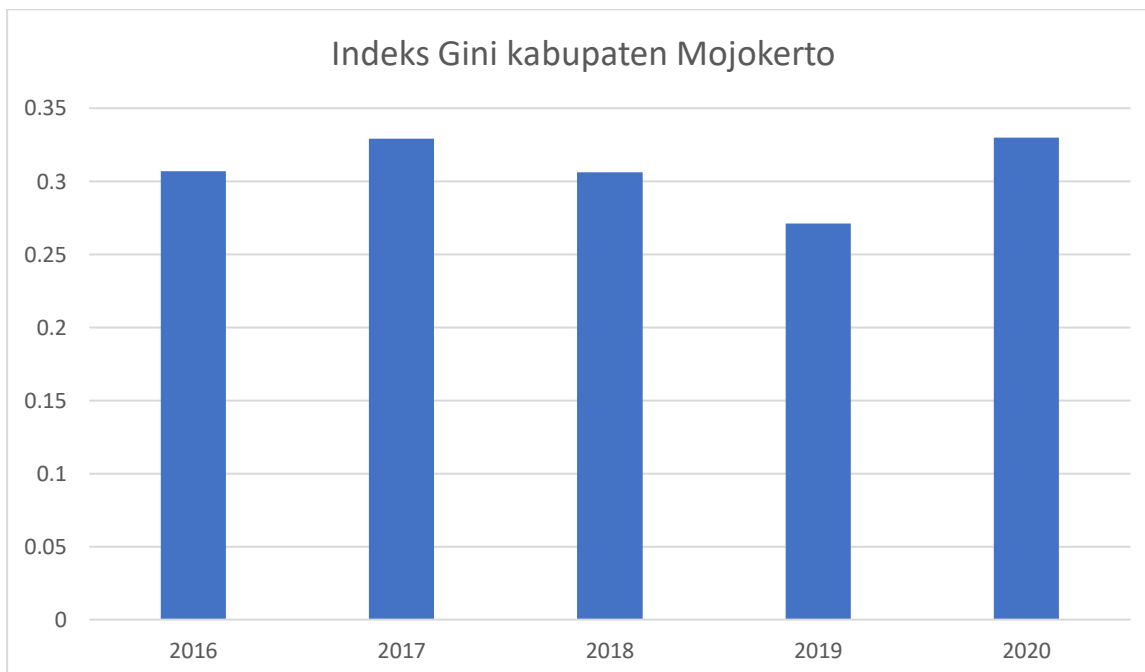
Sumber :Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2021

2.2.1.5 Indeks Gini

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Adapun indeks gini kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Gambar 2.9
Indeks Gini Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber :BPS Kaupaten Mojokerto Tahun 2021



2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas focus Kesejahteraan social dilakukan terhadap indikator angka melek huruf dan angka rata- rata lama sekolah. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari indikator kinerja pada focus kesejahteraan sosial, sebagai berikut:

2.2.2.1 Angka Melek Huruf

Angka melek huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin. AMH digunakan sebagai indicator karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis angka melek huruf disajikan dalam table berikut ini:

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Mojokerto Tahun 2016– 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
15-19	-	-	10	100	100
20-29	-	-	100	100	100
30-39	-	-	99,81	100	100
40-49	-	-	99,31	99,83	100
50-59	-	-	95,52	95,52	100
60-69	-	-	85,44	84,51	100
70+	-	-	70,18	66,45	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto

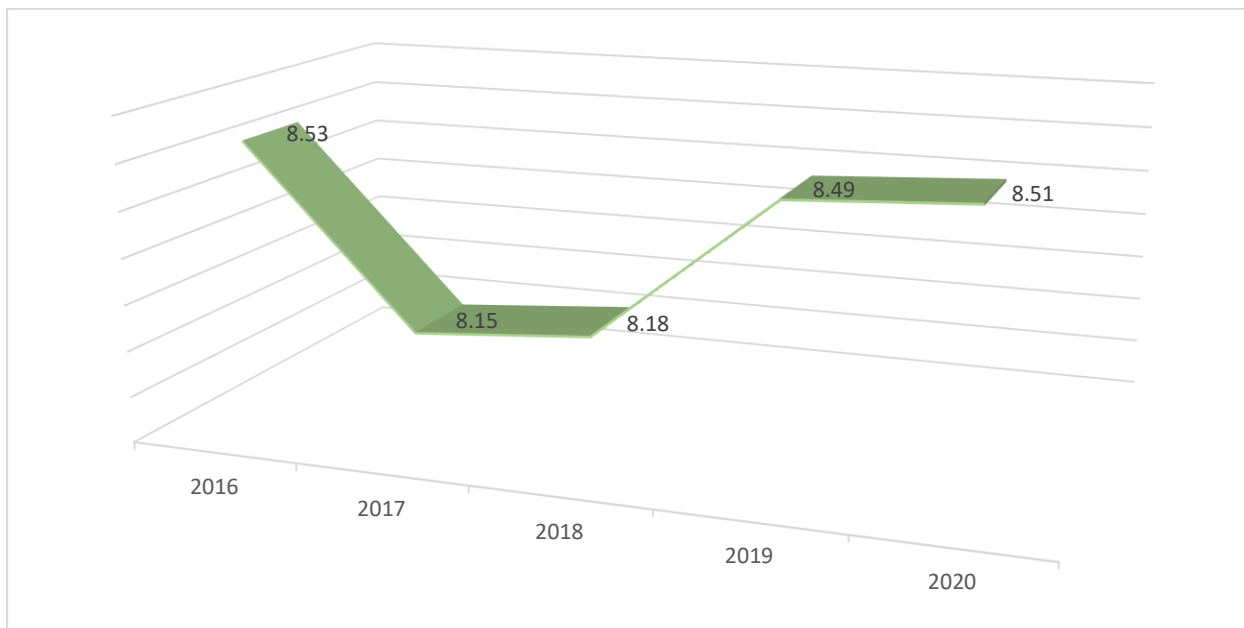
Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto berbanding lurus dengan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis. Sehingga angka melek huruf dari tahun ke tahun di Kabupaten Mojokerto terus meningkat. Tingginya AMH di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa tingkat buta huruf sangat rendah, dimana pendidikan dasar telah dilaksanakan secara efektif yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan membaca dan menulis yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari – hari.

2.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Dalam analisis ini indikator RLS dihitung dari variable pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto disajikan pada table berikut :



Gambar 2.10
Rata – Rata Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Gambar 2.10 di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan pada kurun waktu lima tahun terakhir. Dari tahun 2016 – 2020 rata – rata lama sekolah di Kabupaten Mojokerto adalah 8,51 tahun atau rata – rata pendidikan terakhir penduduk Kabupaten Mojokerto ialah kelas VIII – IX pada Sekolah Menengah Pertama (SMP). Angka rata–rata lama sekolah dapat menggambarkan kualitas penduduk dalam hal mengemban pendidikan. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan penduduk Kabupaten Mojokerto.

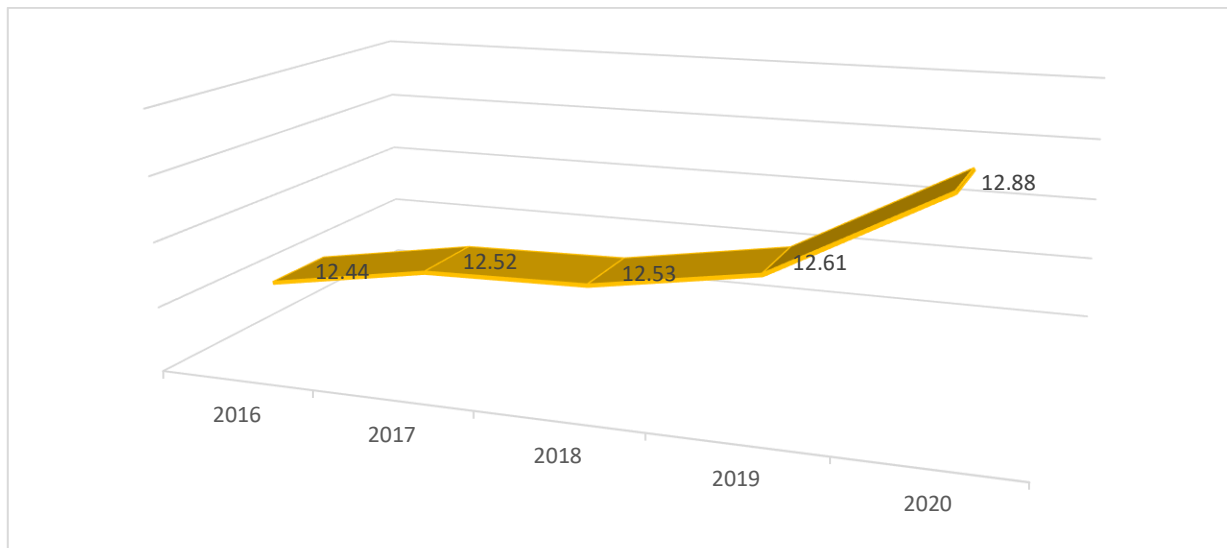
2.2.2.3 Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dariunsurpendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun keatas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 adalah sebesar 12.88 tahun. Artinya bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun keatas)



di masa mendatang adalah selama 12.88 tahun atau setara dengan mengenyam pendidikan sampai dengan lulus SLTA (tepatnya kuliah semester II).

Gambar 2.11
Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Mojokerto

Dari Tabel diatas disimpulkan bahwa Harapan Lama Sekolah Setiap Tahun meningkat. Mulai dari tahun 2016 sebesar 12.44 sampai tahun 2020 menjadi 12.88

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Analisis kinerja atas seni budaya dilakukan terhadap indikator – indicator jumlah group kesenian, jumlah klub olahraga dan jumlah gedung olahraga. Berikut ini disajikan beberapa indikator kinerja pada focus seni budaya dan olahraga :

Tabel 2.27
Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah group kesenian	479	498	515	540	365
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah klub olahraga	99	103	103	103	130
4	Jumlah gedung olahraga	2	2	2	2	2

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto 2021



Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah group kesenian yang mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 namun pada tahun 2020 jumlah group kesenian menurun. Sedangkan untuk jumlah klub olahraga mengalami peningkatan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto menyelenggarakan berbagai festival seni dan budaya untuk menampung apresiasi masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pelestarian budaya setempat. Selain pada bidang kesenian, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mendukung dalam pelaksanaan kegiatan olahraga. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya 99 klub olahraga yang pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 130 klub olahraga pada tahun 2020 dan dua bangunan gedung olahraga sebagai bentuk fasilitasi serta pelayanan pada bidang olahraga.

Tabel 2.28
Capaian Kinerja Olahraga dan Budaya Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk	buah	201	201	194	276	276
Jumlah Gedung Olahraga per 10.000 Penduduk	buah	2	2	2	2	2
Kesenian Tradisional	jenis	20	498	515	540	365
Cagar Budaya	unit	53	58	58	46	46
Permuseuman	buah	-	-	-	-	--
Kunjungan wisata	orang	1.346.134	1.779.292	1.927.504	1.949.519	832.343
Lama kunjungan Wisata	hari	-	1,25	1,5	1,4	1.4
PAD sektor pariwisata	rupiah	7.311.150.464,-	8.924.401.736,-	13.192.225.156	11.080.620.420	5.300.739.000
Jumlah Pemuda Prestasi	orang	9	-	-	-	1
Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif	organisasi	12	101	103	11	12
Jumlah Atlit Prestasi	orang	9	31	121	58	10
Jumlah Cabor Prestasi	cabor	3	25	5	12	4
Penyelenggaraan even seni dan budaya	Kali	12	9	20	2	4



Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	42	53	58	46	46
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	buah	-	-	-	-	-
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan public atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang public maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikut merupakan indikator variable aspek pelayanan umum:

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga Negara. Sedangkan urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

2.3.1.1 Pendidikan

2.3.1.1.1 Angka Partisipasi Murni (APM)

Pemerataan kesempatan memperoleh akses pendidikan, peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan serta peningkatan peranan kelembagaan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan. Indikator ini mengukur proporsi anak yang bersekolah pada umur tertentu pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umur tersebut. APM selalu lebih rendah dibandingkan APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama. Nilai APM yang mendekati nilai 100 persen menunjukkan hampir semua penduduk bersekolah dan tepat waktu sesuai dengan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Hal ini dapat dilihat pada indikator berikut :



Tabel 2.29
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM SD/ MI	96,09	99,30	99,3	99,49	97,78
2.	APM SMP/MTS	97,85	84,35	84,3	83,56	83,84

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa APM tahun 2016 jenjang SD/MI dan SMP/MTs mengalami penurunan dari APM tahun 2016, Pada tahun 2020, angka partisipasi murni baik di tingkat SD/MI mengalami penurunan dan SLTP/MTs mengalami peningkatan dari tahun 2020.

2.3.1.1.2 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.30
Angka PartisipasiKasar (APK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	PAUD	98,85	104,74	95,1	99,19	99,25
2.	APK SD/MI	105,91	109,58	109,6	108,48	102,07
3.	APK SMP/MTs	119,76	104,68	104,7	103,70	94,15

Sumber: Dinas Pendidikan Tahun 2021

Berdasarkan tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka partisipasi kasar untuk jenjang PAUD dari tahun ke tahun mengalami flutuaktif, namun pada tahun 2018 angka partisipasi kasar mengalami penurunan sebesar 9,61%. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs angka partisipasi kasar terus mengalami peningkatan sampai tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Sedangkan untuk jenjang SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Perlu dilakukan pencermatan



bahwasanya untuk penghitungan angka partisipasi kasar berdasarkan jumlah siswa seluruhnya disbanding jumlah siswa per kelompok usia jenjang pendidikan. Dalam hal angka pasrtisi pasi kasar menurun, bisa disebabkan karena ada siswa/pelajar pada jenjang pendidikan bersekolah di wilayah selain kabupaten atau terdapat siswa/pelajar yang bersekolah di wilayah Kabupaten Mojokerto.

2.3.1.1.3 Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah gedung sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan gedung sekolah yang dapat menampung jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal ketersediaan sekolah. Selanjutnya jumlah sekolah terbanyak untuk jenjang SMP/MTs terdapat di Kecamatan Mojosari yaitu sebanyak 18 gedung sekolah dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Trawas.

Tabel 2.31
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016- 2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah guru	8.083	7.911	7.481	7.082	6.404
1.2	Jumlah murid	99.913	98.112	97.912	92.902	97.896
1.3	Rasio	1:12	1:13	1:14	1:15	1:15
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah guru	4.626	4.343	4.343	4.333	3196
2.2	Jumlah murid	50.883	49.759	49.759	49.724	47.192
2.3	Rasio	1:11	1:11	1:11	1:11	1:14

Sumber: Data Potensi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Pada tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Jumlah Guru baik SD/Mi maupun SMP/MTS cenderung mengalami penurunan sehingga Rasio perbandingan semakin membesar dari tahun ke tahun.

Perlu diketahui bahwa Batas ambang bawah Rasio yang disyaratkan oleh kemendikbud adalah 1:20, meskipun Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto saat ini masih dalam ambang batas, namun perlu adanya program/kegiatan yang perlu menyabilkan rasio guru dan murid di Kabupaten Mojokerto.



Tabel 2.32
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Mojokerto Menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Jatirejo	306	4268	1:14	164	2175	1:13
2	Gondang	246	3527	1:14	138	2177	1:16
3	Pacet	398	5178	1:13	179	2820	1:16
4	Trawas	158	3513	1:22	76	1039	1:14
5	Ngoro	428	6806	1:17	222	2957	1:13
6	Pungging	363	6165	1:17	291	4729	1:16
7	Kutorejo	412	5632	1:14	218	3121	1:14
8	Mojosari	515	8713	1:17	234	3237	1:14
9	Bangsalsari	342	5088	1:15	180	2668	1:15
10	Mojoanyar	266	3928	1:14	119	1669	1:15
11	Dlanggu	331	4690	1:14	130	1978	1:15
12	Puri	445	6928	1:15	164	2221	1:13
13	Trowulan	375	6735	1:18	202	2641	1:13
14	Sooko	362	6461	1:18	293	4275	1:14
15	Gedeg	317	4550	1:14	133	2089	1:16
16	Kemlagi	348	5150	1:15	129	2519	1:19
17	Jetis	461	7533	1:16	149	2713	1:18
18	Dawarblandong	331	4031	1:12	175	2164	1:12

Sumber: Dinsa Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2013 pasal 2, ayat (2) poin 6 “Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran”. Sedangkan untuk jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% (daerah umum) dan sebanyak 40% (daerah khusus). Pada Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Kecamatan Trawas memiliki jumlah guru jenjang SD/MI paling sedikit yaitu sebanyak 201 orang, sedangkan jumlah guru paling banyak terdapat di Kecamatan Mojosari sebanyak 620 orang. Hal ini berkaitan dengan kondisi Kecamatan Mojosari yang secara de facto merupakan ibu kota Kabupaten Mojokerto. Jumlah siswa terbanyak untuk jenjang SD/MI juga terdapat di Kecamatan Mojosari. Sedangkan, jumlah guru terbanyak untuk jenjang SMP/ MTs terdapat di Kecamatan Pacet yaitu sebanyak 540 orang. Kemudian jumlah murid terbanyak untuk jenjang SMP/MTs terdapat di Kecamatan Sooko.



Tabel 2.33

Jumlah Guru yang Sudah Bersertifikas tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru PAUD	257	251	245	237	231
2	Guru SD	2699	2641	2579	2422	2217
3	Guru SMP	1108	1091	1065	1037	989

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pendidikan dasar						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	98,85	99	99,5	99,19	89.49
Angka Partisipasi Kasar						
SD /MI		105,91	109,58	109,6	108,48	94.9
SMP/MTS		119,76	104,68	104,7	103,7	88.69
Angka Pendidikan yang ditamatkan	siswa					
SD/MI ke SMP	siswa	100,71	97,85	101,63	93,56	96.24
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	siswa	93,55	94,62	96	112,44	119.78
Angka PartisipasiMurni						
SD/MI/Paket A		96,09	99,3	99,3	99,49	88.14
SMP/MTs/Paket B		97,85	84,35	84,3	83,55	88.22
Angka PutusSekolah						
SD/MI/Paket A		0,004	0,005	0,03	0,01	0.02
SMP/MTs/Paket B		0,02	0,046	0,48	0,16	0.2
Angka Kelulusan						
SD/MI/Paket A		100	100	100	100	100
SMP/MTs/Paket B		100	100	100	100	100
Angka Melanjutkan						
SD/MI/ke SMP		100,71	97,85	101,63	93,56	96.24
SMP/MTs ke SMA /SMK		93,55	94,62	96	112,44	119.78
Fasilitas Pendidikan						
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik(Ruang Kelas)	unit	90,1	92,2	93,11	91,49	90.3
Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik (Ruang Kelas)	unit	87,2	88,17	88,9	89,47	87.4



Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah						
SD/MI	rasio	1/164	1/165	1/108	1/148	1/170
SMP/MTs	rasio	1/241	1/255	1/151	1/224	1/249
Rasio guru terhadap murid						
SD/MI	rasio	1/11	1/15	1/17	1/15	1/12
SMP/MTs	rasio	1/15	1/16	1/17	1/16	1/15
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV						
PAUD	%	80,5	81	81,5	81,5	81,5
SD/MI	%	94,92	92,44	90	95	57,3
SMP/MTs	%	92,1	95,87	87	96,7	65,9

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

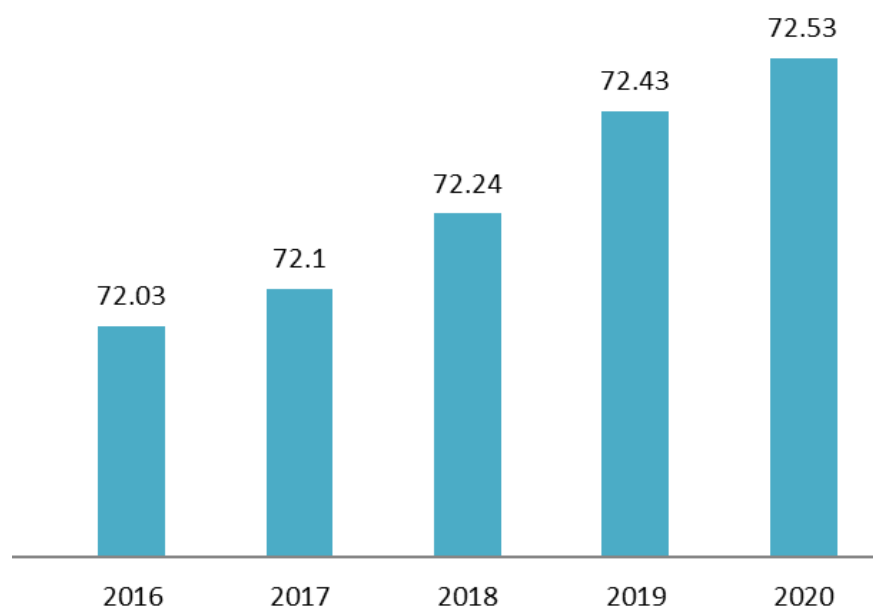
2.3.1.2 Urusan Kesehatan

2.3.1.2.1 Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup juga merupakan salah satu indikator derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, dengan adanya peningkatan Angka Harapan Hidup (UHH) saat lahir dapat diindikasikan adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan.

Pada tahun 2019, angka harapan hidup Kabupaten Mojokerto sebesar 72,43 tahun. Sedangkan pada tahun 2020, meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 72,53 tahun. Hal ini dapat diindikasikan bahwa adanya keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di Kabupaten Mojokerto.

Gambar 2.12
Harapan Hidup di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

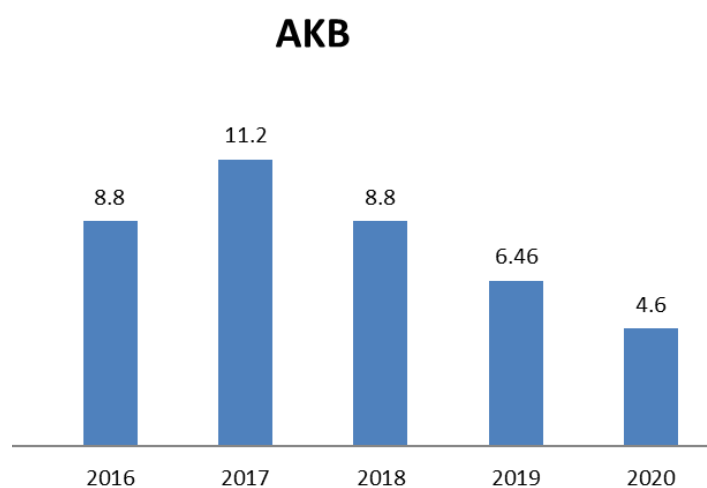


2.3.1.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup

Kematian bayi adalah kematian terjadi antara waktu bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Penyebab kematian bayi yang dapat diidentifikasi antara lain adalah bayi berat badan lahir rendah (BBLR), Asfiksia (sesak nafas setelah bayi baru lahir), infeksi dan kelainan kongenital. Untuk menurunkannya dilakukan dengan intervensi di 1000 Hari Pertama Kelahiran, pemberian tablet Fe pada remaja putri, peningkatan sosialisasi tentang kesehatan reproduksi.

Untuk upaya penurunan kematian bayi, tidak dapat dipisahkan dari upaya penurunan kematian ibu melahirkan, karena merupakan satu kesatuan. Upaya yang dilaksanakan Dinas Kesehatan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu selain dengan kampanye pemberian tablet Fe, juga melaksanakan Persalinan empat tangan, pelaksanaan audit maternal perinatal, melaksanakan rapat koordinasi dengan penolong persalinan (bidang, dokter spesialis kandungan), meningkatkan program inovasi seperti pendampingan bumil risti, kelas Bapak dan meningkatkan kunjungan rumah ibu hamil. Serta peningkatan akses ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan dengan dokter spesialis kandungan untuk deteksi dini resiko tinggi ibu hamil. Selain penguatan ke dalam Dinas Kesehatan, perlu dilakukan penguatan pada kelembagaan Satgas Penakib (Satuan Tugas Penurunan Kematian Ibu dan Bayi), pengembangan Rumah Tunggu Kelahiran yang dibiayai oleh dana Jampersal (DAK), penguatan jejaring sistem rujukan maternal dan neonatal dari Puskesmas ke Rumah Sakit serta penguatan keterlibatan masyarakat pada program Kesehatan Ibu dan Anak melalui P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Jumlah angka kematian bayi di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:

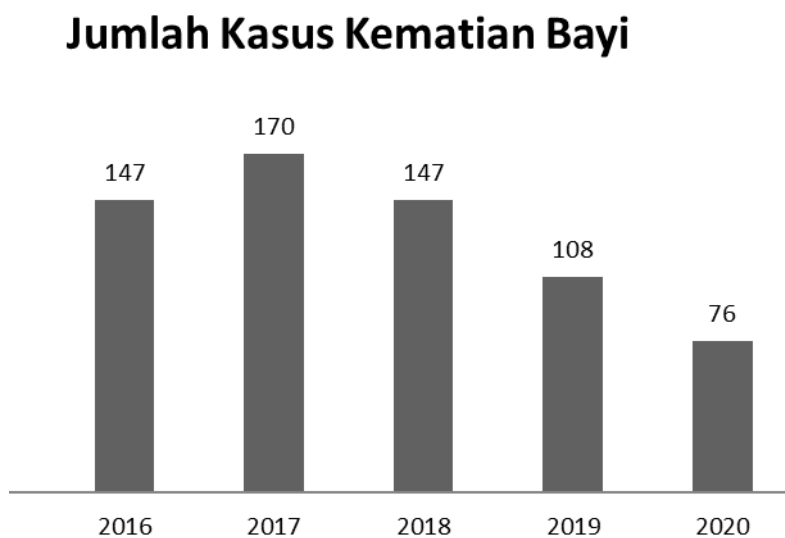
Gambar 2.13
Angka Kematian Bayi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Gambar 2.14
Jumlah Kasus Kematian Bayi di kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

2.3.1.2.3 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Angka kematian ibu merupakan banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh, dll. Jumlah kasus kematian ibu (AKI) di Kabupaten Mojokerto mengalami kenaikan akan tetapi masih di bawah angka kematian nasional. Pada tahun 2019 kasus kematian ibu sebanyak 15 kasus (89,7) dan pada tahun 2020 sebanyak 19 kasus (114,07). Hal ini dikarenakan telah banyak upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan jaringannya untuk menurunkan angka kematian ibu. Diantaranya dengan melakukan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, yaitu intervensi yang dilakukan mulai dari Ibu dinyatakan hamil hingga anak usia batita. Selain intervensi di 1.000 HPK, juga dilakukan upaya penurunan resiko-resiko yang dihadapi ibu hamil dengan merujuk pada kasus yang ada, seperti pendarahan, Pre Eklamsia, Infeksi maupun penyebab kematian akibat kelainan darah seperti thalassemia



Gambar 2.15
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020



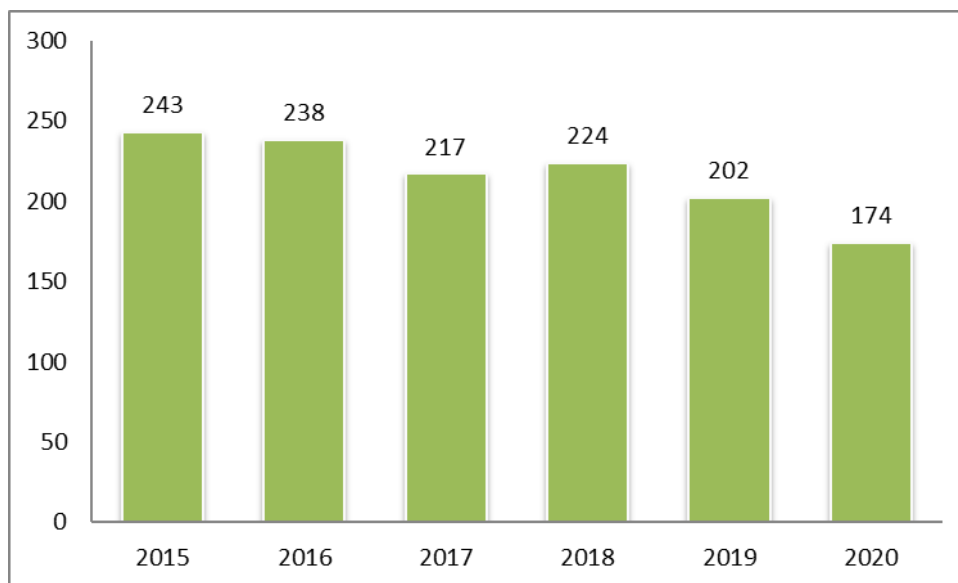
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.1.2.4 Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrisi yang cukup di dalam tubuh. Di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2019 : 186 Kasus tahun 2020 : 174 kasus semua sudah tertangani.



Gambar 2.16
Jumlah Gizi Buruk di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

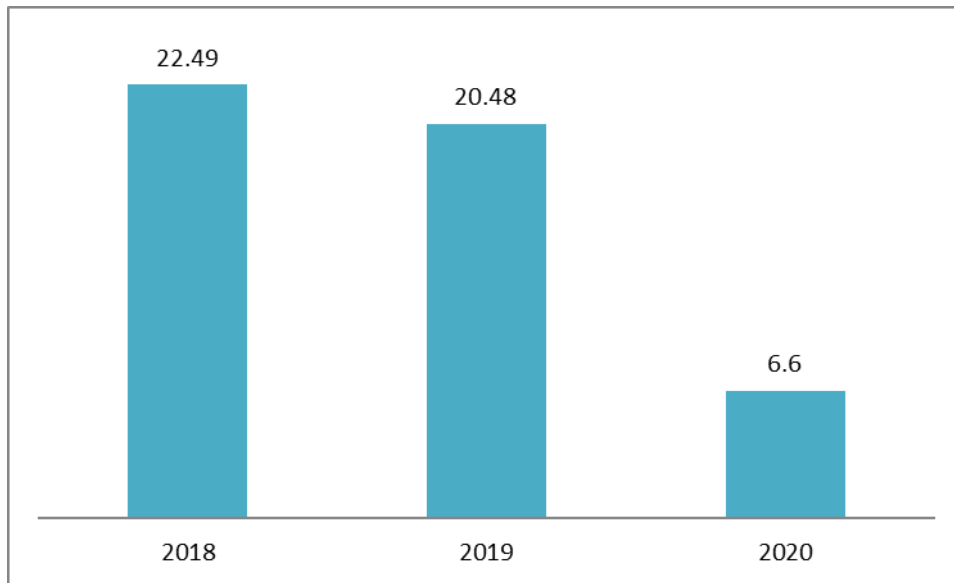
Selain penurunan gizi buruk, Prevalensi stunting kabupaten mojokerto juga cukup tinggi. Pada tahun 2020, Kabupaten Mojokerto bersama 99 Kabupaten Kota lainnya Tahun 2021 merupakan lokasi fokus stunting berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas nomor Kep 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021.

Prevalensi Stunting Kabupaten Mojokerto berdasarkan bulan timbang (bulan agustus) pada tahun 2019 ada 20,48% sedangkan tahun 2020 ada 6,66% Adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto yaitu:

1. Bumil KEK yang mendapat PMT pemulihan
2. Ibu Hamil mendapat IFA (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan
3. Balita kurus yang mendapatkan PMT
4. Anak 6-59 bulan yang memperoleh Vit A
5. Bayi 0-11 bulan telah diimunisasi dasar secara lengkap
6. Balita diare yang memperoleh suplementasi zinc
7. Remaja putri mendapatkan TTD
8. Kelas ibu hamil (ibu mengikuti konseling gizi dan kesehatan)
9. Keluarga yang mengikuti Bina Keluarga Balita
10. Rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak
11. Rumah tangga yang menggunakan sanitasi layak
12. Orang tua yang mengikuti kelas parenting
13. desa menerapkan KRPL



Gambar 2.17
Prevalensi Stunting di Kabupaten Mojokerto Tahun 2018– 2020



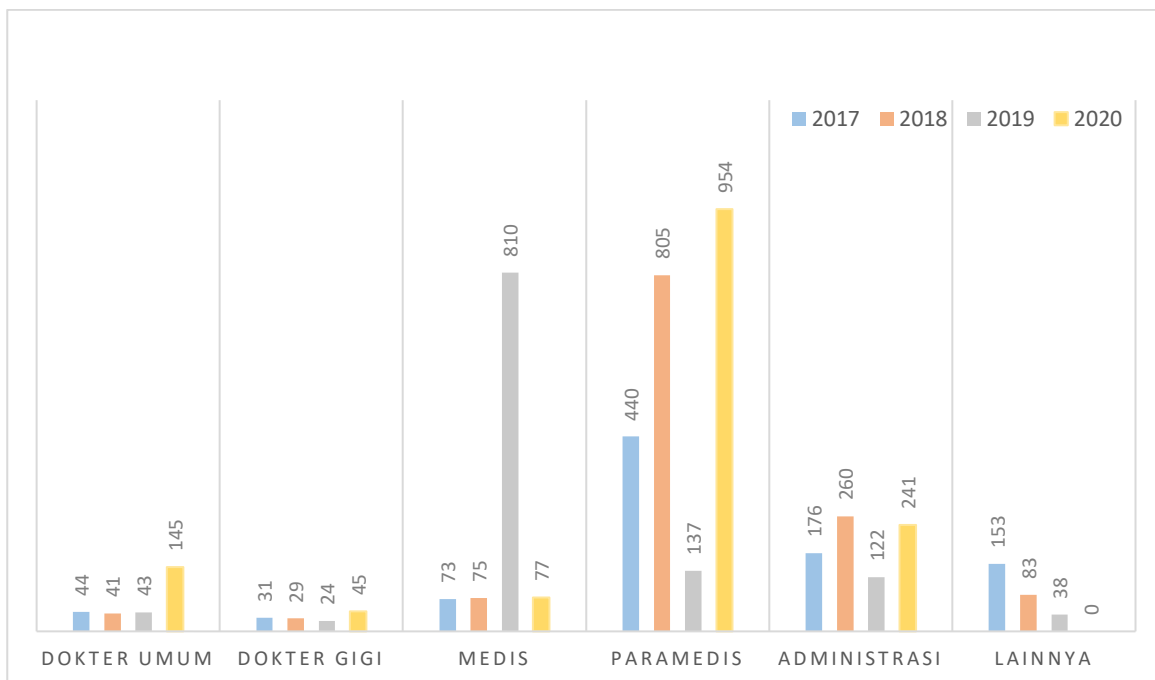
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.1.2.5 Jumlah Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan

Tenaga medis adalah tenaga yang terdiri dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang terdiri dari medis, paramedis, administrasi, dan lainnya di Kabupaten Mojokerto. Jumlah tenaga medis maupun tenaga Kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Jumlah tenaga medis dan tenaga Kesehatan di Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:



Gambar 2.18
Jumlah Dokter Umum, Dokter Gigi, Medis, Paramedis dan lainnya di Kabupaten Mojokerto



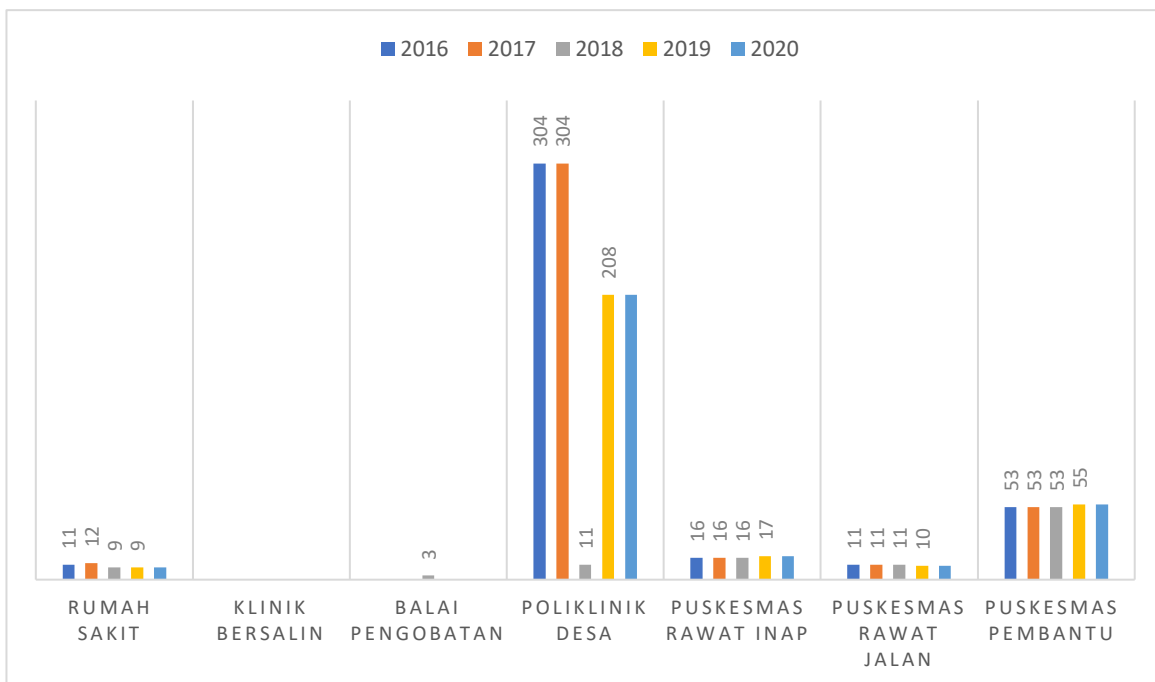
Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021 2021

Jumlah dokter umum di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan cukup dratis dari tahun 2019 ke tahun 2020 yaitu dari 43 menjadi 145. Sedangkan jumlah dokter gigi di Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya fluktuatif, pada tahun 2017 yaitu 31, tahun 2018 yaitu 29, tahun 2018 yaitu 24 dan pada tahun 2018 sejumlah 45 dokter gigi. Selain itu untuk jumlah tenaga medis pada tahun 2019 cukup tinggi yaitu sejumlah 810 medis lalu menurun pada tahun 2020 sejumlah 77 orang. Selanjutnya jumlah paramedis mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 137 orang dan meningkat Kembali pada tahun 2020 yaitu 954 orang.

Selain tenaga paramedis yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Mojokerto, fasilitas kesehatan juga berpengaruh terhadap kinerja pelayanan. Fasilitas-fasilitas kesehatan menjadi salah satu factor pendukung untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.



Gambar 2.19
Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto Tahun 2021

Sepanjang Tahun 2016-2020 Jumlah fasilitas Kesehatan di Kabupaten Mojokerto cenderung tetap, hanya untuk poliklinik desa yang cenderung turun pada tahun 2018 , kemudian naik Kembali untuk tahun 2019 dan tetap pada tahun 2020. Tentu Jumlah Fasilitas Kesehatan Mojokerto masih cenderung kurang dibandingkan dengan jumlah pasien yang terus meningkat. Diperlukan penambahan fasilitas kesehatan baik dalam skala kecil maupun besar.

2.3.1.2.6 Angka Kesakitan Akibat Penyakit Tidak Menular

Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit yang bukan disebabkan oleh infeksi kuman. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Sedangkan Angka Kesakitan adalah jumlah pasien yang mengidap penyakit. Berikut jumlah Pasien Akibat Penyakit Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan tahun 2016-2020 :



Tabel 2.35
jumlah Pesein Akibat Penyakit Tidak Menular yang mendapatkan pelayanan tahun 2016-2020

Penyakit	2016	2017	2018	2019	2020
Hipertensi	19.52	28.1	20.06	34.99	44.55
Kusta	35	14	37	19	13
Diare	34.6	80.6	69	58.8	77.4
Diabetes Melitus	NA	NA	NA	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto Tahun 2021

Prevalensi Penyakit Menular dan Tidak Menular yg masih tinggi bisa disebabkan :

- Cakupan Imunisasi yang belum memenuhi target
- Pola Hidup dan Pola Makan yang salah

Faktor yang berpengaruh :

- Kurang pemahaman pentingnya imunisasi dan pengaturan pola hidup sehat (Germas)
- Belum optimalnya upaya promotif dan preventif
- Masih rendahnya peran serta masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat mengikuti Program Imunisasi dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular

2.3.1.2.7 Desa ODF

Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan, Pembuangan tinja yang tidak memenuhi syarat sangat berpengaruh pada penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Desa ODF diartikan sebagai desa yang tidak ada lagi kejadian buang air besar (BAB) sembarangan. Di Kabupaten Mojokerto desa ODF yg masih rendah bisa disebabkan Masih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Masyarakat. Faktor yang mempengaruhi antara lain :

- Pemahaman masyarakat yang masih rendah tentang ketersediaan sarana dan kualitas lingkungan sehat
- Belum optimalnya upaya promotif dan preventif yang dilakukan, baik dalam metode, sasaran maupun pelaksanaannya



Tabel 2.36
Jumlah Desa ODF di Kabupaten Mojokerto

Jumlah Desa ODF Di Kabupaten MOjokerto				
2016	2017	2018	2019	2020
2	10	43	83	102

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Mojokerto Tahun 2021

Adapun Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto Dari Tahun 2016-2020 :

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Harapan Hidup	th	72.03	72.1	72.24	72.43	72.53
Presentase Balita Gizi Buruk	%	0,34%(238 balita)	0,31%(217 balita)	0,33%(224 balita)	0,24% (202 balita)	0,26% (174 balita)
Cakupan desa siaga aktif	%					
	Pratama	79	121	102	84	102
	Madya	177	150	169	182	154
	Purnama	42	31	31	33	40
	Mandiri	6	2	2	5	8
	Jumlah	304	304	304	304	304
Angka KematianBayi (AKB)	1000 KH	8,8 (147 bayi)	11,2 (170 bayi)	8,8 (147 bayi)	6,46 (108 bayi)	4,6 (76 bayi)
Angka Kematian Ibu (AKI)	/100.000 KH	179 (30 ibu)	174 (29 ibu)	113.1 (19 ibu)	89.7 (15 ibu)	114.07 (19 ibu)
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	/1000 KH	12,17 (190 balita)	9,65 (161 balita)	10,22 (171 balita)	7,4 (124 balita)	4,6 (77 balita)
Rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	61.86	52.92	75.04	75.5	78.7
Rumah Tangga / KK yang menggunakan jamban sehat	%	75.5	80.45	79.47	88.1	91.8
Rasio posyandu per satuan balita		1.51	1.42	1.4	1.4	1.6



Aspek/ Bidang/Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		1.5	1.5	1.5	0.13	0.13
Persentase Cakupan puskesmas Standar	%	74 (20 puskk)	85 (23puskk)	88 (24 puskk)	93 (25 Puskk)	100 (27 puskesmas)
Rasio dokter per satuan penduduk		0.04	0.06	0.05	20	16
Rasio tenaga medis per satuan penduduk		0.07	0.83	0.12	0.27	40,4/100.000 pendkk
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	balita	238	217	224	202	174
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0.007	0.051	0.01	0.014	0.19
Persentase CakupanDesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	70.07	81.25	89.14	82.2	82.9
Akreditasi Puskesmas dan RSUD strata madya	%	1	10	21	27	27
Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas	nilai IKM	B	B	B	B	B
Persentase Peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien	nilai IKM	B	B	B	B	B
Persentase Cakupan Penemuan dr Penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	7.41	8.14	33.43	40.1	23.8



Aspek/ Bidang/Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	%	100 (434 kasus)	100 (221 kasus)	100 (404 kasus)	100 (267 kasus)	100 (97 kasus)
Persentase Tercukupinya Pelayanan masy.miskin	%	88	90.28	91.48	99.9	99.9
Persentase Cakupan kunjungan bayi	%	93.46	98.97	98.32	99.8	99.8
Persentase penduduk yang memanfaatkan Puskesmas	%					
R Jalan	%	51.51	122.12	124.06	178.3	137.3
R Inap	%	5.71	6.27	7.07	12.4	7.9
Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	15.79	16.66	4.52	5.7	0.01
Persentase Posyandu aktif	%	68.86	81.02	80.89	80.9	80.9

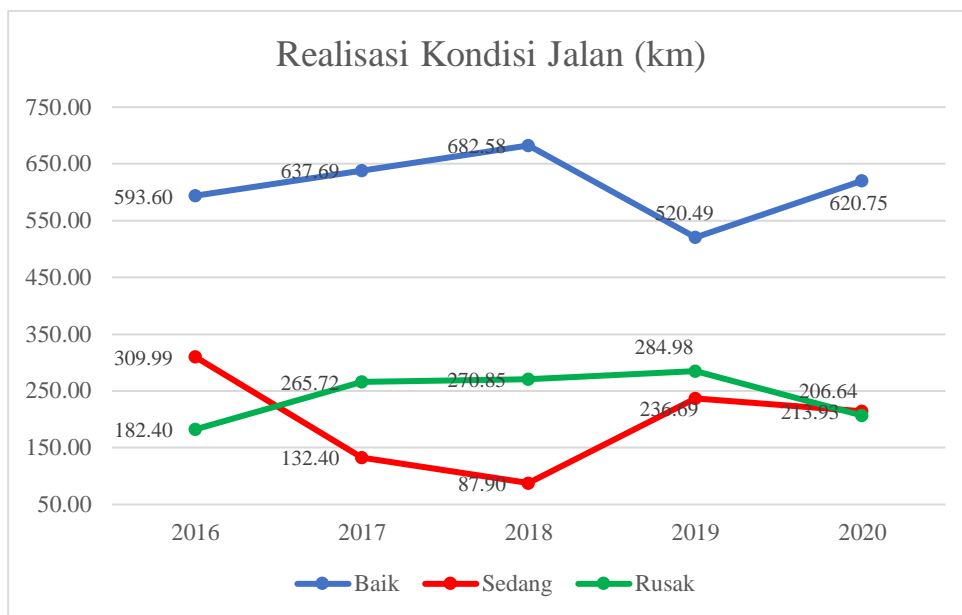
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang harus mendapatkan prioritas juga dalam pembangunan. Pekerjaan umum ini meliputi urusan jalan, jembatan, irigasi, drainase, PJU, dan TPS. Adapun status Ruas jalan Kabupaten Mojokerto tertuang pada keputusan Bupati Mojokerto nomor : 188.45/284/HK/416-012/2018. Berikut merupakan realisasi kondisi jalan kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020 :



Gambar 2.20
Realisasi Kondisi Jalan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



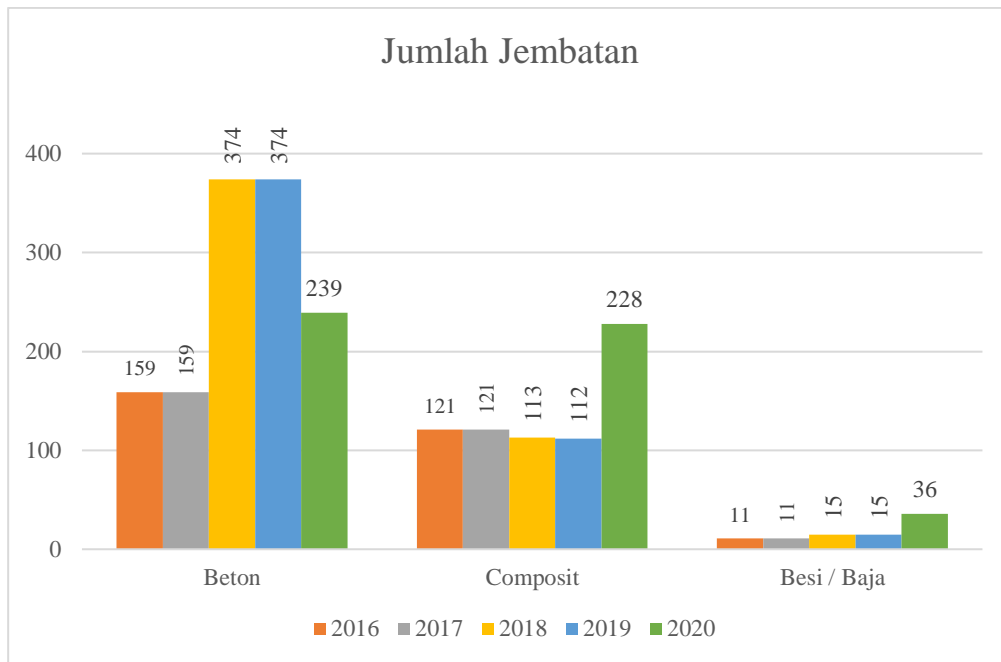
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2021

Panjang jalan menurut kondisi jalan di Kabupaten Mojokerto mengalami fluktuatif. Jalan pada kondisi baik tahun 2017 637.69 km, pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 683.57 km, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 520.49 km namun pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 620.75 km. Sedangkan jalan dengan kondisi sedang panjangnya stabil. Pada tahun 2019 kondisi jalan sedang sepanjang 236.69 km, kemudian di tahun 2020 sepanjang 213.93 km. Panjang jalan dengan kondisi rusak di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016-2019 Cenderung naik, namun pada tahun 2020 dengan adanya program rehabilitasi jalan mengalami penurunan menjadi 206.64. perlu dilakukan upaya yang insentif dan berkelanjutan agar penurunan Panjang jalan yang buruk semakin berkurang signifikan.

Kondisi jalan akan berpengaruh terhadap lancarnya jalannya transportasi, struktur pendukung laju transportasi dikembangkan secara optimal melalui berbagai usaha bersama seluruh elemen, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaku transportasi.



Gambar 2.21
Jenis dan Jumlah Jembatan Tahun 2016-2020



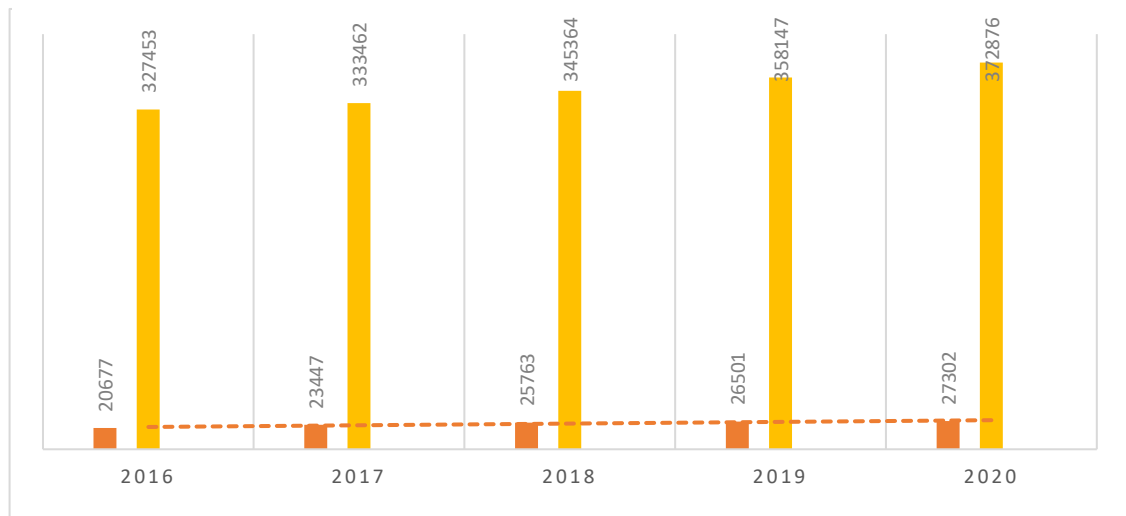
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Pada pembangunan jembatan di Kabupaten Mojokerto menggunakan tiga jenis bahan yang digunakan yaitu beton, composit serta besi/baja. Pada jembatan dengan bahan dari beton mengalami penurunan pada akhir tahun 2020. Pada jembatan berbahan composit mengalami Kenaikan Menjadi 228. Selanjutnya pada jembatan berbahan jenis besi/baja mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya 11 menjadi 36 jembatan berbahan besi pada tahun 2020. Perlu terus dilakukan upaya rehabilitasi jembatan pada kabupaten Mojokerto mengingat jembatan merupakan salah satu alat penunjang pembangunan ekonomi daerah.

Salah Satu urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah mengenai akses air bersih. Pada tahun 2016 sebesar 20.677 rumah tangga, tahun 2017 meningkat sebesar 23.447 rumah tangga, lalu meningkat Kembali pada tahun 2018 sebesar 25.763 rumah tangga dan tahun 2019 sebesar 26.501 rumah tangga dan untuk tahun 2020 sebesar 27302. Lalu pengguna listrik di Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2017 sebesar 333.462 pelanggan, pada tahun 2018 sebesar 345.364 pelanggan, tahun 2019 sebesar 358.147 dan tahun 2020 sebesar 372.876



Gambar 2.22
Jumlah pelanggan air bersih rumah tangga di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021 2021

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	1/1034	1/1043	1/1064	1/1073	1 / 1124,3
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik(> 40 KM/Jam)	%	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19
Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	%	Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah				
Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19
Rasio Jaringan Irigasi	%	81,00	81,00	81,00	81,00	77,00
Luas daerah irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Ha	17762,00	17762,00	17762,00	17757,00	16,104



Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	75,18	76,98	78,6	80,5	62,00
Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	%	70	70	70	75	75,00
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	1:4	1:4	1:4	1:3	1:3
Ruang publik yang berubah peruntukannya	Buah	3	3	2	3	1
Persentase Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100,00
Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	54,65	61,56	63,45	65,55	59,61
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	86,25	87,97	68	70	56,00
Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	38,05	38,12	38,19	38,19	38,19
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	Bukan Kewenangan Pemerintah Daerah				
Tersedianya data kondisijalan dan jembatan	dokumen	1	1	1	1	1
Pemenuhan Kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU)	titik	26.176	29.937	39.174	40.715	40,715
Persentase tersedianya rencana tata ruang rinci sesuai UU No. 26/2007	%	5,56%	11%	11%	11%	11,00
Tingkat Ketersediaan dokumen RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) kawasan strategis sesuai peraturan perundangan yang berlaku	%					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Mojokerto Tahun 2021



2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan Urusan Pemerintah wajib yang menangani permasalahan perumahan dan permukiman dan fasilitasnya. Berikut adalah Capaian Indikator Kinerja Kunci Sesuai Permendagri 100 Tahun 2018.

Tabel 2.39 Capaian Indikator Kinerja Urusan perumahan dan Permukiman

No	Uraian	Capaian IKK Urusan Perumahan dan Permukiman				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah rumah yang berada pada Kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	2577	2835	3119	3429	3772
2	Jumlah Rumah Yang terkena bencana alam	1637	3075	114	788	8
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	1637	3075	114	788	871
4	Jumlah Unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	4	8
5	Jumlah Unit rumah korban bencana yang dibangun Kembali sesuai rencana aksi	0	0	0	4	5
6	Jumlah Unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	0	0	0	0
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	0	0	0	0
8	Jumlah RT KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	0	0	4	5

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Tabel diatas Menggambarkan bahwa Penanganan untuk rehabilitasi rumah dirasa masih kurang, dimana pada tahun 2020 Jumlah KK yang terdampak bencana alam sebesar 871 sedangkan jumlah rehabilitasinya hanya 4 rumah.



Selain IKK Sesuai PERMENDAGRI 18 tahun 2020 , berikut capaian Indikator SPM sesuai PERMENDAGRI 100 Tahun 2018 :

Tabel 2.40
Capaian Indikator SPM perumahan dan Permukiman Tahun 2016-2020

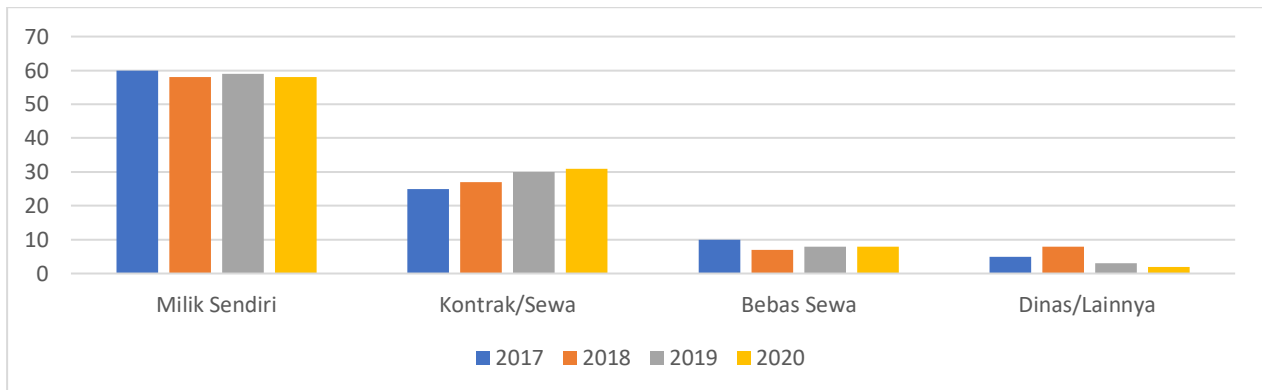
No	Uraian	Capaian Indikator SPM perumahan dan Permukiman				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	-	4 unit rumah	5 unit rumah
2	Jumlah warga yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	0	0	0	0	0

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021

Capaian Indikator SPM perumahan cenderung kecil hal ini disebabkan bencana yang telah terjadi di kabupaten Mojokerto tidak berdampak begitu besar terhadap kerusakan rumah masyarakat sehingga hanya beberapa rumah saja yang perlu dilakukan rehabilitasi.



Gambar 2.23
Persentase Rumah Tangga Menurut Kepemilikan Rumah Tangga
di Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat ,Kawasan permukiman dan Perhubungan Tahun 2021

Perumahan rakyat ditinjau dari presentase rumah tangga menurut kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya. Jika dilihat berdasarkan status kepemilikan rumah, setiap tahunnya didominasi oleh rumah milik sendiri meskipun jumlahnya fluktuatif.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kawasan permukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	%	-	-	-	-	
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	97,01	-	-	-	
Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	-	-	-	-	
Persentase areal kawasa nkumuh	%	0,292	0,29	0,2830,	0,2801	
Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	%	-	-	-	-	



Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio tempat pemukiman umum per	%	-	-	-	-	
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	%	-	-	-	-	
Rumah tangga pengguna air bersih (perdesaan dan perkotaan)	KK	-	-	26639	19270	
Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	%	-	-	-	-	
Rumah tidak layak huni (RTLH yang direhab)	%	-	1,0%	2,9%	3,7%	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021

2.3.1.5 Urusan Pertanahan

Usuran Pertanahan Pada Kabupaten Mojokerto berfokus pada penyelesaian Sengketa Tanah . Adapun Urusan Pertanahan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 merupakan urusan pemerintahan pilihan, yang baru dilaksanakan pada Tahun 2020. Berikut Capaian Urusan Pertanahan Tahun 2020 :

Tabel 2.42

Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No	Uraian Capaian Urusan Pertanahan	Jumlah
1	Penyelesaian Sengketa Tanah	1
2	Pendampingan Redistribusi Tanah	324

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021

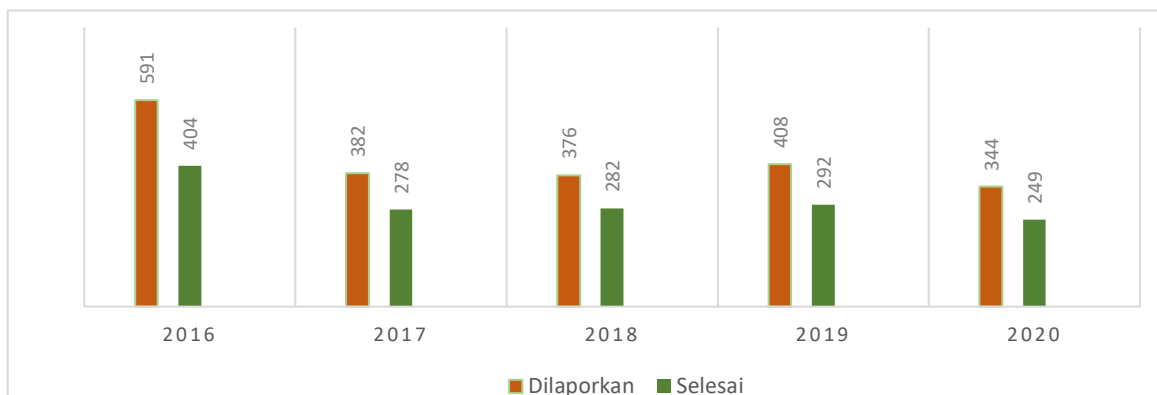
2.3.1.6 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memberikan pelayanan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang meliputi berbagai elemen strategis yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas politik daerah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta iklim investasi daerah. Konsekuensinya beragam permasalahan yang berkaitan dengan disintegrasi, ideologi dan politik, ekonomi, sosial, budaya, kerukunan hidup beragama, serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menja



dibagian dan tantangan yang harus diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa kalah atau dirugikan.

Gambar 2.24
Kasus Kejadian Gangguan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Mojokerto.



Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Penegakan Perda	%	89,80%	99,15%	98,85%	96,57%	84%
Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Trantibum terhadap Masyarakat dan Badan Usaha	kali	56 kali	50 kali	63 kali	65 kali	42 kali

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.44
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Prosentase Potensi Konflik yang dapat dicegah	%	25,00	17,14	28,00	34,62	35,65



Jumlah Penyelenggaraan Forum Antar Umat Beragama (FAUB)	kali	5	5	5	6	5
Prosentase Konflik SARA	%	-	-	-	-	-

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.45

Jumlah Organisasi Masyarakat di Kabupaten Mojokerto yang terdaftar tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Organisasi Masyarakat	99	101	103	105	110
2	Pembinaan Organisasi	2	2	4	4	4
3	Jumlah LSM	84	88	90	94	103
4	Pembinaan LSM	2	2	4	4	4
5	Jumlah Forum kewaspadaan dini masyarakat					
	a. Kabupaten	1	1	1	1	1
	b. Kecamatan	18	18	18	18	18

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.46

Jumlah masyarakat yg rentan pelanggaran HAM tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah masyarakat yang rentan	0	0	0	0	0
2	Jumlah masyarakat yg rentan pelanggaran HAM yg sudah dibina	0	0	0	0	0

Sumber: Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki tingkat kerentanan sedang hingga tinggi terhadap perubahan iklim dalam bentuk peningkatan suhu dan perubahan curah hujan. Ada lima sektor yang diproyeksikan menerima dampak tinggi yaitu kebencanaan, sumber daya air, pertanian, peternakan, dan kesehatan. Untuk mengetahui secara rinci tingkat kerawanan daerah di wilayah Negara Indonesia, BNPB telah melakukan penilaian tentang Indeks Kerawanan Bencana Indonesia (2009) yang diperbaharui dengan Indeks Rawan Bencana Indonesia (2011). Berikut disampaikan capaian Indeks Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto.



Tabel 2.47
Indeks Resiko bencana Kabupaten Mojokerto

Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Indeks Resiko Bencana (IRB)	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	163,60	155	140,94	147	120,70

Sumber: BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Indeks Rawan Bencana (IRB) adalah suatu alat analisis bencana berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat kejadian bencana yang pernah terjadi di wilayah tertentu. Semakin Kecil Nilai Indeks, semakin baik penanganan risiko bencana pada wilayah tersebut Menurut Tabel diatas pada tahun 2016-2020 Target indeks Resiko Bencana Kabupaten Mojokerto Semakin menurun, dapat disimpulkan bahwa, penanganan bencana di kabupaten Mojokerto semakin Baik,. Namun masih diperlukan Upaya Upaya tertentu untuk membuat capaian IRB menyentuh angka 100.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Berikut di sampaikan jumlah kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2020.

Tabel 2.48
Kejadian Bencana Kabupaten Mojokerto 2019-2020

No	Jenis Bencana	2019	2020
BENCANA ALAM :			
1	Banjir Luapan	17	21
2	Banjir Bandang	41	1
3	Tanah Longsor	3	9
4	Tanggul / Plengsengan rusak	3	5
5	Kebakaran Hutan	47	4
6	Gempa Bumi	0	0
7	Kekeringan	6	5
8	Gunung Meletus	0	0
9	Angin Kencang / Puting Beliung	15	11
TOTAL :		132	56
BENCANA NON ALAM :			



No	Jenis Bencana	2019	2020
1	Wabah Penyakit	0	0
2	Gagal Teknologi	1	0
3	Gagal Modernisasi	0	0
4	Laka Air	2	2
5	Epidemi	0	1
TOTAL :		3	3
BENCANA SOSIAL :			
1	Konflik Sosial	0	0
2	Sabotase	0	0
3	Aksi Teror	0	0
TOTAL :		0	0

Sumber: BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah yang diberi tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan masalah kebakaran dan bencana yang termasuk dalam dinas gawat darurat atau Rescue (Penyelamatan) seperti Ambulans dan Badan SAR Nasional. Para Pemadam Kebakaran dilengkapi dengan pakaian anti-panas atau anti-api dan juga helm serta boots/sepatu khusus dalam melaksanakan tugas, dan biasanya pakaiannya dilengkapi dengan scotlight reflektor berwarna putih mengkilat agar dapat terlihat pada saat pelaksanaan tugas. Berikut disampaikan data kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Mojokerto tahun 2019-2020.

Tabel 2.49
Kejadian Kebakaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2019-2020

KEBAKARAN :		2019	2020
1	Industri	11	7
2	Rumah / Bangunan	21	38
3	Tempat Usaha	9	10
4	Bangunan Instansi	1	0
TOTAL :		42	55

Sumber: BPBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.1.7 Sosial

Pemerintahan Kabupaten Mojokerto melalui Dinas Sosial berusaha melakukan bermacam-macam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pelayanan ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang diatur dalam UU



No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, hal ini juga merupakan tugas bersama sinergitas Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan masyarakat.

Tabel 2.50
Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016 – 2020

Status	Jumlah Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2016 – 2020				
	2016	2017	2018	2019	2020
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	181	635	435	196	719
Keluarga Fakir Miskin	83.618	86.500	95.168	92.341	129
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	7888	7.883	7.866	7.861	8.358
Korban Bencana Alam	426	417	959	0	9
Pekerja Migran Bermasalah Sosial	26	24	24	24	12
Korban Tindak Kekerasan	16	16	16	17	10
Korban Trafficking	5	0	5	0	0
Korban Penyalahgunaan NAPZA	47	49	48	48	44
Orang dengan HIV / AIDS	4	4	10	10	13
Bekas Warga Binaan LP	373	366	384	369	370
Kelompok Minoritas	130	123	123	119	121
Pemulung	248	238	260	265	253
Pengemis	108	112	110	108	99
Gelandangan	62	30	64	62	31
Tuna Susila	101	102	101	80	89
Penyandang Disabilitas	3.935	53.68	3.986	3.925	3.797
Lanjut Usia Terlantar	7761	76.62	7.561	11.993	13.550
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	47	23	22	22	16
Anak Korban Tindak Kekerasan	42	38	36	29	14
Anak Disabilitas	1.028	1.064	1.052	1.045	1.109
Anak Jalanan	102	109	102	106	109
Anak yang Berhadapan dengan Hukum	15	14	18	41	23
Anak Terlantar	5.301	5.066	4.888	4.862	3.942
Anak Balita Terlantar	1.031	959	952	1.120	968

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.51
Data Terpadu kesejahteraan Sosial Kabupaten Mojokerto 2019-2020

STATUS KESEJAHTERAAN (JIWA)	Tahun	
	2019	2020
DESIL 1	39403	46942
DESIL 2	51538	67994
DESIL 3	64694	80345
DESIL 4	62900	108593
DESIL 4+	145932	57305

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan urusan terpusat demi keseragaman ketertiban dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada Kabupaten. Guna menertibkan administrasi kependudukan perlu standarisasi kepemilikan KTP berbasis NIK, Kepemilikan Akta Kelahiran dan kepemilikan penduduk wajib Kartu Keluarga yang memiliki kartu keluarga, yang masuk dalam kewenangan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pelaksanaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, yang bertugas untuk melakukan pencatatan, pendaftaran, serta pembukuan yang selengkap-lengkapnyanya dan sejelas-jelasnya, serta member kepastian hukum yang sebesar-besarnya terhadap peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian seseorang. Capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil :



Tabel 2.52
Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Aplikasi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Kecamatan	18	18	18	18	0
2	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	%	69,21%	75,10%	75,14%	74,27%	75,36%
3.	Kepemilikan akte kelahiran per 1.000 penduduk	Orang	292	334	361	384	398
4.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	98,90%	98,98%	99,13%	99,34%	99,55%
5.	Kepemilikan KTP	Orang	98,12%	99,29%	99,94%	98,80%	99,58%
6.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Persentase Kepemilikan KIA	%	30	30	3,89%	20,03%	30,46%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dari data di atas dapat dijabarkan beberapa informasi penting terkait akselerasi pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam memberikan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di tahun 2021, Pembangunan dan Pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Administrasi dan Kependudukan (SIAK), yakni aplikasi teknologi kependudukan dan pencatatan sipil, telah rampung dibangun dan telah diaplikasikan di semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto. Dari total 18 kecamatan, kesemuanya telah mengaplikasikan SIAK sebagai sarana akselerasi kependudukan dan pencatatan sipil. Artinya saat ini semua kecamatan di Kabupaten Mojokerto dapat melaksanakan pelayanan kependudukan seperti pengurusan KTP secara langsung. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pengurusan KTP, cukup datang ke kantor kecamatan masing-masing. Hal ini menjadikan pelayanan pengurusan KTP menjadi lebih efektif dan efisien, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat.

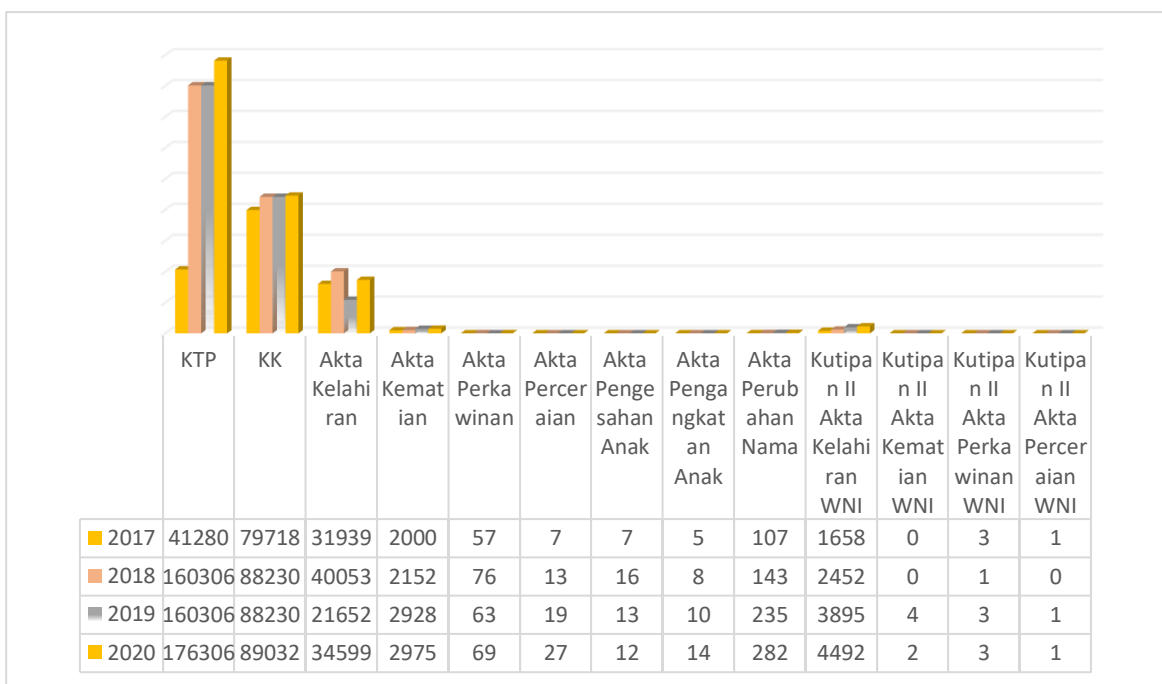
Penerapan aplikasi SIAK dalam administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berkorelasi terhadap peningkatan rasio penduduk ber-KTP. Mudahnya pelayanan KTP tentu memberikan dorongan bagi masyarakat yang belum ber-KTP untuk mengurus administrasi kependudukannya. Dari data tercatat jumlah penduduk yang berumur 17 tahun ke atas (wajib



memiliki KTP) berjumlah 871.732 orang, dan pada tahun 2020 penduduk yang telah memiliki KTP sebanyak 861.241 orang, sehingga penduduk yang telah memenuhi ketentuan wajib KTP sebesar 98,80%. Kemudahan kependudukan dan pencatatan sipil ini juga mengangkat peningkatan kepemilikan akte kelahiran. Kepemilikan Akte Kelahiran per 1.000 penduduk sebesar 384 orang atau meningkat sebesar 6,37 % dari tahun 2018 yang sebesar 361 orang

Untuk capaian kepemilikan administrasi kependudukan yang merupakan pelaksanaan kebijakan fungsi perlindungan sosial urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2017-2020 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Gambar 2.25
Penerbitan dokumen administrasi penduduk



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Dari tabel di atas menggambarkan beberapa penerbitan dokumen administrasi kependudukan terlihat terjadi beberapa pkenaikan di tahun 2020 seperti penerbitan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, dan Akta Pengesahan Anak, dibandingkan tahun 2019, sedangkan pada penerbitan dokumen lainnya mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan semakin tinggi sehingga dari tahun ke tahun penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan terus berkurang.

Adapun untuk kepemilikan akta di tahun 2020 ini mengalami peningkatan. Untuk akte yang diterbitkan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:



Tabel 2.53
Jumlah Kepemilikan Akte Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kepemilikan akta kelahiran	326.938	380.260	409.053	445.152	466.396
2.	Kepemilikan akta perkawinan	189	236	312	375	385
3.	Kepemilikan akta perceraian	44	51	66	84	90
4.	Kepemilikan akta pengangkatan anak	0	45	53	63	19
5.	Kepemilikan akta ganti nama	0	157	300	535	238
6.	Kepemilikan akta kematian	728	2.659	4.811	6.441	12.579
7.	Kepemilikan akta pengakuan dan pengesahan anak	0	7	37	50	12

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kepemilikan KTP	%	98,12	99,29	99,94	98,80	99,58%
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Jiwa	812562	842874	846234	861241	882352
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	Per 1000 penduduk	292	334	361	384	398
Persentase Penduduk Wajib KK yang Memiliki KK	%	100	100	100	100	100
Kepemilikan KTP	%	98,12	99,29	99,94	98,80	99,58%
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Jiwa	812562	842874	846234	861241	882352
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 Penduduk	Per 1000 penduduk	292	334	361	384	398
Persentase Penduduk Wajib KK yang Memiliki KK	%	100	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan KIA	%	0%	0%	3,89%	20,03	30,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Dari 1.159.593 orang penduduk menurut catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 445.152 orang telah memiliki akta kelahiran, atau tiap 1.000 penduduk terdapat 384 orang yang memiliki akta kelahiran. Angka tersebut meningkat sebesar 8,83 % dibanding tahun 2018, secara umum kesadaran masyarakat Kabupaten Mojokerto atas kepemilikan akte kependudukan mengalami peningkatan.

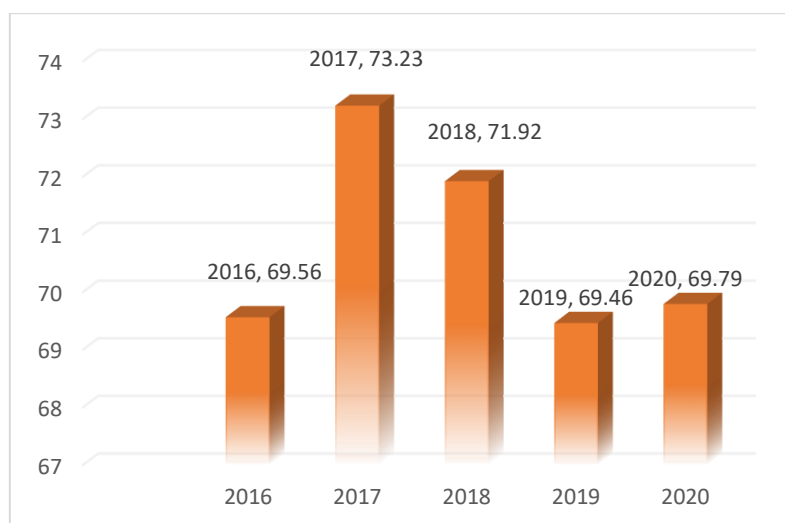
2.3.2.2 Tenaga Kerja

Ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003). Berikut merupakan pembahasan mengenai ketenagakerjaan yang meliputi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK):

2.3.2.2.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenaga kerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survey. Berikut merupakan data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2020.

Gambar 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

TPAK mampu mengungkap besar animo penduduk usia kerja untuk ikut aktif dalam kegiatan yang bersifat ekonomis. Secara umum, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari

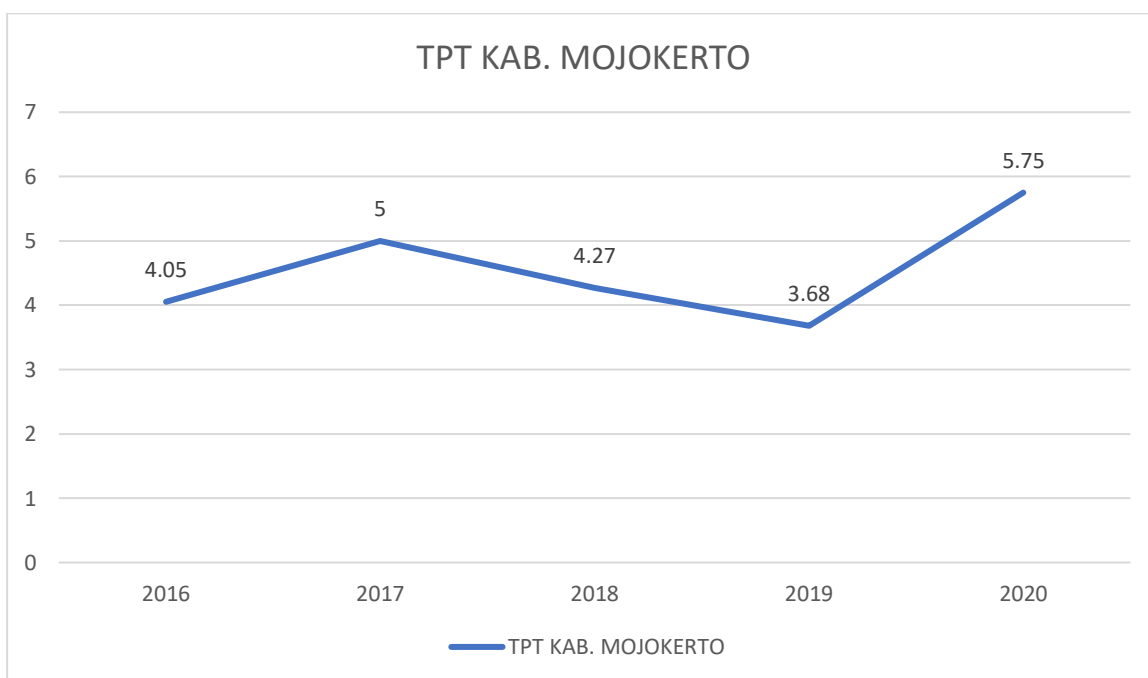


tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan untuk aktif secara ekonomi rendah. Namun pada tahun 2020 tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami peningkatan.

2.3.2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah pencari pekerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan sehingga tidak mampu terserap dengan baik. Pengangguran seringkali menjadi permasalahan perekonomian, karena dengan adanya pengangguran, produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah social lainnya.

Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Tenaga Kerja kan. Mojokerto

Dapat disimpulkan dari grafik diatas bahwa pada tahun 2019 Angka Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten Mojokerto sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2020 saat adanya pandemi covid yang berimbas pada penurunan kondisi ekonomi mengakibatkan jumlah pengangguran Secara nasional maupun di Mojokerto menjadi naik.

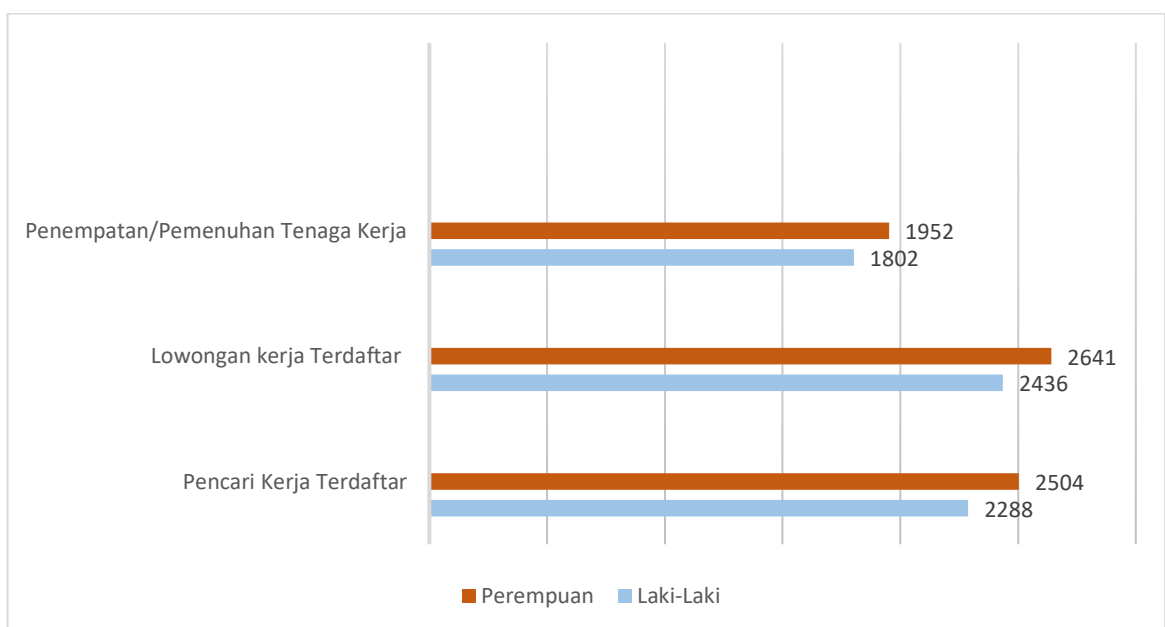


2.3.2.2.3 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Keberhasilan pembangunan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh factor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya adalah penduduk (sumber daya manusia). Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah penduduk dalam usia kerja. Tenaga kerja adalah seluruh penduduk suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Terkait dengan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto, berikut disajikan table rasio daya serap tenaga di Kabupaten Mojokerto Tahun 2019:

Gambar 2.28

Pencari Kerja Terdaftar, Lowongan Kerja Terdaftar dan Penempatan Tenaga Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 2.55
Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) 2016-2020

NO	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
	26	24	56	68	31

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.56
Jumlah Shelter Untuk PMI 2016 – 2020

NO	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
	NIHIL				

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

**Tabel 2.57****Data Dukung Upah Minimum Kerja (UMK) Kabupaten Mojokerto 2016-2020**

Tahun	Indikator		UMK	Perubahan (%)
	Inflasi %	KHM (Rp)		
2016	1.4	2,288,856	3,030,000	13,2
2017	8,71	2,262,329	3,279,975	13,6
2018	8,03	2,684,000	3,565,661	8.7
2019	8,51	2,799,294	3,851,983	8.0
2020	-	-	4,179,787	8.5

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.58**Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020**

Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	-	5,00	4,27	3,68	5,75
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	Jumlah	-	620.659	616.733,00	601.378	620.390
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	-	73,23	71,92	69,35	69,79
Rasio penduduk yang bekerja	%	-	95,00	95,73	96,32	94,24
Lajupertumbuhan PDB per tenagakerja	%					NIHIL
Rasio Kesempatan Kerja	%	-	69,57	68,85	66,79	65,77
Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja						NIHIL
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	orang	156	-	72	36	144
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan	orang	120	121	132	136	20
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	orang	152	76	108	80	32
Rasio Proporsi Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	%	-	95,00	95,73	96,32	-
Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	kasus	49	39	55	44	41



Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	kasus	21	26	30	12	14
Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	orang	3.472	3.581	3.764	3.754	16.798
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	orang	-	52.792	54.135	62.362	67.958
Rasio lulusan S1/S2/S3						4,34
Persenta sejumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0	0	0	0
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	-	59,43	59,19	51,92	38,64
Persentase transmigran swakarsa	%	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak perempuan dan hak-hak anak sesuai dengan yang diamanatkan oleh regulasi. Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan pengarusutamaan gender. Gerakan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak harus digiatkan agar mengurangi jumlah kekerasan perempuan. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan serta kualitas hidup perempuan dan anak.

Rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang kerap menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan justru meningkat menjadi 0,356 meskipun pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berupaya menekannya di angka 0,049. Fakta ini menjadi tugas yang tidak mudah karena mustahil untuk menyelesaikan persoalan kekerasan terhadap perempuan tanpa menyelesaikan akar permasalahannya. Namun berdasarkan data dari P2TP2A, jumlah kasus yang terjadi pada 2018 berkurang dari tahun sebelumnya. Di tahun 2017 jumlah kasus yang ditangani oleh P2TP2A sebanyak 22 kasus, sedangkan di tahun berikutnya turun menjadi 17 kasus. Dari kasus-kasustersebut di atas P2TP2A telah memberikan layanan antara lain rehabilitasi sosial, pendampingan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. Lintas Sektor yang menjadi jejaring dengan P2TP2A belum menyediakan anggaran untuk penanganan jika terjadi kasus kekerasan pada perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan tupoksi dari masing-



masing OPD/Lintas Sektor terkait. Selain itu P2TP2A masih belum memiliki tempat layanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (Belum memiliki ruang khusus layanan dan ruang konseling).

Tabel 2.59
Jumlah Kasus yang Ditangani P2TP2A Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)	Kasus	10	9	6	4	16
2.	Pencabulan	Kasus	4	5	-	3	1
3.	Penganiayaan/Lainnya	Kasus	2	3	1	3	1
4.	Pemeriksaan	Kasus	3	2	2	-	2
5.	Penelantaran	Kasus	3	3	3	2	2
6.	Trafficking	Kasus	-	-	1	-	-
7.	Pornografi	Kasus	1	-	2	1	-
8.	Hak Asuh Anak	Kasus	-	-	2	1	4
9.	Pelecehan Seksual	Kasus	1	-	-	1	4
10.	Bullying	Kasus	-	-	-	1	4
11.	Kekerasan Lainnya	Kasus	-	-	-	4	6
	Jumlah	Kasus	22	22	17	19	36

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

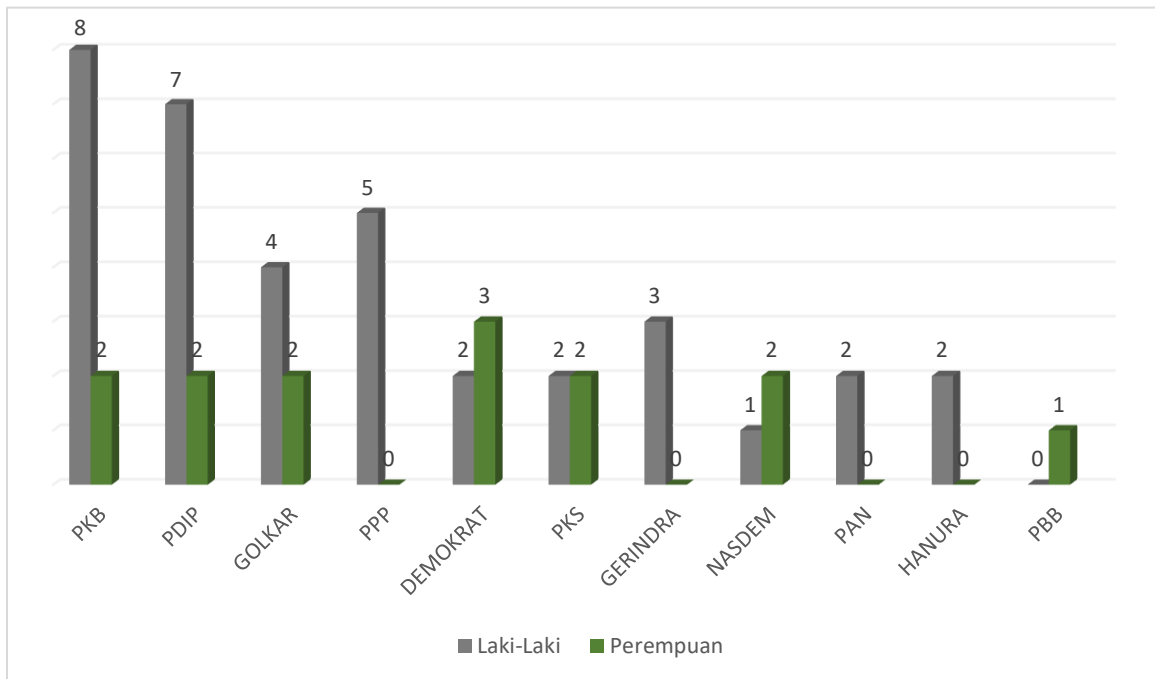
Aspek lain yang telah dilaksanakan adalah pemberdayaan perempuan. Selain perlindungan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga fokus pada pemberdayaan perempuan. Hal ini untuk memastikan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa strategi telah dilaksanakan antara lain (a) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; (b) Pelatihan Penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta (c) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan. Salah satu kegiatannya adalah fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lomba Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta sosialisasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak dan Pengukuhan Kader GNAKSA melalui P2TP2A bisa diselesaikan 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selain perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak, yang tatkala cukup penting adalah kesetaraan gender di bidang politik. Partisipasi politik perempuan di Kabupaten Mojokerto cukup rendah. Dimana belum semua partai politik ada perwakilan perempuan di anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berikut adalah jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019:



Gambar 2.29

Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Isu gender di Kabupaten Mojokerto masih belum dilaksanakan sepenuhnya, hal itu tercermin dari belum adanya apresiasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia terkait penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) bagi daerah-daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender. Sehubungan dengan hal tersebut juga data terpilah oleh Perangkat daerah selaku produsen data masih belum tersedia dengan baik.

2.3.2.4 Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dan tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Dengan wilayah Kabupaten Mojokerto yang memiliki pegunungan dengan banyak mata air, sungai-sungai, beberapa cek dam dan embung yang multi guna diharapkan ketahanan pangan dapat dipenuhi.



Kondisi alam tersebut sangat potensial untuk kegiatan perikanan pada umumnya. Kegiatan perikanan budidaya berkembang pesat di seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto, sedangkan perikanan tangkap terkonsentrasi di perairan umum dan sekitarnya yang meliputi 4 (empat) wilayah kecamatan yaitu, Kecamatan Dawarblandong, Kemlagi, Gedeg, dan Jetis, meskipun di luar itu terdapat juga kegiatan perikanan tangkap di perairan umum lainnya, seperti sungai, cek-dam maupun embung. Perairan Umum Daratan (PUD) yang ada di Kabupaten Mojokerto meliputi 28 waduk seluas 53,53 Ha, 26 sungai dengan luas + 113 Ha, 2 buah Embung dengan luas + 0,170 Ha. Secara geografis maupun administratif, Kabupaten Mojokerto tidak memiliki wilayah laut untuk dikelola dan dapat mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.

a. Kondisi konsumsi pangan Kabupaten Mojokerto

Mengingat urgensi urusan pangan bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan sekaligus bagi ketahanan pangan nasional, maka urusan pangan di Kabupaten Mojokerto masih perlu mendapatkan perhatian. Meskipun pemantauan terhadap stabilitas harga pangan telah dilakukan sesuai dengan target yang ditetapkan, tetapi pada dasarnya capaian lain masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan pangan perkapita misalnya. Meskipun tidak ada penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi target di tahun 2019 masih belum terealisasi dengan baik. Pada aspek yang lain, Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mojokerto juga belum memenuhi target meskipun tidak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2018. PPH dengan skor 97,27 artinya bahwa tidak hanya ketersediaan pangan saja yang terpenuhi, akan tetapi juga keragaman pangan semakin baik pada tingkat ketersediaan pangan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita menandakan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto, sedangkan persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menandakan bahwa kebutuhan non pangan seimbang atau masih melebihi kebutuhan pangan. Hal ini berarti aspek pemerataan asupan kalori yang dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Mojokerto dapat dikatakan cukup meskipun belum meskipun masih di dominasi oleh padi-padian.



Tabel 2.60
Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No.	Jenis Bahan Makanan	Bahan (Ton)	Ketersediaan per Kapita				
			Kg/Th	Gram/Hari	Kalori(kkal/hari)	Protein (gr/hari)	Lemak (gr/hari)
1.	Padi-padian	484.760,05	292,93	802,55	2.667	64,82	18,19
2.	Makanan Berpati	72.763,07	118,52	324,7	332	2,59	4,32
3.	Gula	56581	51,97	142,37	519	0,21	0,70
4.	Buah/Biji Berminyak	34,8	19,72	54,03	208	20,23	9,84
5.	Buah-buahan	0	224,87	616,07	174	1,80	0,83
6.	Sayur-sayuran	0	89,3	244,66	56	3,19	0,63
7.	Daging	14.557	29,53	80,91	151	10,45	11,87
8.	Telur	10.052	17,52	48,01	61	4,76	4,34
9.	Susu	4240,746	43,08	118,04	72	3,78	4,13
10.	Ikan	516,84	0,59	1,63	1	0,20	0,03
11.	Minyak Lemak	0	30,85	84,53	487	0,17	34,06
	Jumlah	643.505,51	918,88	2.517,5	4.728	112,2	88,94

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Detail ulasan kondisi konsumsi pangan Kabupaten Mojokerto 2020 adalah sebagai berikut :

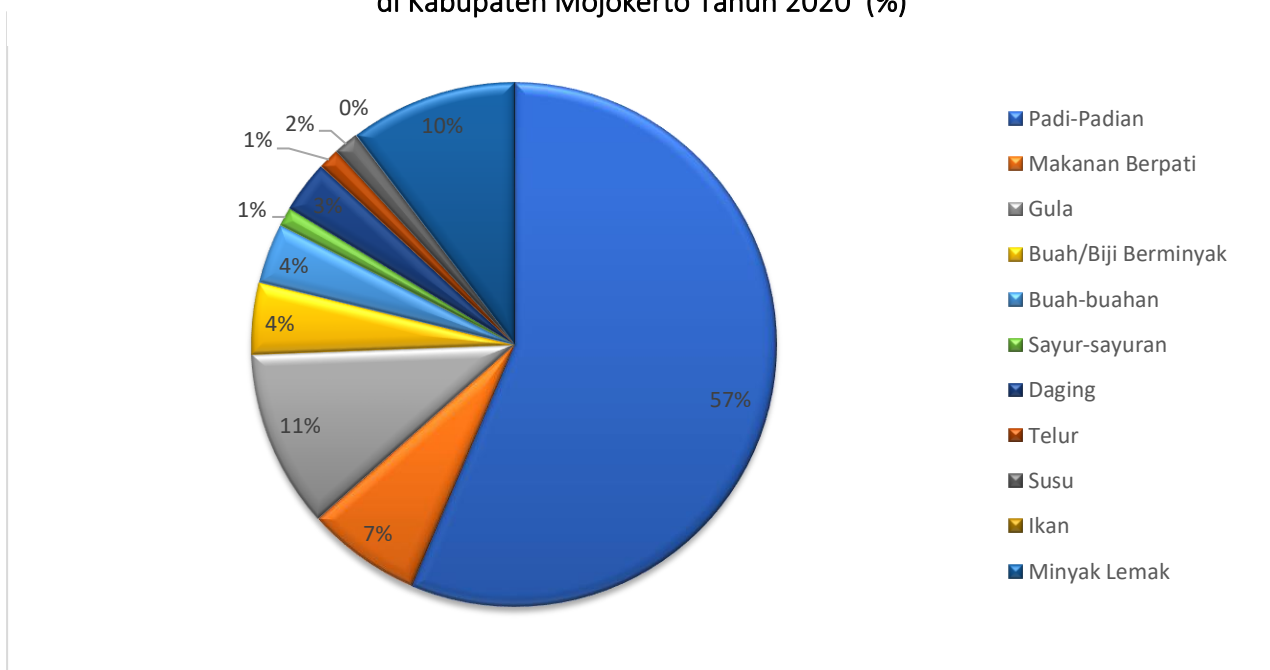
- 1) Ketersediaan Berbagai Jenis Bahan Makanan
- 2) Berdasarkan hasil penghitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2020 diketahui bahwa ketersediaan berbagai jenis bahan makanan (Tabel III.A.2.c.2) menghasilkan ketersediaan per kapita sebanyak 918,88 kg/tahun atau 2.517,5 gr/hari. Dari ketersediaan ini dapat menghasilkan energy sebanyak 4.728 kilo kalori/hari, protein sebanyak 112,2 gr/hari dan lemak sebanyak 88,94 gr/hari. Situasi ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 ini menggambarkan bahwa tingkat ketersediaan energy sudah melebihi Angka Kecukupan Energi (AKE), dan juga melebihi Angka Kecukupan Protein (AKP). Walaupun ketersediaan energi di Kabupaten Mojokerto tahun 2019 sudah melebihi AKP, namun ketersediaan energy ini sebagian besar berasal dari kelompok bahan makanan padi-padian 56,41% seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Kontribusi ketersediaan energi yang juga cukup besar berasal dari kelompok makanan berpati (7,02%) dan minyak dan lemak (10,30%). Sedangkan kontribusi ketersediaan energy dari kelompok bahan makanan lainnya relative kecil. Demikian juga ketersediaan energy dari kelompok bahan pangan hewani relative



rendah hanya 6,03% (daging 3,19%, telur 1,29%, susu 1,52% dan ikan 0,02%), sedangkan menurut FAO RAPA (1989) kontribusi energy dari pangan hewani sebaiknya sekitar 15% dari total energi.

Sumber penyedia protein di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2019 ini didominasi kelompok padi-padian padahal sasaran yang diharapkan adalah bergesernya pola konsumsi masyarakat dari kelompok padi-padian menuju kelompok pangan hewani ataupun kelompok kacang-kacangan. Pada grafik di bawah ini terlihat bahwa proporsi ketersediaan protein yang bersumber dari padi-padian sebesar 57,77 %, pangan hewani 17,10 %, dan buah biji berminyak sebesar 4,40 %. Sisanya sebanyak 11,89 persen dari sumber lainnya meliputi umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan menurut Hardinsyah (2010), menyatakan bahwa rata-rata AKE dan AKP nasional pada tingkat konsumsi adalah 57 g per kapita per hari dengan proporsi anjuran protein hewani 25 %.

Gambar 2.30
Proporsi Ketersediaan Protein Per Kapita Berdasarkan Kelompok Bahan Makanan di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 (%)



Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.61
Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kal)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	2.667	121,2	0,5	60,6	25	25
2.	Umbi-umbian	343	15,6	0,5	7,8	2,5	2,5
3.	PanganHewani	239	10,9	2	21,7	21,7	24
4.	Minyak dan Lemak	487	22,1	0,5	11,1	5	5
5.	Buah/bijiberminyak	24	1,1	0,5	0,5	0,5	1
6.	Kacang-kacangan	183	8,3	2	16,6	10	10
7.	Gula	519	23,6	0,5	11,8	2,5	2,5
8.	Sayuran dan buah	230	10,3	5	52,3	30	30
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	4.691	213,2		182,4	97,27	100

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

b. Pola Pangan Harapan (PPH)

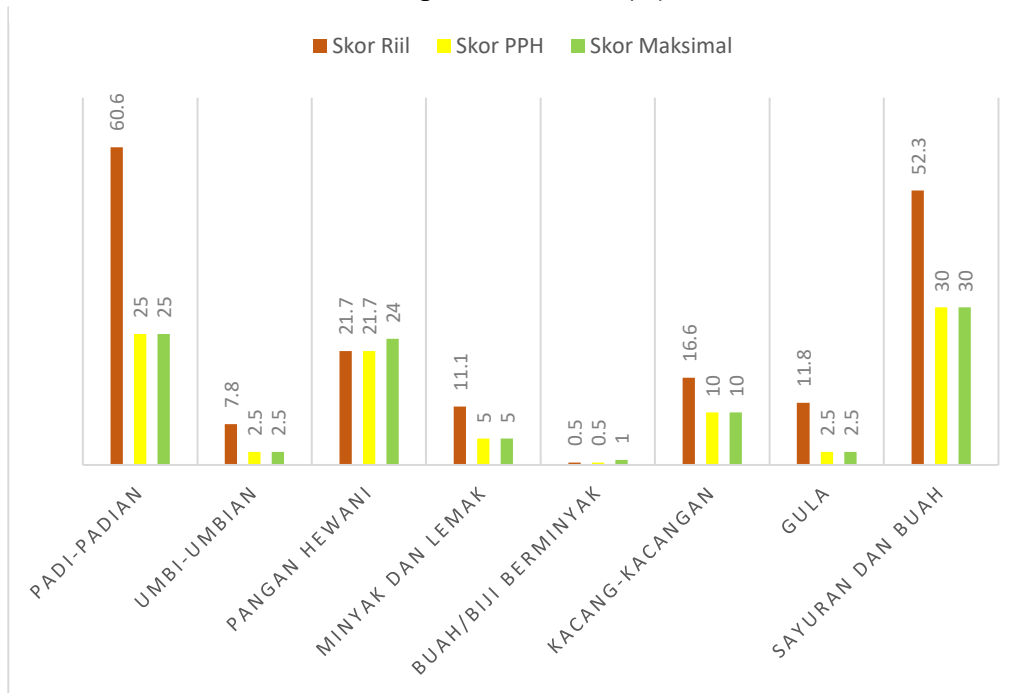
Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya, baik secara absolute maupun relative terhadap total energi penyediaan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan citarasa. PPH ketersediaan berguna sebagai instrument sederhana menilai situasi ketersediaan berupa jumlah dan komposisi pangan menurut jenis pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk penghitungan skor PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi pangan dan pada tingkat ketersediaan. Semakin tinggi skor PPH semakin baik mutu gizi dan keragaman pangan pada tingkat ketersediaan pangan.

Setelah dilakukan perhitungan ketersediaan masing-masing kelompok bahan makanan secara rinci telah dihasilkan energi yang dapat dihasilkan setiap jenis bahan makanan baik yang diproduksi oleh Kabupaten Mojokerto maupun yang didatangkan dari daerah lain (import). Rekapitulasi energi yang dapat dihasilkan dari setiap kelompok komoditi bahan makanan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Kabupaten Mojokerto tahun 2019. Perolehan skor PPH yang baru mencapai 97,27% persen, hal ini menunjukkan bahwa keragaman produksi bahan pangan di



Kabupaten Mojokerto masih belum cukup baik mutu gizinya. Keragaman produksi yang belum cukup baik dapat dijelaskan dengan grafik di bawah ini.

Gambar 2.31
Perbandingan Skor PPH dengan Skor Riil dan Skor Maksimal Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Berdasarkan Ketersediaan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2021 (%)



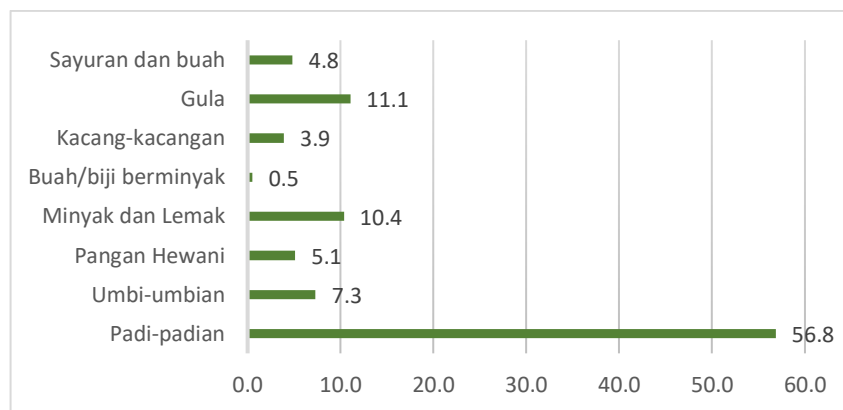
Sumber: Dispari Kabupaten Mojokerto diolah Tahun 2021

c. Angka Kecukupan Energi (AKE)

Angka Kecukupan Energi (AKE) di Kabupaten Mojokerto cukup tinggi hingga mencapai 213,2% (grafik di bawah ini). Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi produksi bahan pangan Kabupaten Mojokerto sudah lebih dari cukup. Namun sebagaimana diketahui bahwa komposisi tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Mojokerto sebagian besar masih didominasi oleh kelompok padi-padian yang mencapai 56,8%.



Gambar 2.32
Angka Kecukupan Energi (AKE)



Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto diolah, Tahun 2020

Tabel 2.62
Ketersediaan dan Kebutuhan Beras Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018 – 2020

Komoditi	2018			2019			2020		
	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (ton)	(+ / -)	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (ton)	(+ / -)	Ketersediaan (ton)	Kebutuhan (ton)	(+ / -)
Beras	213.449,00	79.093,00	134.356	335.944,00	96.863,3	239.081	82.553,68	91.561,9	-9,008

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Ketersediaan beras di Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun 2020 mengalami defisit sebesar 9 ton. Dengan ketersediaan beras yang mengalami Defisit pada akhir tahun, menunjukkan ketersediaan pangan beras belum mampu mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto. Untuk lebih meningkatkan keanekaragaman pangan demi pemantapan asupan kalori dan energy masyarakat, Kabupaten Mojokerto juga menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendukung percepatan diversifikasi pangan di masyarakat. Melalui program ini diharapkan masyarakat mengalami peningkatan skor PPH. Kegiatan P2KP ini telah dilaksanakan di Desa Gunung sari Kecamatan Dawar blandong. Kegiatan Pengembangan Percepatan Diversifikasi Pangan dilaksanakan melalui Festival Makanan Khas Daerah di tingkat Baperrwil, Sosialisasi diversifikasi Pangan dan Penyusunan Analisis Pola Pangan Harapan (PPH).

d. Penyediaan dan Keamanan Pangan

Selain memastikan kualitas pangan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berkomitmen pada ketersediaan dan keamanan pangan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan aksi dalam bentuk pengawasan ketersediaan pangan untuk mengatasi kerawanan pangan. Dalam hal distribusi pangan, selama 2019 pemerintah Kabupaten



Mojokerto telah melakukan pemantauan dan analisa harga pokok. Kegiatan ini penting untuk menjamin lancarnya distribusi dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan di pasar. Selain itu, pemantauan ini juga untuk memastikan tidak adanya praktik-praktik pasar yang merugikan dan berdampak buruk pada pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selanjutnya, untuk mengatasi kerawanan pangan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah melakukan penanganan di 5 desa yang terindikasi memiliki masalah keamanan pangan. Penanganan tersebut penting untuk memastikan ketersediaan pangan di desa rawan pangan terutama di musim-musim rawan pangan. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kemandirian pangan, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melakukan pendampingan dan edukasi melalui program Desa Mandiri Pangan. Meski pencapaiannya masih kurang dari target, yakni lima desa, kegiatan ini telah dilaksanakan di empat desa. Hal ini berarti embrio munculnya desa mandiri pangan sudah terbentuk dan tinggal melakukan evaluasi dan memperbaiki, serta menduplikasikannya untuk desa-desa lainnya sehingga pengetahuan tentang kesadaran akan kemandirian pangan bisa disebarluaskan dan diarusutamakan.

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Mojokerto juga melaksanakan berbagai alternatif yang dapat dikembangkan bersama dengan masyarakat guna meningkatkan ketahanan pangan daerah. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan pekarangan sebagai lahan produktif penghasil pangan. Pekarangan non-produk kemudian diubah menjadi lahan produktif sederhana untuk menambah produksi pangan meskipun dalam skala yang lebih kecil. Program ini merupakan satu dorongan kepada masyarakat untuk benar-benar memanfaatkan lahan tak produktifnya menjadi salah satu sarana penghasil pangan. Selain itu program ini juga menjadi sarana kampanye kesadaran mandiri pangan bagi setiap masyarakat Kabupaten Mojokerto. Kegiatan pemanfaatan pekarangan ini dilaksanakan di 18 titik di Kabupaten Mojokerto. Jumlah tersebut melampaui target sebelumnya yang mematok 10 titik.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (UU No. 32 Tahun 2009). Kondisi/kualitas Lingkungan Hidup suatu daerah dapat dihitung melalui pengukuran/perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Komponen dari IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan



(IKTL). Berikut merupakan Kondisi/kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto, Kondisi/kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dan Kondisi/kualitas Lingkungan Hidup Nasional selama kurun waktu tahun 2017 sampai tahun 2020 yang ditunjukkan pada Tabel berikut.



Tabel 2.63
Perbandingan IKA, IKU IKTL dan IKLH antara Nasional, Propinsi dan Kabupaten Mojokerto

	Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019				TAHUN 2020			
	IKA	IKU	IKTL	IKLH	IKA	IKU	IKTL	IKLH	IKA	IKU	IKTL	IKLH	IKA	IKU	IKTL	IKLH
Nasional	58,68	87,03	56,88	66,64	72,77	84,74	61,03	71,67	52,62	86,56	62	66,55	53,53	87,21	60,74	70,27
Provinsi Jawa Timur	52,77	85,49	62,02	66,29	52,69	83,50	63,56	66,36	56,13	83,32	63,16	67,10	56,13	84,59	63,72	67,70
Kab. Mojokerto	50	81,62	44,66	57,35	52	90,29	49,2	62,37	62	90,29	-	-	60	92,50	55,47	64,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian IKLH Kabupaten Mojokerto cukup fluktuatif. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya polusi/pencemaran udara, tingkat pencemaran badan air dan kondisi tutupan lahan yang ada pada Kabupaten Mojokerto. Pada Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto tidak melakukan perhitungan untuk nilai Indeks Kualitas Lahan karena keterbatasan anggaran sehingga untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak dapat di hitung. Capaian IKLH Kabupaten Mojokerto dari tahun 2017 - 2019 rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan nilai IKLH Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Hal ini dikarenakan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) lebih kecil dibandingkan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Kondisi/kuailitas Lingkungan Hidup selain dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dapat juga dilihat dari beberapa indikator capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup. Indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 2016-2020

Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup						
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL / HGB	km2	969,36	969,36	969,36	969,36	969,36
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan	km2	302,91	302,91	302,91	302,91	302,91
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan	Ha	335,62	335,62	335,62	335,62	335,62



Persentase Luas Cakupan Permukiman yang Dilayani Pengangkutan Sampah (dari luas wilayah Kab. Mojokerto)	%	50,00	50,00	50,00	50,00	77,78
Terbangunnya TPA Baru	Ha	2 Hektar	-	-	-	4 hektar
Tersedianya TPS dan TPST	Unit	59.00	59.00	59+4=63	75+4=79	75+4=79
Timbulan Sampah yang Ditangani	kg	9.607.304	13.638.879	13.128.050	11.368.980	15.712.480
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	%	-	0,27	0,27	0,27	0,25
Jumlah Cakupan Area Pelayanan	Kecamatan	10	10	10	10	14
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	%	-	35,38	35,38	35,38	30,73
Persentase Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan						
Penegakan Hukum Lingkungan	%				25,00	73,00
Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa indikator yang konstan setiap tahunnya seperti Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam & Lingkungan Hidup dan terdapat beberapa indikator yang cenderung meningkat setiap tahunnya seperti timbulan



sampah yang ditangani. Indikator yang konstan tiap tahunnya menunjukkan kondisi lingkungan yang diukur menggunakan indikator tersebut stabil. Sedangkan indikator yang cenderung meningkat menunjukkan kondisi lingkungan yang mengalami dinamika peningkatan.

1. Pengelolaan Sampah

Dalam melakukan pengelolaan sampah, Kabupaten Mojokerto telah menerbitkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Perbup tersebut memuat besaran target pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana yang telah diamanatkan Perpres. Selain itu, sebagai bentuk keseriusan Pemkab Mojokerto dalam menangani sampah, pada tahun 2018 masterplan pengelolaan sampah Kabupaten Mojokerto telah selesai disusun sebagai arahan untuk mencapai target pengelolaan sampah yang telah ditetapkan.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Mojokerto dimulai dari sumber sampah baik itu dari permukiman, perkantoran maupun fasilitas umum, Tempat Pengumpulan Sementara (TPS) dan/atau TPS 3R dan akhirnya menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Saat ini Kabupaten Mojokerto memiliki 2 (dua) TPA yang terletak di Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari yang saat ini memiliki luas sebesar 4 (empat) Hektar setelah pada tahun 2017 diperluas sekitar 2,5 Hektar dan TPA Karangdiyeng yang berada di Desa Karangdiyeng Kecamatan Kutorejo yang selesai dibangun pada Nopember tahun 2020 dengan luas 4,1 Hektar. Konsep pengelolaan sampah yang digunakan adalah konsep 3R yaitu upaya pengurangan sampah, penggunaan kembali dan pendaur ulangan sampah.



Gambar 2.33
Peta Pelayanan Sampah Kabupaten Mojokerto



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.65
Berat Sampah Yang masuk TPA Belahan Tengah

Bulan	Berat Sampah yang Masuk TPA Belahan Tengah		
	2018	2019	2020
Januari	1,438,680	987,580	1,494,660
Februari	1,414,210	977,250	1,602,010
Maret	1,194,520	1,084,980	1,705,780



Bulan	Berat Sampah yang Masuk TPA Belahan Tengah		
	2018	2019	2020
April	1,194,520	888,840	1,489,830
Mei	1,017,070	454,720	1,220,960
Juni	1,114,630	840,590	1,325,450
Juli	1,096,610	982,630	1,243,240
Agustus	968,360	913,760	862,480
September	890,330	858,410	980,900
Oktober	1,065,690	1,091,720	1,339,220
November	777,810	1,057,170	1,383,280
Desember	956,300	1,231,330	1,064,670
Jumlah	13,128,730	11,368,980	15,712,480
Jumlah Sampah kg / hari	36,468.69	31,580.50	43,645.78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2. Kinerja Pengelolaan Sampah Terkait dengan Jakstrada

Berkaitan dengan Jakstrada, berikut capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.66
Capaian Pengelolaan Sampah Tahun 2020

Indikator	Capaian Pengelolaan Sampah			
	2020			
	Target		Capaian	
	ton	%	ton	%
Timbulan Sampah	841068 m3	100	258460 m3	30.7300
Pengurangan	210267.1 m3	25	213567 m3	25.3924
Penanganan	630801 m3	75	44892.8 m3	5.3376

Sumber Data : DLH Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Pada Tahun 2020 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah secara umum tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah kapasitas TPA Belahan Tengah yang berada di Desa Belahan Tengah Kecamatan Mojosari



telah penuh (*overload*). Faktor yang kedua adalah TPA Karangdiyeng yang tergolong TPA baru (selesai pembangunan Nopember tahun 2020) belum dapat dioperasikan.

B. Pencemaran Lingkungan Oleh Pelaku Usaha Dan/Atau Kegiatan

Pada tahun 2020 terdapat 3 (Tiga) pengaduan masyarakat yang disampaikan Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dan segera ditindak lanjuti. Jumlah Pengaduan pada tahun 2020 cenderung menurun dibanding Tahun sebelumnya, hal ini merupakan salah satu capaian yang baik, namun pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan harus tetap dilakukan mengingat adanya kemungkinan pencemaran lingkungan yang tidak dilaporkan ataupun luput dari pengawasan. Adapun Penindakan Permasalahan pencemaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan pada tahun 2020 disebutkan pada table berikut ini :

Tabel 2.67
Penindakan Permasalahan Pencemaran Lingkungan Tahun 2020

No	Tahun 2020			
	Nama Perusahaan yang Diadukan	Kategori berdasarkan Permasalahan	Permasalahan / Temuan Kondisi di Lapangan	Tindak Lanjut
1	Industri cecek	mengakibatkan sumur baunya tidak sedap dan air sungai terasa gatal	Indusrti cecek puri agar segera melengkapi perizinan	Telah dilakukan verifikasi pengaduan untuk mematuhi peraturan
2	PT. Braja Cakra Buntara (BCB)	menyampaikan aspirasi warga Desa Sidorejo terkait dampak produktifitas PT. Braja Cakra Buntara (BCB)		Memberi arahan
		Pembuangan slag almunium yang di masukkan kedalam karung dan di tumpuk di buang di pinggir suangai	Belum memiliki Izin sama sekali	Memberi arahan
3	PT. Al Rasheed Raya Japanan - Mojosari	Pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur verifikasi lapangan pada Hari Kamis Tanggal 13 Agustus 2020 PT. Al Rasheed Raya Japanan– Mojosari Desa Manduromanggajah Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto	Memberi arahan	Memberi arahan
		Pembuang Air Limbah Supratek	Hasil Pengujian Air Limbah	Pengujian Air Limbah Supratik



Sumber Data : DLH Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Pengaduan pada tahun 2020 cenderung menurun dibanding Tahun sebelumnya, hal ini merupakan salah satu capaian yang baik, namun pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan harus tetap dilakukan mengingat adanya kemungkinan pencemaran lingkungan yang tidak dilaporkan ataupun luput dari pengawasan.

C. Kondisi Lahan/Tanah

Kondisi lahan atau kondisi tanah di Kabupaten Mojokerto setelah dilakukan analisa dan evaluasi hasilnya tidak melebihi ambang kritis dan cenderung produktif, karena lahan yang tersedia di mafaatkan untuk perkebunan, persawahan, badan air dan beberapa ada menjadi non pertanian dan lahan kering. Ini berarti kalau kondisi lahan atau kondisi tanah yang ada di Kabupaten Mojokerto masih dalam batas wajar belum mengalami kerusakan yang signifikan. Adapun data mengenai evaluasi penggunaan tanah/lahan maupun data mengenai luasan tutupan lahan dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.68
Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan tutupan lahan di Kabupaten Mojokerto

No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)				
			Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung Terhadap Kawasan	1. Kawasan Hutan Lindung	4402.7	4402.7	-	-	-
		2. Kawasan Bergambut	-	-	-	-	-
		3. Kawasan Resapan Air	-	-	-	-	-
	Kawasan Perlindungan setempat	1. Sempadan Pantai	-	-	-	-	-
		2. Sempadan Sungai	2380	2380	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau	-	-	-	-	-
		4. Ruang Terbuka Hijau	-	-	-	-	-
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam	-	-	-	-	-
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya	-	-	-	-	-
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut	11276	11276	-	-	-
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut	-	-	-	-	-
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau	-	-	-	-	-
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut	-	-	-	-	-



No	Nama Kawasan	Luas Kawasan (Ha)	Tutupan Lahan (Ha)			
			Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
	7. Taman Hutan Raya	10181	10181	-	-	-
	8. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut	-	-	-	-	-
	9. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	-	-	-	-	-
Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor	-	-	-	-	-
	2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang	-	-	-	-	-
	3. Kawasan Rawan Banjir	-	-	-	-	-
Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam Geologi	i. Kawasan Keunikan Batuan dan	-	-	-	-
		ii. Kawasan Keunikan Bentang	-	-	-	-
		iii. Kawasan Keunikan Proses	-	-	-	-
	2. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	-	-	-	-
		ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	-	-	-	-
		iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	-	-	-	-
		iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	-	-	-	-
		v. Kawasan Rawan Tsunami	-	-	-	-
		vi. Kawasan Rawan Abrasi	-	-	-	-
		vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	-	-	-	-
3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	-	-	-	-	
	ii. Sempadan Mata Air	-	-	-	-	
Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfer	-	-	-	-	
	2. Ramsar	-	-	-	-	
	3. Taman Buru	-	-	-	-	
	4. Kawasan Perlindungan	-	-	-	-	
	5. Kawasan pengungsian	-	-	-	-	

Sumber :Dinas Kehutanan Kabupaten Mojokerto Tahun 221

**Tabel 2.69****Luas Perubahan Penggunaan Lahan Di Kabupaten Mojokerto**

No.	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)
1.	Pemukiman	-
2.	Industri	-
3.	Perkebunan	445,37
4.	Pertambangan	-
5.	Sawah	14.154,40
6.	Hutan	-
7.	Padang rumput dan semak-semak	-
8.	Rawa/Waduk	-
9.	Lahan kritis	-
10.	Lain-lain (Non Pertanian, Lahan Kering, Lahan Hutan dan Badan Air)	82.321,89
Total		96.921,66

Sumber : Perum Perhutani KPH Mojokerto, Tahun 2021

d. Penyediaan/Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berdasarkan pada table luas lahan menurut fungsi/status kawasan hutan, memang belum ada pemanfaatan ruang di Kabupaten Mojokerto yang dipakai untuk ruang terbuka hijau (RTH). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 2.70**Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Status Kabupaten Mojokerto**

No	Fungsi	Luas (Ha)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	4,0629
2.	Hutan Lindung	4402,7
3.	Taman Nasional	0
4.	Taman Wisata Alam	0
5.	Taman Buru	0
6.	Cagar Alam	0
7.	Suaka Margasatwa	11276
8.	Taman Hutan Rakyat	10181



No	Fungsi	Luas (Ha)
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	4,0629
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	0
3.	Hutan Kota	0
4.	Taman Hutan Rakyat	10181
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	0

Sumber : Perum Perhutani KPH Mojokerto, Tahun 2021

e. Sumber Daya Alam

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsure tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non fisik. Sumber daya ada yang dapat berubah (berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang maupun ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Sumber daya hayati adalah salah satu sumber daya dapat pulih (*renewable resources*) yang terdiri atas flora dan fauna. Sumber daya hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya hayati diantaranya adalah flora dan fauna. Sumber daya non hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya non hayati diantaranya adalah bahan mineral, air dan udara. Sumber daya alam Kabupaten Mojokerto sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan perkebunan, pertanian dan pemanfaatan hutan. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai luasan wilayah yang dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.71
Jenis Pemanfaatan Lahan di Kabupaten Mojokerto

No.	Lahan	(Ha)	Skala usaha	Luas (Ha)	Keterangan
1.	Tambang	-	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	-	-
2.	Perkebunan	985.33	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	985.33	-
3.	Pertanian	37653.4	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	37653.36	-



No.	Lahan	(Ha)	Skala usaha	Luas (Ha)	Keterangan
4.	Pemanfaatan Hutan	10871.8	Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	8749.8	-
			Rakyat	2122	-

Sumber :Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto 2021

Tabel 2.72

Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian di Kabupaten Mojokerto

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Area lahan (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Batuan	PT. Calvary Abadi	5,68/ Ha	120 m3/hr
2.	Tanah Urug	PT. Alam Sejahtera Harapan	20.33/ Ha	630 m3/hr
3.	Batuan/Sirtu	Fuad Novida Lukunuha	6,62/ Ha	216 m3/hr
4.	Batu / Sirtu	CV. Barokah	30 / Ha	720 m3/hr
5.	Batu / Sirtu	Fuat Novita Lukunuha	8,2 / Ha	252 m3/hr
6.	Batu / sirtu	PT. Calvary Abadi	5,71 / Ha	210 m3/hr
7.	Batu / Sirtu	Khoirul Anwar	7,61 / Ha	210 m3/hr
8.	Tanah Urug	CV. Jaya Adhi Perkasa	7,14 / Ha	168 m3/hr
9.	Sirtu	Pardi P. Sunar	6.047 / Ha	167.75 m3/hr
10.	Batuan	Lasmono	9.11 / Ha	120 m3/hr
11.	Batu dansirtu, urug	CV. Sumber Rejeki	6.66 / Ha	30.183 m3/hr
12.	Tanah urug	Semeru Tambang Abadi	31.596 / Ha	840 m3/hr
13.	Tanah urug	Supono	6.11 / Ha	216 m3/hr
14.	Batu danSirtu	Koperasi Amanatu Ummah	13.7 / Ha	216 m3/hr
15.	Batu danSirtu	CV. Mutiara Timur	10.13 / Ha	216 m3/hr
16.	Batu danSirtu	Beta MangkuAlam	8.4 / Ha	245 m3/hr



17.	Tanah Urug	CV. Rosa datama Sumber Buana	8.18 / Ha	540 m3/ha
18.	Tanah Urug	Yudho Hadi Utomo	7,9 / Ha	277.3 m3/hr
19.	Batu danSirtu	Faizal Arif	5.07 / Ha	187.5 m3/hr
21.	Sirtu	PT. Calvary Abadi	5.14 / Ha	182.94 m3/hr
22.	Sirtu	Faizal Arif	5.07 / Ha	287.59 m3/hr

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

f. Kondisi Udara

Kualitas udara berkaitan dengan pemakaian energi, terutama dari sector industri dan transportasi yang sebagian besar masih sangat tergantung kepada bahan bakar fosil, seperti minyak bumi dan batu bara (IKPLHD Jatim, 2016). Kondisi udara Kabupaten Mojokerto belum mengalami pencemaran. Kondisinya masih dalam batas ambang wajar. Adapun titik pantau dan hasil uji laboratorium mengenai pencemaran dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 2.73
Kualitas Udara Ambien Di Kabupaten Mojokerto 2020

Lokasi	HASIL UJI							
	SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)	O ₃ (µg/Nm ³)	NH ₃ (µg/Nm ³)	Pb (µg/Nm ³)	CO* (µg/Nm ³)	Kebisingan* (dBA)	Kecepatan Angin* (m/s)
	365	150	235		2	10000	70	
Halaman Kantor DLH Kab. Mojokerto, Jl. Pemuda No. 55 B, Mojosari	58.9	5.48	75.4	43.6	0.124	4724	54.1	0,5-1,8
Tugu UKS, Jl. Jayanegara Kab. Mojokerto	39.4	12.1	90.3	30.6	0.1783	5297	66.9	0,2-2,1
Halaman Depan Kantor Desa Jetis, Kec. Jetis	14.6	8.5	101.3	35	0.183	3722	54.4	0,5-1,8

Sumber :Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Pada Tabel 2.73 dapat dilihat bahwa kualitas udara Kabupaten Mojokerto memenuhi baku mutu udara ambien. Hal tersebut dapat dilihat dari parameter-parameter hasil uji laboratorium yang memenuhi baku mutu udara ambien.

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup kabupaten Mojokerto tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Capaian Urusan Lingkungan Hidup						
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	-	-	-	-	-	-
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL / HGB	km2	969,36	969,36	969,36	969,36	969,36
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota / Kawasan Perkotaan	km2	302,91	302,91	302,91	302,91	302,91
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan	ha	335,62	335,62	335,62	335,62	335,62
Persentase Luas Cakupan Permukiman yang Dilayani Pengangkutan Sampah (dari luas wilayah Kab. Mojokerto)	%	50.00	50.00	50.00	50.00	77.78
Terbangunnya TPA Baru	%	2 Hektar	-	-	-	4 hektar



Capaian Urusan Lingkungan Hidup						
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya TPS dan TPST	Unit	59.00	59.00	59+4=63	75+4=79	75+4=79
Timbulan Sampah yang Ditangani	kg	9.607.304	13.638.879	13.128.050	11.368.980	15.712.480
Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	0,27		0,27	0,27	0,27	0,25
Persentase Cakupan Area Pelayanan	Kecamatan	10.00	10.00	10.00	10.00	14.00
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	35,38		35,38	35,38	35,38	30.73
Persentase Kepemilikan Dokumen Lingkungan dan Izin Lingkungan sesuai Peraturan Perundang-Undangan	%		46 SPPL	77 SPPL	117 SPPL	120 SPPL
Penegakan Hukum Lingkungan	%				25.00	73.00
Air	%			IKA : 58.7	IKA : 62	IKA : 60
Udara	%			IKU : 70.19	IKU : 90.29	IKU : 88.26
Limbah cair	%	5.00	2.00	24.00	19.00	19.00
Limbah padat	%					
Pemenuhan Informasi Kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	100.00	100.00	100.00	100.00	-
IKLH			57,35	67,478	62,37	64,158

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto 2021



2.3.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa

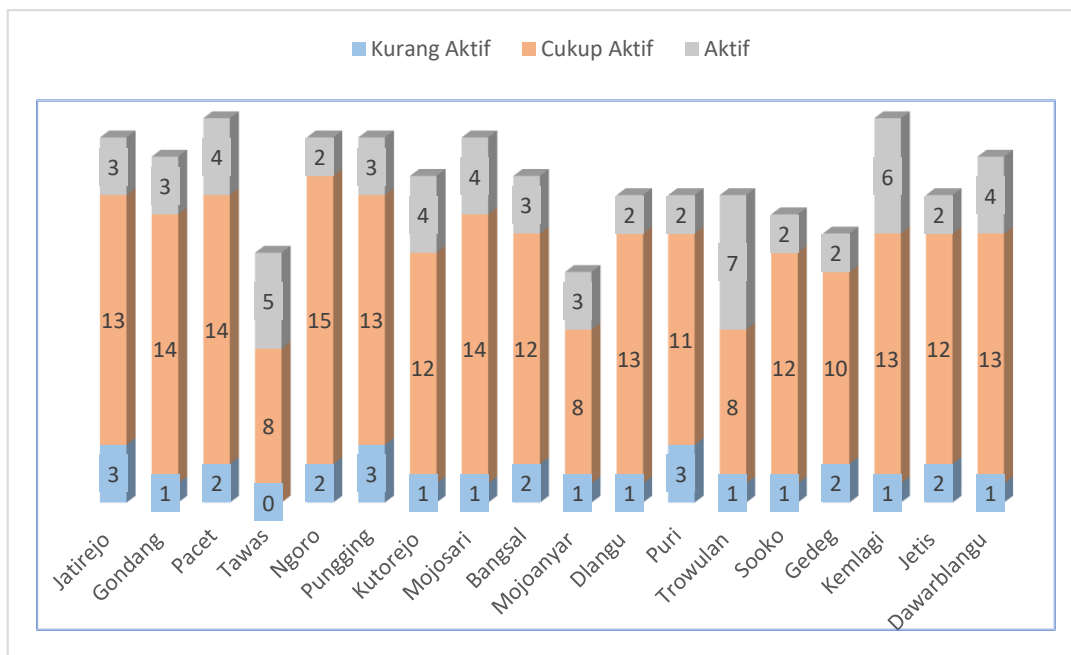
Pemberdayaan Masyarakat Desas sebagai salah satu komponen dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan merupakan urusan wajib yang harus dilakukan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh dan mengelola faktor-faktor produksi, serta penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu alternative strategi pengelolaan pembangunan yang mewujudkan adanya keterlibatan langsung masyarakat baik secara perorangan sebagai warga masyarakat maupun kelembagaan dalam segala proses pembangunan.

Pemberdayaan Masyarakat dan desa dalam hal ini masih banyak ditemukan pada beberapa Desa di Kabupaten Mojokerto terkait Pemahaman perangkat dan kepala desa tentang BUMDes, dikarenakan Belum tercipta komunikasi yang baik antara elit desa dengan warga masyarakat mengenai berbagai isu yang seharusnya dikomunikasikan. Akibatnya, banyak BUMDes yang strukturnya diisi oleh orang-orang dekat kepala desa atau bahkan keluarganya sendiri. Makanya banyak warga desa tidak tahu isu yang berkembang mengenai BUMDesa.

Permodalan adalah persoalan klasik yang selalu dikeluhkan pelaku usaha untuk keberlanjutan usahanya, salah satu cara BUMDes bisa mendapatkan modal dengan bantuan modal usaha dari dana Pemerintah (APBD, APBD Propinsi maupun APBN), bisa juga dengan melakukan kerjasama atau kemitraan dengan BUMN dan Swasta melalui Dana CSR, tetapi selalu terkendala dengan salah satu persyaratan bahwa BUMDesa harus ada legal/formal dan Payung Hukum BUM Desa.



Gambar 2.34
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Menurut Kecamatan Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Desa Maju	Desa	29	21	71	86	114
Desa Mandiri	Desa	0	0	12	12	21
Persentase jumlah binaan lembaga ekonomi pedesaan	%	29%	57,6 %	62%	68,1%	70,6 %
Peningkatan sarana prasarana pasar desa	Unit	14 pasar desa	14 pasar desa	14 pasar desa	15 pasar desa	15,00
Rata-rata jumlah binaan lembaga masyarakat	orang	1520	1520	1520	1520	1520,00
Persentase LPM Berprestasi	%	13,16%	17,76%	18,42%	20,07%	20,07
Persentase PKK aktif	%	100%	100%	100%	100%	100%



Aspek/Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	–	–	–	–	–	–
Rata-rata jumlah binaan kelompok masyarakat	kelompok	21,616	28,473	28,473	28,473	28,473

Sumber: DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.76
Data Dukung Bumdes Kabupaten Mojokerto

NO	BUMDESa	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BUMDes	85	97	110	174	227
2	Jumlah BUMDesa aktif	17	28	52	116	156

Sumber Data : DPMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga Berencana adalah usaha untuk mengukur jumlah dan jarakanak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai hal tersebut maka dibuatlah beberapa cara atau alternative untuk mencegah ataupun menunda kehamilan. Cara-cara tersebut termasuk kontrasepsi atau pencegahan kehamilan dan perencanaan keluarga. Berikut merupakan table jumlah peserta aktif keluarga berencana tahun 2018 – 2020 di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.77
Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

No.	Uraian	2018		2019		2020	
		KK	%	KK	%	KK	%
1.	Keluarga Pra Sejahtera	67.059	19,98	66.883	20,02	65.663	23.221
2.	Keluarga Sejahtera I	71.885	21,42	65.097	19,48	59.083	27.102
3.	Keluarga Sejahtera II	196.620	58,59	202.161	60,50	209.288	63.23
	Jumlah	335.564	100	334.141	100	333.974	100

Sumber : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021



Tabel 2.78
Jumlah Peserta Aktif Keluarga Berencana Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2019

No.	Peserta KB Aktif	2018		2019		2020	
		KK	%	KK	%	KK	%
1.	IUD	23.652	12,48	23.800	12,48	25.002	13.1
2.	MOW	12.924	6,82	13.005	6,82	13.655	7.16
3.	MOP	404	0,21	407	0,21	427	0.22
4.	Kondom	5.417	2,86	5.451	2,86	5723	3.003
5.	Implant	20.350	10,75	20.478	10,74	21501	11.27
6.	Suntik	95.416	50,38	96.014	50,38	10.081	52.89
7.	Pil	31.235	16,49	31.431	16,49	33.002	17.31
	Jumlah PA	189.398		190.586		197.115	
	Jumlah PUS	235.221		240.593		252.623	
	% PA/PUS	80,52		80,87		84,91	

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Berdasarkan hasil pendataan sampai dengan Desember 2019 jumlah peserta KB aktif adalah sebanyak 190.586 atau 80,87% dari Pasangan Usia Subur (PUS) sejumlah 240.593. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keluarga berencana masih tinggi dan berdampak pada jumlah anak dalam keluarga.

Selain Peserta KB aktif dan jumlah tahapan Keluarga, capaian urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu TFR, ASFR-15, mCPR dan Unmet Need KB. TFR (Total Fertility Rate) atau angka kelahiran total TFR adalah angka yang menunjukkan rata rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksinya (usia 15 – 19 tahun). Sedangkan ASFR-15 atau Age Specific Fertility Rate 15 – 19 ASFR adalah angka yang menunjukkan jumlah kelahiran pada wanita usia 15 –19 tahun per 1000 kelahiran. Selanjutnya mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate atau Prevalensi Kontrasepsi Modern). mCPR adalah prosentase jumlah pasangan usia subur yang menggunakan salah satu kontrasepsi modern (IUD, Implant, Vasektomi/MOP, Tubektomi/MOW, Sutik, Pil dan Kondom). Dan yang terakhir Unmet Need KB. Unmet Need KB adalah PUS yang menggunakan metode kontrasepsi tetapi belum terlayani atau tidak ikut KB karena berbagai alasan. Unmet Need ini terdiri dari PUS yang Ingin Anak di Tunda (IAT) dan PUS yang Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL). Adapun target capaiannya sebagai berikut :

Tabel 2.79
Target Capaian TFR, ASFR15-19, mCPR dan Unmet Need KB

	TFR	ASFR 15-19	mCPR	Unmet Need KB
2021	1.95	3.29	67.25	6.32



	TFR	ASFR 15-19	mCPR	Unmet Need KB
2022	1.93	3.25	57.67	6.14
2023	1.9	3.18	68.09	5.96
2024	1.87	3.12	68.63	5.8
2025	1.83	3.03	68.85	5.62

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dikabupaten Mojokerto juga tercatat banyak usia remaja (sekolah) yang belum mendapatkan fasilitasi pengembangan kualitas diri melalui wadah/forum PIKR dan BKR. Jumlah kelompok PIK 243 kelompok dan jumlah kelompok PIK yang aktif 243 jadi presentase keseluruhan 100 %.

Tabel 2.80
Cakupan keaktifan anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

No.	Keaktifan anggota kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	Tahun 2020	
		Jumlah	Persentase
1	Bangsals	7	2,88
2	Dawarblandong	12	4,94
3	Dlanggu	17	7,00
4	Gedeg	10	4,12
5	Gondang	18	7,41
6	Jatirejo	12	4,94
7	Jetis	16	6,58
8	Kemlagi	20	8,23
9	Kutorejo	10	4,12
10	Mojoanyar	11	4,53
11	Mojosari	10	4,12
12	Ngoro	19	7,82
13	Pacet	14	5,76
14	Pungging	10	4,12
15	Puri	17	7,00
16	Sooko	10	4,12
17	Trawas	14	5,76
18	Trowulan	16	6,58
Kabupaten Mojokerto		243	100

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Di lihat dari jumlah perkawinan pertama wanita usia di bawah 20 tahun di banding dengan jumlah semua perkawinan kali 100 %, jumlah perkawinan di bawah 20 tahun sebanyak 1.410 sedangkan jumlah perkawinan keseluruhan sebanyak 8.215. Untuk menanggulangi tingginya perkawinan anak bisa lewat kelompok PIR – dan BKR.

Tabel 2.81
Cakupan Perkawinan pertama penduduk Wanita Usia di bawah 20 Tahun

No.	Perkawinan pertama penduduk wanita usia di bawah 20 tahun	Tahun 2020		
		Jumlah perkawinan di bawah 20 Tahun	Jumlah perkawinan	Persentase
1	Bangsals	55	343	16.03
2	Dawarblandong	110	357	30.81
3	Dlanggu	55	387	14.21
4	Gedeg	54	449	12.03
5	Gondang	76	346	21.97
6	Jatirejo	118	337	35.01
7	Jetis	62	485	12.78
8	Kemlagi	110	467	23.55
9	Kutorejo	90	518	17.37
10	Mojoanyar	30	352	8.52
11	Mojosari	65	609	10.67
12	Ngoro	129	666	19.37
13	Pacet	40	451	8.87
14	Pungging	81	647	12.52
15	Puri	122	581	21.00
16	Sooko	81	467	17.34
17	Trawas	46	238	19.33
18	Trowulan	86	515	16.70
	Kabupaten Mojokerto	1,410	8,215	17.16

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.82
Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre

No.	Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	Tahun 2020	
		Jumlah Kelompok	Persentase
1	Bangsals	7	5.6
2	Dawarblandong	8	6.4
3	Dlanggu	8	6.4
4	Gedeg	7	5.6
5	Gondang	7	5.6
6	Jatirejo	6	4.8



No.	Jumlah PIK remaja dan BKR yang mendapatkan pembinaan genre	Tahun 2020	
		Jumlah Kelompok	Persentase
7	Jetis	7	5.6
8	Kemlagi	7	5.6
9	Kutorejo	7	5.6
10	Mojoanyar	7	5.6
11	Mojosari	7	5.6
12	Ngoro	7	5.6
13	Pacet	6	4.8
14	Pungging	7	5.6
15	Puri	7	5.6
16	Sooko	8	6.4
17	Trawas	6	4.8
18	Trowulan	6	4.8
	Kabupaten Mojokerto	125	100

Sumber: DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Total peserta KB aktif semua metode 197.565 akseptor sedangkan KB MKJP nya hanya 64.801 akseptor dengan presentase sebesar 32,80 %.



Tabel 2.83
Pencapaian Peserta KB Aktif Menggunakan MKEJ

No.	Peserta KB Aktif Menggunakan MKEJ	Tahun 2020																		
		Bangsals	Dawar blandong	Dlanggu	Gedeg	Gondang	Jatirejo	Jetis	Kemlagi	Kutorejo	Mojoanyar	Mojosari	Ngoro	Pacet	Pungging	Puri	Sooko	Trawas	Trowulan	Kab. Mojokerto
1	AKDR																			
	Jumlah Pasangan	711	1,887	1,286	1,839	1,558	653	824	1,137	1,238	775	2,887	1,522	1,911	3,059	1,344	1,918	769	816	26,134
	Persentase (%)	2.72	7.22	4.92	7.04	5.96	2.50	3.15	4.35	4.74	2.97	11.05	5.82	7.31	11.71	5.14	7.34	2.94	3.12	100
2	Vasektomi																			
	Jumlah Pasangan	12	35	63	22	28	3	59	58	7	20	13	11	13	18	20	8	9	11	410
	Persentase (%)	2.93	8.54	15.37	5.37	6.83	0.73	14.39	14.15	1.71	4.88	3.17	2.68	3.17	4.39	4.88	1.95	2.20	2.68	100
3	Tubektomi																			
	Jumlah Pasangan	458	931	1,002	898	678	606	569	796	763	457	1,132	1,108	663	734	801	869	729	717	13,911
	Persentase (%)	3.29	6.69	7.20	6.46	4.87	4.36	4.09	5.72	5.48	3.29	8.14	7.96	4.77	5.28	5.76	6.25	5.24	5.15	100
4	Susuk																			
	Jumlah Pasangan	669	2,240	1,240	1,641	1,503	766	750	1,173	1,551	917	1,619	1,478	1,854	1,687	1,821	799	1,259	1,379	24,346
	Persentase (%)	2.75	9.20	5.09	6.74	6.17	3.15	3.08	4.82	6.37	3.77	6.65	6.07	7.62	6.93	7.48	3.28	5.17	5.66	100

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.84
Pencapaian Peserta KB Aktif Menggunakan Non MKEJ

no.	Peserta KB Aktif Menggunakan Non MKEJ	Tahun																		
		Bangsals	Dawar blandong	Dlanggu	Gedeg	Gondang	Jatirejo	Jetis	Kemlagi	Kutorejo	Mojo anyar	Mojo sari	Ngoro	Pacet	Pungging	Puri	Sooko	Trawas	Tro wulan	Kab. Mojo kerto
1	Suntik																			
	Jumlah Pasangan	5,370	3,405	4,750	5,665	3,282	3,865	8,991	4,588	5,197	4,328	4,807	6,693	4,540	7,532	5,083	6,071	2,829	6,729	93,725
	Persentase (%)	5.73	3.63	5.07	6.04	3.50	4.12	9.59	4.90	5.54	4.62	5.13	7.14	4.84	8.04	5.42	6.48	3.02	7.18	100
2	Tablet																			
	Jumlah Pasangan	1,040	1,697	1,021	2,312	940	858	2,196	1,337	3,066	1,134	2,247	3,035	1,312	2,253	3,166	1,525	821	2,627	32,587
	Persentase (%)	3.19	5.21	3.13	7.09	2.88	2.63	6.74	4.10	9.41	3.48	6.90	9.31	4.03	6.91	9.72	4.68	2.52	8.06	100
3	Kondom																			
	Jumlah Pasangan	294	307	59	551	23	117	468	815	253	55	775	346	72	727	824	479	44	243	6,452
	Persentase (%)	4.56	4.76	0.91	8.54	0.36	1.81	7.25	12.63	3.92	0.85	12.01	5.36	1.12	11.27	12.77	7.42	0.68	3.77	100

Sumber Data : DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah penduduk lahir, mati datang pergi dengan perhitungan : Jumlah penduduk tahun 2019 di kurangi tahun 2020 di bagi tahun 2020 di kali 100 %.

Jumlah Unmeet need 18.718 sedangkan jumlah PUS sebesar 245.061 jadi prosentase sebesar 8 % di harapkan unmeet need kurang lebih sekitar 7 % .

Tabel 2.85
Cakupan Pasangan usia Subur yang tidak ingin anak tetapi tidak ber-KB (Unmeet Need)

No.	PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	Tahun 2020		
		Jumlah Pasangan	PUS	Persentase
1	Bangsals	743	10.600	3.97
2	Dawarblandong	732	12.858	3.91
3	Dlanggu	1,054	11.699	5.63
4	Gedeg	632	16.207	3.38
5	Gondang	1,241	9.860	6.63
6	Jatirejo	561	8.478	3.00
7	Jetis	818	17.593	4.37
8	Kemlagi	1,274	11.961	6.81
9	Kutorejo	1,121	14.964	5.99
10	Mojoanyar	754	9.589	4.03
11	Mojosari	1,201	16.689	6.42
12	Ngoro	1,368	17.391	7.31
13	Pacet	991	12.893	5.29
14	Pungging	2,302	19.885	12.30
15	Puri	1,298	16.268	6.93
16	Sooko	890	14.689	4.75
17	Trawas	725	7.869	3.87
18	Trowulan	1,013	15.568	5.41
	Kabupaten Mojokerto	18,718	245.061	100

2.3.2.8 Perhubungan

Pemenuhan fasilitasi kebutuhan mobilisasi masyarakat untuk melakukan kegiatannya menjadi hal yang utama yaitu pemenuhan kebutuhan layanan transportasi. Transportasi yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto sangat tergantung pada transportasi jalan, sehingga dapat dikatakan transportasi jalan merupakan urat nadi transportasi di Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan transportasi jalan tidak boleh sepotong - potong dan dapat terintegrasi dengan baik. Kedudukan dan fungsi sarana dan prasarana jalan yang sedemikian pentingnya menjadikan infrastruktur jalan ini harus dikelola secara baik secara manajerial maupun konstruksi. Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung dengan manajemen lalu lintas yang baik.

**Tabel 2.86****Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020**

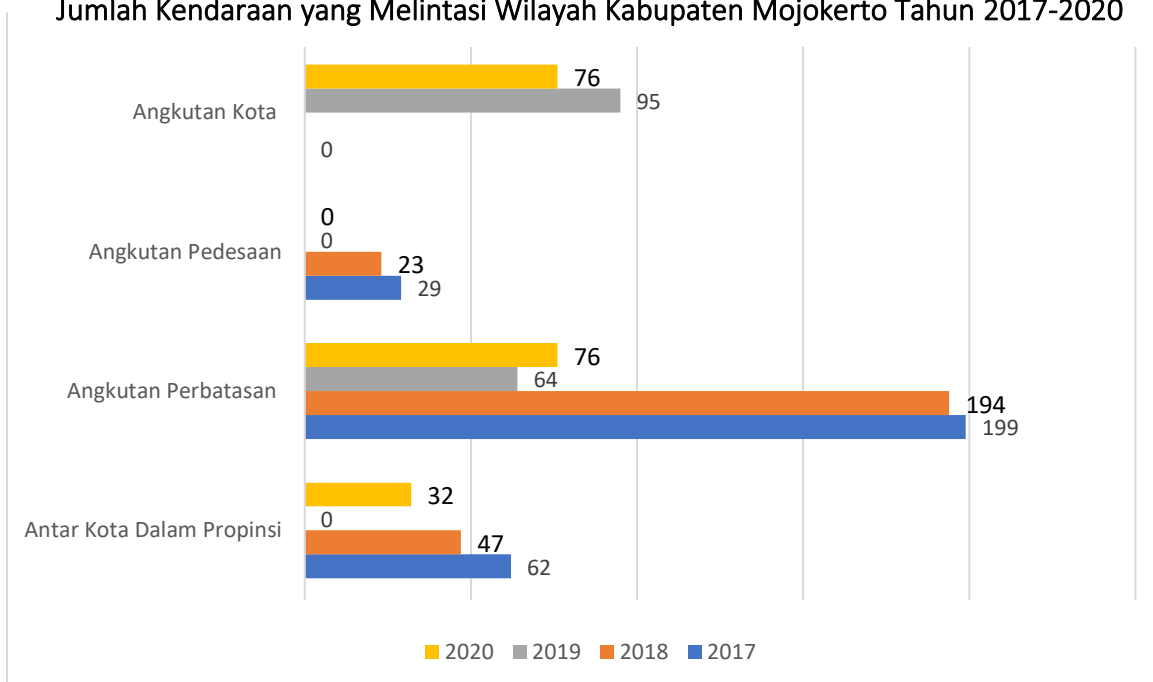
No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020
			Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Persentase kualitas dan kuantitas rambu lalu lintas, RPPJ, APILL, dan marka jalan	%	59	35	98%
1.1	Pemasangan rambu lalu-lintas	buah	143	255	42
1.2	Pemasangan Apill	unit	11	8	8
1.3	Pengecatan marka jalan	m ²	2.247	2.208	1160
2.	Persentase prasarana penunjang LLAJ (halte. Guard drill)	%	43	39	0
2.1	Pemasangan Guardrill	M	110	158	0
2.2	Pemasangan Delineator	buah	0	258	0
3.	Jumlah sarana penunjang LLAJ (halte, guard rill, Delelineator)	%	43	45	0
4.	Jumlah orang terangkut angkutan umum	Orang	743.480	680.320	468.212
5.	Jumlah orang/brg melalui terminal per tahun	Orang/Ton	743.900	643.000	543.000
6.	Jumlah uji kir angkutan umum	Kendaraan	10.796	10.494	6.460
7.	Jumlah Terminal tipe B dan C	Terminal	7	7	7
8.	Jumlah angkutan darat	Kendaraan	557.180	482.903	633.630
9.	Kepemilikan KIR angkutan umum	Kendaraan	10.796	10.494	6.460
10.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Menit	15	15	15
11.	Pendapatan Bidang Perhubungan	Rp.	7.464.007.537,14	7.628.821.550,00	6.557.943.400,00

Sumber : DPRKP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Gambar 2.35

Jumlah Kendaraan yang Melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Jumlah kendaraan yang melintasi Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020 beragam. Pada angkutan perbatasan memiliki nilai cukup tinggi disbanding lainnya. Pada tahun 2017 angkutan perbatasan 199 kendaraan, kemudian menurun menjadi 194 pada tahun 2018 dan 64 kendaraan saja pada tahun 2019 Namun Sempat naik menjadi 76 Pada Tahun 2020. Sedangkan jumlah kendaraan yang rendah adalah angkutan pedesaan, pada tahun 2017 dan 2018 hanya 23 dan 29 kendaraanya

Tabel 2.87

Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja	Koefisi en	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio ijin trayek	%	84,62	76,92	67,69	52,31	40
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	9072	8433	10.796	10.494	6.460
Kepemilikan KIR angkutan umum	%	85,54	79,03	91,30	97,20	98,66
Jumlah Terminal	Unit	7	7	7	7	7
Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	orang	858.230	804.552	743.480	680.320	468.212
Sarana Prasarana Transportasi	%	56,77	55,37	57,18	58,2	63,03

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelayanan urusan perhubungan Kabupaten Mojokerto cenderung stagnan dan kurang memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa dilihat sarana prasarana yg tersedia hanya sedikit dan kurang layak. Akibatnya jumlah orang yg menggunakan kendaraan umum semakin menurun dari tahun ke tahun

2.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi instansi dan masyarakat, mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di instansi, serta mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui e-government. Pencapaian kinerja dalam mendukung keberhasilan urusan komunikasi dan informatika tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan dengan capaian indikator keberhasilan seperti terlihat pada table berikut :

Tabel 2.88
Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020

No	Kegiatan	Satuan	2018	2019	2020
			Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Jumlah sarana IT dan jenis media informasi yan digunakan (KIM, Wika FM, Tabloid Majatama, Web)	Kelompok	4	4	77
2.	Kerjasama dengan mass media (media cetak dan elektronik)	%	95	95	95
3.	Jumlah layanan e-Gov	Unit	16	20	20
4.	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	Buah	45	40	
5.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Buah	6	7	4
6.	Jumlah menu <i>Website</i> milik pemerintah daerah	Menu	20	20	10
7.	Jumlah Subdomain mojkertokab.go.id	Sub domain	71	90	85
8.	Jumlah Jaringan Internet Untuk OPD	Jaringan	86	85	89
9.	Jumlah Layanan Informasi Dan Pengaduan	Kegiatan	2	3	3

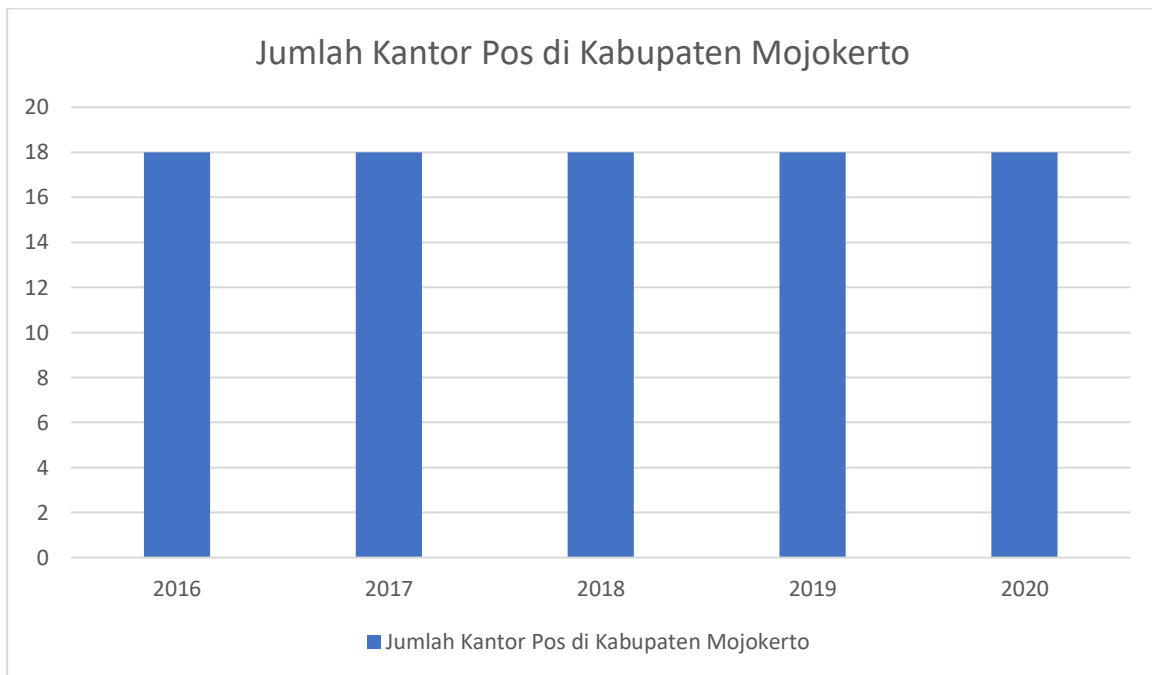
Sumber: Dinas Kominfo dan Bagian Humas Setda Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Penyelenggaraan komunikasi di Kabupaten Mojokerto didukung dengan adanya keberadaan Kantor Pos di Kabupaten Mojokerto. Salah satu fungsi keberadaan Kantor Pos adalah untuk membantu kelancaran komunikasi aktivitas masyarakat maupun komunikasi



penyelenggaraan pemerintahan. Kabupaten Mojokerto memiliki kantor pos sejumlah 18 kantor yang tersebar dalam seluruh kecamatan.

Gambar 2.1
Jumlah Kantor Pos di Kecamatan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

2.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun, berdasarkan pembagian kewenangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten/kota pada urusan ini adalah sebatas pada urusan koperasi dan usaha mikro. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan Rapat Anggota tahunan atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha. Berikut adalah data tentang koperasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020:



Gambar 2.36
Jumlah Koperasi Menurut Sektor Usaha di Kabupaten Mojokerto Tahun 2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Data koperasi menunjukkan sampai dengan tahun 2019 jumlah koperasi yaitu 762 lembaga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 koperasi tidak aktif atau sekitar 8,01% dan 701 koperasi tercatat aktif atau 91,99%. Angka ini meningkat sangat tajam jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang berjumlah 542 koperasi atau selama tahun 2019 meningkat sebanyak 220 koperasi. Berikutnya, data koperasi menurut sektor usaha masih didominasi oleh sektor usaha jasa keuangan dan asuransi yaitu sebesar 591 koperasi atau 77,56%. Sektor usaha kedua ditempati oleh usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang berjumlah 62 koperasi atau sekitar 8,14%. Disusul kemudian sektor usaha koperasi akomodasi dan makan minum sebanyak 55 koperasi atau 7,22% dan sisanya sebanyak 54 koperasi memiliki sektor usaha jasa lain sebanyak 54 koperasi atau 7,09%. Sedangkan, menurut jenis koperasi, masih didominasi oleh koperasi konsumen sebanyak 588 koperasi atau 77,17%. Disusul kemudian koperasi simpan pinjam sebanyak 89 koperasi atau 11,68% dan berikutnya adalah koperasi produsen sebanyak 87 koperasi atau 11,42%. Data jenis usaha koperasi ini menunjukkan masih rendahnya jumlah koperasi produsen sebagai pilar ekonomi produktif masyarakat terutama untuk mengolah potensi sumber-sumber daya lokal daerah untuk mendukung pengembangan pariwisata. Menariknya adalah jumlah anggota koperasi produksi sangat besar, yaitu 82.658 orang anggota atau sekitar 51,60% dan disusul anggota koperasi konsumen sebesar 60.855 orang atau 37,99%. Data ini menunjukkan animo masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk berusaha sangat dan tergabung ke koperasi sangat tinggi dan menjadi potensi besar dikembangkan.



Sedangkan data koperasi berdasarkan jumlah anggotanya ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.89
Data Koperasi Berdasarkan Jumlah Anggotanya

Kecamatan Subdistrict		TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Jatirejo	1 626	3 109	1 474
2	Gondang	4 505	5 473	4 323
3	Pacet	5 268	5 135	2 917
4	Trawas	337	1 003	528
5	Ngoro	12 488	13 700	12 471
6	Pungging	7 545	6 557	4 336
7	Kutorejo	7 652	6 051	1 233
8	Mojosari	3 812	5 365	4 093
9	Bangsalsari	1 738	1 756	1 157
10	Mojoanyar	6 476	6 184	6 192
11	Dlanggu	6 880	19 707	6 249
12	Puri	7 206	20 351	2 845
13	Trowulan	12 897	11 907	797
14	Sooko	4 335	25 295	5 528
15	Gedeg	1 727	8 935	8 488
16	Kemlagi	1 546	5 936	5 546
17	Jetis	6 618	7 254	6 914
18	Dawarblondong	7 628	8 531	1 458
JUMLAH		100 284	162 249	76 549

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Mengacu pada tabel tersebut, jika dilihat dari jumlah anggota koperasi, pada tahun 2019 sebanyak 162.249 orang anggota. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2018 sebanyak 100.284 orang anggota atau meningkat 61.965 orang selama tahun 2019. Penambahan jumlah anggota koperasi yang sangat tinggi di Tahun 2019 menunjukkan bahwa semangat mendirikan koperasi masih sangat tinggi, meski tingkat kesadaran penduduk untuk berkoperasi masih sangat rendah. Namun, kondisi tersebut tidak berlanjut di Tahun 2020, dimana terjadi penurunan jumlah anggota koperasi secara drastis, yaitu hanya 76.549 orang anggota saja. Penurunan yang cukup tajam, dan kondisi demikian dimungkinkan karena adanya pandemi covid 19 yang membawa dampak luar biasa terhadap perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, untuk data pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto terlihat melalui beberapa tabel berikut :



Tabel 2.90
Data Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro

Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro di Kabupaten Mojokerto				
No.	Kecamatan	Total 2018	Total 2019	Total 2020
1	Ngoro	1023	1886	1638
2	Mojoanyar	800	1332	2122
3	Dawarblandong	1240	1826	2303
4	Kemlagi	1198	1782	1786
5	Puri	1063	1566	1933
6	Trowulan	814	1219	1658
7	Dlanggu	1267	1880	1296
8	Trawas	545	638	1940
9	Jatirejo	985	1420	2176
10	Gondang	1199	1609	1652
11	Mojosari	1283	2244	3366
12	Jetis	692	1100	2242
13	Pungging	1484	2033	1903
14	Pacet	1104	1524	2906
15	Bangsals	1067	1480	1878
16	Gedeg	906	1468	1539
17	Sooko	822	1227	784
18	Kutorejo	1356	1964	1614
Jumlah		18848	28198	34736

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan data wilayah sebaran usaha mikro di Kabupaten Mojokerto tersebut, terlihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah usaha mikro terbanyak adalah Kecamatan Mojosari dengan angka sebanyak 3.366 pelaku usaha mikro di Tahun 2020. Hal tersebut sangat dimungkinkan karena posisi Kecamatan Mojosari sebagai salah satu wilayah strategis pengembangan ekonomi Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya di posisi terbanyak kedua pada Tahun 2020 adalah Kecamatan Pacet yang mengalami peningkatan sangat signifikan dibanding Tahun 2019 dimana jumlah usaha mikro bertambah sebanyak 1.382. Pertumbuhan jumlah usaha mikro yang sangat tinggi tiap tahunnya, menunjukkan geliat perekonomian yang tumbuh di wilayah tersebut. Dalam tabel tersebut, terlihat 4 (empat) kecamatan yang memiliki pertumbuhan jumlah usaha mikro tertinggi (lebih dari 1000 pelaku usaha mikro) di Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 yaitu : Kecamatan Pacet dengan penambahan sebanyak 1.382 pelaku UM, Kecamatan Trawas bertambah 1.302 pelaku UM, Kecamatan Jetis sebanyak 1.142 pelaku UM, dan Kecamatan Mojosari bertambah sebanyak 1.122 pelaku UM.



Tabel 2.91
Data Sebaran Kelompok Kategori Usaha Mikro

Data Usaha Mikro berdasarkan Kluster Cakupan Wilayah Pemasaran				
No.	KLUSTER	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	Bahan Olahan Pertanian	4950	7445	9047
2	Bahan Olahan Non Pertanian	1295	1960	2511
3	Jasa	2302	3470	4484
4	Perdagangan	9321	13840	16442
5	Kerajinan	980	1483	2252
TOTAL		18848	28198	34736

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.92
Data Usaha Mikro Menurut Aset dan Omset

No.	KLUSTER	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		TOTAL OMSET	TOTAL ASET	TOTAL OMSET	TOTAL ASET	TOTAL OMSET	TOTAL ASET
1	Bahan Olahan Pertanian	4950	4950	7445	7445	9047	9047
2	Bahan Olahan Non Pertanian	1295	1295	1960	1960	2511	2511
3	Jasa	2302	2302	3470	3470	4484	4484
4	Perdagangan	9321	9321	13840	13840	16442	16442
5	Kerajinan	980	980	1483	1483	2252	2252
TOTAL		18848	18848	28198	28198	34736	34736

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab Mojokerto Tahun 2021

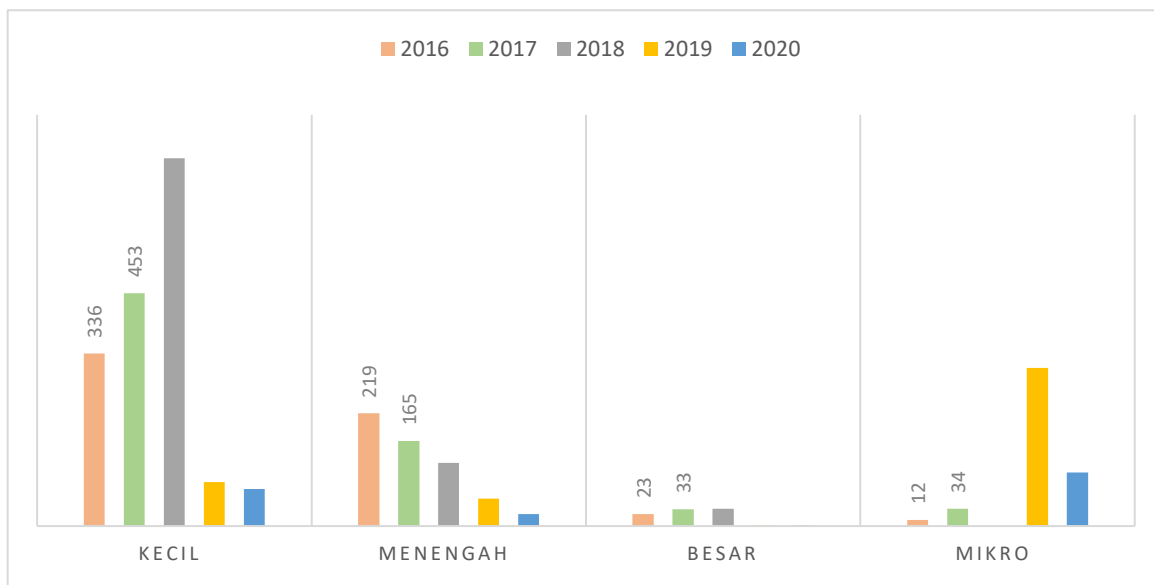
Dilihat dari data usaha mikro berdasarkan kluster usaha maupun menurut total aset dan omset, secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah usaha mikro pada Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2019 pada semua kluster usaha. Jumlah kluster usaha perdagangan tahun 2020 sebanyak 16.442 (47,33%) usaha yang mana jumlah ini naik jika dibandingkan tahun 2019 sebanyak 13.840 usaha atau meningkat sebanyak 2.602 usaha mikro. Disusul kemudian kluster usaha olahan pertanian sebanyak 9.047 (26,05%) usaha, yang meningkat sebanyak 1.602 usaha mikro jika dibandingkan tahun 2019. Kondisi peningkatan ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 sebesar 23% dibandingkan dengan Tahun 2019.

2.3.2.11 Penanaman Modal



Penanaman Modal adalah salah satu urusan yang menjadi indikator keterbukaan Pemerintahan Kabupaten terhadap usaha bagi masyarakat. Pengembangan iklim dan penanaman modal dilakukan dengan pemberian kemudahan-kemudahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten. Hal ini sudah tertuang dalam urusan penanaman modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berikut adalah salah satu bidang dalam urusan penanaman modal yaitu penerbitan ijin usaha perdagangan:

Gambar 2.37
Perkembangan Penerbitan Ijin Usaha Perdagangan



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020

Perkembangan ijin usaha perdagangan menunjukkan data yang menarik. Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ijin usaha mikro yang sangat tinggi yaitu dari 0 tahun 2018 menjadi 308 usaha di tahun 2019. Sebaliknya, untuk usaha kecil menunjukkan penurunan drastis dari 716 usaha di tahun 2018 menjadi hanya 86 usaha di tahun 2019. Demikian juga untuk usaha menengah dan besar yang menurun drastis dari 123 usaha di tahun 2018 menjadi hanya 53 usaha di tahun 2019 untuk usaha menengah. Terakhir, untuk usaha besar selama tahun 2019 hanya 2 ijin usaha diselesaikan. Indikator ini menunjukkan bahwa kesadaran usaha mikro untuk mengurus perijinan mulai tumbuh dengan kemudahan akses OSS dan dibantu oleh klinik usaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Namun pada tahun 2020 penerbitan Izin perdagangan baik sektor mikro, besar, menengah maupun kecil terus mengalami penurunan hal ini menjadi salah satu perhatian Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk mengevaluasi apa penyebab kendala perijinan yang terjadi.



Tabel 2.93

Aspek Bidang Kinerja Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Penyelesaian Ijin	Ijin	1293	4182	948	1195	1195
Jumlah penambahan bangunan ber- IMB	unit	358	570	292	293	293

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2021

Terkait dengan capaian kinerja penanaman modal, terjadi pertumbuhan atas realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Kabupaten Mojokerto dan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi sedikit penurunan. Angka realisasi PMDN tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5,81% dari sebesar Rp. 1.154,1 milyar di tahun 2018 menjadi Rp. 1.221,12 milyar di tahun 2019. Realisasi mengalami kenaikan yang cukup yaitu sebesar Rp. 67,1 milyar. Jumlah investor PMDN yang menanamkan modal juga mengalami kenaikan dari 49 usaha di tahun 2018 menjadi 137 usaha di tahun 2019. Sedangkan, untuk realisasi PMA, sedikit mengalami penurunan dari US\$ 155,3 ribu atau dengan kurs Rp. 12.150 per US\$1,-, yaitu Rp. 1.879,1 milyar di tahun 2018, telah mengalami penurunan sebesar US\$ 107,5 ribu atau Rp. 1.300,6 milyar. Akan tetapi, dilihat dari jumlah investor mengalami kenaikan di tahun 2019, yaitu dari 147 usaha di tahun 2018 menjadi 189 usaha di tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan investasi dalam proses administrasi masih terpenuhi oleh Dinas Penanaman Modal.

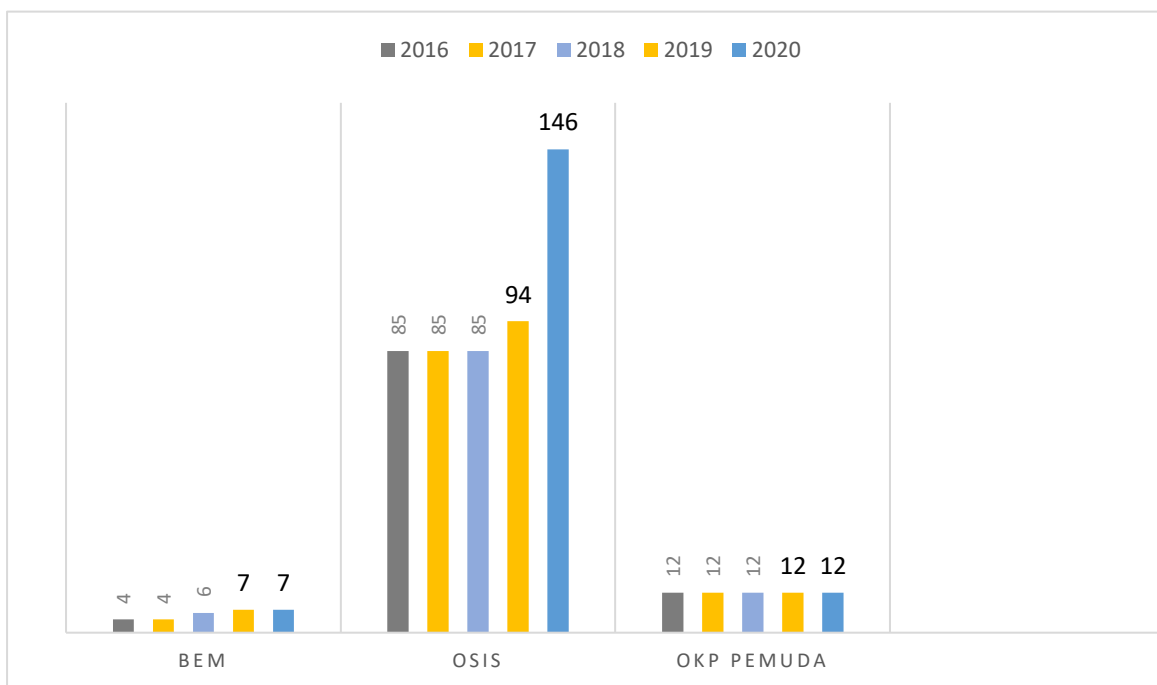
Aspek pemberi pelayanan proses perijinan, dari 21 jabatan yang ada dalam melayani perijinan, hanya sekitar 9 jabatan yang diduduki oleh pejabat yang kompeten dalam bidang perijinan. Kondisi ini didukung oleh staf pelayanan perijinan yang belum ada satupun memiliki sertifikasi kompetensi pelayanan perijinan baik yang pernah ikut pelatihan kompetensi BKPM maupun sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan BNSP sebagai lembaga sertifikasi resmi pemerintah. Masih rendahnya kompetensi ini juga didukung data bahwa selama tahun 2018 dan 2019, belum pernah ada satu pun pegawai pelayanan perijinan yang dikirim mengikuti pelatihan kompetensi. Padahal dari sisi jumlah pegawai, sebanyak 30 orang dari 47 pegawai yang ada di dinas adalah pegawai pelayanan. Namun kebijakan untuk peningkatan kompetensi teknis masih sangat kurang dan belum menjadi program tahunan. Aspek lain terkait kepatuhan pelaporan LKPM oleh investor juga sangat rendah. Dari sebanyak 1.011 usaha yang wajib lapor, hanya 394 atau 39% usaha yang tertib melaporkan perkembangan usahanya. Tingkat kepatuhan investor ini harus menjadi perhatian besar bagi dinas, yang harus dibangun melalui sistem informasi penanaman modal.



2.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional penting dan dibuktikan dalam berbagai peran pemuda seiring dengan kehidupan suatu bangsa. Pemuda adalah generasi penerus dan penentu masa depan sebuah negara. Organisasi kepemudaan yang terdaftar di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Jumlah Organisasi Kepemudaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Kegiatan Kepemudaan tahun 2020 mengalami peningkatan dari sisi jumlah peserta sebanyak 149 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2019 yakni 1236 orang.

Tabel 2.94
Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2016-2020



Jumlah Kegiatan Kepemudaan						
Nama Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pembinaan/pelatihan Organisasi Kepemudaan	giat	1	1	1	1	1
	orang	50	50	60	100	30
	lokasi	Ruper Disparpora	Ruper Disparpora	Wisata Desa Randu- genengan	Pendopo Graha Maja Tama	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto
Penyuluhan narkoba	giat	-	-	1	1	1
	orang	-	-	100	100	50
	lokasi	-	-	Wisata Desa Randu- genengan	Ruper Disparpora	Aula Gerakan Pramuka
Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	giat	1	1	1	1	1
	orang	60	50	175	50	50
	lokasi	Randugene- ngan	Randugene- ngan	Wisata Desa Randu- genengan	Wisata Desa Randu- genengan	Ubalan Waterpark
Seleksi PASKIBRAKA	giat	2	2	2	2	1
	orang	300	300	301	304	300
	lokasi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi	GOR Mojosari dan Provinsi
Pembinaan Wawasan Kebangsaan	giat	-	-	1	1	1
	orang	-	-	200	50	50
	lokasi	-	-	Puri Srijaya Pacet	Lesehan Pringgoda di Pacet	Aula Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kab. Mojokerto
Lomba Kreativitas Pemuda (Baris Berbaris)	giat	-	-	1	1	
	orang	-	-	400	400	
	lokasi	-	-	MAN Mojosari	GOR Mojosari	
Pembentukan Saka Pariwisata	giat	-	-	-	-	1
	orang	-	-	-	-	250
	lokasi	-	-	-	-	Gedung Pramuka Kwartir



Jumlah Kegiatan Kepemudaan						
Nama Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
						Cabang Kab. Mojokerto
Jumlah	giat	4	4	7	7	5
	orang	410	400	1,236	1,004	480
	lokasi	3	4	6	6	6

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 276 buah. Organisasi Olah Raga di Kabupaten Mojokerto secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.95
Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto							
No.	Nama Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Atletik	organisasi	4	4	4	4	4
2	Sepak Bola	organisasi	42	42	45	45	45
3	Bola Voli	organisasi	18	18	18	18	18
4	Bola Basket	organisasi	13	13	14	14	14
5	Bilyar	organisasi	3	3	5	5	5
6	Bulu Tangkis	organisasi	12	12	12	6	6
7	Tenis Lapangan	organisasi	5	5	5	5	5
8	Tenis Meja	organisasi	8	8	8	8	8
9	Catur	organisasi	6	6	7	7	7
10	Karate	organisasi	16	16	18	18	18
11	Wushu	organisasi	3	3	3	3	3
12	Kempo	organisasi	4	4	-	2	2
13	Silat	organisasi	15	15	16	16	16
14	Takraw	organisasi	4	4	4	4	4
15	Selam	organisasi	2	2	2	2	2
16	Senam	organisasi	10	10	-	1	1
17	Bina Raga	organisasi	6	6	6	6	6
18	Renang	organisasi	7	7	8	8	8
19	Gulat	organisasi	2	2	2	2	2
20	Yudo	organisasi	2	2	2	2	2
21	Bridge	organisasi	2	2	-	1	1



Perkembangan Organisasi Olahraga Kabupaten Mojokerto							
No.	Nama Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
22	BPOC	organisasi	4	4	-	1	1
23	Hoki	organisasi	4	4	4	4	4
24	PanjatTebing	organisasi	2	2	-	2	2
25	Drumband	organisasi	3	3	4	75	75
26	Taekwondo	organisasi	5	5	7	7	7
27	Paralayang	organisasi	-	-	-	1	1
28	Bola Tangan	organisasi	-	-	-	1	1
29	Pentaque	organisasi	-	-	-	1	1
30	Olahraga Wanita	organisasi	-	-	1	1	1
31	Soft Ball	organisasi	-	-	-	2	2
32	Jujitsu	organisasi	-	-	-	2	2
33	Muythai	organisasi	-	-	-	2	2
Jumlah			201	201	195	276	276

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan KONI Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Prestasi olahraga yang dicapai Kabupaten Mojokerto dapat dilihat dari perolehan medali pada kegiatan-kegiatan olahraga, antara lain: Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kejuaraan Daerah (Kejurda), dan Kejuaraan Tingkat Nasional. Jumlah total medali yang diperoleh untuk tahun 2020 sebanyak 4 mengalami penurunan sebanyak 58 medali dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan pada tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19 (virus corona) sehingga banyak kegiatan pertandingan yang di tiadakan.



Tabel 2.96
Tingkat Prestasi Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Kegiatan	Capaian 2016				Capaian 2017				Capaian 2018				Capaian 2019				Capaian 2020			
		Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml
1	Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) SD	-	1	-	1	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	POPDA SMP	-	2	-	2	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	POPDA SMA	-	1	-	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Kejurda/Kejurnas bola voli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BAPOPSI catur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kejurnas catur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kejurnas karate	-	3	-	3	-	4	-	4	3	3	4	10	-	-	-	-	3	1	-	4
8	Kejurnas taekwondo	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-
9	POPNAS (Pekan Olahraga Pelajar Nasional)	-	2	-	2	-	2	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	POSPEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(Pekan Olahraga Pondok Pesantren)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



No.	Kegiatan	Capaian 2016				Capaian 2017				Capaian 2018				Capaian 2019				Capaian 2020			
		Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml
11	Kejurda Kick Boxing	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Kejurnas U-17 Bulu Tangkis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
13	Sirnas (Walikota Surabaya Cup) Bulu Tangkis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kejurnas Bulu Tangkis U-13 di Purwokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Daihatsu Aspec Bulu Tangkis di Padang	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Unibraw Open Bulu Tangkis Jawa Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Kejurprop Taekwondo	-	-	-	-	-	-	-	-	15	6	4	25	1	-	1	2	-	-	-	-
18	Kejur UPN Taekwondo Surabaya	-	-	-	-	-	-	-	-	20	8	6	34	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Kejurprop Taekwondo di Pasuruan	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kejuaran Taekwondo UM Malang	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	5	18	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Porprov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	7	17	-	-	-	-



No.	Kegiatan	Capaian 2016				Capaian 2017				Capaian 2018				Capaian 2019				Capaian 2020			
		Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml	Emas	Perak	Perunggu	Jml
22	Kejurda Taekwondo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-
23	Kejurda Atletik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
24	Kejurnas Atletik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-
25	Kejurda Selam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
26	Kejurnas Selam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
27	Kejurprov Gulat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	-	-	-	-
28	Kejurprov Sepak bola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-
29	Kejurprov Wushu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-
30	Kejurprov Kick boxing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
31	Kejurnas Hoki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	-	-	-	-
32	ASEAN GAMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Jumlah		0	9	0	9	0	12	12	24	60	36	25	121	15	13	30	58	3	1	0	4

Sumber :Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dan KONI Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



2.3.2.13 Statistik

Data statistic merupakan komponen sekaligus instrument strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistic menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistic itu bersifat spesifik, terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah.

Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistic diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta meningkatnya mutu pelayanan statistic daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan statistic adalah penyelenggaraan statistic sektoral di lingkup daerah Kabupaten/Kota. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah tersebut. Statistik sektoral mencakup semua instansi pemerintah, baik departemen maupun lembaga pemerintah non departemen yang memperoleh dana dari APBN dan atau APBD termasuk juga survei yang dilaksanakan oleh konsultan - konsultan yang bekerja sama dengan instansi pemerintah.

2.3.2.14 Persandian

Urusan persandian ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan kebijakan pemantapan struktur organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien, penyediaan sarana dan prasarana, peningkatan pengelola administrasi daerah, peningkatan kapasitas lembaga perwakilan daerah dan peningkatan pengendalian serta pengawasan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu



kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi. Tugas dan fungsi persandian di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan tata kelola persandian untuk menjamin keamanan informasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, dan pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan persandian.

2.3.2.15 Kebudayaan

Kebudayaan dinilai sebagai salah satu indikator yang menentukan nilai keberagaman suatu daerah. Potensi Kabupaten Mojokerto cukup besar di bidang kebudayaan. Hal ini ditunjukkan dengan beragamnya seni dan budaya yang dimiliki, disamping adanya peninggalan benda cagar budaya yang bernilai sejarah yang tinggi. Kebudayaan merupakan satu kesatuan di dalam pengembangan kesenian di Kabupaten Mojokerto, yang memberikan warna tersendiri dengan adanya berbagai tradisi upacara adat serta kreativitas seniman dan seniwati.

Tabel 2.97
Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto							
No.	Nama Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wayang kulit	Organisasi	60	59	53	56	37
2	Ludruk	Organisasi	14	15	17	18	6
3	Orkes Melayu	Organisasi	194	220	220	220	115
4	Qosidah Modern	Organisasi	9	11	4	4	
5	Campursari	Organisasi	43	44	56	47	20
6	Kuda Lumping	Organisasi	47	35	32	47	23
7	Bantengan	Organisasi	33	41	41	56	30
8	Pencak Silat	Organisasi	11	13	19	17	9
9	Sanggar Seni	Organisasi	6	3	5	5	7
10	Band	Organisasi	1	0	3	1	
11	Elektone	Organisasi	33	30	37	44	18
12	Reog	Organisasi	3	5	8	4	1
13	Sholawat modern	Organisasi	1	1	3	4	
14	Karawitan	Organisasi	11	4	8	9	4
15	Layar Tancap	Organisasi	1	-	-	-	
16	MC	Organisasi	2	-	-	-	
17	Waranggono	Organisasi	-	1	-	-	



Jumlah Group Kesenian Kabupaten Mojokerto							
No.	Nama Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
18	Event Organizer	Organisasi	-	2	-	-	
19	Musik humor	Organisasi	8	12	7	7	3
20	Rock dangdut	Organisasi	2	-	-	-	
21	Pramuseni	Organisasi	-	1	1	1	
22	Tradisional kembang	Organisasi	-	1	1	-	
Jumlah			479	498	515	540	273

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Prestasi Tingkat Provinsi Jawa Timur: Penyaji Terbaik Jatim Specta Night Carnival 2018 dengan Tema “Jotundo “Kidung Adni Amertama” bertempat di Kabupaten Situbondo pada tanggal 19 Oktober 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;

- a) Penyaji Terbaik non ranking pentas di Anjungan Jawa Timur TMII “Nyi Roro Kidul Mantu” pada tanggal 3 November 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;
- b) Penyaji Unggulan Terbaik Festival Karya Tari Jawa Timur Tahun 2019 dengan judul Aringgit bertempat di Gedung Kesenian Cak Durasim pada tanggal 1-3 Mei 2019, diraih oleh Kabupaten Mojokerto;
- c) Lima Dalang Bocah Terbaik Non Ranking Tingkat Propinsi Jawa Timur dalam rangka Parade Dalang Bocah se Jawa, diraih An. Johana Cleora Saskia;
- d) Juara 2 Paduan Suara dalam rangka Festival Seni Budaya Pelajar di Kabupaten Malang tanggal 26 April 2019, diraih oleh SMAN 1 Sooko.

2.3.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana belajar yang mempunyai banyak koleksi buku, map, hasil seni, CD dan lain sebagainya. Perpustakaan dilaksanakan untuk membudayakan gemar membaca di lingkup masyarakat. Penyelenggaraan perpustakaan juga difungsikan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak atau karya rekam. Ukuran keberhasilan urusan perpustakaan menggunakan indikator jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Peningkatan kualitas pelayanan informasi dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan dan pemasyarakatan minat baca, hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah meningkatnya pengetahuan, informasi minat baca masyarakat. Dengan keberhasilan urusan perpustakaan yang ditunjukkan oleh beberapa capaian indikatornya telah mencapai target, maka tujuan dan sasaran urusan perpustakaan tahun 2020 ini bisa terwujud, hal ini tercapai karena dukungan dari kegiatan-kegiatan sebagaimana tabel berikut :



Tabel 2.98
Jumlah Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016– 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD	316	316	316	613	413
2.	MI	187	187	187	201	198
3.	SMP	56	56	56	213	124
4.	MTs	75	75	75	83	83
5.	SMA	49	49	49	88	40
6.	MA	41	41	41	48	48
7.	SMK	12	12	12	64	40
8.	Perpustakaan Keliling	1	1	3	3	3
9.	Instansi Pemerintah	2	2	3	3	3
10.	Perguruan Tinggi	13	13	13	13	17
11.	Umum	304	304	304	304	304
12.	Perpustakaan Desa Penerima bantuan	75	75	81	82	82
	Jumlah	1.131	1.131	1.138	1.715	1,355

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Jumlah perpustakaan pada tahun 2018-2020 Jumlah Perpustakaan cenderung meningkat tajam sebanyak 577 yang di dominasi penambahan perpustakaan pada sekolah sekolah. Namun Untuk tahun 2020, jumlah perpustakaan cenderung turun akibat di ambalnya kebijakan Sekolah dari rumah akibat pandemi. Diperlukan inovasi inovasi tertentu dalam menjawab tantangan saat ini, khususnya akibat pandemi covid-19

Tabel 2.99
Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Jenis Buku	Satuan	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
Buku Non Fiksi	Judul	9,235	9,335	8,725	8,815	10,059
	Eksemplar	18,235	19,245	18,525	18,817	21,141
Buku Referensi	Judul	582	584	584	593	625
	Eksemplar	1022	955	925	975	994
Buku Fiksi	Judul	5,427	5,715	5,233	5,603	7,401
	Eksemplar	7922	7872	6336	6929	9821

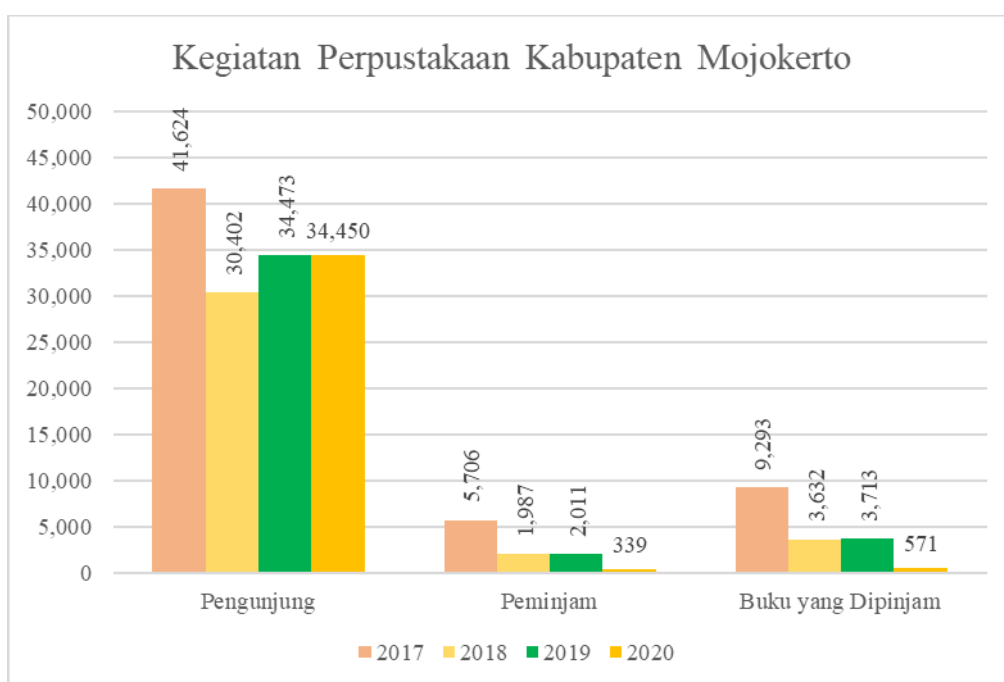


Jenis Buku	Satuan	Jumlah Koleksi Buku Kantor Perpustakaan Daerah				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah	Judul	15,644	15,634	14,542	15,011	18,085
	Eksemplar	27,179	28,072	25,786	26,721	31,956

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Jumlah koleksi buku yang ada di Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2016-2020 Mengalami Kenaikan untuk semua jenis buku.

Gambar 2.38
Kegiatan Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tahun 2020 baik jumlah pengunjung perpustakaan, peminjam maupun buku yang dipinjam mengalami penurunan. Adapun jam layanan perpustakaan Hari Senin - Jum'at pukul 08.00 – 16.00 WIB, Hari Sabtu pukul 08 – 12.00 WIB. Apabila melihat data tersebut dapat dikatakan bahwa upaya untuk mempromosikan perpustakaan telah dilakukan dengan berbagai cara namun dikarenakan perubahan pola masyarakat yang masih rendah, masyarakat beranggapan membaca bukan suatu kebutuhan, maka jumlah pengunjung perpustakaan masih jauh dari harapan. Apabila kita melihat peminjam buku kita cukup prihatin karena tidak seimbang dengan jumlah pengunjung hal ini disebabkan karena koleksi buku dirasa masih kurang terutama buku-buku yang baru, sehingga para pengunjung rata - rata telah membaca koleksi buku dan akhirnya tidak meminjam.



Tabel 2.100
Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan						
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pengunjung Perpustakaan	pemustaka	3,776	41,624	30,402	34,473	34,450
Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk	%	0.0684	0.0687	0.0695	0.0681	0.0681
Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	Judul	16,538	17,337	17,677	17,922	18,085
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat	orang	-	-	-	-	-
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	eksemplar	28,678	30,417	31,124	31,675	31,956

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.2.17 Kearsipan

Arsip bukan hanya sekedar hasil administrasi negara tetapi merupakan rekaman kegiatan sekaligus bukti akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan daerah. Arsip merupakan salah satu unsure penting dalam perencanaan sebagai bentuk pengorganisasian informasi guna mencapai tujuan dalam proses pembangunan. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah terlaksana dengan baik, karena dukungan dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan sarana prasarana kearsipan dan Pengadaan buku, rak buku dan box arsip. Demikian pula dengan Jumlah Desa/Kelurahan yang menerapkan standarisasi pengelolaan arsip sudah seluruh desa/kelurahan yang berjumlah 304 desa/kelurahan, yang juga termasuk pengelolaan arsip secara baku. Meningkatnya pemahaman kearsipan baik intern Pemerintah Daerah maupun masyarakat, sehingga mendorong terciptanya penataan arsip yang baik. Peningkatan SDM Pengelola kearsipan dilaksanakan melalui penyuluhan maupun bimtek kearsipan yang dalam tahun 2018 dilaksanakan sebanyak 56 kegiatan.



Tabel 2.101
Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Kearsipan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Bimtek Kearsipan	Sekdes/Seklur	4	3	2	2	-
2.	Pembinaan dan Praktek Pengelolaan Arsip	SKPD	36	46	250	-	-
3.	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintahan	Kasi Umum	31	43	56	38	-

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.102
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

Instansi	2018	2019	2020
BPKAD	Baik	Baik	Baik
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Baik	Baik	Baik
Kec. Jatilejo	Baik	Baik	Baik
Kec. Mojoanyar	Baik	Baik	Baik
DPMD	Baik	Baik	Baik
Dinas Koperasi	Baik	Baik	Baik
Dinas Sosial	Baik	Baik	Baik
Kec. Bangsal	Baik	Baik	Baik
Kec. Gedeg	Baik	Baik	Baik
Dinas Lingkungan Hidup	Baik	Baik	Baik
Kec. Jetis	Baik	Baik	Baik
Disparpora	Baik	Baik	Baik
BKPP	Baik	Baik	Baik
Bagian Adm. Pemerintahan	Baik	Baik	Baik
Dinas Kesehatan	Baik	Baik	Baik
Disperindag	Baik	Baik	Baik
Dispari	Baik	Baik	Baik
RSUD RA. BASOENI	Baik	Baik	Baik
SATPOL PP	Baik	Baik	Baik
DISKOMINFO	Baik	Baik	Baik
Kec. Dawarblandong	Baik	Baik	Baik
Kec. Gondang	Baik	Baik	Baik



Instansi	2018	2019	2020
Kec. Bangsal (Ds. Mejoyo, Ds. Kutoporong) dikirim Bimtek ke Provinsi	Baik	Baik	Baik

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dalam rangka meningkatkan penataan arsip pada tahun 2020 telah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke beberapa kecamatan dengan sampel beberapa desa/kelurahan serta Instansi yang hasilnya rata-rata dalam kategori baik.

Tabel 2.103
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Audit Penyelenggaraan Kearsipan	%	55,75	45,22	65,55	74,81	79,43
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kali	1 kali	3 kali	2 kali	1 kali	-
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%	5,35	5,35	5,35	5,35	5,35

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Sektor kelautan dan perikanan menggunakan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan secara intensif, efisien dan terintegrasi antara sentra produksi budidaya dan tangkap dengan pengolahan dan pemasaran hasil sehingga menjadi Kawasan ekonomi unggulan daerah yang berdampak terhadap peningkatan nelayan dan pembudidaya. Capaian target indikator sasaran bidang perikanan tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukungnya dalam tahun 2017 - 2020 sebagaimana terlihat dari table capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.104****Capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020**

No.	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pembinaan usaha budidaya ikan	11,22	13,93	16,07	100,00	100,00
2.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari kolam	275.822	364.752	592.739	1.027.502	1.217.360
3.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari keramba	14.221	58.046	15.723	2.305	420
4.	Jumlah produksi ikan konsumsi dari waduk	40.012	40.150	45.600	44.450	68.900
5.	Frekuensi sosialisasi konsumsi ikan produksi perikanan	17	19	19	18	18

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Secara umum capaian kinerja bidang perikanan telah memenuhi target hanya target untuk produksi ikan konsumsi dari keramba yang tidak mencapai target yaitu sebesar 4,53%.

Adapun beberapa program yang dilakukan pada urusan bidang perikanan yaitu:

1) Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi benih ikan baik di UPR maupun BBI dan peningkatan produksi budidaya ikan, perkembangan produksi perikanan budidaya tahun 2016-2020 seperti dalam table berikut ini :

Tabel 2.105**Capaian Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2016 – 2020**

No.	Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah produksi benih UPR	Ekor	19.220.000	20.550.000	26.392.000	3.216.000	3.440.000
2.	Jumlah produksi benih ikan hias	Ekor	-	-	1.343	-	-
3.	Jumlah BBI	Unit	1	1	1	1	1
4.	Jumlah produksi benih BBI	Ekor	2.106.000	2.586.000	2.658.000	2.747.000	3.003.070
5.	Produksi ikan di kolam	ton	314.752	364.752	592.739	1.027.502	1.217,36
6.	Produksi ikan di karamba apung	ton	5,60	5,80	-	-	-
7.	Produksi ikan di karamba tancap	ton	14.740	13.740	15.723	2,3	0,42

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



2) Pengembangan PerikananTangkap

Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilaksanakan dalam mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Mojokerto, pada program ini Dinas Pangan dan Perikanan melakukan pembinaan pada nelayan di perairan umum untuk melakukan penangkapan yang ramah lingkungan. Adapun rincian capaian kinerja penangkapan ikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.106
Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No.	Kegiatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi perikanan tangkap	161.5	163.36	164.45	166.3	156.00
2.	Cakupan binaan kelompok nelayan	32	28	36	15	11

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

3) Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

Dengan kegiatan Peningkatan SDM, dan Kelembagaan Usaha Pokdakan. Pada kegiatan ini dilaksanakan penyusunan program penyuluh perikanan di 18 kecamatan. Melalui kegiatan ini pelayanan terhadap masyarakat yang berkaitan dengan penyuluhan dapat terlaksana di kelompok pembudidaya ikan dan nelayan penangkapan ikan. Perkembangan kenaikan kelas kelompok perikanan tahun 2017-2019 seperti dalam table berikut ini :

Tabel 2.107
Perkembangan Kenaikan Kelas Kelompok Perikanan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Kelas/Kelompok	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pemula	Kelompok	156	163	177	118	142
2.	Lanjut	Kelompok	-	-	-	-	-
3.	Madya	Kelompok	33	38	47	25	40
4.	Utama	Kelompok	-	-	-	-	-
	Jumlah	Kelompok	189	201	224	143	182

Sumber: Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Mojokerto Tahun 2021

Jumlah kelas kelompok Lanjut tidak ada di tahun 2020 hal ini disebabkan karena adanya perubahan indikator penilaian kelas kelompok sesuai Keputusan Menteri Kelautan



dan Perikanan R.I Nomor Kep.14/MEN/2013 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan.

4) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Pada program ini tahun 2019 melakukan kegiatan sosialisasi/pembinaan kader GEMARIKAN 304 Desa/Kelurahan bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan, sehingga produksi perikanan dapat terserap di pasar domestik. Hal ini juga dapat menumbuh kembangkan sentra sentra pengolahan ikan, mengembangkan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah. Disamping itu Dinas Pangan dan Perikanan juga melakukan kegiatan promosi produk pada acara pameran pembangunan untuk memperkenalkan produk-produk hasil olahan perikanan, mengadakan lomba cipta menu masak ikan tingkat Kecamatan maupun Kabupaten guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, meningkatkan konsumsi ikan masyarakat serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan.

Gambaran di atas merupakan upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan ketahanan pangan, terutama jika dilihat dari aspek ketersediaan dan kerawanan, distribusi, serta kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Adapun upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam urusan pangan ini melahirkan prestasi. Di tingkat Baperwil Bojonegoro, Dinas dan Tim Penggerak PKK (Pokja III) Kabupaten Mojokerto meraih juara harapan II dalam Festival Makanan Khas Daerah. Tentu ini menjadi pemantik bagi kegiatan- kegiatan berikutnya untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik. Secara umum, urusan pangan Kabupaten Mojokerto telah mampu melaksanakan prioritas daerah di tahun 2019 terutama dalam poin peningkatan ketahanan pangan serta kualitas dan keanekaragaman gizi masyarakat.

2.3.3.2 Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. Kabupaten Mojokerto mempunyai potensi yang cukup besar di bidang pariwisata dan kebudayaan jika dilihat dari segi letak dimana Kabupaten Mojokerto berada pada jalur poros *Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan* (Gerbang Kerta susila), member peluang cukup besar untuk dijadikan destinasi wisata. Obyek dan daya tarik wisata Kabupaten Mojokerto berada di 93 lokasi dan berdasarkan kategori jenis destinasi terbagi dalam beberapa jenis potensi wisata, yaitu wisata alam, wisata kreasi, wisata edukasi dan minat khusus, wisata sejarah dan religi, serta wisata belanja dan kuliner seperti dalam table berikut ini :



Tabel 2.108
Potensi Wisata Tahun 2020 Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Alam
Kabupaten Mojokerto

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1.	Gunung Penanggungan	Trawas
2	Air Terjun Dlundung	
3	Air Terjun Desa Duyung	
4	Air Terjun Desa Kemendung	
5	Wisata Tubing Dlundung	
6	Wisata Hutan Pinus	
7	Camping area Dlundung	
8	Camping area Joloundo	
9	PPLH Seloliman	
10	Air Terjun Grenjengan	
11	Air Terjun Watu Gilang	
12.	Gunung Pundak	Pacet
13	Gunung Welirang	
14	Air Terjun Coban Cunggu	
15	Air Terjun Coban Surodadu	
16	Air Terjun Coban Waru	
17	Air Terjun Coban Watu ondo / Kembar	
18	Air Terjun Coban watu gedek	
19	Air Terjun Coban Curah watu	
20	Air Terjun Watu lumpang	
21	Wisata Rafting	
22	Air Terjun Grenjengan	
23	Air Terjun Watu Adem	
24	Air Terjun Desa Bulak kunci	
25	Spot foto desa sendi	
26	Wisata Hutan Pinus	
27	Bumi Perkemahan Claket	
28	Area camping Desa Nogosari	
29	Pemandian Air Panas	
30	Puncak Watu jengger	Jatirejo
31	Air Terjun Tujuh Bidadari	
32	Air Terjun Coban Kabejan	Gondang
33	Wisata akar seribu	
34	Tubing akar seribu	
35	Goa Selopayung	
36	Wisata Edukasi Lembah Mbencirang	Kemlagi
37	Ekowisata Tanjungan	
38	Wana Wisata Watu Blorok	

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.109
Potensi Wisata Tahun 2020 Berdasarkan Kategori Jenis Destinasi Wisata Kreasi
Kabupaten Mojokerto

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Duyung Trawas Hill	Trawas
2	Fresh Green	
3	Joglo Park	Pacet
4	Pacet Mini Park	
5	Wisata Ubalan	
6	Claket Adventure Park	
7	Pacet Hills	
8	Petik strawberry	
9	Taman Kelinci	
10	Pemandian Balekambang	Gondang
11	Lembah Bencirang	
12	Waterpark Sooko	Sooko
13	Kolam renang rolak songo	Mojoanyar
14	Kolam renang Tirta anandiri	
15	Kolam renang MK Tirta	Ngoro
16	D dan N waterland	
17	Kolam Renang BBB	Mojosari
18	Dewa Jembul (Desa Wisata Jembul)	Jatirejo
19	Wisata Desa Randugenengan	Dlanggu
20	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
21	MKP Brantas	Gedeg

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Tabel 2.110
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Berdasarkan
Kategori Jenis Destinasi Wisata Edukasi dan Minat Khusus

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Kampung main Majapahit	Trowulan
2	Museum Majapahit	
3	Wisata Dayang Sumbi	Puri
4	PPLH Seloliman	Trawas
5	Kampung Organik Brenjonk	
6	Jalur Pendakian Puncak Gunung Penanggungan	
7	Perkebunan Organik Ashitaba dan Kopi	
8	Wisata Petik Jeruk	Dlanggu
9	Kampung Coklat Desa Randugenengan	
10	Lembah Mbencirang	Gondang
11	Wisata Trail Kawasan Hutan Watu Blorok	Jetis
12	TPA Belahan Tengah	Mojosari

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2020



Tabel 2.111
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Berdasarkan
Kategori Jenis Destinasi Wisata Sejarah dan Religi

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan	
1	Kampung Majapahit	Trowulan	
2	Budha Tidur		
3	Candi Brahu		
4	Candi Gentong		
5	Makam Siti Inggil		
6	Situs Watesumpak		
7	Makam Putri campa		
8	Makam Troloyo		
9	Situs Kedaton		
10	Gapura Wringin lawang		
11	Gapura Bajangratu		
12	Situs Watesumpak		
13	PetirtaanTikus		
14	Candi Minakjinggo		
15	Situs kolam segaran		
16	Pendopo Agung		
17	Situs Kanal Air		
18	Petilasan Hayam wuruk		
19	Situs Lantai segi enam		
20	Makam Panjang		
21	Gapura Jedong	Ngoro	
22	Situs Pasetran		
23	Candi Bangkal		
24	Candi Genting		
25	Situs Makam Mendhek		
26	Situs Klinterejo	Sooko	
27	PetilasanTribunaTunggadewi		
28	Candi Kesiman tengah	Pacet	
29	Prasasti Petak		
30	Situs Goa Gembyang		
31	Temuan lencana girindrawardhana		
32	Jubel Waterleideng		
33	Situs Makam Krapyak		
34	Prasasti Rejoso		Gondang
35	Situs Kemasantani		
36	Situs Lindu dewi		
37	Peninggalan Pabrik Kesono		
38	Situs Bale kambing		



No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
39	Situs Umpak Jabung	Jatirejo
40	Situs Makam Kiageng jabung	
41	Situs Makam Kunitir	
42	Candi Grinting	
43	Situs Watu Dakon	Pungging
44	Sumur gantung	Kemlagi
45	Situs Gapuro	
46	Situs Mojolebak	
47	Temuan Lencana Girindrawardhana	Kutorejo
48	Reco Lanang	Trawas
49	Candi Jolotundo	
50	Situs Kemasantani	
51	Candi Carik	
52	Candi Centong	
53	Candi Kelir	
54	Candi Kendalisodo	
55	Candi Lemari	
56	Candi Lurah	
57	Candi Meja	
58	Candi Naga	
59	Candi Penanggungan	
60	Candi Pendowo	
61	Candi Putri	
62	Candi Yudho	
63	Situs Balekambang	
64	Candi Kamal	
65	Candi Kama II	
66	Candi Kama III	
67	Situs Sumber Tiri	Mojosari
68	Makam Sayyid Mahmud Ibrahim	Puri
69	Situs Makam Tumenggung Prawirosono	Bangsals

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

Tabel 2.112
Potensi Wisata Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Berdasarkan
Kategori Jenis Destinasi Wisata Belanja dan Kuliner

No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
1	Pusat Oleh-oleh Kabupaten Mojokerto	Mojosari
2	Kampung Pengrajin Sepatu	Sooko
3	Kampung Pengrajin Cor Kuningan	Trowulan
4	Kuliner sambal wader	
5	PPST / Pusat Perkulakan Sepatu	
6	Kampung Krecek Rambak	Bangsals



No.	Potensi Wisata	Lokasi Kecamatan
7	Pusat Kuliner Sendi	Pacet
8	Coklat Majapahit	Dlanggu
9	Warung Desa	Trawas
10	UTC/UPC	
11	Arum Manis	

Sumber : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2020



Tabel 2.113
Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Perkembangan Tingkat Hunian Hotel Kabupaten Mojokerto																
No.	Kecamatan	2016			2017			2018			2019			2020		
		Hotel	Kamar	Tamu	Hotel	Kamar	Tamu	Hotel	Kamar	Tamu	Hotel	Kamar	Tamu	Hotel	Kamar	Tamu
1	Pacet	10	352	13,170	7	257	16,569	33	462	30,597	33	469	25,058	6	436	1,242
2	Trawas	9	250	82,390	8	366	72,539	18	235	49,965	18	265	49,211	8	241	31,339
3	Trowulan	1	35	2,383	1	34	2,699	3	19	5,635	3	19	4,408	1		0
4	Mojosari	1	20	4,005	1	36	3,575	-	-	-	-		-	1		1,836
5	Puri	2	77	10,163	1	65	21,611	4	151	8,443	4	151	6,358	2	57	10,970
Jumlah		23	734	112,111	18	758	116,993	58	867	94,640	58	904	85,035	18	734	45,387

Sumber: Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



2.3.3.3 Pertanian

Penyelenggaraan Urusan Pertanian ditujukan untuk mewujudkan ketersediaan pangan, pengembangan usaha pertanian dan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat serta terwujudnya kelestarian lingkungan atau ekosistem. Hal ini didukung oleh potensi sumber daya alam di Kabupaten Mojokerto yang didukung oleh kondisi lahan dan iklim yang sesuai bagi pengembangan berbagai komoditas pertanian dan perkebunan serta peternakan. Potensi sumber daya alam dan kondisi alam yang mendukung tersebut menjadikan dasar bagi Dinas Pertanian, Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto untuk membentuk sentra-sentra potensi komoditas pertanian dan perkebunan. Sentra komoditas tersebut antara lain padi, hortikultura, biofarmaka, tanaman hias, dan tanaman perkebunan serta ternak-ternak unggulan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan peningkatan produksi, produktivitas pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan baik sarana, prasarana maupun dana yang memadai. Adapun pembangunan atau penyediaan sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produksi pertanian meliputi: Perencanaan Jalan Usaha Tani (JUT), Peningkatan Jalan Usaha Tani (JUT Cor), Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal, Pembangunan Dam Parit, dan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan.

Urusan Pertanian juga didukung oleh bidang peternakan dan perkebunan, dimana Pemerintah mencanangkan Program UPSUS (Upaya Khusus) yang dilakukan dalam rangka mendukung terlaksananya Nawacita yaitu Swasembada Pangan. Untuk mendukung keberhasilan program ini, maka salah satunya melalui bantuan sarana dan prasarana.

Sedangkan produksi jagung mencapai 102.49% tetapi bila dibandingkan tahun sebelumnya menurun, dari 151.967 ton menjadi 150.365 ton (menurun 1.602 ton). Untuk produksi kedelai masih hanya tercapai 35.88% karena banyak yang beralih menanam ubi jalar. Namun demikian untuk produksi padi dan jagung masih memenuhi target karena didukung kegiatan UPSUS (Upaya Khusus) dengan perlakuan luas tambah tanam (LTT).



Tabel 2.114
Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan Palawija Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018– 2020

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (Ha)			Produksi (Ton)			Produktivitas (Kw/Ha)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Padi	53.836	50.986	50.542	335.944,30	307.469,77	305.874,16	61,65	60,43	60,46
2.	Jagung	22.142	24.532	24.024	148.837,03	162.798,13	155.838,81	59,57	55,72	63,16
3.	Kedelai	945	1.122	840	1.575,71	1.602,40	1.263,50	16,67	14,29	15,04
4.	Kacang tanah	749	528	649	1.093,54	766,54	978,62	15,97	13,98	15,07
5.	Ubi kayu	337	588	453	7.738,47	12.693,30	8.343,79	229,92	215,94	184,11
6.	Ubi jalar	1.803	2.016	2.046	65.024,60	68.121,63	74.089,60	360,59	337,96	362,12

Sumber Data : Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2020 produksi sumber pangan utama di Kabupaten Mojokerto, seperti jagung, dan ubi kayu mengalami penurunan dibanding tahun 2019 karena musim kemarau yang lebih panjang sehingga ketersediaan air berkurang. Sedangkan untuk perkembangan produktivitas tanaman sayur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.115
Luas Panen Tanaman Sayuran Tahun 2019 – 2020

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)		Produktivitas (Ton/Ha)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1.	Bawang Daun	87	148	1.074,3	1.703,30	123,48	115,09
2.	Kentang	-	-	-	-	-	-
3.	Kubis	6	6	180	180	300	300
4.	Sawi	55	69	705,5	799,00	128,27	115,81
5.	Wortel	2	2	440	30	2,200	150,00
6.	Cabe besar	15	19,4	62,2	121,90	41,46	63,00
7.	Cabe kecil	3.443	3.461,4	6.709,7	5.804,8	19,49	16,77
8.	Tomat	50	43,50	3.158,4	895,31	631,68	205,82
9.	Buncis	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Realisasi tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran beberapa jenis tanaman mengalami peningkatan produksi dan produktivitas dari tahun sebelumnya, seperti cabe besar. Sedangkan untuk jenis tanaman sayur seperti bawang daun, kentang, kubis, sawi, wortel, cabe besar dan tomat, justru mengalami penurunan produksi dikarenakan intensitas curah hujan yang cukup



tinggi menjelang musim panen sehingga menyebabkan banyak tanaman yang busuk sebelum dipanen. Penurunan produksi tanaman sayuran juga disebabkan karena luas areal tanam yang berkurang, beralih ke tanaman lain yang lebih mempunyai nilai ekonomis tinggi. Untuk perkembangan produktivitas tanaman hias dapat dilihat di table berikut ini:

Tabel 2.116
Luas Panen dan Produksi Tanaman Hias Tahun 2018 – 2020

No	Jenis Komoditi	Luas Panen (m ²)			Produksi (Tangkai)			Produktivitas (Tangkai/m ²)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Gladiol	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Krisan	19.200	1.300	20.000	50.400	26.000	40.000	2,63	2,0	2,00
3.	Mawar	138	548	514	1.180	929	1.081	8,55	1,70	2,10
4.	Anggrek	2.320	1.270	2.026	52.340	3.740	16.560	22,56	2,95	8,17
5.	Sedap malam	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Produksi tanaman hias banyak mengalami penurunan produksi kecuali komoditas anggrek dan mawar. Hal ini disebabkan animo permintaan pasar cenderung naik untuk tanaman hias anggrek dan mawar. Adapun perkembangan produktivitas tanaman buah dapat dilihat di table berikut ini:

Tabel 2.117
Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah Tahun 2018 – 2020

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (Pohon)			Produksi (Kw)			Produktivitas (Kw/Phn)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Alpukat	54.177	39.739	37.669	12.177	9.289	9.420	2,25	2,34	25,0
2.	Mangga	629.992	376.277	433.281	163.448	115.459	176.335	2,59	3,07	40,7
3.	Rambutan	100.784	119.959	140.815	11.466	34.403	22.870	1,14	2,87	16,2
4.	Durian	175.734	67.765	38.141	38.080	27.716	12.252	2,17	4,09	32,1
5.	Pisang	1.837.948	1.525.549	1.633.652	192.601	156.777	153.661	1,05	1,03	9,4
6.	Salak	233.249	72.970	42.113	10.337	2.272	1.344	0,44	0,31	3,2
7.	Kelengkeng	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Manggis	504	326	435	186	62	61	3,69	1,90	14,0
9.	Nangka	87.911	68.081	65.449	18.113	23.020	26.481	2,06	3,38	40,5
10.	Semangka	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Melon	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Jeruk	71.622	44.546	113.599	10.497	23.415	60.489	1,47	5,26	53,3

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Secara umum produksi buah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, terutama untuk buah rambutan, durian, pisang, dan salak. Sedangkan yang mengalami peningkatan adalah mangga, nangka dan jeruk. Peningkatan produksi dipengaruhi oleh cuaca yang sangat mendukung, dimana pada saat terjadi proses penyerbukan tidak terjadi hujan sepanjang tahun sehingga buah yang dihasilkan tidak banyak yang rontok, disamping itu petani sudah melakukan budidaya dengan benar, waktu pemupukan. Sedangkan penurunan produksi buah alpukat, mangga, rambutan, pisang dan salak disebabkan karena cuaca ekstrim saat pembungaan sehingga banyak yang rontok dan busuk. Untuk perkembangan produktivitas tanaman obat dapat dilihat di table berikut ini:

Tabel 2.118
Luas Panen dan Produksi Tanaman Biofarmaka Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (m ²)			Produksi (Kg)			Produktivitas (Kg/m ²)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Jahe	649.500	490.264	307.696	488.232	255.835	277.995	0,75	0,52	0.90
2.	Temulawak	63.979	47.019	59.473	102.364	56.809	138.438	1,59	1,21	2.33
3.	Kencur	9.788	5.608	8.892	19.009	5.565	6.127	1,94	0,99	0.69
4.	Kunyit	202.639	288.503	351.959	417.417	521.072	660.860	2,06	1,81	1.88
5.	Laos	43.860	38.567	49.213	123.416	141.650	105.320	2,81	3,67	2.14
6.	Kapulaga	-	14	20	-	9	25	-	0,64	1.25

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Pada komoditas tanaman biofarmaka secara umum mengalami peningkatan produksi kecuali komoditas kencur. Luas panen meningkat di sebabkan karena permintaan pasar yang meningkat sedangkan produktivitas mengalami penurunan karena jenis/varietas yang diusahakan adalah jenis yang memiliki produktivitas rendah. Untuk perkembangan produktivitas tanaman perkebunan dapat dilihat di table berikut ini:

Tabel 2.119
Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2018 – 2020

No.	Jenis Komoditi	Luas Panen (Ha)			Produksi (Ton)			Produktivitas (Kg/Ha)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1.	Kelapa	17,00	5,00	7,50	4,22	4,00	2,30	248,24	800,00	306,67
2.	Kopi	250	217	375	148,00	151,00	158,40	592,00	695,85	422,40
3.	Cengkeh	52	56	79	26,12	27,70	26,70	502,31	494,60	337,97
4.	Kapuk	60	74	77	52,80	46,10	35,60	880,00	622,97	462,34
5.	Tebu	9.255	8.189	8.864	56.581,00	42.702,91	45.065,18	6.113,00	5.215,00	5.084,07
6.	Tembakau	249	217	190	2.211,77	2.299,00	2.048,00	8.882,61	10.594,47	10.778,95



7.	Kapas.	10,00	5,55	1,20	2,80	3,65	-	280	657	-
8	Kakao	101,20	117,6	271	95,75	98,00	98,20	946,14	833,33	362,36
9	Jambu Mente	41,00	25,00	31,50	8,16	19,50	15,50	199,02	780,00	492,06

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Untuk produksi tanaman perkebunan rata-rata mengalami penurunan, kecuali tanaman tembakau yang mengalami peningkatan. Kenaikan produksi tanaman tembakau terjadi, karena didukung dengan adanya program DBHCHT (cukai). Demikian juga dengan tanaman kakao yang produksinya juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunan produksi tersebut, karena kurangnya dukungan dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan tanaman kakao serta dikarenakan luas panen yang berkurang sehingga produksinya juga menurun. Penurunan produksi tanaman perkebunan seperti kelapa, kapuk, dan tebu dikarenakan menurunnya luas areal tanam akibat alih fungsi lahan.

Melalui Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit pada Ternak, dengan kegiatan: Pendataan Masalah Peternakan, Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak, Pemusnahan Ternak yang Terjangkit Penyakit Endemis, Pengawasan Perdagangan Ternak antar Daerah, Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Ternak, serta Operasionalisasi Laboratorium Keswan dan Puskesmas, telah dilakukan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Tabel 2.120
Perkembangan Pelayanan Kesehatan Hewan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018-2020

No.	Kegiatan	Satuan	2018	2019	2020
1.	Vaksinasi Ternak	Ekor	94.516	90.710	15.500
2.	Pengobatan	Ekor	5.040	1.637	2.247
3.	Pemeriksaan Penyakit Ternak	Ekor	2.897.000	2.974.246	1.161.071

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Pelayanan kesehatan hewan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis untuk pemeriksaan penyakit ternak. Hal yang sama juga terjadi pada vaksinasi ternak dan pengobatan menurun disebabkan, karena semakin sedikit ternak yang membutuhkan vaksinasi dan pengobatan, yang berarti bahwa banyak ternak yang sehat. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan ini dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja bidang peternakan, di mana rincian indikator capaian kinerja bidang peternakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.121
Capaian Perkembangan Populasi dan Produksi Ternak Kabupaten Mojokerto
Tahun 2018 – 2020

No.	Kegiatan	Satuan	2018	2019	2020
A. Populasi					
1.	Sapi potong	Ekor	56.244	50.404	51.913
2.	Sapi perah	Ekor	2.238	2.196	2.284
3.	Kerbau	Ekor	-	280	250
4.	Kuda	Ekor	242	220	230
5.	Kambing	Ekor	49.729	44.270	44.650
6.	Domba	Ekor	18.495	19.728	18.203
7.	Babi	Ekor	9.500	7.000	5.980
8.	Kelinci	Ekor	4.971	4.370	5.669
9.	Ayam petelur	Ekor	437.674	684.500	967.585
10.	Ayam broiler	Ekor	8.608.093	11.001.870	12.003.945
11.	Ayam buras	Ekor	669.425	613.200	632.837
12.	Itik	Ekor	300.079	337.400	320.353
B. Produksi					
1.	Daging sapi	Kg	617.848	902.402	933.221
2.	Daging kambing	Kg	343.149	377.544	433.735
3.	Daging domba	Kg	9.828	238.961	181.990
4.	Daging ayam petelur	Kg	37.125	384.010	373.868
5.	Daging ayam broiler	Kg	13.569.048	15.465.355	16.065.185
6.	Daging ayam buras	Kg	45.360	101.675	153.450
7.	Telur ayam ras	butir	4.817.894	7.260.407	9.327.953
8.	Telur ayam buras	butir	391.020	367.637	357.172
9.	Telur itik	butir	1.990.839	2.294.678	2.300.510
10.	Telur puyuh	butir	13.770	10.350	15.547
11.	Produksi susu	liter	4.240.746	4.279.800	4.485.400

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Untuk capaian indikator kinerja populasi, sebagian ternak mengalami penurunan yaitu kerbau, domba, babi dan itik kecuali populasi sapi potong, sapi perah, kuda, kerbau, domba, ayam petelur, ayam boiler, dan ayam buras yang mengalami kenaikan. Sedangkan untuk produksi, hampir seluruh ternak mengalami kenaikan produksi, kecuali daging domba, daging ayam petelur dan telur ayam buras yang mengalami penurunan, karena permintaan pasar yang menurun.



Tabel 2.122
Capaian Perkembangan Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Peternakan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020

No.	Kegiatan	Satuan	2018	2019	2020
1.	Peternak rakyat	Orang	49.650	90.638	90.750
2.	Perusahaan peternakan :				
	Ayam petelur	RTP	761	58	24
	Ayam pedaging	RTP	996	290	12
	Sapi potong	RTP	19.605	28.800	1
	Breeder	RTP	52	569	1
	Babi	RTP	1	0	2

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Untuk capaian indikator kinerja keterlibatan masyarakat dalam kegiatan peternakan pada tahun 2020 mengalami banyak peningkatan dari tahun 2019 sebesar 90,7%. Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dilaksanakan dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner. Adapun rincian indikator pelayanan kesehatan hewan pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.123
Perkembangan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020

No	Kegiatan	Satuan	2018	2019	2020
1.	Pemeriksaan kualitas susu	Sampel	125	75	60
2.	Pemeriksaan kualitas daging	Sampel	7.300	6.763	5.014
3.	Uji cemaran mikroba dan residu antibiotik	Sampel	39	57	120

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dari tiga kegiatan pemeriksaan dan uji pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, pemeriksaan kualitas susu dan kualitas daging menurun, karena menurunnya jumlah permintaan pemeriksaan dibandingkan dengan tahun 2019, di mana ada kegiatan rutin pemeriksaan mengikuti provinsi. Sedangkan kegiatan uji cemaran mikroba dan residu antibiotik mengalami kenaikan, karena di tahun 2018 tidak ada uji residu antibiotik menjadi ada (bertambah) di tahun 2019 sebesar 63 uji residu antibiotik.



Tabel 2.124
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	7,80	7,43	6,93	6,61	6,72
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	3,56	n/a	n/a	n/a	n/a
Produksi sektor pertanian (tanaman pangan)	ton	594.278,15	565.802,90	560.213,65	553.451,76	546.388,47
Produksi sektor pertanian (sayur)	kw	3.272,00	3.596,00	6.380,80	12.330,10	9.534,39
Produksi sektor pertanian (tanaman hias)	tangkai	921.704,00	360.518,00	103,92	958,74	57.641,00
Produksi sektor pertanian (buah)	kw	628.419,26	565.104,00	422.633,00	371.695,00	462.912,97
Produksi sektor pertanian (biofarmaka)	kg	915.127,00	975.608,00	1.150.438,00	853.455,00	1.188.764,50
Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	1,47	n/a	n/a	n/a	n/a
Produksi sektor perkebunan	ton	74,338	55,265	68,610	45,352	47,450
Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Ketersediaan Lahan untuk pembangunan Embung	unit	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Padi	kw/ha	61,15	60,14	61,65	60,43	59,91
Jagung	kw/ha	57,46	60,72	59,57	55,72	51,45
Kedelai	kw/ha	13,32	12,48	16,67	14,29	1.263,50
Kentang	kw/ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Paprika	kw/ha	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Buah Durian	kg/phn	307	216	217	41	32
Buah Mangga	kg/phn	396	250	259	31	41
Buah Apel	kg/phn	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Sedap Malam	tangkai/ m ²	8	4	n/a	n/a	n/a
Krisan	tangkai/ m ²	2	1	3	2	2
Padi	Ton	338.441,38	338.432,98	335.944,30	307.469,77	305.874,16



Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jagung	Ton	141.808,30	147.642,25	148.837,03	162.798,13	155.838,81
Kedelai	Ton	3.003,10	2.424,26	1.575,71	1.602,40	1.263,50
Sayuran Kentang	Kwintal	6.000	n/a	n/a	n/a	n/a
Paprika	Kwintal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Durian	Kwintal	29.989	22.918	38.080	27.716	12.252
Mangga	Kwintal	246.047	181.462	163.448	115.459	176.335
Buah Apel	Kwintal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Sedap Malam	Tangkai	150	70	n/a	n/a	n/a
Krisan	Tangkai	890.856	325.800	50.400	26.000	40.000
Mitra Perusahaan						
Tebu	ton	70.868,55	52.484,83	56.581,00	42.702,90	45.065,18
Non Mitra perusahaan						
Kelapa	ton	n/a	30,20	13,36	4,00	2,30
Kopi	ton	250,00	148,00	148,00	151,00	158,40
Cengkeh	ton	21,60	21,80	26,10	27,70	26,70
KapukRandu	ton	91,20	91,20	60,14	60,14	35,60
Kenanga	ton	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Daging	Ton	5.324,34	10.973,16	15.461,29	18.154,67	18.141,45
Telur	Ton	6.303,92	7.566,78	10.125,36	9.977,14	2.673,23
Susu	Ton	4.461,89	6.248,94	4.244,87	4.284,97	4.485,40
Sapi Potong	Ekor	54.575	2.710,00	3.632	4.370	51.913
Sapi Perah	Ekor	3.692	163,00	677	454	2.284
Kambing	Ekor	51.096	24.376,00	26.582	23.523	44.650
Domba	Ekor	24.371	9.892,00	6.268	15.318	18.203
Ayam Petelur	Ekor	356.554	155.000	152.000	349.100	967.585
Ayam Pedaging	Ekor	2.987.195	7.791.116	11.263.757	12.887.796	12.003.945
Itik	Ekor	309.808	56.000	61.452	506.525	320.353

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dengan adanya Nilai Tukar Petani dapat mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk pertanian. Dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi peningkatan yang disebabkan karena naiknya indeks yang diterima petani.



Tabel 2.125

Nilai Tukar Petani Kabupaten Mojokerto Tahun 2017-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks yang diterima petani (It)	134,79	140,18	148,16		
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	128,87	131,70	136,67		
3.	Nilai Tukar Petani (NTP-P)	103,35	106,44	108,41	116,15	116,67

Sumber: Laporan Tahunan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021

2.3.3.4 Perdagangan

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. Sektor perdagangan ini dalam 4 (empat) tahun terakhir memberikan kontribusi terbesar kedua terhadap struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto jika dibandingkan dengan kategori lapangan usaha lainnya. Namun, kemudian terjadi anomali dengan adanya pandemi Covid 19 di awal Tahun 2020 menyebabkan sektor ini sangat terdampak yang ditunjukkan dengan angka laju pertumbuhan di Tahun 2020 berkontraksi sebesar -6,96 %. Berikut gambaran kinerja sektor perdagangan dalam 5 tahun terakhir (2016 – 2020).



Tabel 2.126
Capaian Kinerja Sektor Perdagangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	PDRB ADHB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rupiah)	6.693.874,3	7.086.578,5	7.616.566,1	7.988.986,4	7.366.414,9
2.	PDRB ADHK Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Juta Rupiah)	5.255.147,0	5.566.711,3	5.895.394,5	6.241.491,5	5.806.832,5
3.	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	5,82	5,93	5,95	5,89	-6,96
4.	Total Nilai Ekspor :					
	c. ADHB (Juta Rupiah)	26.275.390,1	30.803.514,6	35.543.262,1	37.538.277,8	37.348.592,6
	d. ADHK (Juta Rupiah)	20.791.311,4	23.045.201,1	25.100.133,6	26.333.302,0	26.688.506,4
5.	Total Nilai Impor :					
	a. ADHB (Juta Rupiah)	20.091.674,0	23.628.213,1	28.151.692,2	29.934.907,8	29.122.248,7
	b. ADHK (Juta Rupiah)	14.218.161,6	15.706.063,8	17.045.791,0	17.927.058,4	17.256.586,4

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Mengacu pada tabel tersebut di atas, secara umum terlihat bahwa kinerja sektor perdagangan di Kabupaten Mojokerto terus mengalami peningkatan tiap tahunnya mulai dari Tahun 2016 – 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menunjukkan tren meningkat tiap tahunnya, dimana kondisi terakhir pada Tahun 2019 nilai PDRB ADHB dari sektor ini sebesar 7.988.986,4 juta rupiah, meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar 7.616.566,1 juta rupiah atau dapat dikatakan mengalami peningkatan sebesar 372.420,3 juta rupiah. Demikian pula dengan nilai PDRB ADHB, total nilai ekspor dan impor juga meningkat tiap tahunnya hingga Tahun 2019. Hanya pada Tahun 2020 kinerja sektor perdagangan menurun dan hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid 19. Pemberlakuan lockdown di beberapa negara, PSBB di beberapa wilayah di Indonesia, tentunya sangat berpengaruh terhadap mobilitas perdagangan di Kabupaten Mojokerto.

Berikut adalah gambaran secara lebih rinci terhadap komoditi yang memberikan andil terhadap total nilai ekspor di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.127
Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto Menurut Jenis Komoditi
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Jenis Komoditi	Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto menurut Jenis Komoditi									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan
HYGIENE PRODUK (KERTAS TOILET ATAU KERTAS TISU UNTUK KULIT MUKA, KERTAS HANDUK ATAU KERTAS SERBET DAN KERTAS SEMACAM ITU DARI JENIS YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA ATAU SANITER)	45,527,431	Jepang, Malaysia, USA, China, Philipina, Korea, Thailand, Vietnam	48,557,414	Jepang, Malaysia, USA, China, Philipina, Korea, Thailand, Vietnam	49,196,975	Jepang, Malaysia, USA, China, Philipina, Korea, Thailand, Vietnam	55,484,348	Jepang, Malaysia, USA, China, Philipina, Korea, Thailand, Vietnam	49,978,294	Jepang, Malaysia, USA, China, Philipina, Korea, Thailand, Vietnam
INSTRUMEN MUSIK, DEGAN SUARA YANG DIHASILAN ATAU HARUS DIPERKUAT SECARA ELEKTRIK (GITAR DAN ACESORISNYA, SPAREPARTNYA)	38,751,611	Italy, USA, United Kingdom, Brazil, Argentina, Australia, Perancis, Netherland, China, Kanada	41,326,235	Italy, USA, United Kingdom, Brazil, Argentina, Australia, Perancis, Netherland, China, Kanada	45,714,862	Italy, USA, United Kingdom, Brazil, Argentina, Australia, Perancis, Netherland, China, Kanada	49,527,481	Italy, USA, United Kingdom, Brazil, Argentina, Australia, Perancis, Netherland, China, Kanada	47,229,793	Italy, USA, United Kingdom, Brazil, Argentina, Australia, Perancis, Netherland, China, Kanada



Jenis Komoditi	Realisasi Ekspor Kabupaten Mojokerto menurut Jenis Komoditi									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan	Nilai (US \$)	Negara Tujuan
PRODUK ALAS KAKI	22,511,389	USA, Jepang, Korea, Argentina, Singapore, Taiwan, Spanyol	23,024,843	USA, Jepang, Korea, Argentina, Singapore, Taiwan, Spanyol	23,304,497	USA, Jepang, Korea, Argentina, Singapore, Taiwan, Spanyol	25,196,822	USA, Jepang, Korea, Argentina, Singapore, Taiwan, Spanyol	24,662,125	USA, Jepang, Korea, Argentina, Singapore, Taiwan, Spanyol
PRODUK OLAHAN MAKANAN /MINUMAN	9,765,008	Taiwan, Jerman, Pakistan, Perancis, Spanyol, Thailand	9,649,217	Taiwan, Jerman, Pakistan, Perancis, Spanyol, Thailand	10,545,592	Taiwan, Jerman, Pakistan, Perancis, Spanyol, Thailand	11,475,713	Taiwan, Jerman, Pakistan, Perancis, Spanyol, Thailand	12,641,190	Taiwan, Jerman, Pakistan, Perancis, Spanyol, Thailand
TEXTILE	6,519,990	Jepang, Korea, vietnam	6,077,545	Jepang, Korea, vietnam	6,180,764	Jepang, Korea, vietnam	5,020,496	Malaysia, USA	5,108,446	Jepang, Korea, vietnam
STAINLESS STEEL	3,394,793	Jerman, Saudi Arabia, Qatar	3,303,613	Jerman, Saudi Arabia, Qatar	3,472,735	Jerman, Saudi Arabia, Qatar	3,424,788	Jerman, Saudi Arabia, Qatar	3,605,040	Jerman, Saudi Arabia, Qatar
SHOPING BAG, KEMASAN DARI KARTON	8,608,633	Netherlands, USA, Italy, Jepang, Spanyol, UK	8,766,429	Netherlands, USA, Italy, Jepang, Spanyol, UK	8,068,503	Netherlands, USA, Italy, Jepang, Spanyol, UK	8,809,192	USA, India, Thailand	8,085,918	Netherlands, USA, Italy, Jepang, Spanyol, UK
KAYU OLAHAN / PRODUK FURNITURE DARI KAYU	5,464,491	USA, China, Uni Emirat Arab	5,323,420	USA, China, Uni Emirat Arab	6,080,435	USA, China, Uni Emirat Arab	6,334,597	China, Jepang, Korea, Thailand, Vietnam	6,301,326	USA, China, Uni Emirat Arab
ALUMINIUM/ BARANG DARI ALUMINIUM/ Furniture dari Aluminium	5,354,463	Italy, USA, Netherlands, Spanyol, Mexico, Malaysia, Korea	5,380,072	Italy, USA, Netherlands, Spanyol, Mexico, Malaysia, Korea	5,235,571	Italy, USA, Netherlands, Spanyol, Mexico, Malaysia, Korea	5,484,237	Italy, United Kingdom, USA	5,187,740	Italy, USA, Netherlands, Spanyol, Mexico, Malaysia, Korea
BAHAN KIMIA DASAR	4,285,670	Australia, India, vietnam, Thailand	4,166,132	Australia, India, vietnam, Thailand	3,771,962	Australia, India, vietnam, Thailand	3,659,558	Australia, India, vietnam, Thailand	3,878,112	Australia, India, vietnam, Thailand

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2020

Nilai ekspor perdagangan Kabupaten Mojokerto tahun 2019 sebesar US\$ 189,8 juta dengan tujuan negara ekspor terbesar adalah USA, Jepang dan Belanda. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan jika dibandingkan dengan nilai ekspor tahun 2018 yaitu sebesar US\$197,5 juta



atau menurun sekitar US\$ 7,1 juta. Penurunan ini disebabkan permintaan negara importir yang menurun. Produk-produk yang menjadi produk utama masih tetap sama selama 2 tahun, yaitu material shoes, Instrumen Musik Gitar dan komponennya, dan farmasi/obat-obatan yaitu Emulsifior, glukosa Syrup, malttodextrin.

Kinerja sektor perdagangan dalam negeri khususnya dalam konteks lingkup dalam daerah Kabupaten Mojokerto, tentunya tidak terlepas dari transaksi perdagangan yang terjadi di seluruh pusat perdagangan yang tersedia di Kabupaten Mojokerto. Data menunjukkan bahwa jumlah pasar rakyat di Kabupaten Mojokerto adalah sebanyak 20 (dua puluh) pasar rakyat, dimana 12 pasar rakyat dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, sedangkan 8 pasar lainnya di kelola oleh Pemerintah Desa setempat. (*Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, 2021*). Sedangkan jumlah pedagang di Kabupaten Mojokerto dalam 2 (dua) tahun terakhir, terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.128
Nilai Ekspor ke Negara Tujuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Negara Tujuan	Nilai Ekspor ke Negara Tujuan				
	2016	2017	2018	2019	2020
Lainnya	132,159,990	135,052,938	180,746,989	170,444,843	132,878,924
France	10,768,787	9,906,888	10,768,357	11,629,826	12,387,559
United Kingdom	6,286,370	6,659,291	7,238,360	8,106,963	11,743,907
China	13,121,324	13,793,045	14,993,745	16,128,445	14,650,920
Jerman	11,820,905	12,522,146	13,969,724	15,087,302	19,960,547
Italy	10,174,851	11,305,391	12,288,468	13,271,545	11,322,445
Malaysia	16,002,925	16,628,144	18,074,070	19,610,366	19,870,861
Thailand	15,472,797	19,682,228	21,393,726	22,998,255	27,744,056
Netherland	12,987,808	11,305,391	12,228,468	13,763,084	15,755,707
USA	62,550,818	53,923,119	58,612,086	62,597,708	76,624,159
Japan	46,120,654	60,018,954	65,237,993	69,804,653	79,098,241
Jumlah	337,467,229	350,797,535	415,551,986	423,442,990	422,037,326

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto, Tahun 2020



Tabel 2.129
Jumlah Pedagang Pasar Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Jenis Pasar	Jumlah Pedagang Pasar																			
	2016				2017				2018				2019				2020			
	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total	Kios	Los	Lesehan	Total
Kelas I				0				0				0	645	2,836	1,236	4,717	546	2,838	968	4,352
Kelas II				0				0				0	-	-	-	0				0
Kelas III				0				0				0	22	33	-	55				0
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667	2,869	1,236	4,772	546	2,838	968	4,352

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Mojokerto Tahun 2021

Berdasarkan tabel data jumlah pedagang pasar tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah pedagang pasar di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 jika dibandingkan dengan Tahun 2019. Tahun 2020 jumlah pedagang pasar adalah sebanyak 4.772 pedagang dengan komposisi 667 pedagang kios, 2.869 pedagang los, dan 1.236 pedagang lesehan. Sedangkan pada Tahun 2020 jumlah pedagang pasar adalah sebanyak 4.352 pedagang dengan komposisi 546 pedagang kios, 2.838 pedagang los dan 968 pedagang lesehan. Dengan demikian dapat dikatakan terdapat penurunan jumlah pedagang pasar sebanyak 420 pedagang. Penurunan jumlah pedagang pasar ini dapat mengindikasikan turunnya minat masyarakat untuk melakukan usaha perdagangan di pasar. Dan tentunya hal tersebut perlu untuk mendapatkan perhatian, terutama terkait dengan upaya peningkatan minat masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional atau pasar rakyat sehingga dapat membantu mengembangkan perekonomian masyarakat lokal.

2.3.3.5 Perindustrian

Urusan perindustrian mengemban tugas utama untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menyelaraskan jenis industri yang berkembang dengan potensi sumber daya local untuk menciptakan rantai pemasokan industry, penataan Kawasan industry dan peruntukan industry serta meminimalisir limbah dan menjaga kelestarian lingkungan. Pelaksanaan urusan industry diarahkan untuk terus meningkatkan kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto. Terlebih lagi sektor industri pengolahan ini memberikan kontribusi terbesar bahkan lebih dari 50% kontribusinya terhadap struktur perekonomian di Kabupaten Mojokerto dalam 5 (lima) tahun terakhir. Bahkan pada Tahun 2020 dalam situasi pandemi Covid 19 pun, sektor ini



mampu tumbuh positif dengan angka laju pertumbuhan ADHK sebesar 0,16%. Berikut adalah data kinerja sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2.130
Capaian Kinerja Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	PDRB ADHB Industri Pengolahan (Juta Rupiah)	34.129.479,4	37.566.587,7	41.007.107,2	44.349.866,1	44.708.444,3
2	PDRB ADHK Industri Pengolahan (Juta Rupiah)	26.427.891,0	28.192.779,7	30.155.134,8	32.102.324,0	32.153.799,1
3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Industri Pengolahan (%)	5,73	6,68	6,96	6,46	0,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, 2021 di olah.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan terus meningkat setiap tahunnya. Disisi lain meski laju pertumbuhannya terus meningkat namun tidak signifikan dibanding pertumbuhan sektor lainnya. Satu hal positif yang terlihat adalah bahwa sektor ini memiliki peran yang besar terhadap perekonomian Kabupaten Mojokerto yaitu pada Tahun 2020 dimana terjadi pandemi Covid 19, namun sektor ini tetap mampu bertahan dan tumbuh positif sebesar 0,16%. Hal tersebut semakin memperkuat opini bahwa sektor industri pengolahan ini menjadi sektor basis bagi perekonomian Kabupaten Mojokerto.

Selanjutnya pelaksanaan urusan perindustrian perlu untuk lebih difokuskan pada upaya-upaya peningkatan produktivitas sektor industri baik kecil, menengah, maupun industri besar. Pembangunan industri yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat memacu pembangunan sektor sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat merangsang sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. di sisi lain, sektor jasa yang turut berkembang antara lain adalah lembaga keuangan, lembaga pemasaran/periklanan, lembaga pelatihan ketrampilan dan rumah makan. Hal tersebut juga



berdampak pada meluasnya kesempatan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya beli) sebagai ukuran tumbuhnya perekonomian.

Tabel 2.131
Data Jenis Industri Berdasarkan Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2020

DATA JENIS INDUSTRI BERDASARKAN JUMLAH INDUSTRI dan TENAGA KERJA						
Jenis Industri	Jumlah Industri			Tenaga Kerja		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Makanan, Minuman, dan Tembakau	5918	5918	5948	20416	20416	39521
Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit, dan Alas Kaki	2135	2135	2141	8045	8045	10955
Kayu, Rotan, Bambu, dan Perabot Rumah Tangga	723	723	745	2951	2951	6275
Kertas, Barang dari Kertas, Percetakan dan Penerbitan	317	317	330	7431	7431	9139
Pupuk, Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, Barang dari Karet dan Plastik	181	181	227	11404	11404	15486
Semen, barang galan bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara	1196	1196	1212	9022	9022	10968
Logam dasar	257	257	281	3174	3174	5514
Alat Angkutan, Mesin dan Peralatannya	1230	1230	1240	11873	11873	12014
Industri Pengolahan Lainnya	287	287	300	4077	4077	4662
Total	12244	12244	12424	78393	78393	114534

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa jumlah industri di Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2020 adalah sebanyak 12.424 industri dan meningkat sebanyak 180 industri jika



dibandingkan dengan Tahun 2019 yang berjumlah 12.244 industri. Dari peningkatan jumlah tersebut berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerjanya dimana pada Tahun 2020 jumlah tenaga kerja di sektor ini adalah sebanyak 114.534 orang, meningkat cukup signifikan sebanyak 36.141 jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang berjumlah 78.393 tenaga kerja. Dengan demikian, maka sektor industri pengolahan ini perlu untuk terus dikembangkan terutama sebagai sektor basis yang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto ke depan.

2.3.3.6 Transmigrasi

Urusan transmigrasi merupakan urusan dengan urgensi yang cukup tinggi, hal ini dikarenakan berkorelasi dengan upaya pengentasan kemiskinan. Program transmigrasi secara regulasi masih bergantung pada pemerintah pusat/provinsi, baik untuk sarana dan prasarana maupun local transmigrasi, sehingga keberhasilan program/kegiatan transmigrasi di daerah masih bergantung pada Pemerintah Pusat/Provinsi.

Capaian indikator kinerja bidang Transmigrasi tahun 2016-2021 tercermin dari terealisasinya indikator kinerja berupa *outcome* yang menunjukkan keberhasilan pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukungnya seperti yang terlihat dalam table berikut ini.

Tabel 2.132
Capaian Indikator Kinerja Bidang Transmigrasi Tahun 2016 – 2021

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.	Pembinaan kesiapan peserta transmigrasi	KK	-	-	-	3	-
2.	Transmigrasi Swakarsa	%	-	-	-	-	-
3.	Transmigrasi Umum	KK	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.4 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsure pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan



kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Mojokerto meliputi perencanaan umum (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan perencanaan yang bersifat khusus misalnya Perencanaan Tata Ruang, Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang Fisik dan Prasarana.

Tabel 2.133
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Capaian
1.	Jumlah dokumen pengembangan data informasi	Dokumen	4	2	3	5	2
2.	Jumlah dokumen perencanaan di bidang ekonomi	Dokumen	3	4	3	1	1
3.	Jumlah dokumen perencanaan di bidang sosial budaya dan pemerintahan	Dokumen	13	14	20	15	15
4.	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERBUP	Dokumen	2	2	2	2	2
5.	Tersedianya dokumen hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah.	Dokumen	1	1	1	1	1

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Secara umum capaian urusan perencanaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya dokumen pengembangan data informasi;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan di bidang ekonomi;
- 3) Tersedianya dokumen perencanaan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan;
- 4) Tersedianya dokumen RKPD tahun 2021 dan RKPD 2020 Perubahan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman dan arah kebijakan tahunan daerah;
- 5) Tersusunnya LKPJ Bupati Mojokerto tahun 2020;
- 6) Tersedianya data hasil monitoring, evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah



2.3.4.2 Keuangan

Keuangan daerah merupakan komponen yang penting dalam pemerintahan, analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan secara efektif. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif. Keberhasilan kinerja aparatur pemerintahan dalam urusan keuangan salah satunya adalah dengan mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk itu Kabupaten Mojokerto menargetkan perolehan nilai WTP pada tiap tahunnya.

Tabel 2.134
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Satuan	2018	2019			2020		
			Realisasi	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1.	Persentase OPD dengan Tata Kelola Keuangan yang baik	%	100	100	100	100	100	100	
2.	Opini BPK	Nilai	WTP	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100

Sumber: : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.135
Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 -2020
(Sebelum dan Sesudah Perubahan)

Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto									
No.	Urusan	2019				2020			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
I.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar								
1	Pendidikan	762.249.043.830	827.859.093.250	65.610.049.420	8,61	748.984.556.881,85	718.177.023.742,40	(30.102.177.047)	-4,02
2	Kesehatan	426.539.338.118	510.748.782.295	84.209.444.177	19,74	362.896.799.736,40	465.033.020.108,78	92.238.076.530	25,42
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	279.146.382.400	364.070.716.463	84.924.334.063	30,42	289.025.590.586,33	162.393.546.786,33	(126.632.043.800)	43,81
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.338.455.440	11.742.296.440	1.403.841.000	13,58	10.236.644.790,00	10.533.798.628,00	297.153.838	2,90



Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto

No.	Urusan	2019				2020			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
5	Ketentramandan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	37.312.843.092	41.813.523.592	4.500.680.500	12,06	32.126.904.840,00	30.491.031.532,00	(1.635.873.308)	-5,09
6	Sosial	9.941.152.840	11.072.908.840	1.131.756.000	11,38	13.321.631.840,00	12.586.797.813,00	(734.834.027)	-5,52
II.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar								
1	Tenaga Kerja	6.276.038.880	6.379.546.880	103.508.000	1,65	6.786.930.880,00	5.711.552.480,00	(1.075.378.400)	15,84
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.278.000.000	1.278.000.000	-	0,00	-	-	-	-
3	Pangan	9.596.285.420	10.399.230.936	802.945.516	8,37	8.565.146.920,00	10.151.244.935,00	1.586.098.015	18,52



Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto

No.	Urusan	2019				2020			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
4	Lingkungan Hidup	32.344.568.840	37.668.855.840	5.324.287.000	16,46	34.964.055.990,00	38.068.778.137,00	3.104.722.147	8,88
5	Administrasi Keperindudukan dan Cakil	8.639.824.350	9.752.231.850	1.112.407.500	12,88	10.329.327.600,00	10.842.036.600,00	512.709.000	4,96
6	Pemberdayaan Masyarakat Desa	12.417.665.840	13.314.390.840	896.725.000	7,22	10.475.781.360,00	8.027.278.135,00	(2.448.503.225)	23,37
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13.783.674.600	13.954.727.100	171.052.500	1,24	15.208.382.400,00	14.038.013.370,00	(1.170.369.030)	-7,70
8	Perhubungan		4.821.967.250			1.263.854.000,00	1.745.053.500,00	481.199.500	38,07
9	Komunikasi dan Informatika	8.971.573.000	10.855.546.000	1.883.973.000	21,00	15.754.556.480,00	15.926.227.100,00	171.670.620	1,09
10	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.344.058.900	7.504.539.400	160.480.500	2,19	6.467.004.400,00	5.162.325.050,00	(1.304.679.350)	20,17



Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto

No.	Urusan	2019				2020			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
11	Penanaman Modal	6.088.359.200	5.830.123.000	(258.236.200)	-4,24	5.793.647.300,00	5.296.437.511,00	(497.209.789)	-8,58
12	Kepemudaan dan Olah Raga	5.435.500.000	5.410.500.000	(25.000.000)	-0,46	1.567.500.000,00	1.052.754.375,00	(514.745.625)	32,84
13	Kebudayaan	3.820.000.000	4.135.000.000	25.000.000	8,25	3.445.000.000,00	724.093.750,00	(2.720.906.250)	78,98
14	Perpustakaan	5.027.545.200	5.273.692.200	246.147.000	4,90	4.752.706.400,00	4.092.117.580,00	(660.588.820)	13,90
15	Kearsipan	-	-	-		150.000.000,00	80.391.000,00	(69.609.000)	46,41
III.	Urusan Pilihan								
1	Kelautandan Perikanan	-	-	-		-	-	-	-
2	Pariwisata	26.128.703.200	20.062.532.905	(6.066.170.295)	-23,22	9.294.020.200,00	10.725.801.325,00	1.431.781.125	15,41



Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto

No.	Urusan	2019				2020			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
3	Pertanian	24.061.012.260	24.766.908.760	705.896.500	2,93	24.682.642.760,00	21.180.752.380,00	(3.501.890.380)	14,19
4	Perdagangan	25.789.423.000	22.023.493.600	(3.765.929.400)	-14,60	2.573.500.000,00	4.873.177.000,00	2.228.877.000	86,61
5	Perindustrian	9.647.638.000	9.583.543.000	(64.095.000)	-0,66	8.822.168.000,00	9.736.762.800,00	(14.605.200)	-0,17
6	Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang								
1	Administrasi Pemerintahan	174.025.493.206	188.626.855.686	14.601.362.480	8,39	210.159.326.536,00	188.188.853.510,75	(21.970.473.025)	10,45
2	Pengawasan	12.460.026.432	12.780.093.932	320.067.500	2,57	15.679.322.320,00	13.250.423.253,75	(2.428.899.066)	15,49



Anggaran Belanja per Urusan Kabupaten Mojokerto

No.	Urusan	2019				2020			
		Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Lebih / Kurang (Rp)	%
3	Perencanaan	11.124.313.360	12.698.429.304	1.574.115.944	14,15	13.726.486.435,60	11.824.939.643,00	(1.901.546.793)	13,85
4	Keuangan	588.626.843.966	673.237.416.006	47.412.365.048	14,37	720.015.687.845,30	910.726.870.817,50	190.711.182.972	26,49
5	Kepegawaian	12.537.053.380	14.791.368.880	2.254.315.500	17,98	15.841.586.880,00	9.844.369.840,00	(5.997.217.040)	37,86
	Total	2.570.155.645.307	2.869.883.346.251	299.727.700.944	11,66	2.602.910.763.381,48	2.700.485.472.703,51	87.381.921.572,03	3,36



Tabel 2.136
Ringkasan Anggaran Dan Realisasi APBD Kab. Mojokerto Tahun Anggaran 2019-2020
(Sesudah Audit BPK-RI)

Urusan	2019				2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
BELANJA	2,882,456,314,250.60	2,559,610,383,721.43	(322,845,930,529.17)	88.80	2,700,485,472,703.51	2,404,898,902,932.71	(295,586,569,770.80)	89.05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	1,767,307,320,880.93	1,522,091,762,732.08	(245,215,558,148.85)	86.12	1,399,215,218,610.51	1,237,090,360,500.41	(162,124,858,110.10)	88.41
Pendidikan	827,859,093,250.46	720,332,745,367.50	(107,526,347,882.96)	87.01	718,177,023,742.40	636,307,923,370.95	(81,869,100,371.45)	88.60
Dinas Pendidikan	827,859,093,250.46	720,332,745,367.50	(107,526,347,882.96)	87.01	718,177,023,742.40	636,307,923,370.95	(81,869,100,371.45)	88.60
Kesehatan	510,748,782,295.37	457,378,034,606.26	(53,370,747,689.11)	89.55	465,033,020,108.78	422,096,716,209.12	(42,936,303,899.66)	90.77
Dinas Kesehatan	229,326,299,664.02	206,539,640,038.26	(22,786,659,625.76)	90.06	250,212,648,196.65	208,845,819,276.12	(41,366,828,920.53)	83.47
RSUD. Prof. Dr. Soekandar	194,172,108,675.00	169,078,681,488.00	(25,093,427,187.00)	87.08	149,239,433,154.13	148,037,537,689.00	(1,201,895,465.13)	99.19
RSUD. RA. Basoeni	87,250,373,956.35	81,759,713,080.00	(5,490,660,876.35)	93.71	65,580,938,758.00	65,213,359,244.00	(367,579,514.00)	99.44
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	364,070,716,463.10	288,187,048,660.32	(75,883,667,802.78)	79.16	162,393,546,786.33	131,750,377,164.34	(30,643,169,621.99)	81.13
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	364,070,716,463.10	288,187,048,660.32	(75,883,667,802.78)	79.16	162,393,546,786.33	131,750,377,164.34	(30,643,169,621.99)	81.13
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11,742,296,440.00	10,011,584,005.00	(1,730,712,435.00)	85.26	10,533,798,628.00	9,088,952,041.00	(1,444,846,587.00)	86.28
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman	11,742,296,440.00	10,011,584,005.00	(1,730,712,435.00)	85.26	10,533,798,628.00	9,088,952,041.00	(1,444,846,587.00)	86.28



Urusan	2019				2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Dan Perhubungan								
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	41,813,523,592.00	36,348,471,006.00	(5,465,052,586.00)	86.93	30,491,031,532.00	26,733,186,180.00	(3,757,845,352.00)	87.68
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6,210,973,000.00	5,040,247,963.00	(1,170,725,037.00)	81.15	6,378,787,000.00	5,739,349,935.00	(639,437,065.00)	89.98
Satuan Polisi Pamong Praja	24,395,952,000.00	20,944,641,010.00	(3,451,310,990.00)	85.85	13,641,091,692.00	11,551,835,669.00	(2,089,256,023.00)	84.68
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10,425,128,592.00	9,641,167,033.00	(783,961,559.00)	92.48	10,471,152,840.00	9,442,000,576.00	(1,029,152,264.00)	90.17
Sosial	11,072,908,840.00	9,833,879,087.00	(1,239,029,753.00)	88.81	12,586,797,813.00	11,113,205,535.00	(1,473,592,278.00)	88.29
Dinas Sosial	11,072,908,840.00	9,833,879,087.00	(1,239,029,753.00)	88.81	12,586,797,813.00	11,113,205,535.00	(1,473,592,278.00)	88.29
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	136,578,351,296.00	122,129,715,982.85	(14,448,635,313.15)	89.42	120,918,303,523.00	107,946,874,118.00	(12,971,429,405.00)	89.27
Tenaga Kerja	6,379,546,880.00	5,610,144,046.00	(769,402,834.00)	87.94	5,711,552,480.00	4,567,589,480.00	(1,143,963,000.00)	79.97
Dinas Tenaga Kerja	6,379,546,880.00	5,610,144,046.00	(769,402,834.00)	87.94	5,711,552,480.00	4,567,589,480.00	(1,143,963,000.00)	79.97
Pangan	1,278,000,000.00	1,236,730,000.00	(41,270,000.00)	96.77	10,151,244,935.00	8,728,846,855.00	(1,422,398,080.00)	85.99
Dinas Pangan Dan Perikanan	1,278,000,000.00	1,236,730,000.00	(41,270,000.00)	96.77	10,151,244,935.00	8,728,846,855.00	(1,422,398,080.00)	85.99
Lingkungan Hidup	10,399,230,936.00	8,804,923,065.00	(1,594,307,871.00)	84.67	38,068,778,137.00	34,074,507,203.00	(3,994,270,934.00)	89.51
Dinas Lingkungan Hidup	10,399,230,936.00	8,804,923,065.00	(1,594,307,871.00)	84.67	38,068,778,137.00	34,074,507,203.00	(3,994,270,934.00)	89.51
Administrasi Kependudukan dan Capil	37,668,855,840.00	34,608,077,858.00	(3,060,777,982.00)	91.87	10,842,036,600.00	9,639,629,330.00	(1,202,407,270.00)	88.91



Urusan	2019				2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	37,668,855,840.00	34,608,077,858.00	(3,060,777,982.00)	91.87	10,842,036,600.00	9,639,629,330.00	(1,202,407,270.00)	88.91
Pemberdayaan Masyarakat Desa	9,752,231,850.00	9,005,118,948.00	(747,112,902.00)	92.34	8,027,278,135.00	7,248,989,263.00	(778,288,872.00)	90.30
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	9,752,231,850.00	9,005,118,948.00	(747,112,902.00)	92.34	8,027,278,135.00	7,248,989,263.00	(778,288,872.00)	90.30
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	13,314,390,840.00	12,043,351,514.00	(1,271,039,326.00)	90.45	14,038,013,370.00	12,967,149,212.00	(1,070,864,158.00)	92.37
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan	13,314,390,840.00	12,043,351,514.00	(1,271,039,326.00)	93.42	14,038,013,370.00	12,967,149,212.00	(1,070,864,158.00)	92.37
Perhubungan	4,821,967,250.00	4,713,406,200.00	(108,561,050.00)	97.75	1,745,053,500.00	1,732,876,680.00	(12,176,820.00)	99.30
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Dan Perhubungan	4,821,967,250.00	4,713,406,200.00	(108,561,050.00)	97.75	1,745,053,500.00	1,732,876,680.00	(12,176,820.00)	99.30
Komunikasi dan Informatika	10,233,546,000.00	9,062,877,553.00	(1,170,668,447.00)	88.56	15,926,227,100.00	14,875,751,060.00	(1,050,476,040.00)	93.40
Dinas Komunikasi Dan Informatika	10,233,546,000.00	9,062,877,553.00	(1,170,668,447.00)	88.56	15,926,227,100.00	14,875,751,060.00	(1,050,476,040.00)	93.40



Urusan	2019				2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7,504,539,400.00	6,760,667,651.00	(743,871,749.00)	90.09	5,162,325,050.00	4,600,662,499.00	(561,662,551.00)	89.12
Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro	7,504,539,400.00	6,760,667,651.00	(743,871,749.00)	90.09	5,162,325,050.00	4,600,662,499.00	(561,662,551.00)	89.12
Penanaman Modal	5,830,123,000.00	5,144,753,038.00	(685,369,962.00)	88.24	5,296,437,511.00	4,586,318,652.00	(710,118,859.00)	86.59
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,830,123,000.00	5,144,753,038.00	(685,369,962.00)	88.24	5,296,437,511.00	4,586,318,652.00	(710,118,859.00)	86.59
Kepemudaan dan Olah Raga	5,410,500,000.00	4,534,502,894.85	(875,997,105.15)	83.81	1,052,754,375.00	742,615,250.00	(310,139,125.00)	70.54
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	5,410,500,000.00	4,534,502,894.85	(875,997,105.15)	83.81	1,052,754,375.00	742,615,250.00	(310,139,125.00)	70.54
Kebudayaan	4,045,000,000.00	3,943,734,400.00	(101,265,600.00)	97.50	724,093,750.00	702,234,750.00	(21,859,000.00)	96.98
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	4,045,000,000.00	3,943,734,400.00	(101,265,600.00)	97.50	724,093,750.00	702,234,750.00	(21,859,000.00)	96.98
Perpustakaan	5,273,692,200.00	4,445,253,242.00	(828,438,958.00)	84.29	4,092,117,580.00	3,399,801,884.00	(692,315,696.00)	83.08
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	5,273,692,200.00	4,445,253,242.00	(828,438,958.00)	84.29	4,092,117,580.00	3,399,801,884.00	(692,315,696.00)	83.08
Urusan Pilihan	76,436,478,265.00	66,613,385,000.00	(9,823,093,265.00)	87.15	46,516,493,505.00	38,590,085,903.00	(7,926,407,602.00)	82.96
Pariwisata	20,062,532,905.00	17,373,277,390.00	(2,689,255,515.00)	86.60	10,725,801,325.00	9,630,497,955.00	(1,095,303,370.00)	89.79
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga	20,062,532,905.00	17,373,277,390.00	(2,689,255,515.00)	86.60	10,725,801,325.00	9,630,497,955.00	(1,095,303,370.00)	89.79



Urusan	2019				2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga	518,000,000.00	377,887,958.00	(140,112,042.00)	72.95	382,740,468.75	380,039,000.00	(2,701,468.75)	99.29
Pertanian	24,766,908,760.00	20,802,604,260.00	(3,964,304,500.00)	83.99	21,180,752,380.00	16,950,382,531.00	(4,230,369,849.00)	80.03
Dinas Pertanian	24,766,908,760.00	20,802,604,260.00	(3,964,304,500.00)	83.99	21,180,752,380.00	16,950,382,531.00	(4,230,369,849.00)	80.03
Perdagangan	22,023,493,600.00	20,076,575,357.00	(1,946,918,243.00)	91.16	4,873,177,000.00	3,621,438,625.00	(1,251,738,375.00)	74.31
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22,023,493,600.00	20,076,575,357.00	(1,946,918,243.00)	91.16	4,873,177,000.00	3,621,438,625.00	(1,251,738,375.00)	74.31
Perindustrian	9,583,543,000.00	8,360,927,993.00	(1,222,615,007.00)	87.24	9,736,762,800.00	8,387,766,792.00	(1,348,996,008.00)	86.15
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9,583,543,000.00	8,360,927,993.00	(1,222,615,007.00)	87.24	9,736,762,800.00	8,387,766,792.00	(1,348,996,008.00)	86.15
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	902,134,163,808.67	848,775,520,006.50	(53,358,643,802.17)	94.09	1,133,835,457,065.00	1,021,271,582,411.30	(112,563,874,653.70)	90.07
Administrasi Pemerintahan	188,626,855,686.00	167,437,165,185.00	(21,189,690,501.00)	88.77	188,188,853,510.75	167,197,968,306.65	(20,990,885,204.10)	88.85
Kepala Daerah dan WKDh	912,210,000.00	579,843,776.00	(332,366,224.00)	63.56	808,363,000.00	635,104,008.00	(173,258,992.00)	78.57
Sekretariat Daerah	52,321,076,300.00	44,916,143,746.00	(7,404,932,554.00)	85.85	45,239,123,619.00	39,636,309,586.00	(5,602,814,033.00)	87.62
Sekretariat DPRD	75,581,107,426.00	70,773,238,154.00	(4,807,869,272.00)	93.64	82,593,336,043.00	77,385,775,921.00	(5,207,560,122.00)	93.69
Kecamatan Sooko	3,300,611,960.00	2,708,569,099.00	(592,042,861.00)	82.06	3,201,075,813.75	2,586,752,022.00	(614,323,791.75)	80.81
Kecamatan Trowulan	2,760,075,960.00	2,304,489,031.00	(455,586,929.00)	83.49	2,914,707,557.50	2,462,440,426.00	(452,267,131.50)	84.48
Kecamatan Puri	3,244,949,960.00	2,801,632,198.00	(443,317,762.00)	86.34	3,306,136,227.00	2,873,561,366.00	(432,574,861.00)	86.92
Kecamatan Bangsal	3,269,459,480.00	2,790,785,579.00	(478,673,901.00)	85.36	3,332,879,134.00	2,748,294,902.00	(584,584,232.00)	82.46
Kecamatan Gedeg	3,181,635,960.00	2,818,501,417.00	(363,134,543.00)	88.59	3,249,242,460.00	2,831,474,315.00	(417,768,145.00)	87.14



Urusan	2019				2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Kecamatan Kemlagi	2,782,899,360.00	2,464,723,526.00	(318,175,834.00)	88.57	2,768,445,139.25	2,410,090,913.00	(358,354,226.25)	87.06
Kecamatan Jetis	2,515,406,480.00	2,181,080,943.00	(334,325,537.00)	86.71	2,540,655,062.50	2,146,755,933.00	(393,899,129.50)	84.50
Kecamatan Dawarblandong	3,039,771,000.00	2,540,302,059.00	(499,468,941.00)	83.57	3,084,971,146.25	2,563,147,169.00	(521,823,977.25)	83.08
Kecamatan Mojosari	10,935,212,000.00	9,416,343,614.00	(1,518,868,386.00)	86.11	9,306,951,400.00	7,184,636,697.65	(2,122,314,702.35)	77.20
Kecamatan Pungging	2,634,236,480.00	2,206,843,900.00	(427,392,580.00)	83.78	2,768,330,250.00	2,340,397,177.00	(427,933,073.00)	84.54
Kecamatan Ngoro	3,200,703,960.00	2,759,990,280.00	(440,713,680.00)	86.23	3,440,626,710.00	2,891,632,215.00	(548,994,495.00)	84.04
Kecamatan Kutorejo	2,636,095,000.00	2,151,335,175.00	(484,759,825.00)	81.61	2,641,599,930.00	2,245,975,625.00	(395,624,305.00)	85.02
Kecamatan Dlanggu	2,497,492,480.00	2,100,207,052.00	(397,285,428.00)	84.09	2,343,161,630.00	1,949,206,056.00	(393,955,574.00)	83.19
Kecamatan Gondang	3,211,818,440.00	2,753,155,784.00	(458,662,656.00)	85.72	3,257,808,705.00	2,645,279,109.00	(612,529,596.00)	81.20
Kecamatan Jatilejo	2,738,428,480.00	2,498,316,983.00	(240,111,497.00)	91.23	3,003,497,094.00	2,584,076,436.00	(419,420,658.00)	86.04
Kecamatan Trawas	2,280,116,480.00	1,992,073,147.00	(288,043,333.00)	87.37	2,573,321,195.00	2,227,860,581.00	(345,460,614.00)	86.58
Kecamatan Pacet	3,066,112,000.00	2,535,418,277.00	(530,693,723.00)	82.69	3,218,337,950.00	2,605,746,920.00	(612,591,030.00)	80.97
Kecamatan Mojoanyar	2,517,436,480.00	2,144,171,445.00	(373,265,035.00)	85.17	2,596,283,444.50	2,243,450,929.00	(352,832,515.50)	86.41
Pengawasan	12,780,093,932.00	11,555,208,919.50	(1,224,885,012.50)	90.42	13,250,423,253.75	11,543,082,522.00	(1,707,340,731.75)	87.11
Inspektorat Kabupaten	12,780,093,932.00	11,555,208,919.50	(1,224,885,012.50)	90.42	13,250,423,253.75	11,543,082,522.00	(1,707,340,731.75)	87.11
Perencanaan	12,698,429,304.23	11,738,291,367.00	(960,137,937.23)	92.44	11,824,939,643.00	10,463,791,999.00	(1,361,147,644.00)	88.49
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12,698,429,304.23	11,738,291,367.00	(960,137,937.23)	92.44	11,824,939,643.00	10,463,791,999.00	(1,361,147,644.00)	88.49



Urusan	2019				2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih	%	Anggaran	Realisasi	Selisih	%
Keuangan	673,237,416,006.44	647,023,245,744.00	(26,214,170,262.44)	96.11	910,726,870,817.50	823,726,605,717.65	(87,000,265,099.85)	90.45
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	636,039,209,014.44	613,148,329,103.00	(22,890,879,911.44)	96.40	877,945,679,740.75	793,604,746,085.00	(84,340,933,655.75)	90.39
Badan Pendapatan Daerah	36,680,206,992.00	33,497,028,683.00	(3,183,178,309.00)	91.32	32,398,450,608.00	29,741,820,632.65	(2,656,629,975.35)	91.80
Kepegawaian	14,791,368,880.00	11,021,608,791.00	(3,769,760,089.00)	74.51	9,844,369,840.00	8,340,133,866.00	(1,504,235,974.00)	84.72
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	14,791,368,880.00	11,021,608,791.00	(3,769,760,089.00)	74.51	9,844,369,840.00	8,340,133,866.00	(1,504,235,974.00)	84.72

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



2.3.4.3 Pengawasan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta aparat pengawas internal pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan efisien, efektif, transparan dan akuntabel, maka dilakukan pengawasan yang obyektif dan profesional sesuai Norma dan Standar Audit Pemerintah, dengan realisasi indikator sebagaimana terlihat dari capaian sebagai berikut :

Tabel 2.137
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2016	2018	2019		2020		%
			Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Target	Realisasi	
1.	Persentase penanganan pengaduan administratif	%	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.138
Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No.	Indikator	Jumlah	Nilai (Rp)	Setor (Rp)	Sisa (Rp)
1	Tindak lanjut Pemeriksaan Reguler (keuangan)				
	Tahun 2016				
	a. Kerugian	998	9,879,513,748	-	-
	b. Kewajiban setor	734	-	5,752,148,725	4,127,365,023
	Tahun 2017				
	a. Kerugian	1,559	10,080,791,886	-	
	b. Kewajiban setor	1,196	-	5,517,287,142	4,563,504,744



No.	Indikator	Jumlah	Nilai (Rp)	Setor (Rp)	Sisa (Rp)
	Tahun 2018				
	a. Kerugian	438	9,678,235,610	-	-
	b. Kewajiban setor	271	-	5,987,010,309	3,691,225,301
	Tahun 2019				
	a. Kerugian	2,679	10,483,348,162	-	
	b. Kewajiban setor	2,121	-	5,047,563,974	5,435,784,188
	Tahun 2020				
	a. Kerugian	1,418	10,030,472,352	-	
	b. Kewajiban setor	1,080	-	5,576,002,538	4,454,469,814

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.139
Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2020

No	Sub Kelompok Temuan*)	Jumlah Kejadian	Selesai	%	Nilai Kerugian (Rp)
Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan					
1	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	423	319	75	2.645.567.308
2	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/ daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	3	3	100	0
3	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	231	186	81	2.499.342.880
4	Administrasi	490	381	78	290.874.000
5	Indikasi tindak pidana				
Sub total Kejadian		1.147	889	78	5.435.784.188
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern					
1	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	656	542	83	0
2	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	623	506	81	0
3	Kelemahan struktur pengendalian intern	240	175	73	0
Sub total Kejadian		1.519	1.223	81	0



No	Sub Kelompok Temuan*)	Jumlah Kejadian	Selesai	%	Nilai Kerugian
					(Rp)
	Temuan 3 E				
1	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	1	1	100	0
2	Ketidakefisienan	0	0	0	0
3	Ketidakefektifan	12	8	67	0
Sub total Kejadian		13	9	167	0
Jumlah Kejadian		2.679	2.121	326	5.435.784.188

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.140
Rekomendasi Temuan Hasil Audit Kinerja APIP Tahun 2020

No	Sub Kelompok Rekomendasi	Jumlah Kejadian	%	Nilai Temuan (Rp)
1	Penyetoran ke kas negara/daerah, Kas BUMN/D, dan masyarakat			
2	Pengembalian barang kepada negara, daerah, BUMN/D, dan masyarakat			-
3	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan			-
4	Penghapusan barang milik negara/daerah			-
5	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	2		-
6	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan			-
7	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian			-
8	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan			-
9	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	7		-
10	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang			-
11	Pelaksanaan penelitian oleh Tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern			-
12	Pelaksanaan sosialisasi	1		-
13	Lain-lain			-
Jumlah		9		

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.141
Aspek Bidang Kinerja Pengawasan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pelanggaran pegawai		3 Kasus	1 Kasus	3 Kasus	2 Kasus	2 Kasus
Jumlah temuan BPK	Jumlah	17	8	12	14	12
Persentase tindak lanjut atas rekomendasi temuan/ tindak lanjut tuntas (TS)	%	95%	74%	9%		
Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (dalam juta rupiah)	Rupiah	1.386.424,08	1.532.463,58	1.684.964,45	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat					84,09	85,09

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.142
Jumlah data nilai Maturitas dan SDM untuk pengawasan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Maturitas	-	-	2.925	2.925	2.925
2	Jumlah SDM APIP	47	46	45	58	57
3	Jumlah ideal pemeriksa sesuai sasaran obyek	-	69	69	69	69

Sumber: Inspektorat Kabupaten Mojokerto

2.3.4.4 Kepegawaian dan Pendidikan

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, khususnya sumberdaya aparatur, merupakan prioritas utama untuk dapat mewujudkan aparatur sipil negara yang professional. Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi pendorong untuk merealisasikan terwujudnya ASN yang berkualitas, berkompetensi dan professional. Cakupan realisasi Urusan Kepegawaian tahun 2019 seperti yang diuraikan di atas selengkapnyanya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.143**

Capaian Indikator Urusan Kepegawaian Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian						
Nama Diklat	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Frekuensi Diklat PNS	kali	15	11.00	10	7	-
Diklat Pim Tingkat II	orang	5	-	2	2	-
Diklat Pim Tingkat III	orang	12	-	3	3	40
Diklat Pim Tingkat IV	orang	40	40	40	40	-
Diklat Teknis	orang	470	304	235	2	90
Diklat Fungsional	orang	110	170	80	50	5.00
Tugas Belajar	orang	14	11	8	7	2
Jumlah Pelanggaran Disiplin	orang	11.00	1.00	17	9	8.00
Persentase pegawai yang bernilai SKP baik	%	99.99	99.99	99.02	-	-

Sumber : BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.144

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 – 2020

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan					
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
SD	orang	134	117	99	75	56
SLTP	orang	359	305	286	266	209
SLTA	orang	1,867	1,711	1,597	1,484	1,377
D1	orang	183	83	76	59	35
D2	orang	1,530	1,120	1,062	920	731
D3	orang	517	592	583	571	568
D4	orang	43	66	69	122	159
S1	orang	3,994	4,115	3,921	3,928	4,095
S2	orang	468	513	487	472	493
S3	orang	4	3	3	2	2
Jumlah	orang	9,099	8,625	8,183	7,899	7,725

Sumber: BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.145
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Kabupaten Mojokerto
Tahun 2016– 2020

Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai menurut Pangkat / Golongan					
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Golongan I	orang	203	163	141	133	124
Golongan II	orang	2,780	2,360	1,840	1,650	1,497
Golongan III	orang	3,019	3,204	3,511	3,621	3,903
Golongan IV	orang	3,097	2,898	2,691	2,495	2,201
Jumlah	orang	9,099	8,625	8,183	7,899	7,725

Sumber :BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Dengan manajemen kepegawaian yang baik diharapkan memperoleh aparatur pemerintah daerah yang profesional, sehingga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD dapat dicapai. Jumlah pegawai per 31 Desember 2020 sebanyak 7.725 orang PNS/CPNS. Bila dilihat berdasarkan jenjang kepangkatan PNS/CPNS tahun 2020 sebagian besar terdapat pada golongan III (3.901 orang), dan jumlah terkecil adalah golongan I (124 orang), sedangkan bila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan PNS/CPNS terbanyak dengan urutan pendidikan S1 (4.905 orang), dan jumlah yang terkecil adalah jenjang S3 (2 orang).

Tabel 2.146
Realisasi Pemberian Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 -2020

Uraian	Realisasi Pemberian Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala dan Pensiun PNS					
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Kenaikan Pangkat	orang	847	1,680	1,466	1,290	870
2. Kenaikan Gaji Berkala	orang	315	320	414	128	79
3. Pensiun :						
a. Aktif	orang	293	341	361	325	472
b. Dini	orang	23	10	7	4	7
c. Janda / Duda	orang	28		33	27	76
Jumlah	orang	1,506	2,351	2,281	1,774	1,504

Sumber: BKPP Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021



Tabel 2.147
Realisasi Eselon PNS Kabupaten Mojokerto Tahun 2016–2020

Nama Eselon	Realisasi Eselon PNS					
	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Eselon II	orang	33	32	30	24	28
Eselon III	orang	169	180	182	179	163
Eselon IV	orang	631	615	581	560	526
Eselon V	orang	29	26	-	-	-
Jumlah	orang	862	853	793	763	717

Sumber: BKPP Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Tabel 2.148
Aspek Bidang Kinerja Kepegawaian dan Pendidikan Tahun 2016-2020

Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian dan Pendidikan						
Aspek / Bidang / Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pegawai Yang Pernah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural	ASN	51.00	40.00	46	45	40.00
Rata-Rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan Dan Pelatihan	Hari/ Bulan	120 Hari / 4 Bulan	120 Hari / 4 Bulan	120 Hari / 4 Bulan	120 Hari / 4 Bulan	120 Hari / 4 Bulan
Presentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Bulan	395	401	380	2	56
Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	ASN	37	35	35	35	28
Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	4,942	4,123	3,457	3,047	3,003
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	PNS	4,627	447	4,696	4,828	4.694
Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat Dan Penyesuaian Ijazah	PNS	117	-	-	14	23

Sumber: BKPP Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021



Tabel 2.149
Aspek Bidang Kinerja Kepegawaian dan Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Aspek Bidang Kinerja	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pegawai yang pernah mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural	ASN	51	40	46	45	40.00
2.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Hari/ Bulan	120 Hari/ 4 Bulan	120 Hari/ 4 Bulan	120 Hari/ 4 Bulan	120 Hari/ 4 Bulan	120 Hari / 4 Bulan
3.	Presentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	ASN	395	401	380	1.905	56
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	Jabatan	37	35	35	35	28
5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	Jabatan	4.942	4.123	3.457	3.047	3,003
6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	PNS	4.627	4.470	4.696	4.828	4.694
7.	Pelaksanaan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian Ijazah	PNS	-	-	-	14	23

Sumber: BKPP Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.4.5 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (litbang) adalah fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan fungsi penunjang litbang, dinilai dengan indikator kinerja “persentase hasil litbang yang menjadi dasar kebijakan daerah”. Indikator kinerja tersebut menjadi pertimbangan berupa selektivitas dalam penyusunan rencana kegiatan litbang yang dibutuhkan oleh kepala daerah dalam pengambilan kebijakan.



Tabel 2.150
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka inflasi	%	1,30	3,05	1,97	2,04	0,59
PDRB per kapita (ADHB)	Rp.Juta/Org	59.735. 179,14	64.359. 175,09	69.159 .461,92	73.712. 797,38	72.746. 306,72
Nilai TukarPetani	%	103.35	106,44	108,41	116,15	116,67
Indeks Gini		0,3	0,32	0,31	-	0,301
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		-	-	-	-	-
Rasio kesenjangan kemiskinan		115,38	111,79	111,55	108,81	109,21
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	%	10,61	10,19	10,08	9,75	10,19
Indeks Pembangunan Manusia		71,38	72,36	72,64	73,53	73,83
Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat-syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR (Rencana Tata Ruang) dan Program pemanfaatan ruang yang dilakukan minimal 2 kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang	%	> 100	> 100	>100	>100	>100
Persentase Tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang	%	-	-	100	100	100
Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada
Buku "kabupaten dalam angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada
Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ada/Tidak	ada	ada	ada	ada	ada



Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya DokumenPerencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda dan dievaluasi setiap tahun	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tdk	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Ranking Pangripta/ PPD di Jawa Timur						
Ketepatan waktu penyusunan LKPJ Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100
Jumlah penelitian yang dilakukan	penelitian	1	2	4	4	4
Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		-	-	-	-	-
Nilai tukar petani		103,35	106,44	108,41	116,15	116,67
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan per kapita	persen	45,61	48,52	47,33	49,08	47,02
Produktivitas total daerah		-	-	-	-	-
Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa		-	-	-	-	-
Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indicator keterbukaan ekonomi)		9,50	10,14	9,63	9,26	9,15
Angka kriminalitas yang tertangani		-	-	-	-	-
Rasio ketergantungan		-	-	-	-	-
Daya Beli		-	-	-	-	-
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp/bln	-	-	-	-	-

Sumber : Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.3.4.6 Sekretariat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta untuk menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya maka daerah dituntut untuk mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah serta perselisihan antar daerah dalam koridor keutuhan Negara Kesatuan Republik



Indonesia. Kerjasama daerah merupakan wahana dan sarana untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan daerah satu dengan daerah yang lain, menyasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal oleh karenanya telah dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan baik antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga seperti table berikut ini:

Tabel 2.151
Realisasi Kerjasama Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	%
I	Kerjasama Antar Daerah							
	1. Kesepakatan Bersama (MoU)	Buah	5	5	4	4	6	20.0%
	2. Perjanjian Kerjasama	Buah	7	7	8	6	6	14.3%
	3. Perjanjian Pinjam Pakai	Buah	1	-	-	-	-	0.0%
II	Kerjasama dengan Pihak Ketiga							
	1. Kesepakatan Bersama (MoU)	Buah	95	95	103	86	97	2.6%
	2. Perjanjian Kerjasama	Buah	66	66	52	80	71	7.6%
	3. Perjanjian Hibah	Buah			-	-	-	0.0%
	4. Perjanjian Pinjam Pakai	Buah	2	2	2	-	1	50.0%
	5. Keputusan Bersama	Buah	8	4	8	-	6	25.0%
	Jumlah Perjanjian Kerjasama Daerah	Buah	184	179	177	176	187	1.9%

Sumber: Sekretariat Daerah dan beberapa OPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Pembangunan Hukum di Kabupaten Mojokerto secara umum telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, pembangunan hukum yang dilaksanakan pada tahun 206 dititik beratkan untuk melaksanakan pembentukan beberapa produk hukum daerah dalam rangka penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana telah dituangkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Capaian penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan hukum tahun sampai 2021 seperti terlihat pada table berikut:



Tabel 2.152
Realisasi Bidang Pembangunan Hukum Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	%
1	Persentase produk hukum yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	%	100	95	100	100	105	5.0%
2	Penyusunan Raperda	Raperda	12	10	9	14	11	2.7%
3	Raperda yang disampaikan ke DPRD	Raperda	11	9	7	14	10	4.2%
4	Perda yang diundangkan	Perda	9	8	7	11	9	2.8%
5	Penyusunan Peraturan Bupati	Perbup	94	92	90	97	93	0.5%
6	Penyusunan Keputusan Bupati	Keputusan	341	511	681	1	384	12.5%
7	Evaluasi Peraturan Desa	Kegiatan	69	44	18	120	63	9.2%
8	Evaluasi Perda	Produk Hukum	9	8	7	11	9	2.8%
9	Himpunan Lembaran Daerah	Buku	450	450	450	450	450	0.0%
10	Himpunan Berita Daerah	Buku	450	450	450	450	450	0.0%
11	Lembaran Daerah Lepas	Eksemplar	201	101	1	400	176	12.4%

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.153
Realisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

No	Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Bagian Perekonomian							
1.6	Persentase kesepakatan bersama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama	dok	n/a				
	Kegiatan fasilitasi dan koordinasi antar lembaga daerah dan pihak ketiga			Target 5 naskah kerjasama dan realisasi 5 naskah kerjasama	Target 5 naskah kerjasama dan realisasi 5 naskah kerjasama	Target 5 naskah kerjasama dan realisasi 5 naskah kerjasama	Target 10 naskah kerjasama dan realisasi 27 naskah kerjasama



No	Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama antar daerah dan wilayah perbatasan			target 3 wilayah/daerah dan realisasi 3 wilayah/daerah	target 3 wilayah/daerah dan realisasi 3 wilayah/daerah	target 3 wilayah/daerah dan realisasi 3 wilayah/daerah	target 3 wilayah/daerah dan realisasi 3 wilayah/daerah
Bagian Pemerintahan							
1.7	Hasil Evaluasi atas LPPD	predikat					
Bagian Hukum							
1.9	Persentase produk hukum Daerah yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan Daerah	%					
Bagian LPBJ							
1.1 0	Persentase paket pengadaan barang/ jasa yang berhasil dilelangkan	%	0	0	0	60,98%	57,24%
Bagian Organisasi							
1.8	Persentase Perangkat Daerah yang berkinerja baik/akuntabel	%					
	Nilai SAKIP			50,08 (CC)	61,23 (B)	70,88 (BB)	74,98 (BB)
1.1 1	IKM Pemda	%	70,06 (Kurang Baik)	77,76 (Baik)	78,51 (Baik)	80,56 (Baik)	81 (Baik)

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.154
Realisasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mojokerto Tahun 2016–2020

Tahun	Jumlah sarana peribadatan yang mendapat bantuan pemerintah		%	Frekuensi pelaksanaan pembinaan mental spiritual		%	Satuan
	Target	Realisasi		Target	Realisasi		
2016	28	25	89%	72	59	82%	Buah
2017	43	11	26%	73	62	85%	Buah
2018	71	18	25%	70	65	93%	Buah
2019	23	0	0%	85	70	82%	Buah
2020	180	27	15%	70	70	100%	Buah

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



2.3.4.7 Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative. Capaian kinerja dalam rangka Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2020 digambarkan secara jelas seperti pada table sebagai berikut :

Tabel 2.155
Fasilitasi Kegiatan DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016–2020

No.	Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	%
1	Pembahasan Raperda	Raperda	15	16	15	14	16	14,29
2	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama	Kali	8	8	8	8	8	0,00
3	Rapat-rapat alat kelengkapan DPRD							
	a. Rapat Pimpinan	Kali	13	13	13	11	14	27,27
	b. Rapat Badan Musyawarah	Kali	18	19	18	16	20	25,00
	c. Rapat Konsultasi	Kali	21	21	21	22	20	(9,09)
	d. Rapat Komisi Internal	Kali	24	25	24	23	25	8,70
	e. Rapat Komisi Eksternal	Kali	2	3	2	0	4	0
	f. Rapat Badan Anggaran Internal	Kali	15	17	15	12	18	50,00
	g. Rapat Badan Anggaran Eksternal	Kali	12	11	12	14	10	(28,57)
	h. Rapat Pansus Raperda	Kali	20	22	20	15	24	60,00
	i. Rapat Pansus Non Raperda	Kali	8	8	8	7	8	14,29
	j. Rapat Badan Kehormatan	Kali	5	4	4	5	4	(20,00)
	k. Rapat Kerja/Dengar Pendapat	Kali	19	19	19	18	19	5,56
	l. Rapat Badan Legislasi	Kali	6	3	5	11	0	0
	m. Rapat Gabungan	Kali	3	3	3	3	3	0,00
4	Rapat-rapat Paripurna		0	0	0			
	Rapat Paripurna	Kali	24	22	23	26	21	(19,23)
	Rapat Paripurna Istimewa	Kali	3	3	3	2	3	50,00
	Rapat Paripurna Internal / khusus	Kali	4	5	4	2	6	200,00



No.	Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	%
5	Penjaringan spirasi masyarakat pada masa reses	OK	3	2	2	3	2	(33,33)
6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah							
	Pimpinan DPRD	OH	7	4	6	14	0	0
	Anggota DPRD	OH	15	8	13	30	0	0
	Komisi-komisi	OH	29	28	28	29	28	(3,45)
	Badan Kehormatan	OH	0	0	0	0	0	-
7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD							
	Ketua	OK	1	1	1	2	0	-
	Wakil Ketua 3 Orang	OK	3	2	3	6	0	-
	Anggota 46 Orang	OK	2	1	2	4	0	-
8	Penyediaan jaminan pemeliharaan kesehatan pimpinan dan anggota DPRD	Kali	1	1	1	2	0	-
9	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah							
	Kunker ke Luar Jawa			0	0			
	Pimpinan	OK	1	1	1	1	1	0,00
	Komisi-komisi	OK	7	6	7	10	4	(60,00)
	Badan Musyawarah	OK	0	0	0	0	0	-
	Badan Anggaran	OK	2	1	1	3	0	-
	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	OK	0	0	0	0	0	-
	Badan Kehormatan	OK	0	0	0	0	0	-
	Kunjungan kerja ke Jateng/Jabar/DKI							
	Pimpinan	OK	10	10	10	8	11	37,50
	Komisi-komisi	OK	25	18	23	39	11	(71,79)
	Badan Musyawarah	OK	1	1	1	1	1	0,00
	Badan Anggaran	OK	2	2	2	3	1	(66,67)
	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	OK	1	0	0	1	0	-
	Badan Kehormatan	OK	2	1	1	3	0	-
	Kunjungan kerja ke Jatim							
	Pimpinan	OK	4	4	4	5	3	(40,00)
	Komisi-komisi	OK	23	23	23	22	23	4,55
	Badan Musyawarah	OK	0	0	0	0	0	-
	Badan Anggaran	OK	4	5	4	1	6	500,00



No.	Kegiatan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020	%
	Badan Pembentukan Peraturan Daerah	OK	4	5	4	3	5	66,67
	Badan Kehormatan	OK	0	0	0	0	0	-

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel 2.156
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/Bidang/Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Presentase kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan	%	63,21	64,02	64,06	64,14	65,4

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Capaian Kinerja Urusan Sekretariat dewan kabupaten Mojokerto dari tahun 2016-2020 Semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh presentase kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat juga meningkat .

2. 4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia. Berikut merupakan pembahasan gambaran umum terkait aspek daya saing daerah di Kabupaten Mojokerto.

2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

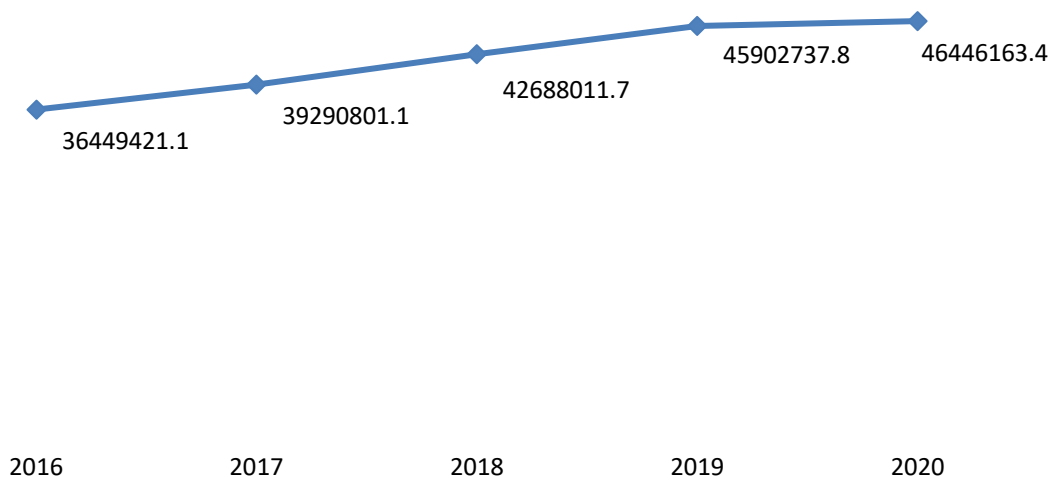


2.4.1.1 Pengeluaran Konsumsi RumahTangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT per kapita)

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Gambar 2.39
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020

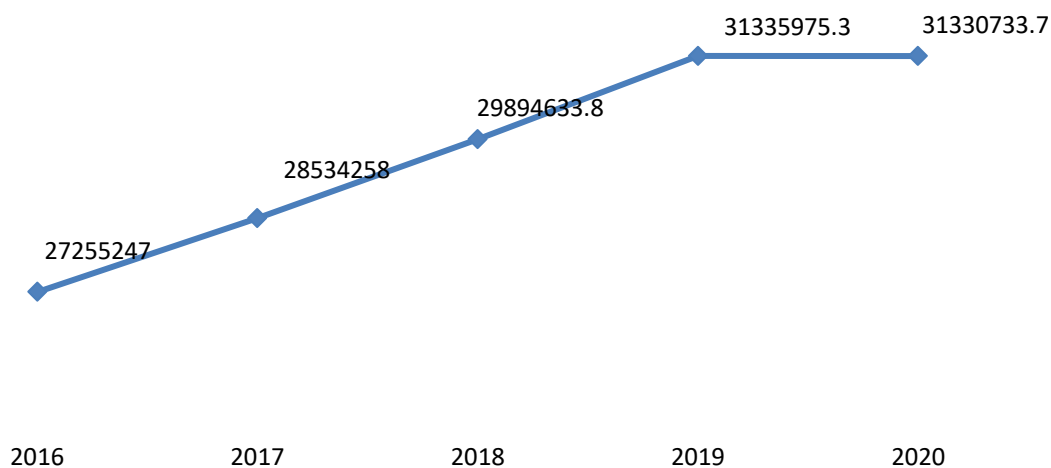


Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021



Gambar 2.40

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Mojokerto Jenis Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (Hukum Engel/Engel law). Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita menandakan bahwa kebutuhan non pangan seimbang atau masih melebihi kebutuhan pangan.

2.4.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Ada dua indeks yang digunakan untuk menghasilkan NTP, yaitu Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib).



Gambar 2.3
Nilai Tukar Petani Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks yang diterima petani (It)	134,79	140,18	148,16		
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	128,87	131,70	136,67		
3.	Nilai Tukar Petani (NTP-P)	103,35	106,44	108,41	116,15	116,67

Sumber: Laporan Tahunan Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2021

Dari table diatas NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Kenaikan harga barang produksi relative lebih besar dari kenaikan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan petani lebih baik disbanding itngkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja infrastruktur dilakukan terhadap beberapa indikator meliputi rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun, ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis dan jumlah bank dan cabang, jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran, jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

Infrastruktur yang tersedia dapat menunjang daya saing daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi pada berbagai sektor di daerah dan antar wilayah.

2.4.2.1 Aksesibilitas Daerah

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah dapat dihitung dengan beberapa indikator sebagai berikut :

a. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum atau Jumlah arus penumpang angkutan umum pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan, yakni di tahun 2016 menjadi 743.395 penumpang, dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 0,02%, yaitu 743.515 penumpang dan di tahun 2018 sebesar 743.900. Hal ini dikarenakan perbaikan angkutan umum yang berdampak pada peningkatan jumlah penumpang. Namun pada tahun 2018-2020 terjadi penurunan yang cukup banyak, akibat adanya revolusi transportasi yang dilakukan



startup transportasi, seperti gojek dll. Mekanisme perlu dilakukan perbaikan baik fasilitas, dan pelayanan secara terus menerus agar jumlah penumpang angkutan umum meningkat.

Tabel 2.157
Jumlah Arus Penumpang Terangkut Angkutan Umum (dalam 1 Tahun)
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah arus penumpang angkutan umum	743.395	743.515	743.480	680.320	468.212

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan Perhubungan, Tahun 2021

b. Jumlah terminal bus tahun 2016-2021 masih tetap sama, yakni 1 terminal bus. Hal ini menunjukkan bahwa masih belum ada penambahan kuantitas terminal bus. Fokus Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini adalah lebih pada perawatan sarana dan prasarana terminal bus dengan mengoptimalkan pemanfaatannya untuk memfasilitasi masyarakat yang menggunakan modal transportasi umum.

Tabel 2.158
Jumlah Terminal Bis Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Terminal Tipe B dan C	7	7	7	7	7

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Perhubungan Tahun 2021

2.4.2.2 Penataan Wilayah

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kesesuaian implementasi tata ruang hasil perencanaan tata ruang berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional dengan peruntukan yang direncanakan sesuai dengan RTRW. Selama tiga tahun terakhir, persentase ketaatan terhadap RTRW di Kabupaten Mojokerto dalam kondisi baik. Ketaatan ini salah satunya ditunjukkan dengan rasio bangunan ber-IMB pada tahun 2014-2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kondisi ketaatan terhadap RTRW dapat dikategorikan dalam kondisi yang baik dari tahun 2015-2018. Selain itu dengan adanya Geografi Informasi Centre (GIS) memudahkan masyarakat umum untuk mengetahui tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Mojokerto.



Tabel 2.159
Rasio Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2020

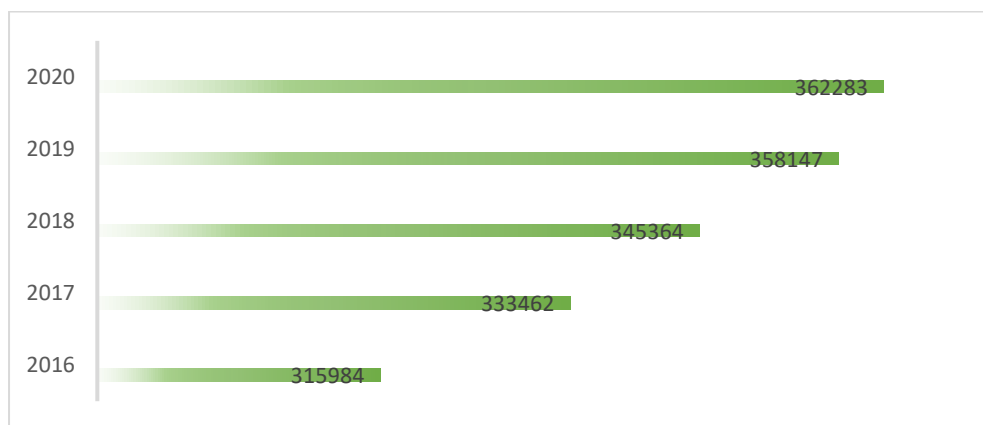
Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Ketaatan terhadap RTRW	Kondisi	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber :Bappeda Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

2.4.2.3 Ketersediaan Listrik

Saat ini energy listrik sudah menjadi kebutuhan utama baik individu maupun badan usaha. Pemenuhan kebutuhan listrik menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah.

Gambar 2.41
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam peningkatan kegiatan pembangunan perekonomian daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga dapat diharapkan mampu mengurangi beban pengangguran dan menanggulangi masalah kemiskinan. Beberapa faktor yang diindikasikan mempunyai pengaruh yang sangat berarti bagi tumbuhnya iklim investasi daerah, seperti angka kriminalitas, jumlah demo, lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi wilayah yang sedang berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pembangunan. Sebagai salah satu komponen aliran modal, PMA dianggap sebagai aliran modal yang relative stabil dibandingkan dengan aliran modal lainnya. Berikut merupakan jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data potensi Kabupaten Mojokerto:



Tabel 2.160
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2016	Jumlah Investor (Perusahaan)	6	14	20
2017	Jumlah Investor (Perusahaan)	27	93	120
2018	Jumlah Investor (Perusahaan)	23	64	87
2019	Jumlah Investor (Perusahaan)	43	69	112
2020	Jumlah Investor (Perusahaan)	12	20	32

Sumber: BPS Kabupaten Mojokerto, Tahun 2021

Berdasarkan table diatas jumlah investor PMDN/PMA di Kabupaten Mojokerto tahun 2016 sampai tahun 2017, didapatkan bahwa jumlah perusahaan yang berupa investor di Kabupaten Mojokerto semakin meningkat baik itu PMDN ataupun PMA. Meningkatnya jumlah investor baik itu Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA) dikarenakan iklim usaha maupun industry mulai dari skala kecil hingga skala besar berkembang cukup baik, seperti kita tahu terdapat kawasan peruntukan khusus industry yaitu Ngoro Industrial Park (NIP) yang berada di Kecamatan Ngoro. Selain itu, berkembang pesat pula industri-industri besar di Kabupaten Mojokerto sehingga hal tersebut dapat menjadi salah satu factor pendorong kecenderungan meningkatnya jumlah investor di Kabupaten Mojokerto.

Investasi atau penanaman modal adalah suatu penanaman modal yang diberikan oleh perseorangan atau perusahaan atau organisasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :Pertama factor Sumber Daya Alam, Kedua factor Sumber Daya Manusia, Ketiga factor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha, Keempat factor kebijakan pemerintah, Kelima factor kemudahan dalam peizinan. Berikut merupakan nilai investasi di Kabupaten Mojokerto berdasarkan data potensi yang ada:

Tabel 2.161
Jumlah Investasi PMDN Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Juta Rp)
2016	6	1,131,998.00	6	1,131,998.00
2017	27	4,544,897.00	27	4,544,897.00
2018	29	5,471,323.67	29	5,471,323.67
2019	32	5,386,544.59	32	5,386,544.59
2020	14	2,356,613.26	14	2,356,613.26

Sumber: Dokumen Data Potensi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 2.162
Jumlah Investasi PMA Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$)
2016	14	122,939.00	14	122,939.00
2017	93	1,429,253,395.00	93	1,429,253,395.00
2018	102	1,567,568,239.68	102	1,567,568,239.68
2019	113	1,736,619,716.51	113	1,736,619,716.51
2020	72	1,106,518,757.42	72	1,106,518,757.42

Sumber: Dokumen Data Potensi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

Tabel diatas merupakan tabel yang menyajikan mengenai jumlah proyek dan nilai investasi yang disetujui serta realisasinya di Kabupaten Mojokerto baik itu investasi untuk penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Dapat dilihat pada table tersebut di atas bahwa semua realisasi investasi sesuai dengan nilai pada persetujuan, hanya terdapat satu yang tidak sesuai yaitu investasi PMDN pada tahun 2014 dimana ternyata nilai realisasi investasi lebih besar dibandingkan dengan persetujuannya, hal tersebut dapat dikarenakan kurang telitinya perhitungan awal yang telah dilakukan sehingga terjadi ketidaksesuaian realisasi dengan persetujuan investasinya.

Tabel 2.163
Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Aspek/ Bidang/ Urusan	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Investasi Baru	Rp	13.223.253.541.663	15.342.645.635.286	17.093.259.895.706	17.866.326.930.105	15.232.761.056.107
Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB						
PMA	US\$ (ribu)	152038.5	125768.6	155,297.7	107,490.5	94,453
PMDN	Rp. Juta	2027,312.8	1818,914.1	1154103.4	1221,189.3	1076,347.60

Sumber: Dokumen Data Potensi Kabupaten Mojokerto Tahun 2021

**Tabel 2.164****Hasil Analisis Gambaran Umum Konsisi daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto**

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui
			2016	2017	2018	2019	2020		
1)	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	5,65	5,73	5,89	5,81	-1.1	-1.1	Sesuai
1.1.1.2	Laju inflasi	%		3,05	1,97	2,04	0,59	0,59	Sesuai
1.1.1.3	PDRB per kapita	Rp. Juta/ Org	59.735.179,14	64.359.175,09	69.163.510,02	73.716.308,55	72.746.306,72	72.746.306,72	Sesuai
1.2	Kesejahteraan Sosial								
1.2.1	Pendidikan								
1.2.1.1	Angka melek huruf								



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui
			2016	2017	2018	2019	2020		
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah		8,53	8,15	8,18	8,49	8,51	8,51	Sesuai
2)	PELAYANAN UMUM								
2.1	Pelayanan Urusan Wajib								
2.1.1	Pendidikan								
2.1.1.1	Pendidikan dasar								
2.1.1.1.1	Angka partisipasi sekolah								
	APM SD/MI		96,09	99,30	99,30	99,49	97,78	97,78	Sesuai
	APK PAUD		98,85	104,74	95,1	99,19	99,25	99,25	Sesuai
	APK SD/MI		105,91	109,58	109,6	108,48	102,07	102,07	Sesuai
2.1.1.1.2	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah								
	Rasio SD/ MI		1:12	1:13	1:14	1:15	1:15	1:15	Sesuai
2.1.1.1.3	Rasio guru terhadap murid		1:11	1:15	1:17	1:15	1:12	1:12	Sesuai
2.1.1.2	Pendidikan menengah								
2.1.1.2.1	Angka partisipasi sekolah								
	APM SMP/ MTs		92,45	97,85	84,35	84,30	83,56	83,56	Sesuai
	APK SMP/ MTs		119,76	104,68	104,7	103,7	94,15	94,15	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui
			2016	2017	2018	2019	2020		
2.1.1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah								
	Rasio SMP/ MTs		1:11	1:11	1:11	1:11	1:14	1:14	Sesuai
2.1.1.2.3	Rasio guru terhadap murid		1:15	1:16	1:17	1:16	1:15	1:15	Sesuai
2.1.2	Kesehatan								
2.1.2.1	Rasio posyandu per satuan balita (II-61)		1:15	1:42	1:40	1:40	1:60	1:60	Sesuai
2.1.2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (II-61)		1:5	1:5	1:5	0:13	0:13	0:13	Sesuai
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan								
2.2.1	Pertanian								
2.2.1.1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/ Ha							
	Padi				61,65	60,43	60,46	60,46	Sesuai
	Jagung				59,57	55,72	63,16	63,16	Sesuai
	Kedelai				16,67	14,29	15,04	15,04	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui
			2016	2017	2018	2019	2020		
	Kacang Tanah				15,97	13,98	15,07	15,07	Sesuai
	Ubi Kayu				229,92	215,94	184,11	184,11	Sesuai
	Ubi Jalar				360,59	337,96	362,12	362,12	Sesuai
2.2.1.2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		7,80	7,43	6,93	6,61	6,72	6,72	Sesuai
3)	DAYA SAING DAERAH								
3.1	Kemampuan Ekonomi								
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
3.1.1.1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita								
	PDRB ADHB	Milyar Rupiah	36449421,1	39290801,1	42688011,7	45902737,8	46446163,4	46446163,4	Sesuai
	PDRB ADHK	Milyar Rupiah	27255247	28534258	29894633,8	31335975,3	31330733,7	31330733,7	Sesuai



No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja					Standar	Interpretasi belum tercapai/ sesuai/ melampaui
			2016	2017	2018	2019	2020		
3.1.1.2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	45,61	48,52	47,33	49,08			
3.1.1.3	Produktivitas total daerah								
3.1.2	Pertanian								
3.1.2.1	Nilai tukar petani	%	0	0	108,58	116,15			
3.2	Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
3.2.1	Perhubungan								
3.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan								
3.2.1.2	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ Ton			743.900	643.000	543.000	543.000	Sesuai
3.2.2	Penataan Ruang								
3.2.2.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
3.2.2.2	Luas wilayah produktif								



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH



Dalam perspektif umum, ada dua sumber pendanaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Kabupaten Mojokerto; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, yakni kinerja keuangan masa lalu serta kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Dalam kaitan ini, tingkat kemampuan keuangan daerah dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Arah kebijakan Ekonomi Makro Kabupaten Mojokerto baik dalam perencanaan maupun implementasinya diselaraskan dengan Kebijakan Ekonomi Makro Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Arah kebijakan ekonomi makro Nasional tahun 2020 adalah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sehingga terdapat tiga kerangka arah kebijakan yang ditetapkan. Pertama, meningkatkan pertumbuhan potensi Indonesia dengan transformasi struktural untuk peningkatan kesejahteraan melalui revitalisasi industri pengolahan, modernisasi pertanian, transformasi sektor jasa. Kedua, menjaga stabilitas makro ekonomi dengan stabilitas harga, eksternal dan sektor keuangan. Ketiga, memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan mendorong pemerataan antar wilayah dan tingkat pendapatan, mendorong penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses dan kesempatan, dan mempertahankan keseimbangan lingkungan.

Pada level Provinsi, kebijakan makro maupun mikro ekonomi telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur antara lain tiga (3) aspek ekonomi utama, yaitu:

1. Aspek Produksi Usaha Mikro dan Besar, pada prinsipnya adalah bagaimana peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendesain aspek peningkatan produksi pada berbagai komoditas dalam skala usaha UMKM dan Besar agar mampu menghasilkan produk yang berdaya saing lebih tinggi serta terjaga baik dari aspek harga yang kompetitif, kualitas, serta kecepatan pengiriman.



2. Aspek pembiayaan yang kompetitif dan efisien, pada prinsipnya adalah peran Pemerintah Jawa Timur dalam mendesain kebijakan fiskal ke dalam sistem perbankan untuk pembiayaan yang kompetitif dan efisien khususnya bagi UMKM serta sektor riil lainnya, sehingga menghasilkan produk yang kompetitif dan lebih efisien yang dengan demikian akan memiliki daya saing yang lebih baik. Hal ini dilakukan melalui upaya antara lain:
 - a. Mendorong perbankan untuk mengoptimalkan skema-skema kredit yang kompetitif untuk sektor riil;
 - b. Skema kredit dari kebijakan Pemerintah Provinsi melalui fasilitasi pembiayaan usaha mikro kecil baik dengan skema pinjaman bunga murah 6%, Apex bank Jatim dan BPR di Jawa Timur, Penjaminan Kredit oleh PT Jamkrida, Pembiayaan sektor pertanian melalui penempatan modal di PT Bank UMKM, serta loan agreement Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bank Jatim serta Linkage Program dengan BPR Kab/Kota dalam pengembangan Industri Primer;
 - c. Mengoptimalkan pola-pola kerjasama pemerintah-swasta;
 - d. Mendorong peran Perseroan maupun BUMN dalam mengalokasikan pemanfaatan CSR/PKBL untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil.

3. Aspek Pemasaran, pada prinsipnya adalah peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendesain pemasaran yang kompetitif serta skala pasar yang lebih luas yang memungkinkan produk UMKM khususnya dan usaha besar memiliki kepastian tujuan pasar. Optimalisasi peran 26 Kantor Perwakilan Dagang Provinsi Jawa Timur di Provinsi Mitra serta peningkatan kapasitas 6 Etalase Perdagangan Jawa Timur di 5 Negara menjadi pendorong dan bentuk fasilitasi yang lebih riil pada pengembangan aspek pemasaran untuk utamanya menguasai pasar domestik dan juga pasar global.

Selanjutnya, pada tingkat lokal Kabupaten Mojokerto, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan karena semakin membaiknya kinerja sektor Industri pengolahan. Hal ini sejalan dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian dunia. Geliat ekonomi di sektor Industri pengolahan semakin meningkat yang berdampak kepada aktivitas perdagangan. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti peningkatan dan pelebaran jalan raya, serta penyelesaian akhir proyek jalan tol yang melintas di Kabupaten Mojokerto, juga mempercepat laju pertumbuhan sektor konstruksi. Indikator ekonomi makro mencakup Produk Domestik Bruto/Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan Inflasi, Nilai Tukar, Harga Minyak dan Tingkat Suku Bunga.



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,1-2,35 %, sehingga perlu dilakukan stabilitas dalam sektor (1) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas dan air bersih, (5) konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) pengangkutan dan komunikasi, (8) keuangan, real estate dan jasa perusahaan, (9) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah). Faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga tumbuh lebih baik, di dukung oleh keyakinan konsumen yang tetap terjaga;
2. Investasi tetap tumbuh stabil didorong oleh investasi industri, dikarenakan lokasi Mojokerto strategis untuk membangun perusahaan. Diharapkan Mojokerto dapat menarik investasi selain bidang industri yaitu investasi bidang pariwisata.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mojokerto tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dalam menunjang keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, selama kurun waktu 5 (lima) tahun ini, telah dilakukan melalui berbagai metode pengelolaan. Ini tidak lain sebagai bentuk restrukturisasi pemerintah sebagai tindak lanjut reformasi. Dampak reformasi ini juga menyangkut pengelolaan keuangan daerah. Upaya ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut ini.

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat



untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga mempertimbangkan beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaranbelanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Perencanaan, Pengelolaan, evaluasi, dan Kinerja keuangan pemerintah daerah diatur dalam beberapa regulasi normatif antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi masalah yang dihadapi oleh setiap Pemerintahan Daerah, karena kebutuhan daerah (*fiscal need*) yang tidak seimbang dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) akan menimbulkan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Agar kapasitas fiskal meningkat, maka Pemerintah Daerah harus dapat meningkatkan PAD tanpa harus melanggar norma-norma dengan cara mengoptimisasi



potensi yang ada. Optimalisasi PAD dari sisi penerimaan hendaknya diikuti dengan pengelolaan penggunaan anggaran dari sisi pengeluaran dan dikelola dengan baik melalui *prinsip value for money* serta dilakukan secara komprehensif dengan berbagai strategi sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan daerah dan keuangan negara, dengan peningkatan prosedur akuntabilitas dan pengendalian dari intern pemerintah daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diimplementasikan melalui proses penganggaran APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD adalah bentuk penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah. Anggaran ini disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk suatu tahun tertentu.

Dalam konteks kinerja pengelolaan keuangan daerah, dapat dilihat dari 2 aspek yakni kinerja pelaksanaan APBD dan kinerja Neraca Daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Sedangkan aspek belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Di sisi lain, aspek pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Sebagaimana termaktub dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Secara substantif, Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah seharusnya tidak perlu menjadi perdebatan lagi karena dalam peraturan perundang-undangan sudah diatur dengan jelas. Demikian pula objek pendapatan asli daerah dalam pelaksanaannya harus memiliki dasar hukum yang jelas untuk dipungut atau tidaknya. Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya di daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan di luar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2).

Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semula *open list* menjadi *close list*. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut, dan penambahan jenis pungutan untuk Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

Kebijakan Pemerintah Pusat sesuai dengan Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif



menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah. PAD adalah sumber pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah. Oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian otonomi suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (*fiscal gap*). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto selalu berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang selalu terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, PAD (Pendapatan Asli Daerah) dibagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pembagian Pajak Provinsi ke Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 95 UU 28/2009 dengan persentase yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan alokasinya dituangkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta.

Peran BUMD dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama



pertumbuhan dan pengembangan ekonomi. Sedangkan dari sisi eksternal, BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini antara lain adalah Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Kemudian untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, serta Hasil Pengelolaan Dana Bergulir. Terkait dengan Pendapatan Daerah sebagaimana terurai di atas, perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini:



Tabel 3.1 (T-C.2)
Pendapatan Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	2,180,483,182,758.42	2,281,192,268,648.19	2,391,525,686,534.77	2,565,576,318,647.93	2,352,101,563,574.18	2.10%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	445,000,794,873.42	446,788,334,925.19	483,033,385,770.10	515,891,852,317.93	477,257,448,164.18	1.96%
1.1.1	Pajak daerah	248,746,800,000.00	274,600,000,000.00	296,805,000,000	316,775,000,000.00	303,910,925,993.82	5.29%
1.1.2	Retribusi daerah	46,930,390,900.00	40,370,441,206.75	42,219,470,890.00	45,919,535,815.00	32,927,069,987.90	- 7.23%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4,581,448,443.00	4,675,188,443.00	4,860,220,680.10	4,725,436,670.00	4,630,252,910.55	0.30%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	174,742,155,530.42	127,242,705,275.44	139,148,694,200.00	148,471,879,832.93	135,789,199,271.91	- 4.92%
1.2.	Dana Perimbangan	1,336,167,635,000.00	1,378,706,506,773.00	1,440,015,857,434.67	1,504,118,327,000.00	1,294,225,001,943.00	- 0.47%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	85,642,948,000.00	65,963,338,773.00	97,212,475,434.67	132,359,400,000.00	94,576,123,101.00	8.00%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	991,180,363,000.00	973,768,511,000.00	973,768,511,000.00	1,006,900,017,000.00	924,376,463,000.00	- 1.64%
1.2.3	Dana alokasi khusus	259,344,324,000.00	338,974,657,000.00	369,034,871,000.00	364,858,910,000.00	275,272,415,842.00	3.47%



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	399,314,752,885.00	455,697,426,950.00	468,476,443,330.00	545,566,139,330.00	580,619,113,467.00	9.95%
1.3.1	Hibah	0	75,127,240,000.00	74,591,400,000.00	81,697,200,000.00	82,602,843,908.00	2,48%
1.3.2	Dana Darurat	0	0	0	0	0	0.00%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	128,371,013,885.00	128,469,173,450.00	167,453,406,830.00	167,453,406,830.00	159,421,421,059.00	6.41%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41,419,834,000.00	7,500,000,000.00	9,000,000,000.00	50,246,730,000.00	93,773,871,000.00	120.76%
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	44,917,740,000.00	8,135,886,500.00	8,895,886,500.00	10,514,905,500.00	9,883,915,500.00	-15.09%

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020



Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto sangat baik dan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data pada tahun 2016, total pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp 445,000,794,873.42,- dan pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan menjadi Rp. 446,788,334,925.19,. Sebagaimana tertuang dalam tabel 3.1, dapat dilihat bahwa akumulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilainya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2019 terhimpun PAD sebesar Rp. 515,891,852,317.93,-

Pada sisi Dana Perimbangan, nilainya juga mengalami peningkatan secara konsisten. Tahun 2016 jumlah Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih sebesar Rp 1,336,167,635,000.00,- Kemudian pada Tahun 2017 nilainya meningkat menjadi Rp. 1,378,706,506,773.00,- *Trend* ini berlanjut terus hingga pada Tahun 2019 dimana volume dana Perimbangan meningkat menjadi Rp 1,504,118,327,000.00,-

Sedangkan pada sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, dalam lima tahun terakhir mengalami juga mengalami peningkatan secara konsisten. Pada Tahun 2016 nilai pendapatan dari sektor ini adalah berjumlah Rp. 399,314,752,885.00,-. Pada Tahun Anggaran berikutnya meningkat menjadi Rp. 455,697,426,950.00,-. Hingga Tahun Anggaran 2020 kembali meningkat menjadi Rp. 580,619,113,467.00,-

Pada Tahun 2020 baik dana Perimbangan dan PAD Asli mengalami penurunan yang akibat adanya pandemi Covid-19,- yaitu secara keseluruhan pendapatan Kabupaten Mojokerto mengalami penurunan dari sebelumnya 2,565,576,318,647.93.- menjadi 2,352,101,563,574.18,-

Sebagaimana diuraikan di atas, dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, tidak akan terlepas dari pendapatan daerah. Pendapatan daerah dalam proses pengelolaan keuangan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun pendapatan dari sektor Lain-lain Pendapatan yang Sah, harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

3.1.1.2 Belanja Daerah

Secara umum, Belanja daerah Secara umum, Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan





kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Pendidikan, (b) Kesehatan, (c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, (d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (e) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan (f) Sosial.

Sementara itu, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) Tenaga Kerja, (b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (c) Pangan, (d) Pertanahan, (e) Lingkungan Hidup, (f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (h) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (i) Perhubungan, (j) Komunikasi dan Informatika, (k) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, (l) Penanaman Modal, (m) Kepemudaan dan Olahraga, (n) Statistik, (o) Persandian, (p) Kebudayaan, (q) Perpustakaan, dan (r) Kearsipan.

Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: (a) Kelautan dan Perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi.

APBD Pemerintah Kabupaten Mojokerto tahun 2016-2020 konsisten mengalami perkembangan yang positif. Rincian perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) disajikan pada Tabel 3.2 berikut ini.



**Tabel 3.2 (T-C-2)**

Belanja Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan (%)
2	BELANJA	2,559,551,283,969.55	2,571,666,855,511.27	2,671,225,385,315.54	2,882,456,314,250.60	2,700,485,472,703.51	1.49%
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,399,849,649,546.70	1,403,520,502,582.00	1,411,334,018,177.46	1,519,488,698,375.90	1,699,842,084,856.13	5.10%
2.1.1.	Belanja Pegawai	984,398,523,054.70	923,842,729,025.00	954,944,897,204.96	995,855,670,760.20	950,207,541,362.75	-0.77%
2.1.2.	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0.00%
2.1.3.	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0.00%
2.1.4.	Belanja Hibah	27,730,700,000.00	39,157,174,000.00	32,118,600,000.00	43,965,900,000.00	109,479,032,357.00	52.28%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7,668,340,000.00	2,781,000,000.00	4,627,548,100.00	4,135,000,000.00	5,125,000,000.00	3.10%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil	32,030,068,635.00	37,895,201,400.00	43,437,115,697.50	47,271,406,890.70	45,778,874,538.20	9.65%
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan	346,522,017,857.00	398,844,398,157.00	375,205,857,175.00	426,360,720,725.00	411,543,842,118.00	4.83%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	0	1,900,000,000.00	177,707,794,480.18	2,313.26%
2.2.	Belanja langsung	1,159,701,634,422.85	1,168,146,352,929.27	1,259,891,367,138.08	1,362,967,615,874.70	1,000,643,387,847.38	-2.46%
2.2.1.	Belanja Pegawai	97,974,827,227.00	100,710,490,023.00	122,767,864,507.00	133,190,429,179.70	117,647,146,093.30	5.38%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	464,836,953,213.67	439,438,056,762.39	526,346,884,271.08	580,307,080,252.65	536,624,344,630.23	4.26%
2.2.3.	Belanja Modal	596,889,853,982.18	627,997,806,143.88	610,776,618,360.00	649,470,106,442.35	346,371,897,123.85	-9.47%

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020



Tabel di atas menunjukkan bahwa selama periode 2016-2020 realisasi Belanja Tidak Langsung mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2016 realisasi Belanja Tidak Langsung adalah sebesar Rp. 1,339,806,550,066.80, kemudian menurun menjadi Rp. 1,262,465,297,426.65 di Tahun Anggaran 2017. Namun pada Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan kembali menjadi Rp. 1,368,771,408,948.00, dan terus mengalami kenaikan pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp. 1,484,207,081,400.65.

Di sisi lain, volume Belanja Langsung menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun Anggaran, meskipun mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2020 karena pandemic COVID-19. Pada Tahun 2016, total Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebesar Rp. 1,159,701,634,422.85. Kemudian dari tahun ke tahun secara konsisten terus meningkat, hingga pada Tahun Anggaran 2019 jumlah Belanja Langsung menjadi Rp. 1,362,967,615,874.70. Namun mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2020 menjadi Rp. 1,000,643,387,847.38.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun pembiayaan daerah tersebut terdiri dari:

1. **Penerimaan Pembiayaan** bersumber dari (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu; (b) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; (c) Penerimaan Pinjaman Daerah; (d) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; (e) Penerimaan Piutang Daerah, dan (f) Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
2. **Pengeluaran Pembiayaan** digunakan untuk (a) Pembentukan Dana Cadangan; (b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah; (c) Pembayaran Pokok Utang; dan (d) Pemberian Pinjaman Daerah.

Di dalam tabel berikut disajikan hasil analisis tentang Perkembangan Realisasi Pembiayaan Daerah serta sumber-sumber pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Mojokerto dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2016-2020:



Tabel 3.3 (T-C.2)
Pembiayaan Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan (%)
1.	PEMBIAYAAN DAERAH	379,068,101,211.13	290,474,586,683.08	279,699,698,780.77	316,879,995,602.67	348,383,909,129.33	-0.96%
1.1.	Penerimaan Pembiayaan	381,068,101,211.13	290,474,586,683.08	299,699,698,780.77	338,879,995,602.67	351,685,673,129.33	-0.94%
1.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	381,068,101,211.13	290,474,586,683.08	299,699,698,780.77	338,879,995,602.67	351,685,673,129.33	-0.94%
1.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0.00%
1.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000.00	0	20,000,000,000.00	22,000,000,000.00	3,301,764,000.00	-43.75%
1.2.1.	Pembentukan Dana Caangan	0	0	15,000,000,000.00	15,000,000,000.00	0	-25.00%
1.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000.00	0	5,000,000,000.00	7,000,000,000.00	3,301,764,000.00	-28.21%

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020



Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SILPA tahun lalu, namun besarnya SiLPA tahun lalu perkembangannya cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan di Mojokerto masih perlu ditingkatkan akurasi dan realibilitasnya. Pada aspek lain, beberapa komponen pembiayaan lain masih cukup rendah meskipun cukup potensial yaitu penyertaan modal investasi.

3.1.2 Neraca Daerah

Aset, Hutang (Kewajiban), dan Ekuitas Dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek. Substansi dari Neraca Daerah adalah memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan, memberikan informasi mengenai fleksibilitas keuangan dan menciptakan tata pemerintahan yang baik dan akuntabel. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Lebih lanjut, sebagaimana dielaborasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kondisi Aset daerah juga memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 2015-2020 disajikan pada Tabel 3.6 berikut:



Tabel 3.4 (T-C.3)
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mojokerto 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan %
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR						
	Kas di Kas Daerah	194,804,666,599	202,788,317,996	237,102,133,835	325,459,949,560	302,273,957,827	12.79%
	Kas di Bendahara Penerimaan	155,477,592	263,989,500	50,509,500	11,735,500	5,631,000	-34.96%
	Kas Bendahara Pengeluaran	0	12,419,000	0	0	19,000,000	-25%
	Kas di BLUD	18,563,501,128	22,439,601,807	27,669,649,998	11,089,793,458	34,815,529,626	49.55%
	Kas di Bendahara JKN Kapitasi	11,950,941,544	8,053,229,692	8,323,602,200	7,813,665,802	6,432,122,086	-13.27%
	Kas Bendahara Pengeluaran - BOS	0	1,142,140,786	1,473,262,792	7,681,547,637	1,560,506,163	92.68%
	Stara Kas dan Kas Lainnya	65,000,000,000	65,000,000,000	65,000,000,000	371,018,828.10	1,208,448,882	31.57%
	Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	0.00%
	Piutang Pendapatan	157,483,513,004	131,115,873,347	130,369,802,968	123,382,894,842	124,600,970,702	-5.42%
	Piutang Lainnya	696,225,102	507,213,852	506,713,852	500,713,852	360,274,267	-14.12%
	Penyisihan Piutang	(80,435,512,060)	(38,397,827,113)	(22,897,590,840)	(32,136,142,944)	(42,044,466,349)	-5.36%
	Beban Dibayar Dimuka	0	0	0	0	0	0.00%
	Persediaan	81,924,490,788	66,730,559,460	43,173,025,946	46,432,184,750	56,758,402,939	-6.02%
	JUMLAH ASET LANCAR	450,143,303,697	459,655,518,326	490,771,110,251	490,236,342,457	489,232,845,554.00	2.14%



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan %
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG						
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0	0.00%
	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%
	Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	0%.00
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0	0	0.00%
	Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0.00%
	Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0.00%
	Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	3,895,500,000	2,963,980,524.52	-5.98%
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	3,895,500,000	2,963,980,524.52	-5.98%
	Investasi Jangka Panjang Permanen	0	0	0	0	0	0.00%
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	50,423,602,271	51,213,588,486	58,296,182,220	70,645,119,402	75,905,551,666.67	11.01%
	Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%
	JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	50,423,602,271	51,213,588,486	58,296,182,220	70,645,119,402	75,905,551,666.00	11.01%
	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	50,423,602,270.97	51,213,588,486.11	58,296,182,219.66	74,540,619,401.71	78,869,532,191.00	12.27%
1.3.	ASET TETAP						
	Tanah	2,778,668,605,013	2,725,613,487,228	2,742,188,609,842	2,765,002,150,671	2,799,995,034,420.00	0.20%



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan %
	Peralatan dan Mesin	453,762,391,821	512,587,477,436	664,500,616,506	803,385,558,949	967,786,116,749.00	20.10%
	Gedung dan Bangunan	942,593,652,907	901,756,281,614	1,097,945,705,563	1,291,566,674,262	1,370,950,825,551.00	10.30%
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,918,309,521,273	2,176,159,507,805	2,396,482,979,221	2,633,072,916,404	2,762,019,206,870.00	9.58%
	Aset Tetap Lainnya	105,032,367,718	7,014,467,328	6,147,415,177	6,345,297,942	6,605,634,141.00	-24.59%
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	27,853,508,404	78,168,482,700	75,709,731,628	65,998,178,150	16,740,132,200.00	22.51%
	Akumulasi Penyusutan	(1,452,435,848,827)	(1,578,995,618,325)	(1,862,023,580,708)	(2,220,160,334,242)	(2,553,149,022,297.00)	15.22%
	JUMLAH ASET TETAP	4,773,784,198,309	4,822,304,085,786	5,120,951,477,228	5,345,210,442,136	5,370,947,927,636.00	3.02%
1.4.	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan	0	0	15,046,547,173	0	0	-25.00%
	JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	15,046,547,173	0	0	-25.00%
1.5.	ASET LAINNYA						
	Tagihan Jangka Panjang	44,690,402,068.15	44,203,933,738.46	43,864,233,903.37	43,791,833,903.37	43,779,824,703.00	-0.51%
	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0	0	0.00%
	Aset Tidak Berwujud	7334200032	8555474032	10191397932	11159452932	6,120,949,152.00	0.03%
	Aset Lain-lain	254,025,070,322	3,278,672,730	14,333,891,233	31,753,750,578	28,868,476,622	87.73%
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(5,907,464,348)	(6,899,096,256)	(8,155,451,619)	(9,262,980,732)	(4,701,035,752)	-0.17%
	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang	(41,726,453,212)	(41,434,572,214)	(43,864,233,903)	(43,791,833,903)	(43,743,275,603)	1.22%
	Penyisihan Piutang Aset lain-Lain	0	0	0	(17,660,311,100.00)	-20,335,452,548.00	3.79%



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan %
	JUMLAH ASET LAINNYA	258,415,754,862	7,704,412,030	16,369,837,546	15,989,911,678	9,989,486,574	-6.10%
	JUMLAH ASET	5,532,766,859,138	5,340,877,604,628	5,701,435,154,418	5,925,977,315,672	59,490,397,919.00	-22.94%
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0	739,162,723	371,018,828	21,174,841	-36.02%
	Utang Bunga	0	0	0	0	0	0.00%
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0	0	0	0	0	0.00%
	Pendapatan Diterima Dimuka	116,397,999	674,590,810	2,757,413,476	2,527,107,557	3,310,627,466	202.74%
	Utang Beban	15287873532	22258604373	21805553026	24891425378	29,872,894,897.00	19.43%
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	5878866200	5248423578	27490965722	1,209,404,570.00	79.37%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15,404,271,531	28,812,061,383	30,550,552,803	55,280,517,485	34,414,101,774	34.07%
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
	Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0.00%
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0	0	0	0	0	0.00%
	JUMLAH KEWAJIBAN	15,404,271,531	28,812,061,383	30,550,552,803	55,280,517,485	34,414,101,774	34.07%
3	EKUITAS DANA						



No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata Rata Pertumbuhan %
3.1.	EKUITAS	5,517,362,587,607	5,312,065,543,245	5,670,884,601,615	5,870,696,798,188	5,914,625,690,181	1.83%
	JUMLAH KEWAJIBAN DANA EKUITAS DANA	5,532,766,859,138	5,340,877,604,628	5,701,435,154,418	5,925,977,315,672	5,949,039,791,956	1.90%

Sumber : BPKAD Neraca Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2020



Perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan, dalam kurun waktu 2016-2020. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), investasi jangka panjang (investasi non permanen dan investasi permanen), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), dana cadangan, serta aset lainnya (tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tagihan tuntutan ganti kerugian daerah, kemitraan dengan pihak kedua, aset tak berwujud, aset lainnya). Semua asset tersebut dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu.

Di sisi lain, kondisi keuangan daerah secara keseluruhan bisa dikatakan baik jika rasio antara kewajiban (hutang) dan aset daerah adalah kecil. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa jika rasio antara jumlah hutang dan jumlah aset semakin kecil persentasenya, maka kondisi keungan pemerintah daerah tersebut semakin sehat (baik).

Data tentang rasio antara jumlah Kewajiban (Hutang) dan jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2016-2020 disajikan dalam tabel di bawah ini:



Tabel 3.5
Rasio Jumlah Kewajiban dan Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto
Tahun Anggaran 2016 - 2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Aset	Jumlah Kewajiban	%
1	2016	5.532.766.859.138,45	15.404.271.531,06	0,278
2	2017	5.340.877.604.628,47	28.812.061.383,33	0,539
3	2018	5.701.435.154.417,86	30.550.552.802,92	0,535
4	2019	5.925.977.315.672,46	55.280.517.484,68	0,932
5	2020	5,949,039,791,956.20	34,414,101,774.42	0.578

Sumber : BPKAD : Neraca Daerah Kabupaten Mojokerto 2016-2020

Rasio hutang terhadap total aset menunjukkan tingkat *leverage* Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Nilai *leverage* menunjukkan kisaran angka di bawah 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kabupaten Mojokerto didanai dari modal sendiri. Tingkat *leverage* tersebut mengindikasikan bahwa keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada kondisi yang sehat. Sedangkan rasio aktifitas yang dihitung rata-rata umur piutang, menunjukkan lama terbayarnya piutang yang cukup pendek. Kondisi ini juga menunjukkan membaiknya kemampuan untuk aktifitas kinerja keuangan.

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencantumkan bahwa sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan (PPH) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus; dan (3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat,



Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kab/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan Daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru. Apalagi di dalam ketentuan peraturan perundangundangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun anggaran 2016-2020 lebih fokus pada upaya untuk mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah antara lain melalui strategi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah
2. Mendorong serta mengoptimalkan peran dan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah maupun sebagai kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Optimalisasi penerimaan dan pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) melalui dukungan analisa data baik melalui Asumsi Dasar (AD) maupun Celah Fiskal (CF);
4. Mengoptimalkan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui dukungan analisa data yang diperlukan Pemerintah sehingga volume DAK baik dari sisi jenis maupun volume yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa lebih optimal;
5. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal baik secara vertikal maupun horisintal yang proporsional;



6. Meningkatkan hubungan/kerjasama antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan dengan instansi instansi yang lain (Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, dll) dalam rangka peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah;

Khusus untuk Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung yang alokasinya lebih besar dibanding alokasi belanja untuk pos-pos yang lain, sangat diperlukan antisipasi dan perencanaan kebutuhan untuk meningkatkan ketepatan target dan realisasi belanja. Berdasarkan Tabel 3.4 di bawah ini, dapat diketahui bahwa besarnya belanja pegawai selama periode 2016-2020 setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun realisasinya tidak pernah mencapai 100%. Selengkapnya, data tentang Target dan Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016-2020 dapat disimak pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi	%
1	2016	984.398.523.054,70	932.552.898.300,80	94,73
2	2017	923.842.729.025,00	805.913.595.216,27	87,23
3	2018	954.944.897.204,96	800.721.815.709,75	83,85
4	2019	995.855.670.760,20	860.918.729.302,00	86,45
5	2020	950,207,541,362.75	812,821,350,190.65	85.54

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020

Realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2016 - 2020 dirinci pada tabel berikut ini :



Tabel 3.7 (T-B.7)
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	932,552,948,300.80	805,913,595,216.27	800,721,815,709.75	860,918,729,302.00	814,832,265,505.00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	825,250,823,966.30	752,207,469,928.77	736,122,412,147.00	738,916,457,028.00	697,408,296,496.00
2	Belanja Tambahan Penghasilan**)	89,630,330,300.00	31,097,779,800.00	36,871,299,307.00	94,496,560,280.00	88,139,160,427.00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	4,700,620,000.00	7,887,120,000.00	11,884,166,836.00	11,084,407,400.00	11,961,620,000.00
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah**)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	11,757,373,787.50	13,323,914,954.25	14,244,998,150.75	14,952,893,750.00	14,611,233,457.00
6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1,213,800,247.00	1,397,310,533.25	1,598,939,269.00	1,468,410,844.00	2,711,955,125.00
B	Belanja Langsung	167,337,582,067.00	212,416,035,393.50	233,609,946,952.00	237,030,346,691.50	187,607,741,440.18
1	Belanja Honorarium PNS/ Non-PNS	58,123,270,600.00	51,609,132,264.50	61,749,198,224.00	69,195,762,249.00	64,662,651,072.18
2	Belanja Uang Lembur**)	1,517,542,517.00	737,666,450.00	579,605,900.00	512,376,501.00	263,737,500.00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Pegawai BLUD	27,889,049,325.00	33,402,113,515.00	40,287,822,843.00	43,080,686,875.00	46,417,962,871.00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)	1,850,530,000.00	1,498,150,000.00	2,189,310,885.00	4,422,422,000.00	2,558,096,578.00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	25,000,000.00	26,000,000.00	24,302,200.00	508,065,880.00	791,937,545.00
6	Belanja makanan dan minuman pegawai***)	16,956,413,115.00	17,848,408,228.00	20,723,318,713.00	24,651,791,812.00	15,883,017,340.00
7	Belanja pakaian dinas dan atributnya**)	4,381,271,985.00	444,069,025.00	906,865,675.00	3,419,513,695.00	230,213,007.00
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)	4,208,040,578.00	1,659,958,255.00	4,288,465,550.00	3,069,021,200.00	2,174,814,800.00
9	Belanja perjalanan dinas**)	37,382,568,057.00	40,926,357,631.00	51,805,650,205.00	64,351,907,491.50	65,381,162,085.00
10	Belanja perjalanan pindah tugas	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Belanja Pemulangan Pegawai	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	42,892,945,215.00	97,666,293,540.00	91,343,229,600.00	66,899,485,863.00	35,662,111,513.00
	TOTAL	1,099,890,530,367.80	1,018,329,630,609.77	1,034,331,762,661.75	1,097,949,075,993.50	1,002,440,006,945.18

Sumber: BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020



Adapun Analisa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur ditampilkan pada table berikut :

Tabel 3.8 (T-C.4)
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Presentase
		A	B	A/B * 100%
1	Tahun Anggaran 2016	1,099,890,530,367.80	2,561,551,283,969.55	42,94
2	Tahun Anggaran 2017	1,018,329,630,609.77	2,571,666,855,511.27	39,60
3	Tahun Anggaran 2018	1,034,331,762,661.75	2,691,225,385,315.54	38,43
4	Tahun Anggaran 2019	1,097,949,075,993.50	2,904,456,314,250.60	37,80
5	Tahun Anggaran 2020	1,002,440,006,945.18	2,703,787,236,703.51	37,10

Sumber: BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

Adapun target dan realisasi anggaran belanja daerah selama periode 2016-2020, setiap tahunnya belum mencapai 100% dalam durasi waktu 5 Tahun. Hal ini antara lain dikarenakan pedoman pelaksanaan dana alokasi khusus datangnya sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan. Target dan realisasi belanja daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2016 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini:

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2016	2.559.551.283.969,55	2.259.797.937.480,96	88,28
2	2017	2.571.666.855.511,27	2.326.306.874.253,96	90,46
3	2018	2.671.225.385.315,54	2.375.393.418.428,07	88,93
4	2019	2.882.456.314.250,60	2.559.610.383.721,43	88,80
5	2020	2,700,485,472,703.51	2,404,898,902,932.71	89.05

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2021



Selanjutnya dari sisi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada Tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

NO	Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan+ Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian + Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau PemDa Lainnya)	Rasio Kemandirian (2/3*100)
1	2	3	4	5
1	2016	447.620.851.328,91	1.401.999.554.444,00	31,92 %
2	2017	500.518.075.940,25	1.359.254.821.883,00	36,82 %
3	2018	555.880.357.834,79	1.445.163.196.099,00	38,46 %
4	2019	554.999.510.278,91	1.490.468.834.546,00	37,23 %
5	2020	537,297,509,364.79	1,545,284,939,184.00	34.77%

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020

Secara umum, Rasio Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa dikatakan cukup bagus. Secara konseptual bisa dijelaskan bahwa semakin tinggi rasio kemandirian mempunyai arti bahwa tingkat ketergantungan Pemkab terhadap bantuan pemerintah pusat semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.8 di atas, terjadi perkembangan mulai tahun 2016 sebesar 31,92%, naik menjadi 36,82% pada Tahun 2017, hingga mengalami kenaikan menjadi 38,46% pada Tahun 2018. Namun menurun tipis menjadi 37,23% satu tahun berikutnya yakni pada Tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 akibat pandemic Covid-19, PAD Kabupaten Mojokerto turun menjadi 34.77%.



3.2.2 Analisis Pembiayaan

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sementara Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Sedangkan Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Analisis ini juga menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencukupi pembiayaan akibat selisih kebutuhan dan alokasi belanja. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan Pembiayaan ini antara lain meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; Penerimaan Pinjaman Daerah; Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan ini mencakup beberapa jenis pembiayaan yakni Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah.



Tabel 3.11 (T-C.5)
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2015-2020

NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2,171,204,423,132.91	2,335,531,986,038.25	2,434,620,262,423.15	2,564,369,514,074.91	2,402,663,250,548.79
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	2,259,797,937,480.96	2,326,306,874,253.96	2,375,393,418,428.07	2,559,610,383,721.43	2,404,898,902,932.71
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	2,000,000,000.00	0.00	20,046,547,173.18	22,994,044,832.62	3,156,000,000.00
	Defisit riil	(90,593,514,348.05)	9,225,111,784.29	39,180,296,821.90	(18,234,914,479.14)	(5,391,552,383.92)

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020



Tabel 3.12 (T-C.6)
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil (Rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	381,068,101,211,13	576,646,344,208.06	299,699,698,780.77	338,879,995,602.67	351,685,673,129.33
2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	31,040,592,005.80	0.00
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Penerimaan Piutang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber : BPKAD : LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020



Tabel 3.13 (T-C.7)
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SiLPA	381,068,101,211.13	100.00	299,699,698,780.77	100.00	338,879,995,602.67	100.00	351,685,673,129.33	100.00	346,294,020,745.10	100.00
2	Pelampauan penerimaan PAD	2,620,056,455.49	0,69	53,729,741,015.06	17.93	63,255,966,556.05	18.67	39,107,657,960.98	11.12	60,040,061,200.61	17.34
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-20,817,195,556.00	-5,46	-35,087,571,390.00	-11.71	-12,747,747,835.67	-3.76	-74,411,127,745.00	-21.16	-10,008,679,588.00	-2.89
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	8,918,379,475.00	2,34	35,697,547,765.00	11.91	-7,413,642,832.00	-2.19	34,096,665,211.00	9.70	530,305,362.00	0.15
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	299,753,346,488.59	78,66	245,359,981,390.71	81.87	295,785,419,714.29	87.28	352,892,477,702.35	100.34	295,732,333,770.80	85.40
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Kegiatan lanjutan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: BPKAD LRA Kabupaten Mojokerto 2016-2020



Kurun waktu tahun 2016-2020 Realisasi Pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan, namun tidak pada tahun 2020 yang mengalami penurunan akibat pandemi Covid 19. Berdasarkan ketentuan pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber terjadinya SiLPA pada suatu Tahun Anggaran berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Di masa mendatang diharapkan SiLPA semakin menurun, karena dengan semakin menurunnya SiLPA merupakan salah satu indikasi semakin sinergisnya antara perencanaan dengan penganggaran serta kian bagusnya kinerja anggaran Pemerintah Daerah. Selain itu semakin besar dana yang dikeluarkan untuk pembangunan maka akan memiliki multiplier effect yang besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto.

3.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas keuangan daerah adalah total Pendapatan dan Penerimaan Daerah setelah dikurangkan dengan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan Kegiatan Lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Lebih lanjut kapasitas keuangan daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat kemandirian Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan sesuai prinsip otonomi daerah.



3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kapasitas kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk 5 Tahun kedepan diproyeksikan meningkat. Dengan memperhatikan perkembangan parameter makro ekonomi yang cukup dinamis selama beberapa tahun terakhir, maka pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dalam tingkatan moderat dengan mengedepankan aspek kepastian pendapatan utamanya sektor penerimaan dari Dana Perimbangan serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penghitungan potensi Pajak Daerah.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan di atas, kebijakan dan strategi pengelolaan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 difokuskan pada:

1. Peningkatan volume PAD melalui optimalisasi penerimaan Pajak Daerah yang meliputi sumber penerimaan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan yang telah dikembangkan berdasarkan ruang lingkup kewenangan Pemkab melalui Peraturan Daerah. Di samping itu juga dilakukan dengan jalan meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah.
2. Meningkatkan penerimaan PAD dari sektor Retribusi Daerah melalui peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat pengguna jasa / layanan yang menghasilkan Retribusi Daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten.
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lain dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada Bagi Hasil Pajak Daerah.
7. Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan
9. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu juga melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran



masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah.

10. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
11. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Kabupaten Mojokerto.
12. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang.
13. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/ meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel.

Sedangkan untuk Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, khususnya dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber-sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

**Tabel 3.14 (T-C.8)**

Proyeksi Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022-2026

NO	URAIAN	APBD 2021 (INDUK)	PROYEKSI					PERTUMBUHAN %
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	PENDAPATAN DAERAH							
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	540.120.371.981	593.809.880.131	635.376.571.740	679.852.931.762	727.442.636.985	778.363.621.574	7%
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.841.578.920.059	1.970.489.444.463	2.108.423.705.576	2.256.013.364.966	2.413.934.300.513	2.582.909.701.549	7%
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.682.157.499.000	1.799.908.523.930	1.925.902.120.605	2.060.715.269.047	2.204.965.337.881	2.359.312.911.532	7%
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	159.421.421.059	170.580.920.533	182.521.584.970	195.298.095.918	208.968.962.633	223.596.790.017	7%
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	74.077.000.000	79.262.390.000	84.810.757.300	90.747.510.311	97.099.836.033	103.896.824.555	7%
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	74.077.000.000	79.262.390.000	84.810.757.300	90.747.510.311	97.099.836.033	103.896.824.555	7%
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.455.776.292.040	2.643.561.714.594	2.828.611.034.615	3.026.613.807.038	3.238.476.773.531	3.465.170.147.678	7%

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Belanja Daerah disusun dan diimplementasikan dengan berdasar pada pendekatan anggaran kinerja (Performance Based Budgeting) yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan anggaran kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan reliabilitas dan akurasi perencanaan anggaran serta menjamin akuntabilitas dari penggunaan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Agar tujuan penggunaan anggaran belanja bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab, maka pengelolaan Belanja Daerah difokuskan pada beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus di manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat mencapai prioritas pembangunan yang diharapkan, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program-program dan kegiatan-kegiatan prioritas sehingga tercapai komprehensif dalam pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan, pembangunan infrastruktur kewilayahan, serta pembangunan reformasi birokrasi.
3. Tolak ukur dan target kinerja Belanja Daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolak ukur dan target pada setiap indikator kinerja bahkan mencantumkan secara jelas lokasi pembangunan yang dilakukan.
4. Optimalisasi Belanja Langsung yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif
5. Setiap pengeluaran belanja dilakukan secara transparan dan akuntabel, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan.
6. Memperhatikan anggaran Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah dan Fungsi Kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah diluar gaji, Anggaran Fungsi Pengawasan serta Alokasi dana desa (ADD) dan belanja untuk kelurahan
7. Penggunaan Dana Transfer Umum yang penggunaannya diarahkan sebesar 25% untuk belanja infrastruktur
8. Penganggaran untuk pemberian Bansos dan Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak Pandemi

Disamping kebijakan belanja sebagaimana terurai di atas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk tahun anggaran 2021-2026 juga melanjutkan beberapa kebijakan belanja yang digariskan pada periode lima tahun sebelumnya yakni antara lain



- 1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2015-2019 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- 2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- 3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- 4) Stimulus belanja untuk pengembangan infrastruktur pedesaan;



Tabel 3.15 (T-C.8)

Proyeksi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022-2026

NO	URAIAN	APBD 2021 (INDUK)	PROYEKSI					PERTUMBUHAN %
			2022	2023	2024	2025	2026	
2	BELANJA							
2.1	BELANJA OPERASI	1.772.049.201.433	1.896.092.645.534	2.028.819.130.721	2.170.836.469.870	2.322.795.022.762	2.485.390.674.355	7%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.104.215.214.179	1.181.510.279.172	1.264.215.998.714	1.352.711.118.623	1.447.400.896.927	1.548.718.959.712	7%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	625.873.171.067	669.684.293.042	716.562.193.555	766.721.547.103	820.392.055.401	877.819.499.279	7%
2.1.3	Belanja Hibah	40.639.566.187	43.484.335.820	46.528.239.327	49.785.216.080	53.270.181.206	56.999.093.890	7%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.321.250.000	1.413.737.500	1.512.699.125	1.618.588.064	1.731.889.228	1.853.121.474	7%
2.2	BELANJA MODAL	322.451.399.087	345.022.997.023	369.174.606.815	395.016.829.292	422.668.007.342	452.254.767.856	7%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	0%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.634.084.483	74.508.470.397	79.724.063.325	85.304.747.757	91.276.080.100	97.665.405.707	7%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.124.854.035	82.843.593.817	87.332.645.385	111.575.930.562	95.556.245.701	94.255.182.900	4.36%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.534.488.783	159.631.902.998	161.506.136.208	189.211.565.742	182.806.375.344	192.352.821.618	5.04%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.157.971.786	1.239.029.811	1.325.761.898	1.418.565.231	1.517.864.797	1.624.115.333	7%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.549.324.782	50.708.859.628	54.258.479.802	58.056.573.388	62.120.533.525	66.468.970.872	7%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	32.549.324.782	50.708.859.628	54.258.479.802	58.056.573.388	62.120.533.525	66.468.970.872	7%
2.4	BELANJA TRANSFER	468.726.366.738	501.537.212.410	536.644.817.278	574.209.954.488	614.404.651.302	657.412.976.893	7%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	42.866.376.420	45.867.022.769	49.077.714.363	52.513.154.369	56.189.075.174	60.122.310.437	7%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	425.859.990.318	455.670.189.640	487.567.102.915	521.696.800.119	558.215.576.127	597.290.666.456	7%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.595.743.292.040	2.766.561.714.594	2.949.611.034.615	3.190.613.807.038	3.370.476.773.531	3.595.170.147.678	6.77%

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek Pengeluaran Pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pemberian Pinjaman Daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan pada:

1. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo
2. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.
3. Kebijakan yang dilakukan dalam konteks Pengeluaran Pembiayaan harus mempertimbangan aspek efisiensi, efektifitas dan keberlanjutan.



Tabel 3.16 (T-C.8)

Proyeksi Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022-2026

NO	URAIAN	APBD 2021 (INDUK)	PROYEKSI					PERTUMBUHAN %
			2022	2023	2024	2025	2026	
3	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.000.000.000	138.000.000.000	136.000.000.000	164.000.000.000	132.000.000.000	130.000.000.000	-0,47%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	140.000.000.000	138.000.000.000	136.000.000.000	134.000.000.000	132.000.000.000	130.000.000.000	-1,48%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	30.000.000.000	0	0	0,00%
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0	25,00%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0	25,00%
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)	0	0	0	0	0	0	0,00%
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	140.000.000.000	123.000.000.000	121.000.000.000	164.000.000.000	132.000.000.000	130.000.000.000	3,22%

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan proyeksi kapasitas kemampuan keuangan daerah, selanjutnya ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam 3 Kelompok Prioritas, yaitu Prioritas I, Prioritas II dan Prioritas III. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagai berikut :

Prioritas I, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20%. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prioritas II, adalah program prioritas ditingkat organisasi perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Prioritas II berhubungan dengan program unggulan perangkat daerah yang paling berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi perangkat daerah. Termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan perangkat daerah untuk mendukung visi misi pembangunan daerah secara holistik. Kebijakan alokasi anggaran untuk prioritas II diarahkan pada:

- 1) Sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi masyarakat miskin;
- 2) Pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, dan pencegahan terhadap bencana alam, serta sekaligus yang dapat memperluas lapangan kerja di pedesaan;
- 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanganan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi pedesaan berbasis potensi lokal, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
- 4) Menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.



Prioritas III, merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja operasi seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III dengan memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi/distribusi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
- 2) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;

Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.



Tabel 3.17 (T-C.9)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	2.643.561.714.594	2.828.611.034.615	3.026.613.807.038	3.238.476.773.531	3.465.170.147.678
2	Pencairan DanaCadangan (sesuai Perda)	0	0	30.000.000.000	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	138.000.000.000	136.286.000.000	134.000.000.000	132.000.000.000	130.000.000.000
	Total Penerimaan (proyeksi Belanja)	2.766.561.714.594	2.949.611.034.615	3.190.613.807.038	3.370.476.773.531	3.595.170.147.678
	Dikurangi:					
1	Belanja Pegawai	1.181.510.279.172	1.264.215.998.714	1.352.711.118.623	1.447.400.896.927	1.548.718.959.712
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0
	Kapasitas Riil	1.570.051.435.422	1.670.395.035.901	1.837.902.688.415	1.923.075.876.604	2.046.451.187.966

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



Tabel 3.18 (T-C.10)
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2022-2026

NO	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.570.051.435.422	1.670.395.035.901	1.837.902.688.415	1.923.075.876.604	2.046.451.187.966
2	Prioritas I	785.025.717.711	835.197.517.951	918.951.344.208	961.537.938.302	1.023.225.593.983
3	Prioritas II	471.015.430.627	501.118.510.770	551.370.806.525	576.922.762.981	613.935.356.390
4	Prioritas III	314.010.287.084	334.079.007.180	367.580.537.683	384.615.175.321	409.290.237.593

Sumber : BPKAD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS





4.1 Permasalahan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam perkembangannya, telah menghadapi berbagai dinamika sosial yang tumbuh di masyarakat. Melalui analisis mendalam, penyusunan rencana jangka menengah perlu mempertimbangkan isu maupun permasalahan yang kerap terjadi di wilayah sebagai rujukan dalam menyusun kerangka perencanaan RPJMD. Dengan mengetahui permasalahan yang kerap muncul diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional, maupun tingkat nasional.

Selanjutnya identifikasi permasalahan pembangunan menurut urusan Pemerintahan daerah dirinci sebagai dasar perumusan kebijakan umum dan program-program pembangunan.



Tabel 4.1
Identifikasi Permasalahan Pembangunan

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
I.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1.1	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendahManajemen dan tata-kelola pendidikan belum efektifBelum semua Guru memiliki kompetensi mengajarSarana prasarana pendidikan yang kurang memadai
1.2	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">Masih tingginya angka kematian ibu dan bayiMasih tingginya Kasus Balita Gizi Buruk dan SuntungMasih tingginya masalah kesehatan yang disebabkan oleh penyakit menular seperti pandemi covid-19, penyakit tidak menular dan bencanaMasih belum maksimalnya pelayanan kesehatan yang bermutuMasih rendahnya akses dan kualitas lingkungan sehat termasuk masih banyak masyarakat yang buang air besar sembaranganMasih rendahnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakatBelum tersedianya data pelayanan kesehatan berbasis elektronikBelum optimalnya jenis, jumlah, pemerataan, dan kualitas SDM Kesehatan
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>Pembangunan / peningkatan jalan dan jembatan</p> <ol style="list-style-type: none">Masih adanya kondisi jalan yang belum standar sepanjang 206 kmTerdapat kondisi jembatan yang rusak sebanyak 56 jembatanTerdapat 274 jembatan yang lebarnya belum sesuai dengan lebar jalanTingginya kebutuhan penahan jalan dan drainase, untuk drainase sepanjang 170 km dan penahan jalan sepanjang 300 kmTerjadinya penurunan kualitas jalan dengan tingkat kerusakan sebesar 10 % sepanjang 150 km



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>Sumber Daya Air</p> <ol style="list-style-type: none">1. hampir 70% air permukaan yang dipakai dalam air irigasi untuk pertanian di Kabupaten Mojokerto berasal dari pegunungan wilayah selatan sehingga kondisi panjang pendeknya musim kemarau/penghujan mempengaruhi ketersediaan air untuk irigasi dan air minum2. masih banyak petani yang tidak melaksanakan pola tata tanam akan tetapi di lapangan tetap diterapkan pembagian air sesuai pola tata tanam yang disepakati3. Terdapat fasilitas sarana/prasarana sumber daya air yang perlu perbaikan dan pembangunan (4 Dam, 1 Bangunan Bagi, 2 Bangunan Bagi Sadap, 239 Bangunan Sadap, 57 Waduk, 6 Embung, 233.493 m saluran sekunder, 49.780 m saluran tersier) <p>Penataan Ruang</p> <ol style="list-style-type: none">1. Belum tersusunnya RDTRK masing-masing kecamatan2. Masih terjadi deviasi pemanfaatan ruang sebesar 20%3. Belum efektifnya pengelolaan tata ruang daerah
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none">1. Perencanaan urusan perumahan dan permukiman masih lemah belum adanya dokumen kebijakan strategi tentang penataan ruang dan permukiman sebagai pengendali pembangunan perumahan dan permukiman.2. Regulasi tentang perumahan masih lemah belum didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas
1.5	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <ol style="list-style-type: none">a) Belum optimalnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur bangsa dan pemahaman wawasan kebangsaanb) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politikc) Belum optimalnya pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di Kecamatan, Kelurahan dan Desa



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>d) Kurang berdayanya kelembagaan demokrasi dan rendahnya upaya peningkatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan dan penegakan HAM</p> <p>e) Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM</p> <p>f) Belum Optimalnya Identifikasi Kegiatan LSM dan Ormas</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>a) Masih belum optimal alat perlengkapan pengamanan internal Satpol PP untuk penanganan unjuk rasa</p> <p>b) Masih lemahnya koordinasi dengan instansi terkait maupun dengan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan</p> <p>c) Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Produk Hukum Daerah beserta ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya</p> <p>d) Masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat akan arti pentingnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban</p> <p>e) Belum terwujudnya penegakan Peraturan Daerah secara optimal</p> <p>f) Belum optimalnya pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah</p> <p>g) Belum optimalnya pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan pengendalian kegiatan-kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban dan pelanggaran Peraturan Daerah</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan sistem peringatan dini bencana / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.2. Tingginya Kejadian Kebakaran2. Pemenuhan layanan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap (response time) 15 menit.3. Sertifikasi keahlian/kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran.



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>4. Penanganan infrastruktur rusak karena bencana yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tapi berdampak pada masyarakat Kabupaten Mojokerto.</p> <p>7. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.</p>
1.6	Sosial	<p>1. Belum optimalnya pemenuhan rehabilitasi sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial;</p> <p>2. Belum optimalnya penanganan penduduk miskin;</p> <p>3. Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sesuai kewenangan kabupaten;</p> <p>4. Belum optimalnya pemanfaatan Basis Data terpadu (BDT) untuk penanganan keluarga fakir miskin;</p>
II.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	
2.1	Tenaga Kerja	<p>a. Masih tingginya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)</p> <p>b. Kurangnya Perlindungan dan fasilitasi Kesejahteraan Tenaga Kerja di perusahaan</p> <p>c. tingginya resiko Perselisihan Hubungan Industrial di wilayah Kabupaten Mojokerto</p> <p>d. Kurangnya perlindungan dan fasilitasi terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI)</p> <p>e. Kurangnya Animo Masyarakat terhadap Program Transmigrasi</p>
2.2	Pangan	<p>a. Masih rendahnya pasokan utama pangan pokok sebagai ketersediaan domestik dan stabilitas pasokan pangan.</p> <p>b. Kurangnya akses individu (keterjangkauan makanan dan preferensi makanan individu) dan pemanfaatan (keamanan pangan dan manfaat gizi) utk mencapai ketahanan pangan.</p> <p>c. Ketersediaan protein perkapita untuk telur dan sayur-sayuran masih sangat rendah yaitu hanya 1% dari tingkat konsumsi pangan. Padahal potensi peternakan unggas, untuk jenis lokal, dan potensi pertanian sayur-sayuran sangat besar.</p> <p>d. Skor PPH untuk kelompok bahan makanan pangan hewani (daging dan telur) masih rendah dan jauh dari skor ideal, yaitu hanya 21,7 poin dari 24 poin idealnya. Perlu pengembangan sub sektor</p>



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>peternakan terutama pengembangan unggas lokal yaitu itik lokal yang merupakan khas Mojokerto.</p> <p>e. Rendahnya pemanfaatan lahan pekarangan produktif dan non produktif untuk mendukung ketahanan pangan keluarga.</p> <p>f. Masih adanya daerah rawan pangan.</p>
2.3	Lingkungan Hidup	<p>Permasalahan yang masih dihadapi dalam urusan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Terjadinya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>b. Menurunnya fungsi dan daya dukung Lingkungan Hidup</p> <p>c. Menurunnya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Alam</p> <p>d. Menurunnya tutupan Vegetasi/ Ruang Terbuka Hijau akibat kegiatan pembukaan lahan</p> <p>e. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>f. Rendahnya penggunaan energi alternative</p> <p>g. Meningkatnya pencemaran air, udara dan tanah</p> <p>h. Meningkatnya timbunan sampah</p> <p>i. Rendahnya pemanfaatan sumber daya alam untuk ekowisata dan jasa lingkungan</p>
2.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<p>a. Belum optimalnya pengarsipan dokumen administrasi kependudukan yang baik, dikarenakan kurangnya sarana yang memadai (ruang yang representatif, tenaga pengarsipan dan prasarana IT kearsipan);</p> <p>b. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan;</p> <p>c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan (masyarakat belum mengerti pentingnya dokumen kependudukan);</p> <p>d. Masih terdapat data kepemilikan dokumen kependudukan yang kurang valid;</p> <p>e. Masih terdapat data ganda di dalam daerah maupun di luar daerah asal.</p>
2.5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	<p>a. Kurangnya modal usaha untuk pengembangan BUMDesa</p>



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>b. Lemahnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap tata kelola pemerintahan desa;</p> <p>c. Kurangnya keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta kemandirian desa dalam pembangunan desa;</p> <p>d. Belum optimalnya kelembagaan ekonomi masyarakat desa dalam upaya pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa;</p> <p>e. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia serta kapasitas lembaga kemasyarakatan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>f. Belum optimalnya penyelenggaraan penataan desa serta belum memadainya sarana prasarana desa</p>
2.6	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<p>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>a. Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas</p> <p>b. Masih tingginya perkawinan anak</p> <p>c. Kurangnya pelayanan komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera</p> <p>d. Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minim</p> <p>e. rendahnya minat akseptor Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</p> <p>f. Masih rendahnya ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga</p> <p>g. Tingginya laju pertumbuhan penduduk</p> <p>h. Masih tingginya Unmeetneed</p> <p>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</p> <p>a. Lokasi dan sarana prasarana Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih belum representative;</p> <p>b. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) masih belum optimal dan belum tersistem dengan baik;</p> <p>c. Belum tersedianya Rumah Aman anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum atau kasus kekerasan terhadap anak</p> <p>d. Kurang sinergisnya antarsektor dalam mendukung pengarusutamaan gender perlindungan anak.</p>



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<ul style="list-style-type: none">e. Masih kurangnya pemahaman stakeholder terkait yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak;f. P2TP2A tingkat kecamatan belum optimal;g. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa belum optimal;h. Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan;i. Kurangnya pemahaman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Perangkat Daerah dan stakeholder terkait;j. Kurangnya pemahaman dan pemenuhan data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh Perangkat daerah.
2.7	Komunikasi dan Informatika	<p>Bidang Informatika</p> <ul style="list-style-type: none">a) Kualitas SDM di Bidang Teknologi Informasi Komunikasi pada masing-masing OPD belum memadaib) Pengembangan Sistem Informasi yang belum keseluruhan terintegrasikanc) Pengembangan pelayanan berbasis elektronik secara online yang belum maksimal <p>Menara Telekomunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Banyak fakta yang muncul di berbagai daerah yang menyatakan bahwa keberadaan menara telekomunikasi (tower) memiliki resistensi/daya tolak dari masyarakat, kesehatan berkenaan dengan pancaran radiasi dari gelombang radio elektromagnetik dari transmitter pada menara telekomunikasib) Keselamatan, dimana masyarakat dan binatang yang ada di bawah tower beresiko tertimpa runtuh tower apabila tumbang/robokc) Keindahan dan keserasian tata ruang wilayah menjadi semrawut dengan semakin menjamurnya towerd) Banyaknya tower/menara telekomunikasi yang didirikan tanpa izin atau memiliki izin palsu alias bodong



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>Persandian dan Orari</p> <ul style="list-style-type: none">a) Pengiriman ORARI ke kecamatan sering tidak bisa sampaib) Setiap pagi jam 08.00, Garuda Induk mengabsen ke jajaran atau kecamatan tapi sebagian yang absenc) Sementara jajaran kecamatan jarang yang muncul atau absend) Dalam penggunaan pesawat ORARI semua jajaran Garuda Induk menggunakan repiter yang dipasang di Pacete) Dalam pengiriman berita yang lewat samapati sering terjadi gangguanf) Diklat persandian dilakukan setiap satu tahung) Pengamanan berita Sandi atau Rahasia sangat pentingh) Diklat persandian dilakukan di Bogori) Dalam pengiriman berita baik, berita biasa atau rahasia tidak diberi stempel sangta kilat <p>Bidang Pos,Persandian, dan Statistik</p> <ul style="list-style-type: none">a) Menyusun bahan koordinasi dengan pihak-pihak terkaitb) Kurangnya sarana dan prasarana untuk membuat laporanc) Belum adanya program aplikasi statistic (data keseluruhan/portal) <p>Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat System Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (LAPOR!SP4N)</p> <ul style="list-style-type: none">a) Belum tercukupi sarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan LAPOR!SP4Nb) Belum adanya sosialisasi LAPOR!SP4N bagi organisasi perangkat daerahc) Belum tersedianya password dari pemerintah pusat/Kemenpan RB untuk membuka akses LAPOR!SP4Nd) Masih kurangnya kegiatan/peningkatan kapasitas SDM/petugas admin/pejabat penghubung di masing-masing OPD <p>Bidang Komunikasidan Inforrmasi Publik (PPID)</p>



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<p>a) Belum tersedianya ruang untuk pelayanan PPID</p> <p>b) Belum tersedianya sarana dan prasarana dalam pelayanan PPID</p> <p>c) Masih kurangnya kegiatan untuk meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi</p> <p>d) Kurangnya tenaga yang representatif dalam pelayanan PPID</p> <p>e) Masyarakat belum mengetahui pelayanan pengaduan melalui PPID</p> <p>f) Belum berfungsinya PPID pembantu di masing-masing OPD</p> <p>Bidang Komunikasi dan Informasi Publik (Dokumentasi)</p> <p>a) Tidak pernah diadakannya pelatihan cara pemotretan dan pengeditan foto yang benar</p> <p>b) Tidak adanya tempat penyimpanan kamera atau steril kamera</p> <p>Bidang Komunikasi dan Informasi Publik</p> <p>a) Belum terbentuknya susunan keanggotaan dewan pengawas dan dewan direksi</p> <p>b) Belum adanya perizinan siaran radio WIKA</p> <p>c) Masih kurangnya pengadaan sarana dan prasarana alat komunikasi WIKA</p> <p>d) Belum terbentuknya KIM (kelompok Informasi masyarakat) di masing-masing Kecamatan</p> <p>e) Belum adanya sosialisasi dan pelatihan KIM untuk mengembangkan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi.</p>
2.8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	<p>a. Pengembangan/diversifikasi usaha pada Koperasi umum sangat rendah, sehingga kualitas produk kurang mampu bersaing.</p> <p>b. Jaringan pemasaran masih rendah dalam hal ini dilihat dari pelaku usaha mikro Kabupaten Mojokerto pangsa pasar masih terbatas skala Regional.</p> <p>c. Akses Modal bagi pelaku Usaha Mikro masih terbatas, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Usaha Mikro yang tidak bisa signifikan karena terbatasnya modal.</p>



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		<ul style="list-style-type: none">d. Kesadaran Masyarakat berkoperasi masih rendah;e. Pertumbuhan koperasi masih didominasi oleh Jenis Jasa Keuangan dan asuransi yang mencapai 591 koperasi atau 77,56%. Koperasi produksi dan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan pertanian.f. Untuk usaha mikro masih didominasi oleh kluster usaha perdagangan sebanyak 13.800 (53,77%). Maka pengembangan usaha sektor produksi olahan pertanian dan kerajinan harus ditingkatkan.g. Kompetensi sumber daya manajemen koperasi masih rendah terutama dalam pengelolaan pasar dan manajemen keuangan.h. Legalitas Usaha mikro rendah, untuk memperoleh NIB harus memiliki NPWP, yaitu dari 28.198 usaha mikro yang ada, baru sebanyak 308 yang memiliki ijin usaha.i. Keluarnya PP nomor 7 tahun 2021 yang terkait dengan UU Cipta Kerja, maka terjadi perubahan klasifikasi usaha mikro, kecil, menengah dan besar, sehingga sistem basis data usaha mikro dan kecil di dinas harus disesuaikan.
2.9	Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya iklim investasi dan usaha.b. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan.c. Kurangnya kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).d. Kurangnya kualitas pelayanan perizinan.e. pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan penanaman kurang optimal.f. Tingkat kepatuhan administrasi pelaporan penanaman modal masih rendah.g. koordinasi dalam pelaksanaan pelayanan perijinan dengan dinas teknis untuk kebutuhan rekomendasi masih perlu ditingkatkan.h. kendala pengurusan perizinan bagi pelaku UMKM.
2.10	Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none">a. Rendahnya minat budaya dan seni tradisional di kalangan masyarakat;b. Lemahnya pemahaman sejarah lokal;c. Lemahnya data serta informasi kebudayaan;d. Minimnya produk ekonomi kreatif lingkup seni budaya;



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		e. Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung kebudayaan; f. Rendahnya pengelolaan keragaman budaya
2.11	Pemuda dan Olahraga	a. Dukungan partisipasi generasi muda dalam kegiatan ekonomi produktif, baik dalam proses produksi, inovasi dan pemasaran berbasis digital masih kurang. b. Pelatihan generasi muda dalam pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat masih kurang. c. Sarana olahraga masih terbatas. d. Pembinaan atlet masih kurang.
2.12	Perpustakaan dan Kearsipan	Perpustakaan a) Masih rendahnya minat, gemar dan budaya membaca masyarakat b) Masih rendahnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan Kearsipan a) Masih belum adanya kesadaran Perangkat Daerah untuk mengelola arsipnya dengan baik dan benar b) Masih rendahnya pengetahuan dan perhatian terhadap Arsip di kalangan Birokrasi c) Masih belum adanya ketersediaan software tentang kearsipan d) Masih belum adanya Standard Operating Procedur (SOP) secara seragam bidang pengelolaan arsip dari pusat sampai daerah dan alat-alat praktis penyimpanan dan perawatan dokumen/arsip statis e) Masih kurangnya bahan-bahan untuk restorasi kearsipan
III.	URUSAN PILIHAN	
3.1	Urusan Kelautan dan Perikanan	a. Angka produksi perikanan cenderung menurun setiap tahun. b. Cakupan jumlah petani ikan yang dibina masih rendah. c. Sistem dan metode budidaya perikanan masih terbatas dilakukan oleh masyarakat. d. Fasilitasi dan bantuan teknis benih dan alat produksi perikanan masih rendah. e. Pengembangan diversifikasi olahan ikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan hewani masih rendah.



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
3.2	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor Pariwisatab. Masih lemahnya pengembangan destinasi wisata;c. Lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya promosi /pemasaran pariwisata yang sinergis dan kolaboratif;d. Rendahnya SDM pelaku industri kepariwisataan;e. Lemahnya data serta informasi pariwisata;f. Rendahnya ekosistem digital dalam mendukung pembangunan kepariwisataang. Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (ecotourism), pariwisata berbasis historical/ dan berbasis religih. Masih rendahnya daya tarik pariwisata dan pengelolaan potensi wisata khususnya yang berbasis pemberdayaan masyarakat;i. Belum terpenuhinya variabel pendukung pembangunan kepariwisataan yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata), amenities (sarana prasarana) dan accomodation (akomodasi); danj. Rendahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan.
3.2	Pertanian	<ul style="list-style-type: none">a. Kecenderungan produksi pertanian dan peternakan semakin menurun.b. lahan yang sudah kritis dan miskin unsur hara tanah.c. serangan hama penyakit utamanya pada tanaman padi yang sulit dikendalikan.d. pemasaran hasil pertanian dimana harga jual padi yang rendah pada saat panen raya.e. Harga pakan unggas cenderung naik, biaya produksi terus meningkat, sedangkan harga jual unggas tidak stabil.f. Daya minat dalam beternak masyarakat menurun, terutama untuk itik lokal, ditunjukkan dengan jumlah peternak menurun.g. Dukungan vaksin flu untuk unggas masih rendah.h. Perlindungan terhadap itik lokal Mojosari sebagai salah satu potensi produksi masih rendah.



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
3.3	Perindustrian dan Perdagangan	<p>Perindustrian</p> <ol style="list-style-type: none">Masih minimnya produktivitas dan daya saing produk IKM.Pertumbuhan industri besar dan menengah yang cenderung stagnan.Belum optimalnya pengembangan kawasan industri dan peruntukan industri.Belum optimalnya penerapan Standar Industri Hijau di kawasan industri dan peruntukan industri.akses kebijakan dan data industri kepada pemerintah pusat masih rendah.Pengetahuan dan kompetensi pelaku IKM terhadap teknologi transaksi/pemasaran online (teknologi digital) masih rendah.Akses cakupan wilayah pemasaran masih lokal.inovasi diversifikasi produk IKM masih rendah dan minim.Standarisasi kualitas produk masih rendah.Jumlah IKM yang naik kelas masih belum maksimal. <p>Perdagangan:</p> <ol style="list-style-type: none">Peningkatan ekspor ke luar negeri dan luar wilayah belum optimal.Peningkatan laju Pertumbuhan PDRB ADHK kategori lapangan usaha perdagangan tidak signifikan.Peningkatan jumlah pedagang tidak berbanding lurus dengan jumlah pasar daerah yang direvitalisasi.Sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pasar aman, sehat dan berdaya saing.Fasilitasi pemasaran produk ke akses dan citra image pasar ke pasar nasional dengan media digital masih kurangKesadaran masyarakat menggunakan produk lokal masih rendah,Harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok kurang stabilRendahnya minat pedagang kecil di pasar rakyat utk melaksanakan tera-tera ulang dan sidang tera ulang kecamatanSarana dan prasarana pengawasan kegiatan metrologi legal belum ada



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		j. Pelaksanaan penyidikan metrologi legal kurang
3.4	Energi dan Sumber Daya Mineral	a) Minimnya data potensi energi dan sumber daya mineral di Kabupaten Mojokerto b) Belum optimalnya pengembangan energi baru terbarukan c) Masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik
IV.	URUSAN PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG	
4.1	Administrasi Pemerintahan	a) Terpisahnya anggaran pemeliharaan kendaraan operasional (ada di Bagian Tata Usaha) dengan tupoksi pemeliharaan kendaraan operasional (ada di Bagian Umum), memberikan kendala panjangnya rantai birokrasi untuk pelaksanaan pelayanan pemeliharaan; b) Terdapat beberapa kegiatan seperti PHBN dan Peringatan Hari Jadi yang membutuhkan koordinasi berkelanjutan dengan beberapa <i>stakeholder</i> . Kendala yang sering kali muncul adalah tidak lancarnya komunikasi sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat;
4.2	Pengawasan	a) Belum Optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
4.3	Perencanaan Pembangunan	b) Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif; c) Lemahnya koordinasi inter dan antar Perangkat Daerah terkait dalam hal perencanaan pembangunan; d) Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan Holistik, Integratif, Tematik, Spasial belum optimal; e) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah belum optimal; f) Penelitian dan pengembangan Perencanaan Pembangunan belum optimal. Kebalitbangan 1) Pengumpulan Satu data yang belum terintegrasi 2) Keakuratan data yang masih jauh dari harapan



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN	IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN
		3) Penelitian penelitian yang dilakukan cenderung tidak terarah dan cenderung melakukan hal yang sudah ada
4.4	Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan yang berdisiplin Ekonomi Akuntansi2) Rendahnya kualitas pengelola keuangan di OPD3) Kurang berperannya kepala OPD se Kabupaten Mojokerto selaku pengguna anggaran yang peduli terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah4) Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang penatausahaan keuangan daerah
4.5	Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none">a) Terbatasnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi terkait pelayanan publik;b) Belum meratanya distribusi ASN sesuai dengan formasi dan kebutuhan;c) Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki;d) Belum terbangunnya sistem perencanaan dan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan formasi jabatan dan standar kompetensinya;e) Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian dalam pengintegrasian data pegawai; danf) Evaluasi kinerja ASN belum berlandaskan pada sistem penilaian kinerja berbasis merit sistemg) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian berbasis teknologi informasih) Perencanaan kebutuhan ASN belum disusun secara komprehensifi) Penempatan ASN belum sepenuhnya berdasarkan kompetensi jabatanj) Pengembangan kompetensi ASN belum dilaksanakan secara optimalk) Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi secara maksimal



4.2 Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu strategis yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Mojokerto 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut.

4.2.1 Isu Internasional

1. Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung



Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Dalam rangka pencapaian target TPB/SDGs yang menjadi prioritas pembangunan nasional, diperlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2. Gejolak Perekonomian Global

Krisis ekonomi global adalah peristiwa dimana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan / degresi dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Krisis ekonomi global ini adalah salah satu dilema yang sedang dihadapi Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Dan ini adalah dinamika kehidupan ekonomi yang tidak tetap perubahannya, kadang sistem ekonomi dunia naik kadang merosot drastis. Ini menyebabkan gejolak besar bagi kehidupan ekonomi seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Akibat langsungnya adalah meledaknya harga kebutuhan pokok di Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Mitigasi Bencana Alam dan Penanganan Perubahan Iklim

Beberapa tahun terakhir ini, pemanasan global akibat tingginya emisi gas rumah kaca menjadi isu internasional yang banyak diperbincangkan. Mencairnya es di kutub utara dan selatan bumi, mengakibatkan muka air laut meningkat dan perubahan musim yang terjadi di beberapa belahan bumi, bencana banjir, badai, serta tenggelamnya beberapa pulau juga diduga akibat tingginya emisi gas rumah kaca tersebut.

Atas dasar isu tersebut, Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional penurunan gas rumah kaca (RANGRK) melalui Perpres No. 61/2011 dan 33 Rencana Aksi Daerah (RADGRK) yang ditetapkan melalui peraturan gubernur serta dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN API). Kebijakan penurunan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim termuat dalam RPJMN 2015-2019 dengan Arah kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup, mitigasi bencana dan perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, peningkatan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

4. Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 sudah di depan mata. Era itu ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital yang mendorong otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Era



ini kerap menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak soal pekerjaan manusia yang akan digantikan teknologi mutakhir. Dalam konteks di Indonesia, Revolusi Industri Keempat telah mengeliminasi beberapa pekerjaan saat ini, karena tenaga kerja yang ada telah banyak berkurang yang dinilai karena akumulasi beberapa faktor di antaranya efisiensi dan disrupsi teknologi. Tidak hanya menjadi perbincangan di tanah air, Revolusi Industri Keempat juga menjadi pembahasan utama di dunia.

Revolusi teknologi ini akan mengaburkan batas antara bidang fisik, digital dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat akan mengacu pada bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Perubahan teknologi ini secara drastis akan mengubah cara individu, perusahaan, dan pemerintah bekerja yang pada akhirnya mengarah pada transformasi masyarakat yang serupa dengan revolusi industri sebelumnya.

Revolusi industri ini tidak hanya berpotensi luar biasa dalam merombak industri, tapi juga mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Bagi Indonesia, fenomena revolusi industri 4.0 memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur Indonesia dan menjadialah satu cara untuk mempercepat pencapaian visi Indonesia untuk menjadi 10 ekonomi terbesar di dunia. Dalam rangka ini, Pemerintah Republik Indonesia telah meluncurkan roadmap revolusi industri 4.0 yang diberi nama “Making Indonesia 4.0” untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan revolusi industri 4.0 di Indonesia. Oleh karenanya, langkah tersebut juga menuntut pemerintah daerah untuk dapat menindaklanjuti roadmap yang telah tersusun.

5. Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Implementasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 telah dimulai tanggal 31 Desember 2015. Asean akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja trampil antar negara Asean. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Indonesia secara cermat dan terintegrasi.

Diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2016, yang mana bagi Indonesia, keberadaan MEA menjadi babak awal untuk mengembangkan berbagai kualitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara dalam perkembangan pasar bebas di akhir 2015. MEA menjadi dua sisi mata uang bagi Indonesia.

Satu sisi menjadi kesempatan yang baik untuk menunjukkan kualitas dan kuantitas produk dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia kepada negara-negara lain dengan terbuka, tetapi pada sisi yang lain dapat menjadi bumerang untuk Indonesia apabila Indonesia tidak dapat memanfaatkannya dengan baik.



MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan GDP Indonesia. Pada sisi investasi, kondisi ini dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Langsung Luar Negeri yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (human capital) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Namun demikian hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Untuk itu diperlukan suatu uji kompetensi bagi setiap calon tenaga kerja yang akan bersaing. Bagi mereka yang lulus uji kompetensi diberikan sertifikat sesuai tingkat ketrampilan dan keahliannya.

4.2.2 Isu Nasional

1. Universal Access 100% layanan air minum, 0% kawasan kumuh, 100% layanan sanitasi

Upaya pencapaian target selaras Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019 yang mengamanatkan 100 persen akses aman air minum, bebas kumuh dan 100 persen akses sanitasi yang layak pada akhir 2019. Indikator 100% yang dimaksud ialah, Indonesia bisa memenuhi 85% Standart Pelayanan Minum (SPM) dan 15% memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam memenuhi SPM di sektor air minum setidaknya setiap warga bisa mendapatkan akses sebanyak 60 liter/orang/detik. Sedangkan, untuk sektor sanitasi yaitu tersedianya sistem air limbah setempat sebesar 60%, tersediaanya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota sebesar 5%, tersediaanya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan sebesar 20% dan adanya sistem penanganan sampah di perkotaan sebesar 70%.

Target universal access pada 2019 mendatang bukanlah merupakan hal mudah yang bisa dicapai, pasalnya dalam memenuhi target ini perlu lompatan besar yang dilakukan. Terlebih, hingga kini capaian akses air minum aman dan sanitasi layak Indonesia masih kurang optimal.

Kendati demikian, menurut Nugroho dengan adanya dukungan dari semua pihak baik dari pemerintah daerah, pihak swasta, maupun masyarakat target 100% akses tersebut bisa tercapai dengan baik, bahkan optimis bisa terlampaui.



2. Jaminan Kesehatan Nasional

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Sedangkan untuk rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah.

Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaannya JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi :

- Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).
- Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
- Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

3. Kedaulatan Pangan

Persoalan pangan bagi bangsa Indonesia dan juga bangsa-bangsa lainnya di dunia ini adalah merupakan persoalan yang sangat mendasar dan sangat menentukan nasib dari suatu bangsa. Ketergantungan pangan dapat berarti terbelenggunya kemerdekaan Bangsa dan rakyat terhadap suatu kelompok, baik negara lain maupun kekuatan ekonomi lainnya. Kedaulatan pangan merupakan sebuah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal, dimana terdapat 7 (tujuh) prasyarat utama untuk menegakkan kedaulatan pangan, yakni : pembaruan agraria, adanya hak akses rakyat terhadap pangan, penggunaan SDA secara berkelanjutan, pangan untuk pangan (tidak sekedar komoditas yang diperdagangkan), pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi,



melarang penggunaan pangan sebagai senjata, dan pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

4. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian persepektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi, dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebijakan-kebijakan nasional terkait pengembangan energi dan sumber daya mineral, menjadi salah satu isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di daerah. Beberapa isu strategis dalam hal ini kebijakan nasional terkait energi sumber daya mineral yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Mojokerto diantaranya adalah program pengembangan jaringan gas, serta target rasio elektrifikasi.

Pembangunan jaringan gas menjadi salah satu prioritas nasional bidang energi sumber daya mineral, dimana pemerintah akan membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di 18 kabupaten/kota. Untuk merealisasikan program ini, kementerian telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi dengan pemerintah daerah terkait. Pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui pipa (jargas) ini merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung program diversifikasi energi. Pembangunan jargas ini merupakan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga perlunya dukungan pemda dalam memberikan perizinan pembangunan Jargas sangat penting. Total jargas yang dibangun di 18 wilayah ini mencapai 78.216 sambungan rumah (SR), dan di Kabupaten Mojokerto dengan target sebanyak 4.000 sambungan rumah (SR).

Kebijakan nasional lain yang sekaligus juga menjadi target pembangunan bidang energi sumber daya mineral yaitu rasio elektrifikasi (RE), dimana secara nasional ditargetkan sebesar 100% pada Tahun 2020, sedangkan untuk Provinsi Jawa Timur ditargetkan RE sebesar 100% tercapai pada Tahun 2021. Kedua target ini tentunya harus diperhatikan pula dalam penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Mojokerto, mengingat berdasarkan data Dinas Energi dan



Sumber Daya Mineral disampaikan bahwa rasio elektrifikasi (RE) Kabupaten Mojokerto pada Tahun 2017 telah mencapai 101,41%. Sedangkan disisi lain, didapatkan data yang bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto bahwa masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik.

6. Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pemulihan perekonomian daerah melalui perdagangan yang adil dan setara di masa Pandemi Covid 19

Amanah Undang-Undang Tentang Cipta Kerja berkaitan dengan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk peningkatan perlindungan kesejahteraan pekerja. Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam 5 tahun kedepan perlu menyiapkan langkah-langkah strategis dalam merespon amanah Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, termasuk dalam hal ini bidang ketenaga kerjaan, investasi, dan pemberdayaan UMKM merupakan isu-isu utama yang sesuai dengan kondisi nyata yang ada di Kabupaten Mojokerto. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dalam rangka pemulihan perekonomian daerah yang sangat terdampak oleh adanya pandemi Covid 19, sangat diperlukan langkah nyata intervensi Pemerintah Daerah, terutama perlindungan dan pemberdayaan sektor UMKM.

Dalam hal perdagangan pemerintah diharapkan melakukan hal-hal sebagaimana berikut. Pemerintah Pusat melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengembangan, penataan, dan pembinaan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha. Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah dengan pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. Peraturan Pemerintah ini juga mengatur Pasar Rakyat pada Pasal 71 hingga Pasal 84.

7. Investasi dan Ketenagakerjaan

Ketentuan dalam Undang_undang Cipta Kerja pada bagian kedua tentang Ketenagakerjaan, dimulai dalam Pasal 81 mengatur perubahan beberapa bagian dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perubahan sebagaimana dimaksud meliputi:



1. Ketentuan tentang lembaga pelatihan kerja (termasuk lembaga pelatihan kerja dengan penyertaan modal asing) wajib memenuhi Perizinan Berusaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah, dan diatur lebih operasional dalam Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan tenaga kerja asing.
3. Ketentuan tentang perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
4. Ketentuan tentang waktu kerja, termasuk waktu lembur, dan soal waktu istirahat dan cuti.
5. Ketentuan soal upah minimum dan hak serta kewajiban pengusaha dan buruh.
6. Ketentuan tentang dewan pengupahan yang memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah.
7. Ketentuan tentang PHK.

Adapun amanah penanaman modal dalam skala besar harus bermitra dengan Koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja. Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah yang cukup besar akan pentingnya kolaborasi kemitraan antara pemodal besar dengan Koperasi dan UMKM dalam memulihkan perekonomian nasional.

8. **Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas**

Amanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas agar pemerintah daerah melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas dalam bidang:

- a. Bidang kesehatan;
- b. Bidang pendidikan;
- c. Bidang industri;
- d. Bidang fasilitas umum;

Dalam hal ini pemerintah daerah diberi amanah untuk mengurangi hambatan dan menciptakan suasana dan lingkungan yang membuat penyandang disabilitas dapat memenuhi hak-haknya di beberapa bidang sebagaimana disebutkan, sehingga tercipta kesetaraan dalam mengakses hak dan tercipta equality before the law. Berikut produk hukum yang menjadi rujukan dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas,
- b. PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.



- c. PP Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- d. PP Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.
- e. PP Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas.
- f. PP Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.
- g. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

9. **Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Cipta Kerja mengubah sebagian ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian kebijakan dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam hal ketentuan melakukan Amdal Lingkungan yang hanya diperuntukkan pada jenis industri yang beresiko menyebabkan pencemaran lingkungan, maka perlu disusun langkah-langkah strategis agar kemudahan investasi dalam ijin lingkungan ini tidak akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan dalam skala yang lebih luas lagi.

10. **Jaminan Produk Halal**

Pemberlakuan kewajiban bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi produk makanan dan minumannya merupakan sesuatu hal yang saat ini menjadi perhatian secara nasional. Amanah itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Perlu adanya pendampingan dan fasilitasi serta bantuan keuangan bagi pelaku usaha yang terkategori UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi produk makanan dan minuman serta produk jasa yang menunjang makanan dan minuman. Sertifikasi produk makanan dan minuman bukanlah hal yang mudah bagi pelaku usaha yang terkategori UMKM untuk dapat mengakses dan memenuhi ketentuan sertifikasi tersebut. Oleh karena itu Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud menjadi *leading sector* dan diberikan wewenang yang cukup untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap hal ini.

4.2.3 **Isu Regional**

1. **Gerbang kertokusila**



Gerbang kertasusila merupakan Pusat Kegiatan nasional (PKN) yang termasuk pengembangan tahapan I dengan proses Revitalisasi dan percepatan kota-kota pusat pertumbuhan nasional melalui revitalisasi kota-kota yang telah beralih fungsi (sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana tata Ruang Nasional).

Sesuai dengan Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dari Gerbang kertasusila dan Gerbang kertasusila Plus yang memiliki Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Kota Mojokerto sebagai bagian dari wilayah pengembangan Mojokerto – Jombang dengan pengembangan yang diarahkan pada:

- Pengembangan pertanian tanaman pangan
- Pengembangan kegiatan pertambangan
- Pengembangan fasilitas kesehatan
- Pengembangan pariwisata
- Pengembangan industri

Kabupaten Mojokerto merupakan wilayah strategis yang dilalui berbagai macam jalur infrastruktur :

- Jalan bebas hambatan Surabaya – Kertosono
- Jalur kereta api double track Surabaya – Mojokerto
- Pengembangan jaringan gas Mojokerto – Jombang
- Pengembangan jalan poros utara Mojokerto – Lamongan

2. Kerjasama Sistem penyediaan air minum (SPAM) regional dan pengembangan TPA regional

Tidak setiap Kabupaten / Kota memiliki ketersediaan air baku, karena itu pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun SPAM regional. Pembangunan SPAM regional ini merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa Kabupaten/ Kota.

SPAM regional dibangun atas kerja sama lintas Kabupaten/ Kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi rakyat yang ada di wilayah layanan SPAM regional itu, sedangkan pengelolanya adalah Pemerintah Provinsi. Keunggulan SPAM regional adalah memudahkan Pemerintah Provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku.

SPAM regional juga secara tidak langsung mampu meningkatkan kerja sama saling menguntungkan antar pemerintah daerah, mendukung kemajuan pembangunan Kabupaten /



Kota yang menjadi daerah pelayanan SPAM regional, dan dapat lebih mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia. Pengembangan TPA regional di Indonesia didasarkan pada :

- UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang mengamanatkan penutupan TPA open dumping paling lambat tahun 2013 (pasal 44)
- Keberatan dari pihak masyarakat bila TPA dibuat sekitar tempat tinggalnya
- Kesulitan mendapatkan lahan TPA di perkotaan, terutama di kota-kota besar

Adapun tujuan Pengembangan TPA Regional adalah :

- Mengakomodasi kota-kota yang memiliki kendala lokasi TPA yang memenuhi syarat dalam wilayah administrasinya
- Meningkatkan sinergi antar daerah dalam pengelolaan persampahan
- Meningkatkan kualitas TPA dan efisiensi pelayanan persampahan
- Meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan dalam pengelolaan sampah secara regional
- Memobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem pengelolaan persampahan

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Basis pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang mengarah kepada pengentasan kemiskinan masyarakat, meski Indonesia pada saat ini dinilai berhasil menurunkan angka kemiskinan. Perumbhan ekonomi yang inklusif harus dibangun dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu memaksimalkan kesempatan ekonomi, memberikan jaring pengaman sosial, dan menjamin tersedianya akses yang sama terhadap segenap kesempatan ekonomi. Ketiga pilar itu perlu mendapat perhatian yang besar bagi pembangunan ekonomi ke depan. Dukungan terhadap perekonomian inklusif akan mengakibatkan pertumbuhan juga menyebar ke berbagai sektor dan tidak hanya pada sektor tertentu. Selama beberapa tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan sektor jasa cenderung melambat, sedangkan sektor industri dan pertanian pertumbuhannya cenderung datar.

4. Infrastruktur

Jalan yang merupakan kewenangan Nasional dan Provinsi yang melintasi Kabupaten Mojokerto belum mendapatkan peningkatan pelebaran, sehingga pada titik-titik tertentu kondisi lalu lintas sangat padat akibat penyempitan jalan tersebut. Begitu juga dengan infrastruktur yang berkaitan dengan pengairan, sungai yang merupakan kewenangan BBWS ataupun Provinsi juga memerlukan perhatian yang lebih baik, karena adanya pendangkalan dan kondisi bangunan air



yang kurang maksimal, daerah di Kabupaten Mojokerto yang terlewat sering mengalami banjir pada saat musim hujan.

5. Bonus demografi

Tingginya jumlah penduduk usia produktif antara 15 tahun hingga 64 tahun dalam suatu wilayah menjadi isu yang penting. Hal tersebut mengingatkannya, apabila tidak dimanfaatkan maksimal akan menjadi permasalahan suatu wilayah. Agar dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Bonus demografi harus dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan tidak sampai menjadi bencana demografi. Pemerintah harus dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk untuk menciptakan penduduk yang berkualitas dan pemerintah juga menyiapkan lapangan pekerjaan yang layak agar warga di usia produktifnya agar tidak menjadi pengangguran intelektual.

4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Mojokerto

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia

Pembangunan manusia pada hakekatnya merupakan suatu proses investasi. Upaya pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi agar dapat berjalan seiring dengan pembangunan manusia diupayakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup serta kapabilitas penduduk. Dengan adanya peningkatan kualitas hidup manusia yang cukup signifikan baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi maka akan terlahir generasi penerus yang berkualitas.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Mojokerto fokus pada sektor pendidikan dan kesehatan. Pada sektor pendidikan berfokus pada pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan peningkatan kualitas pendidikan. Adapun peningkatan kualitas dilakukan dengan pemenuhan sarana/prasarana kelengkapan belajar mengajar pada tiap satuan pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Hal ini serupa dengan isu strategis bidang pendidikan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas layanan pendidikan dasar, kompetensi guru dan sarana prasarana.

Sedangkan pada sektor kesehatan berfokus pada peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik RSUD, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga berupaya meningkatkan derajat kesehatan melalui masyarakat atau yang dikenal sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di antara lain melalui Posyandu, Poskesdes, Polindes dan Posbindu serta pengembangan Desa Siaga. Selain itu, guna memberikan



elayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto juga fokus terhadap pemenuhan alat kesehatan serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan. Terdapat beberapa permasalahan di bidang kesehatan yaitu peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan dalam penurunan AKI, Stunting, pemberantasan penyakit, penyediaan air bersih dan sanitasi. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta sumber daya manusia kesehatan. Selain itu yaitu masih kurangnya kualitas dan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi seluruh masyarakat termasuk bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas).

Disamping kedua hal diatas pemerintah kabupaten Mojokerto juga memperhatikan kemampuan / daya beli masyarakat yang semakin menurun di era Covid 19 ini. Perlu upaya-upaya terukur dan sistematis untuk membantu masyarakat menghadapi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi virus corona tersebut.

Guna mewujudkan Kabupaten Mojokerto yang berkarakter, peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan diselaraskan dengan salah satu agenda prioritas nasional (Nawa Cita) yaitu revolusi karakter bangsa atau lebih dikenal dengan penyebutan revolusi mental. Pada hakekatnya revolusi mental bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain didunia.

2. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan. Kemiskinan tidak hanya merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat dunia saja. Namun merupakan permasalahan/isu strategis di tingkat nasional maupun provinsi. Seluruh Kab/Kota di Indonesia berupaya mengurangi angka kemiskinan di wilayahnya.

Tabel 4.2
Persentase Penduduk Miskin (PO) dan Jumlah penduduk Miskin (000) tahun 2015 s.d 2020
Kabupaten Mojokerto

	satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
--	--------	------	------	------	------	------	------



Persentase Penduduk Miskin (PO)	%	10,57	10,61	10,19	10,08	9.75	10.57
Jumlah penduduk Miskin (000)	Jiwa	113,86	115,38	111,79	111,55	108.81	118.80

Sumber : BPS kabupaten Mojokerto

Pada kurun waktu tahun 2015-2020, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayahnya baik sifatnya mendukung program kemiskinan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan juga sebagai pelaku dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Sebagai pelaku mengandung maksud bahwa Pemerintah Daerah juga turut berpartisipasi mengarahkan program / kegiatan yang ada untuk mengurangi jumlah penduduk miskin.

Salah satu bukti konkrit bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto sukses dalam rangka penanggulangan kemiskinan dapat dilihat pada menurunnya persentase tingkat kemiskinan. Persentase penduduk miskin dikabupaten Mojokerto dari tahun ketahun selalu lebih baik dari pada Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk miskin Nasional Kabupaten Mojokerto masih diatas angka nasional.

Untuk itu perlu adanya percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mencapai target tingkat kemiskinan menjadi satu digit. Sehingga aspek kemiskinan masih menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, disebabkan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih atau capaian akhir dokumen RPJMD 2016-2021 dengan memasang target persentase kemiskinan di Kabupaten Mojokerto sebesar 9,17%.

Disamping masyarakat miskin, maka masyarakat yang termarginalkan juga harus dimasukkan dalam agenda pembangunan. Termasuk dalam hal ini masyarakat yang terkena dampak covid 19 sehingga menjadi tidak berdaya, kaum difabel yang kurang berdaya. Kebijakan sosial yang inklusif tidak membiarkan warga masyarakatnya yang termarginalkan menjadi korban akibat dampak pembangunan. Termasuk dalam hal ini warga yang menganggur karena adanya pemutusan hubungan kerja atau usahanya yang gagal dalam situasi saat ini. Hal ini dapat disebabkan dari berkurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di wilayah Kabupaten Mojokerto dan minat lembaga/instansi/perusahaan mencari SDM yang berkualitas, berintelektual tinggi dan berdaya saing karena masyarakat Kabupaten Mojokerto cenderung belum memiliki SDM yang memenuhi kebutuhan lembaga/ instansi/ perusahaan. Untuk itu perlu adanya peningkatan kesempatan kerja untuk penyerapan tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktifitas ketenagakerjaan dan kompetensi tenaga kerja.



3. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Pusat Pertumbuhan Industri nasional. Di Kabupaten Mojokerto sendiri, sektor industri secara konsisten merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, secara relatif besarnya kontribusi tersebut nyatanya kurang optimal dan cenderung stagnan. Selain itu, sektor industri secara faktual ternyata masih belum mampu menyerap banyak tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.

Berdasarkan posisi geografis, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Kabupaten Mojokerto merupakan bagian dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN), yang dikenal dengan “Gerbang Kertosusila”. Posisi ini menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu wilayah prioritas dalam percepatan pembangunan ekonomi guna menunjang perekonomian nasional. Disamping itu, dalam lingkup Jawa Timur, Kabupaten Mojokerto termasuk dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berpotensi dalam pengembangan industri besar. Oleh karena itu, dengan keuntungan geografis ini, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pengungkit perekonomian Jawa Timur selain Kota Surabaya. Berdasarkan kondisi demografisnya, kualitas penduduk Kabupaten Mojokerto yang dinilai dari tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, dan IPM, masih memberikan harapan yang menjanjikan guna mendorong percepatan pembangunan sektor industri.

Selanjutnya, berdasarkan aspek pembangunan ekonomi yang dilihat dari trend pertumbuhan ekonomi, menunjukkan kondisi yang kurang menguntungkan, kendatipun memiliki pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Dikaitkan dengan struktur ekonominya, masalah ini diduga merupakan akibat tidak berkembangnya sektor industri di daerah tersebut. Nampaknya, hal ini terkait dengan tidak adanya peningkatan value added yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana dibuktikan dengan tidak berubahnya struktur perekonomian Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, untuk memasifkan aktivitas ekonomi Mojokerto diperlukan penguatan sektor industri yang memiliki value added yang lebih tinggi.

Terakhir, berdasarkan aspek pembangunan industri, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa stagnasi pertumbuhan sektor industri masih menjadi masalah utama bagi industrialisasi Kabupaten Mojokerto. Kondisi ini sejatinya mencerminkan rendahnya produktivitas sektor industri di daerah tersebut. Masalah ini menjadi tugas utama pemerintah untuk memaksimalkan peran industri dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Selain itu, berdasarkan kemampuan serapan tenaga kerja di sektor industri, terlihat bahwa terjadi kecenderungan yang semakin turun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor industri di Kabupaten Mojokerto bersifat eksklusif. Selanjutnya, sarana perdagangan menurut



Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengembangan sarana perdagangan ini dimaksudkan untuk memperlancar arus distribusi barang serta meningkatkan daya saing pasar dalam negeri. Oleh karena dalam rangka optimalisasi peran sarana perdagangan, maka diperlukan langkah revitalisasi. Upaya pengembangan sarana perdagangan ini juga menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Berbagai kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah pembangunan beberapa pusat oleh-oleh, pasar wisata, serta pembangunan/revitalisasi pasar. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan nasional terkait pengembangan sarana perdagangan tersebut di atas, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, namun belum optimal, sehingga masih diperlukan langkah lanjutan.

Selain itu, salah satu dampak dari pembangunan jalan tol ini yaitu terbukanya akses perekonomian daerah, yang bisa memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya misalnya pertumbuhan sektor pariwisata daerah. Pertumbuhan usaha mikro kecil dan menengah, tentunya juga akan terjadi seiring dengan kemudahan akses dan dukungan infrastruktur yang memadai. Namun dikarenakan dampak covid 19 menyebabkan aktifitas perekonomian lesu. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya. Terdapat masyarakat yang termarginalkan akibat dampak dari virus corona tersebut. Sehingga pembangunan ekonomi berkualitas dan inklusif menjadi jawaban untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang melanda Kabupaten Mojokerto. Kondisi yang demikian tentunya menjadi isu strategis yang harus terjawab melalui program-program perencanaan pembangunan yang tepat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020–2024.

Perlu terus membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata. Termasuk juga dalam hal ini Koperasi, Usaha Kecil dan Mikro. Permasalahan utama yang dihadapi koperasi secara umum berkaitan dengan organisasi, usaha, sumber daya manusia, sistem pendukung dan iklim usaha. Pengembangan koperasi masih didominasi dengan banyaknya koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar, rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi, terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk sehingga masih lemahnya daya saing Koperasi Usaha Mikro yang merupakan kekuatan ekonomi lokal sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat dan sebagai lahan penyerapan tenaga kerja, akses informasi pasar dan saluran pemasaran, serta terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antara koperasi dan usaha besar. Permasalahan lain yang dihadapi yaitu berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, peran sistem pendukung yang kurang optimal,



kurang meningkatnya nilai tambah agro-industri serta kurangnya daya saing UMKM. Arah kebijakan yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan teknologi industri dan standarisasi mutu produk.

Pemanfaatan ekonomi juga perlu diperhatikan. Karena perubahan pola interaksi masyarakat yang saat ini beralih ke pelayanan bisnis menggunakan fasilitas IT dan internet. Salah satu upaya meningkatkan pajak daerah seharusnya didorong sistem transaksi dengan menggunakan e-payment. Pemanfaatan sistem ini akan memudahkan deteksi pembayaran pajak pendapatan dan Pengembangan potensi wisata di Kabupaten Mojokerto masih perlu dikembangkan, sehingga bisa menambah menarik wisatawan lebih banyak lagi dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Serta perlu adanya optimalisasi kepariwisataan yang inovatif dengan mewujudkan akselerasi kepariwisataan melalui optimalisasi aksesibilitas amenities dan atraksi. Sehingga kualitas dari akses pariwisata secara terpadu tidak kalah bersaing dengan daerah lain dan dapat memperbanyak kunjungan dan lama kunjungan wisata. Selain itu upaya lain yang dapat dilakukan antara lain melalui media promosi sehingga tujuan wisata di Kabupaten Mojokerto bisa dikenal masyarakat luas, karena potensi pariwisata di Kabupaten Mojokerto dapat dikembangkan, seperti tempat wisata alam, buatan, religi dan kebudayaan.

Selain itu juga Mojokerto dilakukan upaya peningkatan infrastruktur pendukung wisata, jaminan keamanan dan ketertiban, meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas di objek wisata, menjaga keasrian dan kelestarian objek wisata, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan untuk mencetak tenaga terdidik dan terlatih dalam bidang pariwisata, meningkatkan prasarana dan sarana transportasi yang memperlancar perjalanan menuju objek wisata, meningkatkan kualitas cinderamata yang akan dibeli oleh para wisatawan, memasyarakatkan program Sapta Pesona Pariwisata, yaitu aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan (kesan) baik yang berhubungan dengan kesan tentang berbagai hal yang terdapat di objek wisata maupun berhubungan dengan cinderamata yang khas.

Selanjutnya tentang konsep Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B). Masalah lahan semakin kompleks dengan tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian. Belum lagi potensi alih fungsi lahan sawah akibat dari penerapan RTRW oleh pemda kabupaten/kota yang kurang berpihak kepada pertanian.

Cepatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, antara lain:

1. menurunnya produksi pangan yang menyebabkan terancamnya ketahanan pangan
2. hilangnya mata pencaharian petani dan dapat menimbulkan pengangguran, dan
3. hilangnya investasi infrastruktur pertanian (irigasi) yang menelan biaya sangat tinggi



Kita mengharapkan dengan adanya perangkat peraturan yang komprehensif terkait perlindungan lahan dan upaya pemberian insentif kepada petani maka diharapkan tanah tersedia bagi petani bukan hanya untuk menjamin ketersediaan produksi pangan, namun lebih jauh menjamin akses petani atas lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Upaya revitalisasi dan perlindungan lahan dilakukan dengan melindungi dan menjamin ketersediaan lahan dengan menindaklanjuti UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah pendukungnya. Selain itu masih kurangnya kebijakan dan strategi mengenai produksi dan pemasaran hasil pertanian sehingga kurangnya nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Untuk itu perlu adanya penguatan vokasi dan kompetensi SDM.

Permasalahan yang mendasar dalam aspek pangan adalah stabilitas harga pangan, peningkatan produksi pangan, optimalisasi lumbung pangan untuk ketahanan pangan, dan penganeekaragaman konsumsi, peningkatan keamanan pangan serta hama penyakit.

4. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat

Tata kelola pemerintahan merupakan hal yang fundamental untuk sebuah pemerintahan. Pemerintahan perlu mengambil bentuk yang lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk kemanfaatan bagi masyarakatnya. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang dilakukan harus didukung oleh teknologi informasi dan internet. Karena perubahan perilaku dan interaksi masyarakat yang saat ini banyak menggunakan sistem daring atau online.

Disamping itu reformasi yang dilakukan harus berorientasi pada kinerja yaitu hasil dan dampak positif terhadap masyarakat Mojokerto. Untuk hal ini dibutuhkan pemerintah yang melayani secara prima.

Pelayanan prima secara harfiah berarti pelayanan terbaik atau sangat baik. Hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Sejalan dengan hal itu pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain melakukan tugasnya dengan kompeten dan rajin. Pelayanan Prima sebagaimana menuntut pelayanan yang memuaskan pelanggan/masyarakat memerlukan persyaratan bahwa setiap pemberi layanan yang memiliki kualitas kompetensi yang profesional, dengan demikian kualitas kompetensi profesionalisme menjadi sesuatu aspek penting dan wajar dalam setiap transaksi.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terus dilaksanakan. Namun, bukan berarti perwujudan pelayanan prima di Kabupaten Mojokerto terbebas dari kendala. Berbagai isu permasalahan seringkali menyertai upaya pelaksanaan pelayanan prima. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya keluhan dari masyarakat / pengguna pelayanan terkait dengan sistem dan prosedur pelayanan perijinan, kependudukan, dan sebagainya. Oleh



karenanya, dalam periode 5 (lima) tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Mojokerto akan lebih mengoptimalkan pencapaian pemberian pelayanan prima bagi masyarakat di seluruh unsur pelayanan. Meningkatkan kinerja sektor pemerintahan dan investasi.

Kualitas tata kelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan suatu daerah, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah daerah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mindset dan *cultureset*. Selain itu peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik dan bersih dalam rangka prasyarat pembangunan yang berkualitas adalah terciptanya keamanan dan ketertiban.

Wilayah yang tidak mampu menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban dapat menghambat pembangunan atau dapat mengakibatkan ketidaktertarikan investor untuk berinvestasi di suatu wilayah. Hal tersebut disebabkan karena konflik. Adapun penyebab konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan, adanya kegamangan jati diri dan karakter bangsa serta kasus kenakalan remaja, pernikahan dini dan narkoba. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas, Pemerintah Daerah dituntut untuk meminimalisi potensi konflik yang terjadi. Dalam menjaga ketertiban dan keamanan tidak hanya dilihat dari sisi penanganan konflik saja. Namun dapat dilihat dari sisi kesiapsiagaan menjamin ketertiban dan keamanan pada situasi darurat (bencana) baik pra maupun pasca bencana. Hal tersebut untuk memberikan perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan memastikan keberlangsungan pelayanan prima kepada masyarakat dan kegiatan perekonomian suatu daerah. Selain itu keamanan dan ketertiban dalam mensukseskan pemilu capres dan cawapres, legislatif, pilkada dan pilkades.

5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana air bersih, air limbah, drainase, persampahan, penanganan kawasan kumuh, Sumber Daya Alam, dan RTLH

- Prasarana Air Bersih

Jumlah sumur gali, sumur pompa, mata air, dan jumlah pengolahan air bersih/air minum.

- Sumber Daya Alam

Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan hidup



- Sanitasi
Jumlah MCK umum sejumlah 54 unit dan yang memiliki jamban keluarga sebanyak 357 kepala keluarga.
- Air Limbah
Perencanaan IPAL Komunal, debit air limbah, desain, lokasi, dan kebutuhan lahan
- Drainase
Saluran terbuka, primer, sekunder, tersier, saluran tertutup, waduk, pintu air, pompa, bangunan persilangan, bangunan pelimpah, cek dam
- Persampahan
Skala individu (masyarakat), skala lingkungan (masyarakat, Pemda, swasta), skala kota (Pemda, swasta)
- Penanganan Kawasan Kumuh

Pembangunan perumahan dan permukiman yang kurang terpadu, terarah, terencana, dan kurang memperhatikan kelengkapan prasarana dan sarana dasar seperti air bersih, sanitasi (jamban), sistem pengelolaan sampah, dan saluran pembuangan air hujan, akan cenderung mengalami degradasi kualitas lingkungan atau yang kemudian diterminologikan sebagai “Kawasan Kumuh”.

Kawasan kumuh meskipun tidak dikendaki namun harus diakui bahwa keberadaannya dalam perkembangan wilayah dan kota tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam rangka meminimalisir munculnya kawasan kumuh, maka perlu dilakukan upaya-upaya secara komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat timbulnya kawasan kumuh tersebut. Upaya-upaya tersebut antara lain pengentasan kemsikinan, penyuluhan kesehatan lingkungan, pembinaan masyarakat sadar lingkungan, pembangunan infrastruktur publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, pengelolaan kawasan bantaran / sepadan, peningkatan kesehatan masyarakat.

Selanjutnya, pembangunan jalan tol Trans Jawa yang menjadi agenda nasional, tentunya sangat berdampak luar biasa terhadap perekonomian daerah, khususnya yang dilintasi, tidak terkecuali Kabupaten Mojokerto. Menjadi salah satu wilayah yang dilintasi oleh Jalan Tol Trans Jawa, menuntut Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk bisa merespon terhadap perubahan arus perekonomian terutama di daerah sekitar interchange tol. Oleh karena itu perlu dirancang pembangunan jalan yang melancarkan arus lalu lintas tol ke Kabupaten Mojokerto sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Prasarana SDA adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh: Waduk/reservoir, bangunan-bangunan irigasi, bangunan pengatur sungai/perlindungan tebing sungai. Proyek



rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengejar target rehabilitasi nasional seluas 3,3 juta jaringan irigasi dalam lima tahun ke depan.

Pemerintah menginginkan agar proyek rehabilitasi irigasi dapat lebih modern dari segi fisik dan sistem manajemennya. Hal tersebut untuk memastikan pemanfaatan irigasi benar-benar optimal untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.

Selanjutnya, Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dua konsep utama yang diperkenalkan untuk menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Secara singkat, mitigasi berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah, menahan dan atau memperlambat efek gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Berkebalikan dengan mitigasi, adaptasi lebih kepada upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim yang telah terjadi dan dirasakan oleh manusia di bumi.

Terdapat empat strategi utama penerapan mitigasi. Salah satunya adalah: **Eliminasi**, yaitu menghindari penggunaan alat-alat penghasil emisi gas rumah kaca. Contoh: Mematikan lampu saat tidak digunakan; mematikan A/C saat tidak ada orang didalam ruangan. Strategi lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak perubahan iklim adalah: **Pengurangan**. Yaitu sebuah tindakan dapat dilakukan dengan mengganti peralatan lama dan/atau mengoptimalkan struktur yang sudah ada. Contoh: Memasukkan efisiensi energi ke dalam pengambilan keputusan investasi.

Hal lainnya yang dapat dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim adalah **Substitusi**. Contoh: Penggunaan energi terbarukan untuk memenuhi kebutuhan listrik dan/atau pemanas. Mitigasi perubahan iklim dapat juga dilakukan dengan merubah kebiasaan dalam hidup kita sehari hari. Efisiensi energi dapat dilakukan melalui substitusi ataupun melalui penghematan. Penghematan energi seringkali turut menurunkan emisi penyebab perubahan iklim. Penggunaan energi secara efisien juga dapat menghemat biaya.

Selain itu, Penataan Ruang perlu mendapat perhatian. Pada urusan penataan ruang, target penyusunan RDTR belum tercapai karena :

- Peta dasar yang harus ter update setiap 2 (dua) tahun
- Proses asistensi peta yang harus melalui PPIDS dan BIG
- Perkembangan yang sangat pesat pada wilayah perkotaan
- Tumpang tindihnya Rencana Rinci Tata Ruang (Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Detail tata Ruang)
- Banyaknya data teknis yang belum dimiliki (RTH, jaringan drainase, jaringan persampahan,dll

Selanjutnya, disparitas pembangunan antar wilayah seringkali menjadi permasalahan serius dan apabila tidak dieleminir secara bertahap dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks (seperti masalah kependudukan, sosial, ekonomi, politik dan lingkungan). Oleh sebab



itu diperlukan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor biofisik/karakteristik wilayah (sumberdaya alam), sumberdaya buatan (ketersediaan sarana dan prasarana sosial-ekonomi), sumberdaya manusia, sumberdaya sosial, karakteristik struktur ekonomi wilayah, dan kebijakan pemerintah daerah. Dengan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas tersebut diharapkan dapat dikembangkan kebijakan dan strategi dalam rangka mengurangi tingkat disparitas yang terjadi.

Perlu ditingkatkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, peningkatan jalan kabupaten masih belum 100% dan kondisi jembatan belum sesuai lebar jalan yang ada serta masih kurangnya penerangan jalan (LPJU). Untuk itu dibutuhkan arah kebijakan untuk memperkuat konektivitas fasilitas wilayah pertumbuhan atau kawasan potensial. Kedua, Peningkatan infrastruktur fisik dan pranata social dalam rangka mewujudkan lingkungan yang layak huni aman dan nyaman bagi warga. Ketiga, mendorong nilai investasi dari target yang ditetapkan, sehingga perlu adanya peningkatan nilai investasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain isu-isu diatas, isu-isu dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga patut untuk dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah mempunyai kaitan erat dengan Rencana Kebijakan dan Program (RKP) pembangunan daerah. Strategis memiliki pengertian sebagai suatu perbuatan atau aktivitas yang dilakukan sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dengan demikian, dalam konteks KLHS, aktivitas tersebut adalah suatu kajian yang sejak awal mempertimbangkan aspek lingkungan hidup dalam proses pengambilan keputusan di arahkebijakan, rencana, atau program. Untuk proses pengambilan keputusan, maka perlu dirumuskan terlebih dahulu isu-isu strategis yang sedang terjadi di Kabupaten Mojokerto yang masuk dalam aspek-aspek lingkungan.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis kajian lingkungan hidup yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis.



Tabel 4.3
Isu Strategis Berdasarkan Tema KLHS

No	Indikator TPB	Isu Strategis
1	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Aktivitas ekonomi masih menurun
2	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Tingkat kemiskinan masih tinggi
3	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata
4	Indikator: Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB.	Rasio penerimaan Pajak relatif kecil
5	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Akuntabilitas kinerja dan penggunaan EProcurement semakin baik namun belum mencapai target yang ditentukan
	Indikator: Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	
	Indikator: Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	
6	Jumlah wisatawan mancanegara	Kunjungan wisatawan mancanegara masih rendah
7	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
8	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Belum terpenuhinya persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusifitas
9	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Pengolahan dan penanganan sampah belum maksimal
10	Angka Kematian Ibu (AKI).	Angka Kematian Ibu (AKI). masih tinggi
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ dan SMP/MTs/ sederajat relatif rendah
12	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Pemerataan akses air minum
13	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Tingginya Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan
14	Jumlah Desa Mandiri.	Jumlah Desa Mandiri belum terpenuhi.
15	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunkan tingkat pengangguran.



No	Indikator TPB	Isu Strategis
	Tingkat setengah pengangguran	
16	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Infrastruktur pelayanan air baku masih belum memadai
17	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun	Rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah
18	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatan penataan kelembagaan jaringan informasi sumber daya air
19	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan meningkat
20	Persentase tenaga kerja formal	Persentase tenaga kerja formal masih sangat rendah dan belum ideal
21	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Menurunnya serapan Tenaga Kerja Sektor Industri Manufaktur
22	Angka kematian (insidensrate) akibat bunuh diri.	Menekan penambahan kasus bunuh diri
23	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun meningkat.
24	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Belum tercapainya target imunisasi dasar lengkap pada balita
25	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Metode kontrasepsi (CPR) sudah banyak digunakan namun belum mencapai target nasional.
	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	
26	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Meningkatnya perokok aktif pada penduduk umur ≥ 15 tahun
27	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Belum terpenuhinya proporsi peserta jaminan kesehatan
28	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR)	Menekan ASFR meningkat
29	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Jumlah kebijakan responsif gender masih belum proporsional.
30	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	Menurunnya kemampuan membaca penduduk umur ≥ 15 tahun
31	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Kualitas konsumsi pangan belum tercukupi



No	Indikator TPB	Isu Strategis
32	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kejahatan pembunuhan dan kekerasan terjadi di masyarakat dan meningkatnya proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	
33	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Menurunnya Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN





5.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen yang terlibat di dalamnya.

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Visi tersebut mengandung makna bahwa pada kepemimpinan Bupati Periode 2021 – 2026 bermaksud untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil, dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.

- **Terwujud** dalam hal ini memiliki arti bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto mampu mengaktualisasikan peran dan fungsinya secara optimal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- **MAJU** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto yang lebih baik di bidang fisik, ekonomi, sosial, mental - spiritual, dan budaya menuju tingkat peradaban yang lebih tinggi.
- **ADIL** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto melaksanakan pembangunan secara merata sehingga terwujud pemerataan hasil-hasil pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar desa maupun antar sector
- **MAKMUR** dalam hal ini memiliki arti bahwa Kabupaten Mojokerto mampu memenuhi kebutuhan ekonominya secara layak, terjadi peningkatan produksi pertanian dan hasil-hasil pedesaan lainnya, menurunnya jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin.

5.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud diatas maka dijabarkan melalui misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk periode 2021-2026 sebagai berikut

MISI 1 “Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan”



Misi ini bertujuan mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, daya beli, pembangunan gender, kesalehan dan kerukunan umat beragama.

MISI 2 “Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk pertumbuhan ekonomi; peningkatan PAD, investasi, laba BUMD; pertumbuhan Koperasi dan UMKM; kemandirian keuangan daerah. Selanjutnya misi ini juga bertujuan untuk percepatan pemerataan hasil-hasil pembangunan, meningkatkan nilai tukar petani, membangun desa, menurunkan penduduk miskin, termasuk di dalamnya penyediaan lapangan kerja yang layak (*decent job*) dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mampu keluar dari kemiskinan.

MISI 3 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan.”

Misi ini bertujuan untuk Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan. Misi ini mencakup upaya-upaya dalam merumuskan kebijakan strategis bagi peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui reformasi birokrasi, ASN yang profesional dan berintegritas, pelayanan publik yang berkualitas, pengelolaan keuangan yg berkualitas, dan pemerintahan berlandaskan IT. Termasuk di dalamnya, upaya perubahan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi. Teknologi informasi yang mendukung penyelenggaraan *good and clean governance* dalam mendukung implementasi kota cerdas sampai pada lini desa.

MISI 4 “Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur di semua Sektor Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pelestarian Lingkungan”

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur di semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan. Adapun sasaran meliputi pembenahan lokasi kumuh, penghijauan, keselamatan transportasi, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan meminimalkan resiko



bencana. Kebijakan strategis bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kualitas air, udara, tutupan lahan, agar berada pada toleransi yang dibutuhkan bagi berlangsungnya kehidupan manusia dan ekosistem di dalamnya; upaya peningkatan penyelesaian masalah persampahan; serta upaya peningkatan mitigasi terhadap potensi kerawanan bencana dan penanganan tanggap darurat termasuk pemulihan pasca bencana . Dengandemikian diharapkan misi ini dapat tercapai.

5.3 TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk terhadap landasan ideal normative dalam penyusunan RPJMD yakni Permendagri No 86 Tahun 2017 menjelaskan, pada dasarnya tahapan selanjutnya dari penyusunan RPJMD adalah perumusan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan Sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan. Hal yang dimaksud sebagai tingkat pembangunan tertinggi adalah dimana tolok ukur pembangunan dapat direpresentasikan melalui capaian Tujuan dan Sasaran. Oleh karena itu, sarat utama Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah measurable dan tangible.

Measurable dalam perumusan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah dalam perumusannya, Tujuan dan Sasaran RPJMD harus dapat diukur. Hal tersebut seperti yang kita kenal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilevel Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang melekat pada level Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan *Tangible* yang dimaksud adalah Tujuan dan Sasaran RPJMD hasilnya nyata dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik nyata dalam representasi keberhasilan pencapaian IKU dan IKD maupun nyata dalam kegagalan pencapaian IKU dan IKD.

Berikut merupakan rumusan Tujuan dan Sasaran beserta Indikatornya pada RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026:



Tabel 5.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Mojokerto

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan										
1.1		Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,83	74,33	75,03	75,73	76,23	76,93	77,63	77,63	Kepala Daerah
			Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,88	13,05	13,11	13,17	13,23	13,29	13,35	13,35	Dinas Pendidikan
				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,51	8,64	8,88	9,12	9,36	9,60	9,84	9,84	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	Angka Harapan Hidup (AHH)	72,53	72,63	72,73	72,83	72,93	73,03	73,12	73,12	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Daya Beli	0.776	0.78	0.789	0.798	0.801	0.81	0.819	0.819	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Gender	91,1	90,02	90,04	90,06	90,08	90,1	90,12	90,12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
1.2				Indeks Kesalehan Sosial	64,70	65,38	66,06	66,74	67,42	68,10	68,78	68,78	Kepala Daerah



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69,48	70,68	71,88	73,08	74,28	75,48	76,68	76,68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
2		Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan											
2.1		Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah		Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,1	0.01-2.35	1.17-4.70	3.53-5.29	4.41-5.88	4.52-5.99	4.63-6.10	4.63-6.10	Kepala Daerah
			Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	44,708,444.30	45,003,318.80	47,019,003.40	49,841,586.20	53,203,929.30	56,850,929.40	60,809,848.20	60,809,848.20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
				PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	8,254,290.30	8,743,296.10	9,117,355.00	9,645,136.90	10,276,739.30	10,962,580.70	11,707,820.10	11,707,820.10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan;



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
				PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6,522,865.30	6,668,825.10	6,862,644.60	7,236,622.60	7,687,741.30	8,178,544.00	8,712,762.20	8,712,762.20	Dinas Pertanian; Dinas Pangan dan Perikanan
			Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2.50%	2,5%	2,69%	2,83%	2,96%	3,09%	3,21%	3,21%	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	Nilai Realisasi Investasi	N/A	3.187.916.340.000	3.339.721.880.000	3.491.527.420.000	3.643.332.960.000	3.795.138.500.000	3.946.944.040.000	3.946.944.040.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase Peningkatan Laba BUMD	4,04 %	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
			Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM	N/A	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
			Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	37.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	Badan Pendapatan Daerah
2.2				Indeks Gini	0,33	0,322	0,317	0,312	0,309	0,304	0,299	0,299	Kepala Daerah
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri	Nilai Tukar Petani (NTP)	116,67	116,69	116,71	116,73	116,75	116,77	116,79	116,79	Dinas Pertanian
			Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0.715	0.738	0.750	0.769	0.785	0.800	0.816	0.816	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Persentase penduduk miskin	10,57	10,37	9,97	9,77	9,57	9,37	9,17	9,17	Dinas Sosial
			Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,75	5,62	5,42	5,09	4,76	4,43	4,10	4,10	Dinas Tenaga Kerja



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
3			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan										
3.1			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70(B)	70.00(B)	70.5(BB)	71.00(BB)	71.50(BB)	72.00(BB)	72.50(BB)	72.50(BB)	Kepala Daerah
			Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73.05	81.00	81.00	81.50	82.00	82.50	83.00	83.00	BKPP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.05	82.00	84.00	85.00	86.00	87.00	88.00	88.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kecamatan; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Sekretariat DPRD
			Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai Sakip	75.38(BB)	76.00(BB)	78.00 (BB)	80.50(A)	81.00(A)	81.50(A)	82.00(A)	82.00(A)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
			Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	N/A	70.00	70.10	70.20	70.30	70.40	70.50	70.50	Inspektorat
			Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00	2.50	2.60	2.70	2.90	3.00	3.20	3.20	Dinas Komunikasi dan Informatika
4			Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan										
4.1			Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Indeks Infrastruktur	N/A	13.019	13.089	13.160	13.233	13.304	13.374	13.374	Kepala Daerah



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Lokasi Kumuh yang tertangani	0% Lokasi kumuh	2,52 % Lokasi kumuh	3,18 % Lokasi kumuh	3,18 % Lokasi kumuh	3,18 % Lokasi kumuh	3,18 % Lokasi kumuh	3,18 % Lokasi kumuh	18,44 % Lokasi kumuh	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Penanganan RTH	13,92%	14,56%	16,40%	18,39%	20,54%	22,84%	25,30%	25,30%	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi	4,30	5,10	6,21	7,46	8,52	9,67	10,74	10,74	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
			Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	71.38%	71.88%	72.38%	72.88%	73.38%	73.88%	74.38%	74.38%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	IKLH	64.158	63,88	64,20	64,53	64,86	65,20	65,52	65,52	Dinas Lingkungan Hidup
			Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	120,70	117,68	114,67	111,65	108,63	105,61	102,60	102,60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN dan PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH



Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah untuk menumbuhkan ketahanan dan sikap kemandirian anggota masyarakat serta peningkatan peran segenap unsure masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan, meningkatkan kepercayaan kepada penyelenggara pemerintah daerah, mewujudkan keamanan dan ketentraman serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah.

6.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah.



Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Kabupaten Mojokerto

Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1 Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan		
Tujuan 1: Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK	Strategi 1.1.1 a) Peningkatan akses pendidikan b) Peningkatan kualitas, profesionalisme, kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan c) Peningkatan kualitas Manajemen Pelayanan Pendidikan d) Peningkatan mutu teknologi informasi dan komunikasi pendidikan
	Sasaran 1.1.2 Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yg berkualitas, mudah dan terjangkau secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular spt pademi Covid 19	Strategi 1.1.2 a) Peningkatan status kesehatan keluarga b) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan c) Peningkatan upaya promotif dan preventif Kesehatan d) Peningkatan kualitas Fasilitas Kesehatan
	Sasaran 1.1.3 Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	Strategi 1.1.3.1 Melakukan upaya untuk menstabilkan harga dan akses masyarakat miskin dan berdaya beli rendah thdp barang2 kebutuhan pokok



Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Strategi 1.1.3.2 Melakukan pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap Pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal tsb diatas dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.
	Sasaran 1.1.4 Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Strategi 1.1.4 a) Pengarusutamaan gender b) Peningkatan dan perlindungan tumbuh kembang anak c) Peningkatan kualitas hidup perempuan d) Pengendalian penduduk melalui Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
	Sasaran 1.2.1 Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Strategi 1.2.1 Melakukan upaya pencegahan thdp kemungkinan terjadinya konflik



Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 2: Membangun kemandirian ekonomi yg berdimensi kerakyatan		
Tujuan 2.1: Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yg berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Sasaran 2.1.1 Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	Strategi 2.1.1 <ol style="list-style-type: none"> Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani dan Masyarakat Pengguna hasil pertanian Pengembangan kapasitas dan kelembagaan ekonomi kreatif berbasis Nilai Budaya Lokal. Adalah strategi untuk membangun ekosistem kelembagaan ekonomi produktif di daerah melalui pengembangan SDM, pemenuhan infrastruktur pengembangan, dan sinergi kebijakan antar sektor, untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi jangka menengah dan panjang serta memperkuat basis ekonomi daerah secara berkelanjutan
	Sasaran 2.1.2 Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	Strategi 2.1.2 <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan destinasi dan promosi wisata Peningkatan industri dan SDM Pariwisata Akselerasi dan integrasi kepariwisataan Pemulihan Pariwisata. Adalah strategi untuk tetap menjaga agar usaha sektor pariwisata tetap berjalan



Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi
		dan memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitarnya. Sektor pariwisata selain membantu meningkatkan pendapatan juga berdampak langsung terhadap pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitarnya, sehingga sangat strategis untuk dijaga kelangsungan hidupnya.
	Sasaran 2.1.3 Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	Strategi 2.1.3 Mempermudah layanan perijinan untuk meningkatkan investasi
	Sasaran 2.1.4 Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Strategi 2.1.4.1 a. Meningkatkan upaya pemulihan dan pengembangan Koperasi Sehat dan UMKM yang mandiri, serta hasil produk yang berdaya saing dan terserap pasar melalui kolaborasi pentahelix pemerintah, masyarakat, swasta, media dan akademisi b. Pemulihan dan Pemberdayaan Ekonomi. Adalah strategi untuk melakukan pemulihan (normalisasi) kegiatan ekonomi daerah baik oleh industri menengah dan besar, maupun berjalannya proses pemberdayaan usaha mikro dan kecil semua jenis usaha secara berkelanjutan.
		Strategi 2.1.4.2



Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi
		Pemberlakuan kewajiban bagi setiap pelaku usaha makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi produk makanan dan minumannya, seperti sertifikasi halal
	Sasaran 2.1.5 Optimalisasi peningkatan PAD	Strategi 2.1.5 Meningkatkan PAD untuk menekan ketergantungan terhadap dana Pusat melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
	Sasaran 2.2.1 Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri	Strategi 2.2.1 Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir , serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada Petani dan Masyarakat Pengguna hasil pertanian
	Sasaran 2.2.2 Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Strategi 2.2.2 Peningkatan pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat desa
	Sasaran 2.3.1 Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Strategi 2.3.1.1 Pengembangan dan penguatan kapasitas PPKS dalam upaya penanganan PMKS Strategi 2.3.1.2



Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
Tujuan	Sasaran	Strategi
		Melakukan perencanaan pemenuhan dan perlindungan penyandang disabilitas
	Sasaran 2.3.2 Penurunan angka pengangguran	Strategi 2.3.2.1 a) Peningkatan kualitas produktivitas dan kompetensi tenaga kerja b) Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja c) Peningkatan efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan		
Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan dan optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber2 pendapatan daerah	Sasaran 3.1 Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	Strategi 3.1 Peningkatan kinerja ASN yang profesional, berintegritas dan berkapasitas berdasarkan sistem merit
	Sasaran 3.2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Strategi 3.2 Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat dan bermanfaat untuk masyarakat
	Sasaran 3.3 Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Strategi 3.3 Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja birokrasi



Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi
	Sasaran 3.4 Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Strategi 3.4 Peningkatan sistem pengawasan yang efektif untuk menghasilkan birokrasi yg akuntabel, bersih dan berintegritas serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)
	Sasaran 3.5 Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Strategi 3.5 Upaya penataan pengelolaan keuangan seluruh Perangkat Daerah berdasar standar akuntansi pemerintah
	Sasaran 3.6 Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Strategi 3.6 Upaya pengembangan sistem informasi dengan ditunjang srana dan partasaran IT yang memadai
Misi 4: Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan		
Tujuan 4 Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan	Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Strategi 4.1 Upaya meminimalisasi rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh



Visi: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur melalui Penguatan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan	Sasaran	Strategi
infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Sasaran 4.2 Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	Strategi 4.2 Upaya pemanfaatan lahan2 untuk penghijauan
	Sasaran 4.3 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Strategi 4.3 Upaya mengembangkan keterhubungan transportasi antar pusat-pusat pertumbuhan kecamatan yang aman
	Sasaran 4.4 Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Strategi 4.4 Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas insfrastruktur jalan, jembatan dan irigasi
	Sasaran 4.5 Terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	Strategi 4.5 Upaya penataan sarana dan prasarana lingkungan hidup mengikuti perkembangan regulasi sebagaimana pengaturan aspek lingkungan dalam UU Cipta Kerja
	Sasaran 4.6 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Strategi 4.6 Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan desa agar sadar akibat bencana alam



6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Arah kebijakan merupakan keputusan dari *stakeholders* sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi terpilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Strategi yang terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi, membentuk cerita atau skenario strategi yang kemudian menjadi arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya. Arah kebijakan adalah pedoman yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan. Arah kebijakan memberikan pedoman dan arahan pembangunan prioritas tahunan untuk apa yang harus dilakukan yang kemudian dijadikan tema RKPD. Berikut arah kebijakan tahunan Kabupaten Mojokerto:

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mojokerto

Arah Kebijakan				
2022	2023	2024	2025	2026
Pemulihan dan Pengembangan Perekonomian Daerah dengan Pemerataan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas SDM melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan dilandasi Nilai Keimanan dan Ketqwaan				



6.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Kepala daerah yang dijabarkan selanjutnya adalah program prioritas II, sedangkan program prioritas I dan III lainnya ada di Bab VII. Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran tema atau agenda pembangunan daerah tahunan yang menjadi tonggak untuk mencapai sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui rencana program pembangunan tahunan daerah.

Tabel 6.3
Program Prioritas Bupati terpilih

I. MOJOKERTO MAJU		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik ▪ Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah ▪ Optimalisasi pelaksanaan PHBS
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pembangunan infrastruktur desa ▪ Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau <i>e-government</i>
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan ▪ Pengelolaan wisata secara integratif dengan pendekatan <i>smart tourism</i> ▪ Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat ▪ Pembangunan stadion sepak bola dan GOR yang berstandar internasional
II. MOJOKERTO ADIL		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta ▪ Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah ▪ Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi Covid-19 ▪ Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama
2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rp. 15 juta bantuan bedah rumah
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BK desa sampai dengan 5 Milyar per desa ▪ ADD Rp 600 juta per desa ▪ Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna ▪ Program pesantrenpreneur dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri
III. MOJOKERTO MAKMUR		
1	MOJOKERTO CERDAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beasiswa bagi siswa berprestasi tidak mampu



2	MOJOKERTO SEHAT	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan
3	MOJOKERTO INDAH	<ul style="list-style-type: none">▪ Pembangunan ruang terbuka hijau dan taman bermain anak di setiap kecamatan
4	MOJOKERTO AMAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Optimalisasi BAZNAS Kab Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial▪ Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR▪ Pembangunan infrastruktur
5	MOJOKERTO BERKAH	<ul style="list-style-type: none">▪ Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan▪ Program kerja sama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil▪ Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani.▪ Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa

Program prioritas yang dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis menurut misi adalah sebagai berikut:

- **Misi 1: SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan**
- **Program Politis Misi ke 1**
 1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta kualitas pendidik
 2. Peningkatan kualitas anak didik melalui integrasi pendidikan formal dan non formal
 3. Pemberian insentif guru TPQ dan guru swasta
 4. Biaya sekolah gratis bagi pelajar tingkat dasar dan menengah
 5. Pemberian kuota internet gratis bagi siswa dan guru selama pandemi Covid-19
 6. Peningkatan infrastruktur rumah ibadah dan tempat pendidikan agama
 7. Peningkatan kualitas sarana, prasarana dan pelayanan Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah
 8. Optimalisasi pelaksanaan PHBS
 9. Peningkatan pelayanan kesehatan pada 1000 HPK untuk mencegah stunting
 10. Mengutamakan pencegahan penyakit dalam pemanfaatan sumber daya kesehatan



- **Program Nomenklatur Misi ke 1**

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
6. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
7. Program Perlindungan Perempuan
8. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
9. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
10. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
11. Program Perlindungan Khusus Anak
12. Program Pengendalian Penduduk
13. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
14. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
15. Program Pembinaan Perpustakaan
16. Program Pengelolaan Arsip
17. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
18. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

- **Misi 2: Membangun kemandirian ekonomi yg berdimensi kerakyatan**

- **Program Politis Misi ke 2**

1. Pengelolaan wisata secara integrative dengan pendekatan smart tourism
2. Peningkatan akurasi data dan penanganan PMKS
3. BK desa sampai dengan 5 Milyar per desa
4. ADD Rp 600 juta per desa
5. Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna
6. Program pesantren preneur dalam rangka menciptakan wirausaha mandiri
7. Optimalisasi BAZNAS Kabupaten Mojokerto dalam membantu penyelesaian permasalahan sosial
8. Mengoptimalkan peran swasta dalam pembangunan daerah dalam bentuk CSR



9. Program kerjasama dengan sektor usaha untuk mencetak tenaga kerja terampil
 10. Peningkatan kualitas hasil pertanian melalui revitalisasi kesuburan tanah, pemanfaatan bibit unggul bersertifikat, dan optimalisasi kelembagaan petani.
 11. Menciptakan lapangan kerja melalui bantuan modal usaha BUMDesa
- **Program Nomenklatur Misi ke 2**
 1. Program Pemberdayaan Sosial
 2. Program Rehabilitasi Sosial
 3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 4. Program Penanganan Bencana
 5. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 6. Program Penempatan Tenaga Kerja
 7. Program Hubungan Industrial
 8. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 9. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 10. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 11. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
 13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 14. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 15. Program Penataan Desa
 16. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 17. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 18. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
 19. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
 20. Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi
 21. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 22. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 23. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 24. Program Pengembangan UMKM
 25. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal



26. Program Promosi Penanaman Modal
27. Program Pelayanan Penanaman Modal
28. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
29. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
30. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
31. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
32. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
33. Program Pengembangan Kebudayaan
34. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
35. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
36. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
37. Program Pemasaran Pariwisata
38. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
39. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
40. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
41. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
42. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
43. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
44. Program Perizinan Usaha
45. Program Penyuluhan Pertanian
46. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
47. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
48. Program Pengembangan Ekspor
49. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
50. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
51. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
52. Program Perekonomian dan Pembangunan

- **Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan**
- **Program Politis Misi ke 3**
 1. Pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-Government



2. Menjadikan Kabupaten Mojokerto sebagai Kabupaten Percontohan

- **Program Nomenklatur Misi ke 3**

1. Program Pendaftaran Penduduk
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
4. Program Informasi dan Komunikasi Publik
5. Program Aplikasi Informatika
6. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor
7. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
8. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
9. Program Perekonomian dan Pembangunan
10. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
11. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
12. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
13. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
15. Program Penyelenggaraan Pengawasan
16. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
17. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
18. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
19. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
20. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
21. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
22. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
23. Program Kepegawaian Daerah
24. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- **Misi 4: Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan**

- **Program Politis Misi ke 4**

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur desa



2. Pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga dan industri serta peningkatan tata kelola TPA
 3. Pembangunan pusat kewirausahaan untuk UMKM di tiap Kecamatan
 4. Rehabilitasi pasar tradisional yang kumuh menjadi pasar sehat
- **Program Nomenklatur Misi ke 4**
 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 6. Program Penataan Bangunan Gedung
 7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 8. Program Penyelenggaraan Jalan
 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
 10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 11. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 12. Program Pengembangan Perumahan
 13. Program Kawasan Permukiman
 14. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 15. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 16. Program Penanggulangan Bencana
 17. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan NonKebakaran
 18. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 19. Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 20. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 21. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 22. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 23. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 24. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 25. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat



26. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
27. Program Pengelolaan Persampahan

Berikut Program prioritas yang dikelompokkan berdasarkan isu-isu strategis menurut misi adalah sebagai berikut:

Tabel 6.4
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi 1 : SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan																	
Tujuan 1.1	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.83	74.33		75.03		75.73		76.23		76.93		77.63		77.63		
Sasaran 1.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan kemanfaatan IPTEK	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.88	13.05		13.11		13.17		13.23		13.29		13.35		13.35		
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.51	8.64		8.88		9.12		9.36		9.6		9.84		9.84		
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	80.00%	80.00%	184,939,968,700	80.00%	203,433,965,570	80.00%	223,777,362,127	80.00%	246,155,098,340	80.00%	270,770,608,174	80.00%	289,177,688,622	80.00%	1,233,314,722,833	Dinas Pendidikan
		APM SD	75.00%	75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		Dinas Pendidikan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		APM SLTP	75.00%	75.00 %		75.00 %		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		Dinas Pendidikan
		APM KESETARAAN	15.00%	15.00 %		15.00 %		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		Dinas Pendidikan
JUMLAH TOTAL					184,939,968,700		203,433,965,570		223,777,362,127		246,155,098,340		270,770,608,174		289,177,688,622		1,233,314,722,833	
Sasaran 1.1.2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah dan terjangkau Secara adil dan merata melalui upaya pencegahan khususnya penyakit menular seperti pandemi Covid 19	Angka Harapan Hidup (AHH)	72.53	72.63		72.73		72.83		72.93		73.03		73.12		73.12		
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)	115 jiwa	115 jiwa	72,022,906	114 jiwa	78,150,011,537	113 jiwa	95,866,229,000	112 jiwa	120,099,786,750	111 jiwa	124,537,211,889	110 jiwa	129,342,791,115	110 jiwa	547,996,030,291	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB per 1.000 Kelahiran Hidup)	4.6 jiwa	4.6 jiwa		4.5 jiwa		4.4 jiwa		4.3 jiwa		4.2 jiwa		4.1 jiwa		4.1 jiwa		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Persentase Stunting	25.00%	25.00 %		23.00 %		21.00%		19.00%		17.00%		15.00%		15.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna	-	-		11.80 %; 5 puskes mas; 2 RS		34.00% ; 10 puskes mas		51.00% ; 15 puskes mas		75.00% ; 20 puskes mas; 2 RD		100.00 %; 27 puskes mas; 2 RD		100.00 %; 27 puskes mas; 2 RD		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase KLB yang Ditangani	72.00% ; 219 desa	72.00 %; 219 desa		64.00 %; 194 desa		56.00% ; 169 desa		47.00% ; 144 desa		39.00% ; 119 desa		31.00% ; 94 desa		31.00% ; 94 desa		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase ODF	60.00%	60.00 %		70.00 %		80.00%		90.00%		100.00 %		100.00 %		100.00 %		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa		swastisaba padapa		swastisaba padapa		swastisaba wiwerda		swastisaba wiwerda		swastisaba wistara		swastisaba wistara		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Persentase Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan : R. Jalan dan R. Inap	61.50% ; 6.30%	61.50 %; 6.30%		62.50 %; 6.40%		62.50% ; 6.40%		63.50% ; 6.40%		64.50% ; 6.50%		65.50% ; 6.60%		65.50% ; 6.60%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	66.00%	66.00 %		75.00 %		75.00%		84.00%		91.00%		100.00 %		100.00 %	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan Jenis dan Jumlah Obat sesuai Standar	90.00%	90.00 %		90.00 %		90.00%		91.00%		92.00%		93.00%		93.00%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan Alkes sesuai Standar	90.00%	90.00 %		90.00 %		90.00%		91.00%		92.00%		93.00%		93.00%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	70.00%	70.00 %	970,000,000	75.00 %	3,050,000,000	80.00%	3,050,000,000	85.00%	3,050,000,000	90.00%	3,050,000,000	90.00%	3,050,000,000	90.00%	15,250,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotik, Toko Obat, UMOT dan PIRT yang Memenuhi Standar Kesehatan :			452,449,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000		580,000,000		2,780,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Apotik (96 Apotik)	15.00%	15.00 %		30.00 %		45.00%		60.00%		75.00%		100.00 %		100.00 %		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Toko Obat (2 Toko Obat)	100.00 %	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		UMOT (1 UMOT)	100.00 %	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		PIRT (1900)	1300; 68.00%	1300; 68.00 %		1420; 74.00 %		1540; 81.00%		1660; 87.00%		1780; 93.00%		1900; 100.00 %		1900; 100.00 %		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Syarat / Standar Kesehatan	20.00%	20.00 %		20.00 %		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		93.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	72.00%	72.00 %	1,044,500,000	72.00 %	850,000,000	73.00%	850,000,000	74.00%	850,000,000	75.00%	850,000,000	76.00%	850,000,000	76.00%	4,250,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg Aktif	80.90%	80.90 %		81.90 %		82.90%		83.90%		84.90%		85.90%		85.90%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	madya	madya	95,504,000,000	utama	95,504,000,000	utama	78,079,000,000	utama	74,510,000,000	paripurna	79,531,000,000	paripurna	82,150,000,000	paripurna	409,774,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	75.00%	75.00 %		75.00 %		75.00%		84.00%		91.00%		100.00 %		100.00 %	-	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	madya	madya	95,504,000,000	utama	95,504,000,000	utama	78,079,000,000	utama	53,510,000,000	paripurna	51,531,000,000	paripurna	52,150,000,000	paripurna	330,774,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	75.00%	75.00 %		75.00 %		75.00%		84.00%		91.00%		100.00 %		100.00 %	-	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
JUMLAH TOTAL					193,546,971,906		273,608,011,537		256,474,229,000		252,569,786,750		260,049,211,889		268,122,791,115		1,310,824,030,291	
Sasaran 1.1.3	Meningkatnya akses keterjangkauan daya beli masyarakat terhadap 9 kebutuhan pokok masyarakat	Indeks Daya Beli	77.60%	78.00%		78.90%		79.80%		80.10%		81.00%		81.90%		81.90%		
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terstandar	92.86%	92.86%	5,671,525,000	93.00%	5,671,525,000	93.00%	6,068,531,750	93.00%	6,493,328,973	93.00%	6,947,862,001	93.00%	7,434,212,341	93.00%	32,615,460,065	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	27.00%	27.00%	150,250,000	29.00%	150,250,000	29.00%	165,275,000	29.00%	210,080,000	29.00%	265,000,000	29.00%	320,000,000	29.00%	1,110,605,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH TOTAL					5,821,775,000		5,821,775,000		6,233,806,750		6,703,408,973		7,212,862,001		7,754,212,341		33,726,065,065	
Sasaran 1.1.4	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Gender	91.1	90.02		90.04		90.06		90.08		90.1		90.12		90.12		
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100.00%	100.00%	470,000,000	100.00%	420,000,000	100.00%	470,000,000	100.00%	480,000,000	100.00%	490,000,000	100.00%	500,000,000	100.00%	2,360,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab
				Tahun-0 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana	80.55%	80.55 %	9,319,510,000	80.56 %	9,089,510,000	80.57%	9,189,510,000	80.58%	9,189,510,000	80.59%	9,189,510,000	80.60%	9,189,510,000	80.60%	45,847,550,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97.55%	97.55 %	1,507,400,000	97.81 %	2,463,000,000	97.86%	2,607,400,000	97.91%	2,707,400,000	97.97%	2,807,400,000	98.02%	2,907,400,000	98.02%	13,492,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	79.57%	79.57 %	310,000,000	80.36 %	310,000,000	82.14%	310,000,000	83.93%	310,000,000	85.71%	310,000,000	87.50%	310,000,000	87.50%	1,550,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan	100.00 %	100.00 %	586,668,000	100.00 %	395,489,000	100.00 %	395,489,000	100.00 %	395,489,000	100.00 %	395,499,000	100.00 %	395,499,000	100.00 %	1,977,465,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa	16.45%	16.45 %	100,000,000	38.89 %	100,000,000	49.34%	100,000,000	65.79%	100,000,000	82.23%	100,000,000	98.68%	100,000,000	98.68%	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	89.58%	89.58 %	100,000,000	91.67 %	100,000,000	93.75%	100,000,000	95.83%	100,000,000	97.92%	100,000,000	100.00 %	100,000,000	100.00 %	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak	27.78%	27.78 %	268,267,400	33.33 %	268,267,400	38.89%	268,267,400	44.44%	268,267,400	50.00%	368,267,400	55.56%	368,267,400	55.56%	1,541,337,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	6.58%	6.58%		8.55%		10.56%		12.50%		14.47%		16.45%		16.45%		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	39.62%	39.62 %	499,310,000	40.74 %	590,489,000	41.82%	590,489,000	42.86%	590,489,000	43.86%	590,489,000	44.83%	590,489,000	44.83%	2,952,445,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
JUMLAH TOTAL					13,161,155,400		13,736,755,400		14,031,155,400		14,141,155,400		14,351,165,400		14,461,165,400		70,721,397,000	
		Indeks Kesalehan Sosial	64.7	65.38		66.06		66.74		67.42		68.1		68.78		68.78		
Sasaran 1.1.5	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69.48	70.68		71.88		73.08		74.28		75.48		76.68		76.68		
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84.50%	84.50 %	460,000,000	85.00 %	760,000,000	85.05%	813,200,000	85.07%	870,124,000	85.09%	931,032,680	85.15%	996,204,968	85.15%	4,370,561,648	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Partisipasi Masyarakat	78.66%	78.66 %	400,000,000	78.67 %	400,000,000	78.68%	428,000,000	78.69%	856,000,000	78.70%	1,560,017,200	78.71%	1,669,218,404	78.71%	4,913,235,604	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97.05%	97.05 %	2,417,104,357	97.05 %	2,417,104,357	97.07%	2,586,301,662	97.09%	2,767,342,778	97.13%	2,961,056,773	97.15%	3,168,330,747	97.15%	13,900,136,317	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pencegahan Konflik Umat Beragama	20.00%	20.00 %	145,000,000	15.00 %	445,000,000	13.50%	476,150,000	12.50%	509,480,500	10.50%	545,144,135	10.00%	583,304,224	10.00%	2,559,078,859	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	89.00%	89.00 %	1,093,760,000	88.95 %	1,093,760,000	88.93%	1,320,323,200	88.91%	1,412,745,824	88.90%	1,511,638,032	88.85%	1,617,452,694	88.85%	6,955,919,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani	90.00%	90.00 %	4,611,000,000	90.00 %	4,611,000,000	90.00%	4,933,770,000	90.00%	5,279,133,900	90.00%	5,648,673,273	90.00%	5,648,673,273	90.00%	26,121,250,446	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	90.00%	90.00 %		90.00 %		90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Anggota Satlinmas yang Terlatih	30.00%	30.00 %		35.00 %		40.00%		45.00%		50.00%		55.00%		55.00%		Satuan Polisi Pamong Praja
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dievaluasi	98.00%	98.00 %	14,285,500,000	98.00 %	15,100,500,000	98.00%	16,157,535,000	98.00%	17,288,562,450	98.00%	18,498,761,822	98.00%	19,793,675,149	98.00%	86,839,034,421	Bagian Kesejahteraan Rakyat
JUMLAH TOTAL					23,412,364,357		24,827,364,357		26,715,279,862		28,983,389,452		31,656,323,915		33,476,859,459		145,659,217,045	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Misi 2 : Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan																	
Tujuan 2.1	Mewujudkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustri, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1.1	0.01 - 2.35		1.17 - 4.70		3.53 - 5.29		4.41 - 5.88		4.52 - 5.99		4.63 - 6.10		4.63 - 6.10		
Sasaran 2.1.1	Meningkatnya daya saing ekonomi melalui optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya unggulan lokal menuju perekonomian daerah	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	44,708,444	45,003,319		47,019,003		49,841,586		53,203,929		56,850,929		60,809,848		312728615.3		
		PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	8,254,290	8,743,296		9,117,355		9,645,137		10,276,739		10,962,581		11,707,820		60,452,928		
		PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6,522,865	6,668,825		6,862,645		7,236,623		7,687,741		8,178,544		8,712,762		45,347,140		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang Memiliki Fasilitas Pemenuhan Komitmen	-	-	-	10.00 %	20,000,000	15.00%	20,000,000	20.00%	20,000,000	25.00%	20,000,000	30.00%	20,000,000	30.00%	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	5.00%	5.00%	383,890,000	5.00%	383,890,000	15.00%	404,000,000	16.00%	414,000,000	16.00%	424,000,000	17.00%	424,000,000	17.00%	2,049,890,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Uttp Bertanda Tera Sah Yg Berlaku	94.37%	94.37 %	1,665,030,000	94.00 %	1,665,030,000	94.00%	1,781,582,100	95.00%	1,906,292,847	95.00%	2,039,733,346	95.00%	2,182,514,681	95.00%	9,575,152,974	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Umkm yang Berkembang Omzetnya	60.00%	60.00 %	667,781,000	60.00 %	667,781,000	60.00%	690,000,000	61.00%	756,000,000	60.00%	801,000,000	60.00%	650,000,000	60.00%	3,564,781,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	1.00%	1.00%	1,794,106,317	1.00%	1,184,403,634	2.00%	1,225,000,000	2.00%	1,325,000,000	3.00%	1,360,000,000	3.00%	1,397,000,000	3.00%	6,491,403,634	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laport Data Industri	-	-	-	50.00 %	116,862,000	55.00%	118,862,000	60.00%	119,862,000	65.00%	128,252,340	70.00%	137,230,004	70.00%	621,068,344	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	-	-	-	45.00 %	200,000,000	50.00%	220,000,000	55.00%	240,000,000	60.00%	260,000,000	70.00%	280,000,000	70.00%	1,200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	47.00%	47.00%	555,000,000	47.00%	1,115,000,000	47.00%	1,006,500,000	48.00%	1,079,100,000	49.00%	1,157,557,000	49.00%	1,242,380,000	49.00%	5,600,537,000	Dinas Pertanian
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terfasilitasi	-	-	-	90.00%	18,000,000	90.00%	19,800,000	95.00%	21,500,000	95.00%	23,700,000	95.00%	25,900,000	95.00%	108,900,000	Dinas Pertanian
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Diberdayakan	0.50%	0.50%	285,000,000	0.50%	304,950,000	0.50%	326,296,500	0.50%	349,137,255	0.50%	373,576,863	0.50%	399,727,243	0.50%	1,753,687,861	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	0.50%	0.50%	930,000,000	0.50%	995,100,000	0.50%	1,064,757,000	0.50%	1,139,289,990	0.50%	1,219,040,289	0.50%	1,304,373,110	0.50%	5,722,560,389	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.09.03	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	10.00%	10.00%	530,000,000	20.00%	795,000,000	40.00%	850,650,000	60.00%	910,195,500	80.00%	973,909,185	100.00%	1,000,000,000	100.00%	4,529,754,685	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97.00%	97.00%	1,797,705,693	97.00%	1,977,476,262	97.00%	2,189,066,222	98.00%	2,423,296,308	98.00%	2,682,589,013	98.00%	2,969,626,038	98.00%	12,242,053,843	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	2.00%	2.00%	150,000,000	8.00%	210,000,000	17.00%	210,000,000	25.00%	210,000,000	33.00%	210,000,000	42.00%	210,000,000	42.00%	1,050,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90.00%	90.00 %	125,000,000	50.00 %	380,000,000	70.00%	385,000,000	80.00%	385,000,000	100.00 %	390,000,000	100.00 %	390,000,000	100.00 %	1,930,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2.00%	2.00%	39,800,000	2.00%	230,000,000	2.00%	230,000,000	2.00%	242,000,000	3.00%	242,000,000	3.00%	250,000,000	3.00%	1,194,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5.00%	5.00%	1,145,767,000	10.00 %	1,100,000,000	10.00%	1,105,000,000	10.00%	1,108,000,000	10.00%	1,116,000,000	10.00%	1,119,000,000	10.00%	5,548,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.00%	2.00%	478,070,000	2.00%	700,000,000	2.00%	704,000,000	2.00%	705,000,000	2.00%	710,000,000	2.00%	711,000,000	2.00%	3,530,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
JUMLAH TOTAL					10,547,150,010		12,063,492,896		12,550,513,822		13,353,673,900		14,131,358,036		14,712,751,076		66,811,789,730	
Sasaran 2.1.2	Meningkatnya pengembangan pariwisata (pariwisata sejarah, eco-tourism dll)	Persentase Peningkatan PAD Pariwisata	2.50%	2,5%		2,69%		2,83%		2,96%		3,09%		3,21%		3,21%		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	40.00%	40.00 %	3,075,000,000	40.00 %	4,420,000,000	40.00%	4,960,000,000	40.00%	4,956,425,000	40.00%	4,520,475,000	40.00%	4,236,178,250	40.00%	23,093,078,250	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	35.00%	35.00 %	675,000,000	35.00 %	1,862,250,000	35.00%	1,505,000,000	35.00%	1,249,000,000	35.00%	1,733,730,000	35.00%	1,530,000,000	35.00%	7,879,980,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase EKRAF yang Dikembangkan	-	-	-	30.00 %	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan SDM Pariwisata dan EKRAF	30.00%	30.00 %	625,000,000	30.00 %	700,000,000	25.00%	485,500,000	32.00%	941,735,000	32.00%	983,756,450	25.00%	546,000,000	25.00%	3,656,991,450	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	10.00%	10.00 %	3,550,000,000	10.00 %	3,265,000,000	10.00%	3,490,050,000	10.00%	3,729,000,000	-	-	10.00%	4,261,880,000	10.00%	14,745,930,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	-	-	-	15.00 %	400,000,000	16.00%	428,000,000	17.00%	458,470,000	18.00%	490,512,900	20.00%	1,964,000,000	20.00%	3,740,982,900	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	7.00%	7.00%	50,000,000	7.00%	600,000,000	7.00%	642,000,000	7.00%	687,450,000	7.00%	735,521,500	8.00%	787,398,005	8.00%	3,452,369,505	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
JUMLAH TOTAL					7,975,000,000		11,347,250,000		11,510,550,000		12,022,080,000		8,463,995,850		13,325,456,255		56,669,332,105	
Sasaran 2.1.3	Meningkatnya pengembangan Jasa Perbankan dan Investasi	Nilai Realisasi Investasi	-	3.187.916.340.000		3.339.721.880.000		3.491.527.420.000		3.643.332.960.000		3.795.138.500.000		3.946.944.040.000		3.946.944.040.000		
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	4.00%	4.00%	130,000,000	5.00%	185,000,000	5.00%	175,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	660,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru yang Masuk	65 investor	65 investor	165,000,000	70 investor	165,000,000	75 investor	165,000,000	80 investor	165,000,000	85 investor	165,000,000	90 investor	165,000,000	90 investor	825,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	79	79	405,000,000	80	265,000,000	81	292,500,000	82	308,500,000	82	326,500,000	82	345,500,000	82	1,538,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab
				Tahun-0 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang Masuk	450 LKPM	450 LKPM	155,000,000	475 LKPM	100,000,000	500 LKPM	106,500,000	525 LKPM	113,000,000	550 LKPM	120,000,000	575 LKPM	127,500,000	575 LKPM	567,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	1.380 izin	1.380 izin	10,000,000	1.400 izin	10,000,000	1.380 izin	10,500,000	1.405 izin	11,000,000	1.430 izin	11,500,000	1.455 izin	12,000,000	1.455 izin	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Peningkatan Laba BUMD	4.04%	1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		1.00%		
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditetapkan	90.00%	90.00%	8,903,051,000	90.00%	2,400,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	12,400,000,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
JUMLAH TOTAL					9,768,051,000		3,125,000,000		3,249,500,000		3,197,500,000		3,223,000,000		3,250,000,000		16,045,000,000	
Sasaran 2.1.4	Meningkatnya pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Koperasi dan UM		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		0.50%		
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	25.00%	25.00%	100,000,000	25.00%	214,000,000	5.00%	228,980,000	5.00%	245,008,600	5.00%	262,159,202	5.00%	280,510,346	5.00%	1,230,658,148	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	25.00%	25.00 %	200,000,000	25.00 %	107,000,000	5.00%	114,490,000	5.00%	122,504,300	5.00%	131,079,601	5.00%	140,255,173	5.00%	615,329,074	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	30.00% ; 0.50%	30.00 %; 0.50%	299,181,000	30.00 %; 0.50%	320,123,670	10.00% ; 0.50%	342,532,327	10.00% ; 0.50%	366,509,590	10.00% ; 0.50%	392,165,261	10.00% ; 0.50%	419,616,829	10.00% ; 0.50%	1,840,947,677	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang telah Diberdayakan dan Dilindungi	5.50%	5.50%	350,000,000	55.00 %	374,500,000	5.00%	400,715,000	5.00%	428,765,050	5.00%	458,778,604	5.00%	490,893,106	5.00%	2,153,651,760	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
JUMLAH TOTAL					949,181,000		1,015,623,670		1,086,717,327		1,162,787,540		1,244,182,668		1,331,275,454		5,840,586,659	
Sasaran 2.1.5	Optimalisasi Peningkatan PAD	Rasio / Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	37.00%	30.00 %		30.00 %		30.00%		30.00%		30.00%		30.00%		30.00%		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100.00 %	100.00 %	7,115,693,405	100.00 %	7,207,172,725	100.00 %	7,711,674,815	100.00 %	8,251,492,052	100.00 %	8,829,096,496	100.00 %	9,447,133,251	100.00 %	41,446,569,339	Badan Pendapatan Daerah
JUMLAH TOTAL					7,115,693,405		7,207,172,725		7,711,674,815		8,251,492,052		8,829,096,496		9,447,133,251		41,446,569,339	
		Indeks Gini	0.33	0.322		0.317		0.312		0.309		0.304		0.299		0.299		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab			
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
Sasaran 2.1.6	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Melalui Pengembangan agro bisnis dan agro industri	Nilai Tukar Petani (NTP)	116.67	116.69		116.71		116.73		116.75		116.77		116.79		116.79			
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	20.00%	20.00%	2,485,000,000	20.00%	2,733,500,000	21.00%	2,924,845,000	22.00%	3,129,584,150	23.00%	3,348,655,041	24.00%	3,583,060,893	24.00%	15,719,645,084	Dinas Pertanian	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20.00%	20.00%	835,000,000	20.00%	1,377,500,000	20.00%	3,162,500,000	20.00%	2,102,000,000	20.00%	2,065,099,000	20.00%	2,444,850,000	20.00%	11,151,949,000	Dinas Pertanian	
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	60.00%	60.00%	340,000,000	60.00%	845,000,000	60.00%	929,500,000	60.00%	977,700,000	60.00%	1,026,525,000	60.00%	1,078,685,000	60.00%	4,857,410,000	Dinas Pertanian	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	3.50%	3.50%	1,373,035,000	4.00%	3,171,250,000	4.00%	3,356,875,000	5.00%	3,240,220,000	5.00%	3,088,250,000	5.00%	3,301,250,000	5.00%	16,157,845,000	Dinas Pertanian	
JUMLAH TOTAL						5,033,035,000		8,127,250,000		10,373,720,000		9,449,504,150		9,528,529,041		10,407,845,893		47,886,849,084	
Sasaran 2.1.7	Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat di Desa Melalui Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Angka Indeks Desa Membangun (IDM)	0.7114	0.738		0.07535		0.769		0.7845		0.8		0.8156		0.8156			
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang Dilaksanakan	20.00%	20.00%	250,000,000	20.00%	250,000,000	20.00%	300,000,000	20.00%	350,000,000	20.00%	350,000,000	20.00%	400,000,000	20.00%	1,650,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	10.00%	10.00 %	290,000,000	10.00 %	450,000,000	10.00%	490,000,000	10.00%	550,000,000	10.00%	550,000,000	10.00%	650,000,000	10.00%	2,690,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Mekanisme Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Tepat	90.00%	90.00 %	8,600,000,000	90.00 %	9,460,000,000	91.00%	10,650,000,000	91.00%	11,525,000,000	92.00%	12,400,000,000	92.00%	12,850,000,000	92.00%	56,885,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat yang Aktif	72.00%	72.00 %	2,855,000,000	85.00 %	3,775,000,000	86.00%	4,225,000,000	87.00%	4,625,000,000	88.00%	5,000,000,000	89.00%	5,350,000,000	89.00%	22,975,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	70.00%	70.00 %		72.00 %		74.00%		76.00%		78.00%		80.00%		80.00%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
JUMLAH TOTAL					11,995,000,000		13,935,000,000		15,665,000,000		17,050,000,000		18,300,000,000		19,250,000,000		84,200,000,000	
Sasaran 2.1.8	Sistem perlindungan sosial dalam penanganan PPKS	Persentase Penduduk Miskin	10.57	10.37		9.97		9.77		9.57		9.37		9.17		9.17		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	85.00%	85.00 %	1,475,000,000	100.00 %	1,578,250,000	100.00 %	1,688,727,500	100.00 %	1,806,938,425	100.00 %	1,933,424,115	100.00 %	2,068,763,803	100.00 %	9,076,103,843	Dinas Sosial
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	85.00%	85.00 %	1,275,000,000	100.00 %	1,364,250,000	100.00 %	1,459,747,500	100.00 %	1,561,929,825	100.00 %	1,671,264,913	100.00 %	1,788,253,457	100.00 %	7,845,445,695	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85.00%	85.00 %	1,325,000,000	100.00 %	1,417,750,000	100.00 %	1,516,992,500	100.00 %	1,623,181,975	100.00 %	1,736,804,713	100.00 %	1,858,381,043	100.00 %	8,153,110,231	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan Sosial	85.00%	85.00 %	225,000,000	100.00 %	240,750,000	100.00 %	257,602,500	100.00 %	275,634,675	100.00 %	294,929,102	100.00 %	315,574,139	100.00 %	1,384,490,416	Dinas Sosial
JUMLAH TOTAL					4,300,000,000		4,601,000,000		4,923,070,000		5,267,684,900		5,636,422,843		6,030,972,442		26,459,150,185	
Sasaran 2.1.9	Penurunan angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.75	5.62		5.42		5.09		4.76		4.43		4.1		4.1		
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Program dan Kegiatan yang Mengacu	100.00 %	100.00 %	-	100.00 %	50,000,000	100.00 %	75,000,000	100.00 %	100,000,000	100.00 %	-	100.00 %	100,000,000	100.00 %	325,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Perencanaan Tenaga Kerja																
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25.00%	25.00 %	750,000,00	25.00 %	885,000,00	25.00%	946,950,000	30.00%	1,013,236,500	30.00%	1,084,163,055	35.00%	1,160,054,469	35.00%	5,089,404,024	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	70.00%	70.00 %	975,000,00	70.00 %	735,000,00	72.00%	786,450,000	72.00%	841,501,500	75.00%	900,406,605	80.00%	963,435,067	80.00%	4,226,793,172	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	80.00%	80.00 %	881,000,00	80.00 %	881,000,00	80.00%	942,670,000	80.00%	1,008,656,900	82.00%	1,079,262,883	82.00%	1,154,811,285	82.00%	5,066,401,068	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar Jaminan Sosial	55.00%	55.00 %		55.00 %		56.00%		56.00%		57.00%		58.00%		58.00%		Dinas Tenaga Kerja
JUMLAH TOTAL					2,606,000,000		2,551,000,000		2,751,070,000		2,963,394,900		3,063,832,543		3,378,300,821		14,707,598,264	
	MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan																	
Tujuan 3.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel, bersih, transparan	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	B	70		70.5		71		71.5		72		72.5		72.5		
Sasaran 3.1.1	Meningkatnya Integritas dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73.05	81		81		81.5		82		82.5		83		83		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.60 (A)	83.60 (A)	6,242,057,434	84 (A)	6,645,553,434	84.40 (A)	7,165,603,380	84.80 (A)	7,981,993,380	85.20 (A)	8,239,959,307	85.60 (A)	8,773,252,670	85.60 (A)	38,806,362,171	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi	87.00%	87.00%	4,480,980,000	77.00%	5,364,754,000	78.00%	5,518,050,000	79.00%	5,891,857,000	81.00%	6,231,289,950	83.00%	6,661,318,500	83.00%	29,667,269,450	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	71.00%	71.00%		72.20%		77.20%		83.00%		89.00%		95.60%		95.60%		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN	99.74%	99.74%		99.75%		99.76%		99.78%		99.80%		99.83%		99.83%		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab
				Tahun-0 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																		Sumber Daya Manusia
		Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	0.24%	0.24%		0.25%		0.24%		0.22%		0.20%		0.17%		0.17%		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	60.00%	60.00 %	6,545,550,000	60.10 %	5,258,280,000	64.70%	9,369,109,600	69.53%	9,874,947,272	74.46%	10,002,193,580	79.97%	10,602,347,130	79.97%	45,106,877,582	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
JUMLAH TOTAL					17,268,587,434		17,268,587,434		22,052,762,980		23,748,797,652		24,473,442,837		26,036,918,300		113,580,509,203	
Sasaran 3.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79.05	82		84		85		86		87		88		88		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen E-KTP	98.00%	98.00 %	1,444,175,100	98.00 %	835,800,000	98.25%	1,060,355,000	98.50%	1,134,579,850	98.50%	1,214,000,300	98.75%	1,298,979,300	98.75%	5,543,714,450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	98.00%	98.00 %		98.00 %		98.25%		98.50%		98.50%		98.75%		98.75%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Dokumen KIA	31.00%	31.00 %		31.00 %		31.25%		32.00%		32.00%		31.75%		31.75%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Dokumen SKPW NI	98.00%	98.00 %		98.00 %		98.25%		98.50%		98.50%		98.75%		98.75%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0 - 18 Tahun)	93.00%	93.00 %	1,305,314,800	93.00 %	389,600,000	94.00%	404,000,000	95.00%	432,280,000	96.00%	462,539,600	97.00%	494,917,000	97.00%	2,183,336,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	98.00%	98.00 %		98.00 %		98.25%		98.50%		98.75%		99.00%		99.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	98.00%	98.00 %		98.00 %		98.25%		98.50%		98.75%		99.00%		99.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	98.00%	98.00 %		98.00 %		98.25%		98.50%		98.75%		99.00%		99.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00 %	100.00 %	1,035,675,700	100.00 %	490,000,000	100.00 %	790,000,000	100.00 %	845,300,000	100.00 %	904,471,000	100.00 %	967,782,900	100.00 %	3,997,553,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10.5	10.5	602,500,000	11	602,500,000	12	560,000,000	13	722,500,000	14	845,000,000	15	977,500,000	15	3,707,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Kegemaran Membaca	40	40		40.5		41		41.5		41.5		42		42		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	50.00%	50.00 %	107,500,000	50.00 %	107,500,000	52.00%	142,500,000	54.00%	142,500,000	56.00%	182,500,000	58.00%	195,000,000	58.00%	770,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	50.00%	50.00 %	30,000,000	53.00 %	30,000,000	53.00%	155,000,000	56.00%	230,000,000	59.00%	275,000,000	62.00%	285,000,000	62.00%	975,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Pelayanan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	25.00%	40,000,000	27.00%	60,000,000	29.00%	67,500,000	29.00%	167,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	35,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Sooko
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	187,017,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sooko
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81.00%	81.00 %	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sooko
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	81.00%	81.00 %	46,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Sooko
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	46,603,151	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Trowulan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti	81.00%	81.00 %	181,210,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trowulan

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Kecamatan dalam Satu Tahun																
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	81.00%	81.00 %	59,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trowulan
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	40,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Trowulan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	50,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Puri
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	81.00 %	95,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Puri

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81.00%	81.00 %	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Puri
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	58,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	8300.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Puri
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	30,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Bangsal
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	81.00 %	105,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bangsal
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81.00%	81.00 %	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bangsal

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	40,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Bangsal
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	45,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Gedeg
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	92,373,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gedeg
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gedeg
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	40,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Gedeg
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	35,058,680	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Kemlagi

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	97,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kemlagi
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81.00%	81.00 %	76,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kemlagi
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	40,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Kemlagi
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	25,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Jetis
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	85.00%	85.00 %	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jetis

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jetis
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	86.00%	86.00 %	80,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Jetis
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	25,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Dawarblandong
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	135,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dawarblandong
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dawarblandong

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	83,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Dawarblandong
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	82.00%	82.00 %	35,000,000	82.00 %	35,000,000	83.00%	38,500,000	84.00%	42,350,000	85.00%	46,585,000	85.00%	51,244,000	85.00%	213,679,000	Kecamatan Mojosari
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	81.00 %	4,224,315,000	81.00 %	3,951,315,000	81.00%	4,346,500,000	81.00%	4,781,200,000	81.00%	5,259,400,000	81.00%	5,785,400,000	81.00%	24,123,815,000	Kecamatan Mojosari
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	81.00%	81.00 %	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mojosari
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	35,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Mojosari
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	35,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Pungging

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pungging
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pungging
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	86.00%	86.00 %	40,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Pungging
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	35,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Ngoro
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Ngoro

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	71,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Ngoro
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	85.00%	85.00 %	87,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Ngoro
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	25,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Kutorejo
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kutorejo
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kutorejo

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.50%	80.50 %	57,665,600	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Kutorejo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	45,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Dlanggu
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dlanggu
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dlanggu
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	40,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Dlanggu
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	35,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Gondang

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gondang
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gondang
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	80,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Gondang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	35,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Jatirejo
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	60,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatirejo

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	90,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatirejo
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	60,500,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Jatirejo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	40,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Trawas
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trawas
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	45,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trawas

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	50,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Trawas
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	80.00 %	25,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Pacet
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	81.00 %	110,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pacet
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	70,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pacet
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	80.00 %	80,000,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Pacet
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	81.00%	81.00 %	40,000,000	81.00 %	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Mojoanyar

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	80.00 %	80,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mojoanyar
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	80.00%	80.00 %	65,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mojoanyar
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	81.00%	81.00 %	42,500,000	81.00 %	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Mojoanyar
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	100.00 %	100.00 %	1,300,000,000	100.00 %	1,391,000,000	100.00 %	1,488,370,000	100.00 %	-	-	-	100.00 %	1,823,317,250	100.00 %	4,702,687,250	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab
				Tahun-0 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran)	100.00 %	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %				100.00 %		100.00 %		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah; Persentase Peraturan DPRD yang Terfasilitasi	60.00% ; 90.00%	60.00 %; 90.00 %	39,651,198,000	60.00 %; 90.00 %	40,405,630,000	65.00% ; 90.00%	43,234,024,100	65.00% ; 90.00%	46,260,405,787	70.00% ; 90.00%	49,498,634,192	70.00% ; 90.00%	52,963,538,586	70.00% ; 90.00%	232,362,232,665	Sekretariat DPRD
JUMLAH TOTAL					54,161,306,211		55,038,345,000		59,464,249,100		62,321,115,637		66,883,130,092		73,490,179,036		317,197,018,865	
Sasaran 3.1.3	Terwujudnya Integrasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Mojokerto	Nilai SAKIP	76.00 (BB)	76.00 (BB)		78.00 (BB)		80.50 (A)		81.00 (A)		81.5 (A)		82 (A)		82 (A)		
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100.00 %	100.00 %	1,795,000,000	100.00 %	1,795,000,000	100.00 %	1,920,650,000	100.00 %	2,055,095,500	100.00 %	2,198,952,185	100.00 %	2,352,878,838	100.00 %	10,322,576,523	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100.00 %	100.00 %	5,075,000,000	100.00 %	4,013,000,000	100.00 %	4,293,910,000	100.00 %	4,594,483,700	100.00 %	4,916,097,559	100.00 %	5,260,224,388	100.00 %	23,077,715,647	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang Ditindak Lanjuti	100.00 %	100.00 %	135,000,000	100.00 %	600,000,000	100.00 %	650,000,000	100.00 %	700,000,000	100.00 %	750,000,000	100.00 %	800,000,000	100.00 %	3,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95.00%	95.00 %	1,790,000,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	11,967,500,000	Bagian Organisasi
JUMLAH TOTAL					8,795,000,000		8,801,500,000		9,258,060,000		9,743,079,200		10,258,549,744		10,806,603,226		48,867,792,170	
Sasaran 3.1.4	Terwujudnya Penguatan Birokrasi yang bersih melalui pengawasan yang efektif	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	-	70		70.1		70.2		70.3		70.4		70.5		70.5		
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86.00%	86.00 %	2,688,000,000	87.00 %	2,693,000,000	87.00%	2,881,510,000	88.00%	3,083,215,700	88.00%	3,299,040,799	89.00%	3,529,973,655	89.00%	15,486,740,154	Inspektorat
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	2+	2+	3,404,300,000	3	3,404,300,000	3	3,642,601,000	3	3,897,583,070	3+	4,170,413,885	3+	4,462,342,857	3+	19,577,240,812	Inspektorat
JUMLAH TOTAL					6,092,300,000		6,097,300,000		6,524,111,000		6,980,798,770		7,469,454,684		7,992,316,512		35,063,980,966	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab
				Tahun-0 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 3.1.5	Meningkatnya Pengelolaan keuangan berkualitas sesuai standar akuntansi pemerintah	Nilai Opini BPK	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	100.00 %	100.00 %	505,025,691,520	100.00 %	564,199,315,100	100.00 %	603,693,267,157	100.00 %	645,951,795,858	100.00 %	691,168,421,568	100.00 %	739,550,211,078	100.00 %	3,244,563,010,761	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik daerah sesuai ketentuan	100.00 %	100.00 %	2,350,000,000	100.00 %	3,400,000,000	100.00 %	3,638,000,000	100.00 %	3,892,660,000	100.00 %	4,165,146,200	100.00 %	4,456,706,434	100.00 %	19,552,512,634	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
JUMLAH TOTAL					507,375,691,520		567,599,315,100		607,331,267,157		649,844,455,858		695,333,567,768		744,006,917,512		3,264,115,523,395	
Sasaran 3.1.6	Meningkatnya jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2.5		2.6		2.7		2.9		3		3.2		3.2		
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	87.00%	87.00 %	2,100,000,000	86.00 %	6,450,000,000	86.00%	7,520,000,000	87.00%	7,810,000,000	87.00%	7,850,000,000	88.00%	8,010,000,000	88.00%	37,640,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												PD Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan SPBE	87.00%	87.00 %	9,941,000,000	81.00 %	11,554,100,000	82.00%	12,835,000,000	83.00%	13,795,000,000	84.00%	14,395,000,000	85.00%	15,470,000,000	85.00%	68,049,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	88.00%	88.00 %	179,000,000	76.00 %	825,000,000	77.00%	950,000,000	78.00%	1,000,000,000	79.00%	1,000,000,000	80.00%	1,000,000,000	80.00%	4,775,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto	88.00%	88.00 %	413,000,000	76.00 %	275,000,000	77.00%	294,250,000	78.00%	314,847,500	79.00%	336,886,825	80.00%	360,468,903	80.00%	1,581,453,228	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH TOTAL					12,633,000,000		19,104,100,000		21,599,250,000		22,919,847,500		23,581,886,825		24,840,468,903		112,045,553,228	
Misi 4: Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan																		
Tujuan 4.1	Mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan pelestarian lingkungan	Indeks Infrastruktur	39.50%	13.019		13.089		13.16		13.233		13.304		13.374		13.374		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														PD Penanggung Jawab
				Tahun-0 (2021)		Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 4.1.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase Penanganan Lokasi Kumuh	0% Lokasi kumuh	2.52 % Lokasi kumuh		3.18 % Lokasi kumuh		3.18 % Lokasi kumuh		3.18 % Lokasi kumuh		3.18 % Lokasi kumuh		3.18 % Lokasi kumuh		3.18 % Lokasi kumuh		
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni	100.00 %	100.00 %	50,000,000	100.00 %	525,000,000	100.00 %	561,750,000	100.00 %	601,072,500	100.00 %	643,147,575	100.00 %	688,167,905	100.00 %	3,019,137,980	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani	100.00 %	100.00 %	1,707,329,000	100.00 %	3,805,000,000	100.00 %	4,071,350,000	100.00 %	4,356,344,500	100.00 %	4,661,288,615	100.00 %	4,987,578,818	100.00 %	21,881,561,933	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas PSU	100.00 %	100.00 %	275,917,359	100.00 %	1,000,000,000	100.00 %	1,000,000,000	100.00 %	1,355,581,985	100.00 %	2,304,489,374	100.00 %	2,929,629,082	100.00 %	8,589,700,441	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
JUMLAH TOTAL						2,033,246,359	5,330,000,000		5,633,100,000		6,312,998,985		7,608,925,564		8,605,375,805		33,490,400,354	
Sasaran 4.1.2	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Penanganan RTH	13.92%	14.56 %		16.40 %		18.39%		20.54%		22.84%		25.30%		25.30%		
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	25.00%	25.00 %	2,415,000,000	61.05 %	2,656,500,000	69.00%	2,842,455,000	78.00%	3,041,426,850	86.00%	3,254,326,730	94.00%	3,482,129,601	94.00%	15,276,838,181	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
JUMLAH TOTAL					2,415,000,000		2,656,500,000		2,842,455,000		3,041,426,850		3,254,326,730		3,482,129,601		15,276,838,181	
Sasaran 4.1.3	Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	Tingkat Keselamatan Transportasi	4.30%	5.10%		6.21%		7.46%		8.52%		9.67%		10.74%		10.74%		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	100.00%	100.00%	1,338,500,000	100.00%	4,200,000,000	100.00%	4,494,000,000	100.00%	4,808,580,000	100.00%	5,145,180,600	100.00%	5,505,343,242	100.00%	24,153,103,842	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
JUMLAH TOTAL					1,338,500,000		4,200,000,000		4,494,000,000		4,808,580,000		5,145,180,600		5,505,343,242		24,153,103,842	
Sasaran 4.1.4	Pemerataan, dan perluasan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sanitasi air minum dan bangunan gedung	Persentase Infrastruktur kondisi baik	71.38%	71.88%		72.38%		72.88%		73.38%		73.88%		74.38%		74.38%		
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik	75.00%	75.00%	11,383,088,000	77.00%	11,383,088,000	78.00%	12,179,904,160	79.00%	13,032,497,451	80.00%	13,944,772,273	81.00%	14,920,906,332	81.00%	65,461,168,216	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Rumah Tangganya Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam Sebuah Kabupaten	-	-	6,062,430,000	340.22 2 KK	6,486,800,100	342.15 2 KK	6,940,876,107	344.09 2 KK	7,426,737,434	346.01 2 KK	7,946,609,055	347.94 2 KK	8,502,871,689	347.94 2 KK	37,303,894,385	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Desa di Wilayah Kabupaten Tersedia TPS / TPST / TPS3R	18.00%	18.00%	1,405,500,000	18.00%	1,500,000,000	18.00%	1,503,885,000	18.00%	1,609,156,950	18.00%	1,721,797,937	18.00%	1,842,323,792	18.00%	8,177,163,679	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat dan Data Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	283.95 5 rumah	283.95 5 rumah	2,127,342,000	283.95 5 rumah	2,127,342,000	283.95 5 rumah	2,276,255,940	283.95 5 rumah	2,435,593,856	283.95 5 rumah	2,606,085,426	283.95 5 rumah	2,788,511,406	283.95 5 rumah	12,233,788,628	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase yang Terhubung	18.00%	18.00%	31,900,000,000	18.00%	31,900,000,000	18.00%	34,133,000,000	18.00%	36,522,310,000	18.00%	39,078,871,700	18.00%	46,790,229,327	18.00%	188,424,411,027	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Langsung dengan Sungai																
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Instansi Pemerintah yang Laik Fungsi	-	90.00 %	12,747,000,000	90.00 %	12,747,000,000	90.00%	13,639,290,000	90.00%	14,594,040,300	90.00%	15,615,623,121	90.00%	16,708,716,739	90.00%	73,304,670,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung sesuai RTBL	-	-	-	10.00 %	100,000,000	10.00%	108,000,000	10.00%	116,640,000	10.00%	125,971,200	10.00%	136,048,896	10.00%	586,660,096	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	61.00% ; 56.00%	61.00 % ; 56.00 %	134,084,492,968	61.00 % ; 56.00 %	124,578,154,750	61.00% ; 56.00%	129,904,710,493	61.00% ; 56.00%	148,539,530,544	61.00% ; 56.00%	142,849,190,303	61.00% ; 56.00%	173,289,752,671	61.00% ; 56.00%	719,161,338,761	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Badan Usaha yang Memiliki Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil	8.00%	8.00%	500,000,000	8.00%	500,000,000	8.00%	648,000,000	8.00%	699,840,000	8.00%	755,827,200	8.00%	816,293,376	8.00%	3,419,960,576	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pembangunan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang	100.00 %	100.00 %	1,450,000,000	100.00 %	2,150,000,000	100.00 %	1,551,500,000	100.00 %	1,660,105,000	100.00 %	1,776,312,350	100.00 %	1,900,654,215	100.00 %	9,038,571,565	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
JUMLAH TOTAL					201,659,85 2,968		193,472,38 4,850		202,885, 421,700		226,636,45 1,535		226,421,06 0,565		267,696,30 8,443		1,117,111,6 27,093	
Sasaran 4.1.5	terwujudnya Lingkungan Hidup yang berkualitas	IKLH	64.158	63.88		64.2		64.53		64.86		65.2		65.52		65.52		
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	80.00%	80.00 %	100,000,00 0	54.36 %	585,000,00 0	56.41%	375,000,000	58.46%	375,000,00 0	60.51%	375,000,00 0	61.54%	375,000,00 0	61.54%	2,085,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu	80.00%	80.00 %	1,357,744,000	43.96 %	1,170,000,000	48.91%	1,185,400,000	53.19%	1,186,616,000	57.29%	1,214,680,640	57.14%	1,306,627,866	57.14%	6,063,324,506	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	-	-		4.80%	185,000,000	7.20%	230,000,000	9.60%	250,000,000	12.00%	267,500,000	14.40%	286,225,000	14.40%		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolaannya	100.00 %	100.00 %	50,000,000	100.00 %	105,000,000	100.00 %	105,000,000	100.00 %	105,000,000	100.00 %	105,000,000	100.00 %	105,000,000	100.00 %	525,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	57.00%	57.00 %	100,000,000	57.27 %	230,000,000	57.60%	236,900,000	57.86%	244,000,000	58.00%	251,320,000	58.15%	258,800,000	58.15%	1,221,020,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui	13.46%	13.46 %	75,000,000	13.46 %	275,000,000	14.94%	275,000,000	16.43%	275,000,000	18.79%	275,000,000	20.27%	275,000,000	20.27%	1,375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup																
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	24.00%	24.00 %	90,000,000	24.00 %	50,000,000	39.00%	50,000,000	49.00%	50,000,000	56.00%	50,000,000	62.00%	50,000,000	62.00%	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	60.00%	60.00 %	26,000,000	60.00 %	130,000,000	70.00%	131,950,000	75.00%	133,958,501	85.00%	136,027,255	85.00%	138,158,073	85.00%	670,093,829	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	98.00%	98.00 %	9,669,400,000	99.00 %	7,105,000,000	99.00%	7,605,000,000	99.00%	8,140,470,000	100.00 %	8,717,542,900	100.00 %	9,322,420,903	100.00 %	40,890,433,803	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
JUMLAH TOTAL					11,468,144,000		9,835,000,000		10,194,250,000		10,760,044,501		11,392,070,795		12,117,231,842		53,079,872,138	
Sasaran 4.1.6	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Resiko Bencana (IRB)	120.7	117.68		114.67		111.65		108.63		105.61		102.6		102.6		
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	20.00%	20.00%	2,400,000,000	20.00%	3,225,000,000	30.00%	3,443,000,000	40.00%	3,741,000,000	50.00%	3,844,025,000	60.00%	4,162,000,000	60.00%	18,415,025,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana	65.00%	65.00 %		65.00 %		65.00%		70.00%		70.00%		75.00%		75.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sesuai Waktu Tanggap	-	-	-	-	-	-	100.00 %	1,592,555,900	100.00 %	1,704,034,813	100.00 %	1,823,317,250	100.00 %	5,119,907,963	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran)	-	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %			Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										PD Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
JUMLAH TOTAL					2,400,000,000		3,225,000,000		3,443,000,000		5,333,555,900		5,548,059,813		5,985,317,250		23,534,932,963	

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Misi 1 : SDM yang Sehat, Cerdas, Terampil dan Produktif yang Dilandasi Nilai-Nilai Keimanan dan Ketakwaan																		
Tujuan 1.1	Mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73.83	74.33		75.03		75.73		76.23		76.93		77.63		77.63		
Sasaran 1.1.1	Meningkatnya pelayanan pendidikan berkualitas dengan mendapatkan akses yang terjangkau dan merata dengan berorientasi pada penanaman karakter Bangsa Indonesia, serta pengoptimalan pemanfaatan IPTEK	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12.88	13.05		13.11		13.17		13.23		13.29		13.35		13.35		

Kode	Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0 (2021)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8.51	8.64		8.88		9.12		9.36		9.6		9.84		9.84		
1.01 .02	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	80.00 %	80.00%	184,939,96 8,700	80.00%	203,433,9 65,570	80.00%	223,777,36 2,127	80.00%	246,155,09 8,340	80.00%	270,770,60 8,174	80.00%	289,177,68 8,622	80.00%	1,233,314,72 2,833	Dinas Pendidikan
		APM SD	75.00 %	75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		Dinas Pendidikan
		APM SLTP	75.00 %	75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		Dinas Pendidikan
		APM KESETARAAN	15.00 %	15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		Dinas Pendidikan
JUMLAH TOTAL					184,939,96 8,700		203,433,9 65,570		223,777,36 2,127		246,155,09 8,340		270,770,60 8,174		289,177,68 8,622		1,310,824,03 0,291	



BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis, pengaruhnya sangat luas dan urgent untuk diselenggarakan. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintahan daerah dapat menjadi strategis di satu tahun atau periode dan sebaliknya, menjadi operasional di periode berikutnya.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategis, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategis, program prioritas yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, meskipun bukan merupakan program yang mendukung langsung visi dan misi kepala daerah terpilih. Selain prioritas yang merupakan urusan wajib penyelenggaraan pemerintahan, terdapat pula program prioritas yang secara langsung mendukung pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Artinya, dalam pelaksanaan pemerintahan, bukan berarti apabila program tersebut bukan merupakan program pendukung langsung pencapaian visi misi lantas ditinggalkan atau tidak dilaksanakan apabila program tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan urusan.

Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Mojokerto disusun dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dengan mempertimbangkan Kapasitas Keuangan Daerah serta urutan prioritas. Pagu indikatif adalah jumlah dana yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan program. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 belanja daerah dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok prioritas, yaitu:

- Prioritas Pertama (P1) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;



- Prioritas Kedua (P2) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
- Prioritas Ketiga (P3) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik, tentunya perlu diperhatikan kapasitas riil keuangan daerah. Kondisi Kapasitas Riil suatu daerahlah yang digunakan dalam mempertimbangkan perumusan Pagu Indikatif belanja pembangunan (belanja langsung). Kondisi Kapasitas Riil beserta proporsi belanja langsung dan tidak langsung Kabupaten Mojokerto disajikan pada Tabel 7.1.

Kapasitas Riil kemampuan keuangan daerah yang terdapat pada Tabel 7.1 idealnya digunakan sebagai dasar dalam perumusan belanja program prioritas, namun dengan adanya perubahan peraturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 menjadi PP No. 12 Tahun 2019, maka kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tidak lagi menjadi rujukan dalam pembagian pagu indikatif (belanja) Program Prioritas, namun demikian tetap menjadi referensi dalam perumusan rencana belanja pembangunan. Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 seluruh belanja daerah melekat pada program perangkat daerah sehingga dalam perumusan kebijakan belanja daerah merujuk pada total Penerimaan Daerah. Berdasarkan peraturan perundangan tersebut diatas, maka proporsi anggaran pada program-program perangkat daerah tahun 2022 hingga tahun 2026 pada RPJMD Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan pada Tabel 7.3



Tabel 7.1
Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Mojokerto

No	Uraian	Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	2.643.561.714.594	2.828.611.034.615	3.026.613.807.038	3.238.476.773.531	3.465.170.147.678
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	0	0	30.000.000.000	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	138.000.000.000	136.286.000.000	134.000.000.000	132.000.000.000	130.000.000.000
	Total Penerimaan (proyeksi Belanja)	2.766.561.714.594	2.949.611.034.615	3.190.613.807.038	3.370.476.773.531	3.595.170.147.678
	Dikurangi:					
1	Belanja Pegawai	1.181.510.279.172	1.264.215.998.714	1.352.711.118.623	1.447.400.896.927	1.548.718.959.712
2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	0
	Kapasitas Riil	1.570.051.435.422	1.670.395.035.901	1.837.902.688.415	1.923.075.876.604	2.046.451.187.966

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021

Tabel 7.2
Proporsi Anggaran Program Perangkat Daerah berdasarkan Prioritas Alokasi Belanja Daerah

NO	URAIAN	2022	2023	2024	2025	2026
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah	1.570.051.435.422	1.670.395.035.901	1.837.902.688.415	1.923.075.876.604	2.046.451.187.966
2	Prioritas I	785.025.717.711	835.197.517.951	918.951.344.208	961.537.938.302	1.023.225.593.983
3	Prioritas II	471.015.430.627	501.118.510.770	551.370.806.525	576.922.762.981	613.935.356.390
4	Prioritas III	314.010.287.084	334.079.007.180	367.580.537.683	384.615.175.321	409.290.237.593



Tabel 7.3
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	APBD 2021 (INDUK)	PROYEKSI					PERTUMBUHAN %
			2022	2023	2024	2025	2026	
2	BELANJA							
2.1	BELANJA OPERASI	1.772.049.201.433	1.896.092.645.534	2.028.819.130.721	2.170.836.469.870	2.322.795.022.762	2.485.390.674.355	7%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.104.215.214.179	1.181.510.279.172	1.264.215.998.714	1.352.711.118.623	1.447.400.896.927	1.548.718.959.712	7%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	625.873.171.067	669.684.293.042	716.562.193.555	766.721.547.103	820.392.055.401	877.819.499.279	7%
2.1.3	Belanja Hibah	40.639.566.187	43.484.335.820	46.528.239.327	49.785.216.080	53.270.181.206	56.999.093.890	7%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.321.250.000	1.413.737.500	1.512.699.125	1.618.588.064	1.731.889.228	1.853.121.474	7%
2.2	BELANJA MODAL	322.451.399.087	345.022.997.023	369.174.606.815	395.016.829.292	422.668.007.342	452.254.767.856	7%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-	-	0%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	69.634.084.483	74.508.470.397	79.724.063.325	85.304.747.757	91.276.080.100	97.665.405.707	7%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.124.854.035	82.843.593.817	87.332.645.385	111.575.930.562	95.556.245.701	94.255.182.900	4.36%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.534.488.783	159.631.902.998	161.506.136.208	189.211.565.742	182.806.375.344	192.352.821.618	5.04%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.157.971.786	1.239.029.811	1.325.761.898	1.418.565.231	1.517.864.797	1.624.115.333	7%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	32.549.324.782	50.708.859.628	54.258.479.802	58.056.573.388	62.120.533.525	66.468.970.872	7%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	32.549.324.782	50.708.859.628	54.258.479.802	58.056.573.388	62.120.533.525	66.468.970.872	7%
2.4	BELANJA TRANSFER	468.726.366.738	501.537.212.410	536.644.817.278	574.209.954.488	614.404.651.302	657.412.976.893	7%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	42.866.376.420	45.867.022.769	49.077.714.363	52.513.154.369	56.189.075.174	60.122.310.437	7%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	425.859.990.318	455.670.189.640	487.567.102.915	521.696.800.119	558.215.576.127	597.290.666.456	7%
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.595.743.292.040	2.766.561.714.594	2.949.611.034.615	3.190.613.807.038	3.370.476.773.531	3.595.170.147.678	6.77%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2021

Selanjutnya pada tabel di bawah ini akan dijabarkan seluruh program pembangunan beserta kerangka pendanaan Kabupaten Mojokerto berdasarkan urusan

Tabel 7.4
Program Pembangunan dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.64 (BB)	77.64 (BB)	501,410,489,906	78.64 (BB)	547,099,325,266	79.64 (BB)	605,216,759,672	80.64 (A)	652,588,435,639	81.64 (A)	693,459,626,134	81.64 (A)	2,999,774,636,617	Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	80.00%	80.00%	203,433,965,570	80.00%	223,777,362,127	80.00%	246,155,098,340	80.00%	270,770,608,174	80.00%	289,177,688,622	80.00%	1,233,314,722,833	Dinas Pendidikan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		APM SD	75.00%	75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		Dinas Pendidikan
		APM SLTP	75.00%	75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		75.00%		Dinas Pendidikan
		APM KESETARAAN	15.00%	15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		15.00%		Dinas Pendidikan
JUMLAH TOTAL																
					704,844,455,476		770,876,687,393		851,371,858,012		923,359,043,813		982,637,314,756		4,233,089,359,450	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN															
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.37 (A)	84.77 (A)	131,782,046,000	85.17 (A)	158,940,647,549	85.57 (A)	175,715,993,653	85.97 (A)	172,784,856,000	86.37 (A)	172,379,637,000	86.37 (A)	811,603,180,202	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI per 100.000 Kelahiran Hidup)	115 jiwa	114 jiwa	78,150,011,537	113 jiwa	95,866,229,000	112 jiwa	120,099,786,750	111 jiwa	124,537,211,889	110 jiwa	129,342,791,115	110 jiwa	547,996,030,291	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB per 1.000 Kelahiran Hidup)	4.6 jiwa	4.5 jiwa		4.4 jiwa		4.3 jiwa		4.2 jiwa		4.1 jiwa		4.1 jiwa		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Stunting	25.00%	23.00%		21.00%		19.00%		17.00%		15.00%		15.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna	-	11.80%; 5 puskesmas; 2 RS		34.00%; 10 puskesmas		51.00%; 15 puskesmas		75.00%; 20 puskesmas; 2 RD		100.00%; 27 puskesmas; 2 RD		100.00%; 27 puskesmas; 2 RD		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase KLB yang Ditangani	72.00%; 219 desa	64.00%; 194 desa		56.00%; 169 desa		47.00%; 144 desa		39.00%; 119 desa		31.00%; 94 desa		31.00%; 94 desa		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
		Persentase ODF	60.00%	70.00%		80.00%		90.00%		100.00%		100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Penghargaan Swastisaba (Kabupaten Sehat)	swastisaba padapa	swastisaba padapa		swastisaba padapa		swastisaba wiwerda		swastisaba wiwerda		swastisaba wistara		swastisaba wistara		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Kunjungan Masyarakat ke Fasilitas Kesehatan : R. Jalan dan R. Inap	61.50%; 6.30%	62.50%; 6.40%		62.50%; 6.40%		63.50%; 6.40%		64.50%; 6.50%		65.50%; 6.60%		65.50%; 6.60%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	66.00%	75.00%		75.00%		84.00%		91.00%		100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Jenis dan Jumlah Obat	90.00%	90.00%		90.00%		91.00%		92.00%		93.00%		93.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		sesuai Standar														Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
		Persentase Ketersediaan Alkes sesuai Standar	90.00%	90.00%		90.00%		91.00%		92.00%		93.00%		93.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Tenaga Kesehatan sesuai Standar	70.00%	75.00%	3,050,000,000	80.00%	3,050,000,000	85.00%	3,050,000,000	90.00%	3,050,000,000	90.00%	3,050,000,000	90.00%	15,250,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotik, Toko Obat, UMOT dan PIRT yang Memenuhi Standar Kesehatan :			550,000,000		550,000,000		550,000,000		550,000,000		580,000,000		2,780,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Apotik (96 Apotik)	15.00%	30.00%		45.00%		60.00%		75.00%		100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Toko Obat (2 Toko Obat)	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
		UMOT (1 UMOT)	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		PIRT (1900)	1300; 68.00%	1420; 74.00%		1540; 81.00%		1660; 87.00%		1780; 93.00%		1900; 100.00%		1900; 100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase Sarana Toko Alkes dan Perusahaan Rumah Tangga, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang Memenuhi Syarat / Standar Kesehatan	20.00%	20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		20.00%		93.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga BerPHBS	72.00%	72.00%	850,000,00	73.00%	850,000,00	74.00%	850,000,00	75.00%	850,000,00	76.00%	850,000,00	76.00%	4,250,000,00		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat yg Aktif	80.90%	81.90%		82.90%		83.90%		84.90%		85.90%		85.90%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP RSUD RA Basoeni	77.56 (BB)	78.00 (BB)	48,768,000,000	79.00 (BB)	65,405,000,000	80.01 (A)	78,076,500,000	80.05 (A)	84,776,000,000	80.10 (A)	87,665,426,491	80.10 (A)	364,690,926,491	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Capaian Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	madya	utama	95,504,000,000	utama	78,079,000,000	utama	74,510,000,000	paripurna	79,531,000,000	paripurna	82,150,000,000	paripurna	409,774,000,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Upaya Kesehatan Masyarakat															Perangkat Daerah Bidang Kesehatan
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	75.00%	75.00%		75.00%		84.00%		91.00%		100.00%		100.00%	-	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP RSUD Prof. Dr. Soekandar	87.69 (A)	87.71 (A)	73,014,046,000	87.73 (A)	75,933,046,000	87.75 (A)	83,715,146,000	87.77 (A)	86,008,856,000	87.79 (A)	88,862,637,000	87.79 (A)	407,533,731,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Capaian Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	madya	utama	95,504,000,000	utama	78,079,000,000	utama	53,510,000,000	paripurna	51,531,000,000	paripurna	52,150,000,000	paripurna	330,774,000,000	Perangkat Daerah yang Mengangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
		Persentase Indikator SPM yang Mencapai Target	75.00%	75.00%		75.00%		84.00%		91.00%		100.00%		100.00%	-	Perangkat Daerah yang Mengangani Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
JUMLAH TOTAL					527,172,103,537		556,752,922,549		590,077,426,403		603,618,923,889		617,030,491,606		2,894,651,867,983	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip	76.8 (BB)	77.7(BB)	39,675,271,560	78.6(BB)	31,752,540,569	79.5(BB)	33,975,218,409	80.4(A)	36,353,483,698	81.3(A)	38,898,227,557	81.3(A)	180,654,741,793	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Panjang Jaringan Irigasi (Primer, Sekunder, Tersier) dalam Kondisi Baik	75.00%	77.00%	11,383,088,000	78.00%	12,179,904,160	79.00%	13,032,497,451	80.00%	13,944,772,273	81.00%	14,920,906,332	81.00%	65,461,168,216	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan	Jumlah Kumulatif Masyarakat yang Rumah Tangganya Mendapatkan Akses terhadap Air Minum	-	340.222 KK	6,486,800,100	342.152 KK	6,940,876,107	344.092 KK	7,426,737,434	346.012 KK	7,946,609,055	347.942 KK	8,502,871,689	347.942 KK	37,303,894,385	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	n Air Minum	melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi di dalam Sebuah Kabupaten														
1.03.04	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Desa di Wilayah Kabupaten Tersedia TPS / TPST / TPS3R	18.00%	18.00%	1,500,000,000	18.00%	1,503,885,000	18.00%	1,609,156,950	18.00%	1,721,797,937	18.00%	1,842,323,792	18.00%	8,177,163,679	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah dengan Akses Unit Pengolahan Setempat dan Data Jumlah Rumah dengan Akses Sambungan Rumah untuk Kegiatan Pemenuhan Pelayanan Dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T	283.955 rumah	283.955 rumah 2,127,342,000	283.955 rumah 2,276,255,940	283.955 rumah 2,435,593,856	283.955 rumah 2,606,085,426	283.955 rumah 2,788,511,406	283.955 rumah 12,233,788,628	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan	Persentase Drainase yang Terhubung Langsung	18.00%	18.00% 31,900,000,000	18.00% 34,133,000,000	18.00% 36,522,310,000	18.00% 39,078,871,700	18.00% 46,790,229,327	18.00% 188,424,411,027	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Sistem Drainase	dengan Sungai														
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Instansi Pemerintah yang Laik Fungsi	-	90.00%	12,747,000,000	90.00%	13,639,290,000	90.00%	14,594,040,300	90.00%	15,615,623,121	90.00%	16,708,716,739	90.00%	73,304,670,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung sesuai RTBL	-	10.00%	100,000,000	10.00%	108,000,000	10.00%	116,640,000	10.00%	125,971,200	10.00%	136,048,896	10.00%	586,660,096	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	61.00%; 56.00%	61.00%; 56.00%	124,578,154,750	61.00%; 56.00%	129,904,710,493	61.00%; 56.00%	148,539,530,544	61.00%; 56.00%	142,849,190,303	61.00%; 56.00%	173,289,752,671	61.00%; 56.00%	719,161,338,761	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11	Program Pengemba	Persentase Badan Usaha yang	8.00%	8.00%	500,000,000	8.00%	648,000,000	8.00%	699,840,000	8.00%	755,827,200	8.00%	816,293,376	8.00%	3,419,960,576	Dinas Pekerjaan Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	ngan Jasa Konstruksi	Memiliki Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikat Terampil														dan Penataan Ruang
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pembangunan / Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Rencana Tata Ruang	100.00%	100.00%	2,150,000,000	100.00%	1,551,500,000	100.00%	1,660,105,000	100.00%	1,776,312,350	100.00%	1,900,654,215	100.00%	9,038,571,565	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					233,147,656,410		234,637,962,269		260,611,669,944		262,774,544,263		306,594,536,000		1,297,766,368,886	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
1.04.02	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76.8 (BB)	77.7 (BB)	11,670,452,477	78.6 (BB)	12,487,384,150	79.5 (BB)	13,361,501,041	80.4 (A)	14,296,806,114	81.3 (A)	15,297,582,542	81.3 (A)	67,113,726,324	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Pengembangan Perumahan Layak Huni	100.00%	100.00%	525,000,000	100.00%	561,750,000	100.00%	601,072,500	100.00%	643,147,575	100.00%	688,167,905	100.00%	3,019,137,980	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani	100.00%	100.00%	3,805,000,000	100.00%	4,071,350,000	100.00%	4,356,344,500	100.00%	4,661,288,615	100.00%	4,987,578,818	100.00%	21,881,561,933	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Kualitas PSU	100.00%	100.00%	1,000,000,000	100.00%	1,000,000,000	100.00%	1,355,581,985	100.00%	2,304,489,374	100.00%	2,929,629,082	100.00%	8,589,700,441	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
JUMLAH TOTAL					17,000,452,477		18,120,484,150		19,674,500,026		21,905,731,678		23,902,958,347		100,604,126,678	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Jumlah Sengketa Tanah yang terselesaikan	-	2 perkara	40,000,000	2 perkara	42,800,000	2 perkara	45,796,000	2 perkara	49,001,720	2 perkara	52,431,840	2 perkara	230,029,560	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
2.10.06	Program Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persentase Redistribusi dan Ganti Rugi Tanah yang tercapai	-	100.00%	20,000,000	100.00%	21,400,000	100.00%	22,898,000	100.00%	24,500,860	100.00%	26,215,920	100.00%	115,014,780	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
2.10.10	Program Penatausahaan Tanah	Persentase Penatausahaan Tanah yang Baik	-	100.00%	50,000,000	100.00%	53,500,000	100.00%	57,245,000	100.00%	61,252,150	100.00%	65,539,801	100.00%	287,536,951	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																man dan Perhubungan
JUMLAH TOTAL					110,000,000		117,700,000		125,939,000		134,754,730		144,187,561		632,581,291	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN															
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Jalan yang Terpasang dan Angkutan Umum Layak Jalan	100.00%	100.00%	4,200,000,000	100.00%	4,494,000,000	100.00%	4,808,580,000	100.00%	5,145,180,600	100.00%	5,505,343,242	100.00%	24,153,103,842	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
JUMLAH TOTAL					4,200,000,000		4,494,000,000		4,808,580,000		5,145,180,600		5,505,343,242		24,153,103,842	
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK															
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.87 (BB)	79.77 (BB)	3,811,010,692	80.67 (A)	4,077,781,440	81.57 (A)	4,363,226,141	82.47 (A)	4,668,651,971	83.37 (A)	4,995,457,609	83.37 (A)	21,916,127,853	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	84.50%	85.00%	760,000,000	85.05%	813,200,000	85.07%	870,124,000	85.09%	931,032,680	85.15%	996,204,968	85.15%	4,370,561,648	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	Persentase Partisipasi Masyarakat	78.66%	78.67%	400,000,000	78.68%	428,000,000	78.69%	856,000,000	78.70%	1,560,017,200	78.71%	1,669,218,404	78.71%	4,913,235,604	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik															
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Masyarakat	Persentase LSM dan Ormas yang Aktif	97.05%	97.05%	2,417,104,357	97.07%	2,586,301,662	97.09%	2,767,342,778	97.13%	2,961,056,773	97.15%	3,168,330,747	97.15%	13,900,136,317	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pencegahan Konflik Umat Beragama	20.00%	15.00%	445,000,000	13.50%	476,150,000	12.50%	509,480,500	10.50%	545,144,135	10.00%	583,304,224	10.00%	2,559,078,859	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penurunan Konflik Sosial	89.00%	88.95%	1,093,760,000	88.93%	1,320,323,200	88.91%	1,412,745,824	88.90%	1,511,638,032	88.85%	1,617,452,694	88.85%	6,955,919,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
JUMLAH TOTAL					8,926,875,049		9,701,756,302		10,778,919,243		12,177,540,791		13,029,968,646		54,615,060,031		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.9 (A)	83.4 (A)	8,538,052,338	83.9 (A)	8,538,052,338	84.4 (A)	9,135,716,001	84.9 (A)	9,775,216,121	85.4 (A)	10,459,481,250	85.4 (A)	46,446,518,048	Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kabupaten / Kota															
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran Perda yang Tertangani	90.00%	90.00%	4,611,000,000	90.00%	4,933,770,000	90.00%	5,279,133,900	90.00%	5,648,673,273	90.00%	5,648,673,273	90.00%	26,121,250,446	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	90.00%	90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		90.00%		Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase Anggota Satlinmas yang Terlatih	30.00%	35.00%		40.00%		45.00%		50.00%		55.00%		55.00%		Satuan Polisi Pamong Praja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.50 (A)	83.90 (A)	7,582,448,491	84.30 (A)	7,562,874,885	84.70 (A)	7,857,956,627	85.10 (A)	8,406,665,341	85.50 (A)	8,993,314,165	85.50 (A)	40,403,259,509	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan dan Pengurangan Resiko Bencana	20.00%	20.00%	3,225,000,000	30.00%	3,443,000,000	40.00%	3,741,000,000	50.00%	3,844,025,000	60.00%	4,162,000,000	60.00%	18,415,025,000	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																man dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Penanganan Darurat Bencana sesuai Waktu Tanggap	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Penyelesaian Penanganan Pasca Bencana	65.00%	65.00%		65.00%		70.00%		70.00%		75.00%		75.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100.00%	100.00%	1,391,000,000	100.00%	1,488,370,000	100.00%	-	-	100.00%	1,823,317,250	100.00%	4,702,687,250		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Penyelamatan Non Kebakaran	sesuai Waktu Tanggap														man dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran)	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%				100.00%		100.00%		Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	-	-	78.5 (BB)	9,025,289,035	79.5 (BB)	9,581,043,518	80.5 (A)	10,220,619,064	28,826,951,617	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	-	-	-	-	100.00%	1,592,555,900	100.00%	1,704,034,813	100.00%	3,646,634,500	5,119,907,963	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Penyelamatan Non Kebakaran	sesuai Waktu Tanggap														man dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
		Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Non Kebakaran)	-	-				100.00%		100.00%			100.00%		100.00%	Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					25,347,500,829		25,966,067,223		36,631,651,463		38,959,658,066		43,130,722,252		170,035,599,833	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL															
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.86 (A)	81.56 (A)	9,339,251,520	82.26 (A)	10,025,751,520	82.96 (A)	10,727,554,126	83.66 (A)	11,478,482,915	84.36 (A)	12,281,976,719	84.36 (A)	53,853,016,800	Dinas Sosial
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan dan Aktif dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	85.00%	100.00%	1,578,250,000	100.00%	1,688,727,500	100.00%	1,806,938,425	100.00%	1,933,424,115	100.00%	2,068,763,803	100.00%	9,076,103,843	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Rehabilitasi Sosial	85.00%	100.00%	1,364,250,000	100.00%	1,459,747,500	100.00%	1,561,929,825	100.00%	1,671,264,913	100.00%	1,788,253,457	100.00%	7,845,445,695	Dinas Sosial
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS Penerima Manfaat Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	85.00%	100.00%	1,417,750,000	100.00%	1,516,992,500	100.00%	1,623,181,975	100.00%	1,736,804,713	100.00%	1,858,381,043	100.00%	8,153,110,231	Dinas Sosial
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Mendapat Perlindungan Sosial	85.00%	100.00%	240,750,000	100.00%	257,602,500	100.00%	275,634,675	100.00%	294,929,102	100.00%	315,574,139	100.00%	1,384,490,416	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					13,940,251,520		14,948,821,520		15,995,239,026		17,114,905,758		18,312,949,161		80,312,166,985	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA															
2.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.40 (A)	83.90 (A)	5,650,657,007	84.40 (A)	6,021,202,997	84.90 (A)	6,649,437,207	85.40 (A)	6,922,297,812	85.90 (A)	7,406,858,659	85.90 (A)	32,650,453,682	Dinas Tenaga Kerja
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Program dan Kegiatan yang Mengacu Perencanaan Tenaga Kerja	100.00%	100.00%	50,000,000	100.00%	75,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	-	100.00%	100,000,000	100.00%	325,000,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	25.00%	25.00%	885,000,000	25.00%	946,950,000	30.00%	1,013,236,500	30.00%	1,084,163,055	35.00%	1,160,054,469	35.00%	5,089,404,024	Dinas Tenaga Kerja
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Informasi Lowongan Kerja yang Terpenuhi	70.00%	70.00%	735,000,000	72.00%	786,450,000	72.00%	841,501,500	75.00%	900,406,605	80.00%	963,435,067	80.00%	4,226,793,172	Dinas Tenaga Kerja
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang Diselesaikan	80.00%	80.00%	881,000,000	80.00%	942,670,000	80.00%	1,008,656,900	82.00%	1,079,262,883	82.00%	1,154,811,285	82.00%	5,066,401,068	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja yang Terdaftar Jaminan Sosial	55.00%	55.00%		56.00%		56.00%		57.00%		58.00%		58.00%		Dinas Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					8,201,657,007		8,772,272,997		9,612,832,107		9,986,130,355		10,785,159,480		47,358,051,946	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK															
2.08.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.28 (A)	83.78 (A)	6,279,423,390	84.28 (A)	6,354,423,390	84.78 (A)	6,299,423,390	85.28 (A)	6,299,423,390	85.78 (A)	6,314,423,390	85.78 (A)	31,547,116,950	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan	Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender	79.57%	80.36%	310,000,000	82.14%	310,000,000	83.93%	310,000,000	85.71%	310,000,000	87.50%	310,000,000	87.50%	1,550,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perempuan															Perempuan
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan	100.00%	100.00%	395,489,000	100.00%	395,489,000	100.00%	395,489,000	100.00%	395,499,000	100.00%	395,499,000	100.00%	1,977,465,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan	16.45%	38.89%	100,000,000	49.34%	100,000,000	65.79%	100,000,000	82.23%	100,000,000	98.68%	100,000,000	98.68%	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Pelaksanaan PUG di Desa														Perempuan
2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak	89.58%	91.67%	100,000,000	93.75%	100,000,000	95.83%	100,000,000	97.92%	100,000,000	100.00%	100,000,000	100.00%	500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kecamatan Layak Anak	27.78%	33.33%	268,267,400	38.89%	268,267,400	44.44%	268,267,400	50.00%	368,267,400	55.56%	368,267,400	55.56%	1,541,337,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Perempuan
		Persentase Desa / Kelurahan Layak Anak	6.58%	8.55%		10.56%		12.50%		14.47%		16.45%		16.45%		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Korban Anak dan ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan	39.62%	40.74%	590,489,000	41.82%	590,489,000	42.86%	590,489,000	43.86%	590,489,000	44.83%	590,489,000	44.83%	2,952,445,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Perempuan
JUMLAH TOTAL					8,043,668,790		8,118,668,790		8,063,668,790		8,163,678,790		8,178,678,790		40,568,363,950	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA															
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan	100.00%	100.00%	420,000,000	100.00%	470,000,000	100.00%	480,000,000	100.00%	490,000,000	100.00%	500,000,000	100.00%	2,360,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase PUS yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana	80.55%	80.56%	9,089,510,000	80.57%	9,189,510,000	80.58%	9,189,510,000	80.59%	9,189,510,000	80.60%	9,189,510,000	80.60%	45,847,550,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97.55%	97.81%	2,463,000,000	97.86%	2,607,400,000	97.91%	2,707,400,000	97.97%	2,807,400,000	98.02%	2,907,400,000	98.02%	13,492,600,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
JUMLAH TOTAL					11,972,510,000		12,266,910,000		12,376,910,000		12,486,910,000		12,596,910,000		61,700,150,000	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL															
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.77 (A)	81.47 (A)	8,484,518,725	82.17 (A)	8,659,558,725	82.97 (A)	9,265,718,100	83.57 (A)	9,914,318,000	84.27 (A)	10,608,320,260	84.27 (A)	46,932,433,810	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen E-KTP	98.00%	98.00%	835,800,000	98.25%	1,060,355,000	98.50%	1,134,579,850	98.50%	1,214,000,300	98.75%	1,298,979,300	98.75%	5,543,714,450	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga	98.00%	98.00%		98.25%		98.50%		98.50%		98.75%		98.75%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan	31.00%	31.00%		31.25%		31.50%		31.50%		31.75%		31.75%		Dinas Kependu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Dokumen KIA														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Dokumen SKPW NI	98.00%	98.00%		98.25%		98.50%		98.50%		98.75%		98.75%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)	93.00%	93.00%	389,600,00	94.00%	404,000,00	95.00%	432,280,00	96.00%	462,539,600	97.00%	494,917,000	97.00%	2,183,336,600	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Akta Kematian	98.00%	98.00%		98.25%		98.50%		98.75%		99.00%		99.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan	98.00%	98.00%		98.25%		98.50%		98.75%		99.00%		99.00%		Dinas Kependu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Akta Perkawinan														dukun dan Pencatatan Sipil
		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian	98.00%	98.00%		98.25%		98.50%		98.75%		99.00%		99.00%		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Realisasi Anggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.00%	100.00%	490,000,000	100.00%	790,000,000	100.00%	845,300,000	100.00%	904,471,000	100.00%	967,782,900	100.00%	3,997,553,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
JUMLAH TOTAL						10,199,918,725		10,913,913,725		11,677,877,950		12,495,328,900		13,369,999,460	58,657,038,760	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.26 (A)	83.76 (A)	5,994,237,961	84.26 (A)	6,772,348,756	84.76 (A)	7,443,123,632	85.26 (A)	8,203,470,995	85.76 (A)	9,023,288,094	85.76 (A)	37,436,469,438	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Penyelenggaraan Penataan Desa yang Dilaksanakan	20.00%	20.00%	250,000,000	20.00%	300,000,000	20.00%	350,000,000	20.00%	350,000,000	20.00%	400,000,000	20.00%	1,650,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Peningkatan Kerja Sama Desa	10.00%	10.00%	450,000,000	10.00%	490,000,000	10.00%	550,000,000	10.00%	550,000,000	10.00%	650,000,000	10.00%	2,690,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.04	Program Administrasi	Persentase Desa yang Menyelenggarakan Mekanisme	90.00%	90.00%	9,460,000,000	91.00%	10,650,000,000	91.00%	11,525,000,000	92.00%	12,400,000,000	92.00%	12,850,000,000	92.00%	56,885,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara Tepat														at dan Desa
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat yang Aktif	72.00%	85.00%	3,775,000,000	86.00%	4,225,000,000	87.00%	4,625,000,000	88.00%	5,000,000,000	89.00%	5,350,000,000	89.00%	22,975,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Lembaga Ekonomi Desa yang Aktif	70.00%	72.00%		74.00%		76.00%		78.00%		80.00%		80.00%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					19,929,237,961		22,437,348,756		24,493,123,632		26,503,470,995		28,273,288,094		121,636,469,438	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN															
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.6(A)	84(A)	7,612,512,556	84.4(A)	7,470,113,184	84.8(A)	7,868,236,343	85.2(A)	8,276,293,560	85.6(A)	8,715,293,588	85.6(A)	39,942,449,231	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	10.00%	20.00%	795,000,000	40.00%	850,650,000	60.00%	910,195,500	80.00%	973,909,185	100.00%	1,000,000,000	100.00%	4,529,754,685	Dinas Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH Ketersediaan)	97.00%	97.00%	1,977,476,262	97.00%	2,189,066,222	98.00%	2,423,296,308	98.00%	2,682,589,013	98.00%	2,969,626,038	98.00%	12,242,053,843	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Desa Rawan Pangan yang Ditangani	2.00%	8.00%	210,000,000	17.00%	210,000,000	25.00%	210,000,000	33.00%	210,000,000	42.00%	210,000,000	42.00%	1,050,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Jumlah Kecamatan yang Dilakukan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	90.00%	50.00%	380,000,000	70.00%	385,000,000	80.00%	385,000,000	100.00%	390,000,000	100.00%	390,000,000	100.00%	1,930,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					10,974,988,818		11,104,829,406		11,796,728,151		12,532,791,758		13,284,919,626		59,694,257,759	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	2.00%	2.00%	230,000,000	2.00%	230,000,000	2.00%	242,000,000	3.00%	242,000,000	3.00%	250,000,000	3.00%	1,194,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	5.00%	10.00%	1,100,000,000	10.00%	1,105,000,000	10.00%	1,108,000,000	10.00%	1,116,000,000	10.00%	1,119,000,000	10.00%	5,548,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Pengolahan dan Pemasaran	2.00%	2.00%	700,000,000	2.00%	704,000,000	2.00%	705,000,000	2.00%	710,000,000	2.00%	711,000,000	2.00%	3,530,000,000	Dinas Pangan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Hasil Perikanan														
JUMLAH TOTAL					2,030,000,000		2,039,000,000		2,055,000,000		2,068,000,000		2,080,000,000		10,272,000,000	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.94 (BB)	80.74 (A)	15,427,446,773	81.54 (A)	16,755,934,453	82.34 (A)	17,940,820,581	83.14 (A)	19,641,976,640	83.94 (A)	21,054,187,114	83.94 (A)	90,820,365,561	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup sebagai Upaya Pelestarian	80.00%	54.36%	585,000,000	56.41%	375,000,000	58.46%	375,000,000	60.51%	375,000,000	61.54%	375,000,000	61.54%	2,085,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Lingkungan dan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup														
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Hasil Uji Titik Pantau Kualitas Air dan Udara yang Memenuhi Baku Mutu Hidup	80.00%	43.96%	1,170,000,000	48.91%	1,185,400,000	53.19%	1,186,616,000	57.29%	1,214,680,640	57.14%	1,306,627,866	57.14%	6,063,324,506	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase Peningkatan Luas Lahan yang Terpulihkan	-	4.80%	185,000,000	7.20%	230,000,000	9.60%	250,000,000	12.00%	267,500,000	14.40%	286,225,000	14.40%		Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Luas Area Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Mojokerto yang Terkelola	25.00%	61.05%	2,656,500,000	69.00%	2,842,455,000	78.00%	3,041,426,850	86.00%	3,254,326,730	94.00%	3,482,129,601	94.00%	15,276,838,181	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Penghasil B3 dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3) yang Memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 dan Terpantau Pengelolannya	100.00%	100.00%	105,000,000	100.00%	105,000,000	100.00%	105,000,000	100.00%	105,000,000	100.00%	105,000,000	100.00%	525,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan / atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto	57.00%	57.27%	230,000,000	57.60%	236,900,000	57.86%	244,000,000	58.00%	251,320,000	58.15%	258,800,000	58.15%	1,221,020,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Memiliki Pengetahuan di Bidang Lingkungan Hidup melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	13.46%	13.46%	275,000,000	14.94%	275,000,000	16.43%	275,000,000	18.79%	275,000,000	20.27%	275,000,000	20.27%	1,375,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Lembaga Masyarakat yang Mendapat Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup	24.00%	24.00%	50,000,000	39.00%	50,000,000	49.00%	50,000,000	56.00%	50,000,000	62.00%	50,000,000	62.00%	250,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Pesentase Pengaduan Masyarakat terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, Lokasi Usaha dan Dampaknya di Daerah Kabupaten yang Tertangani	60.00%	60.00%	130,000,000	70.00%	131,950,000	75.00%	133,958,501	85.00%	136,027,255	85.00%	138,158,073	85.00%	670,093,829	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang Terkelola di Kabupaten Mojokerto	98.00%	99.00%	7,105,000,000	99.00%	7,605,000,000	99.00%	8,140,470,000	100.00%	8,717,542,900	100.00%	9,322,420,903	100.00%	40,890,433,803	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					27,918,946,773		29,792,639,453		31,742,291,932		34,288,374,165		36,653,548,557		159,177,075,880	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.12 (A)	80.92 (A)	7,346,434,945	81.72 (A)	6,315,684,945	82.53 (A)	6,809,635,666	83.32 (A)	7,313,014,697	84.12 (A)	7,855,460,947	84.12 (A)	35,640,231,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	87.00%	86.00%	6,450,000,000	86.00%	7,520,000,000	87.00%	7,810,000,000	87.00%	7,850,000,000	88.00%	8,010,000,000	88.00%	37,640,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Penyelenggaraan SPBE	87.00%	81.00%	11,554,100,000	82.00%	12,835,000,000	83.00%	13,795,000,000	84.00%	14,395,000,000	85.00%	15,470,000,000	85.00%	68,049,100,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Informatika
JUMLAH TOTAL					25,350,534,945		26,670,684,945		28,414,635,666		29,558,014,697		31,335,460,947		141,329,331,200	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK															
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Mojokerto	88.00%	76.00%	825,000,000	77.00%	950,000,000	78.00%	1,000,000,000	79.00%	1,000,000,000	80.00%	1,000,000,000	80.00%	4,775,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
JUMLAH TOTAL					825,000,000		950,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000		4,775,000,000	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN															
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk	88.00%	76.00%	275,000,000	77.00%	294,250,000	78.00%	314,847,500	79.00%	336,886,825	80.00%	360,468,903	80.00%	1,581,453,228	Dinas Komunikasi dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pengamanan Informasi	Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota														Informatika
JUMLAH TOTAL					275,000,000		294,250,000		314,847,500		336,886,825		360,468,903		1,581,453,228	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.6 (A)	84 (A)	5,229,773,463	84.4 (A)	5,595,857,605	84.8(A)	5,987,567,637	85.2 (A)	6,406,697,372	85.6 (A)	6,855,166,188	85.6 (A)	30,075,062,265	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berkualitas	25.00%	25.00%	214,000,000	5.00%	228,980,000	5.00%	245,008,600	5.00%	262,159,202	5.00%	280,510,346	5.00%	1,230,658,148	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	25.00%	25.00%	107,000,000	5.00%	114,490,000	5.00%	122,504,300	5.00%	131,079,601	5.00%	140,255,173	5.00%	615,329,074	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	10.00%; 0.50%	10.00%; 0.50%	320,123,670	10.00%; 0.50%	342,532,327	10.00%; 0.50%	366,509,590	10.00%; 0.50%	392,165,261	10.00%; 0.50%	419,616,829	10.00%; 0.50%	1,840,947,677	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang telah Diberdayakan dan Dilindungi	5.50%	5.50%	374,500,000	5.00%	400,715,000	5.00%	428,765,050	5.00%	458,778,604	5.00%	490,893,106	5.00%	2,153,651,760	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang	0.50%	0.50%	304,950,000	0.50%	326,296,500	0.50%	349,137,255	0.50%	373,576,863	0.50%	399,727,243	0.50%	1,753,687,861	Dinas Koperasi dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Usaha Mikro (UMKM)	Diberdayakan														Usaha Mikro
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang telah Difasilitasi Pengembangan Usaha	0.50%	0.50%	995,100,000	0.50%	1,064,757,000	0.50%	1,139,289,900	0.50%	1,219,040,289	0.50%	1,304,373,110	0.50%	5,722,560,389	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
JUMLAH TOTAL					7,545,447,133		8,073,628,432		8,638,782,422		9,243,497,192		9,890,541,995		43,391,897,174	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL															
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 (BB)	79 (BB)	5,896,497,365	79.50 (BB)	6,304,592,181	80 (A)	6,739,973,633	80.50 (A)	7,205,876,788	81 (A)	7,704,658,163	81 (A)	33,851,598,130	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi	4.00%	5.00%	185,000,000	5.00%	175,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	100,000,000	5.00%	660,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru yang Masuk	65 investor	70 investor	165,000,000	75 investor	165,000,000	80 investor	165,000,000	85 investor	165,000,000	90 investor	165,000,000	90 investor	825,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	79	80	265,000,000	81	292,500,000	82	308,500,000	82	326,500,000	82	345,500,000	82	1,538,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Satu Pintu
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM yang Masuk	450 LKPM	475 LKPM	100,000,000	500 LKPM	106,500,000	525 LKPM	113,000,000	550 LKPM	120,000,000	575 LKPM	127,500,000	575 LKPM	567,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Dikelola	1.380 izin	1.400 izin	10,000,000	1.380 izin	10,500,000	1.405 izin	11,000,000	1.430 izin	11,500,000	1.455 izin	12,000,000	1.455 izin	55,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
JUMLAH TOTAL																
						6,621,497,365	7,054,092,181	7,437,473,633	7,928,876,788	8,454,658,163	37,496,598,130					

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN															
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.32 (A)	82.02 (A)	4,932,256,497	82.72 (A)	5,211,814,451	83.42 (A)	5,359,166,462	84.12 (A)	5,586,258,114	84.82 (A)	5,910,171,181	84.82 (A)	26,999,666,705	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	10.5	11	602,500,000	12	560,000,000	13	722,500,000	14	845,000,000	15	977,500,000	15	3,707,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Kegemaran Membaca	40	40.5		41		41.5		41.5		42		42		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
JUMLAH TOTAL					5,534,756,497		5,771,814,451		6,081,666,462		6,431,258,114		6,887,671,181		30,707,166,705	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	50.00%	50.00%	107,500,000	52.00%	142,500,000	54.00%	142,500,000	56.00%	182,500,000	58.00%	195,000,000	58.00%	770,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban	50.00%	53.00%	30,000,000	53.00%	155,000,000	56.00%	230,000,000	59.00%	275,000,000	62.00%	285,000,000	62.00%	975,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Persentase Pelayanan Kearsipan	-	-	-	-	25.00%	40,000,000	27.00%	60,000,000	29.00%	67,500,000	29.00%	167,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
JUMLAH TOTAL																	
					137,500,000			297,500,000			412,500,000			517,500,000			1,912,500,000
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.19.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.04 (A)	82.64 (A)	7,991,466,274	83.24 (A)	8,533,785,333	83.84 (A)	9,114,066,725	84.44 (A)	9,734,967,815	85.04 (A)	10,399,331,982	85.04 (A)	45,773,618,129	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	7.00%	7.00%	1,185,000,000	7.00%	1,234,100,000	7.00%	1,320,487,000	7.00%	1,412,921,090	8.00%	1,521,645,965	8.00%	6,674,154,055	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	9.80%	10.00%	3,200,000,000	10.00%	3,424,000,000	10.00%	3,663,680,000	10.00%	3,920,137,600	12.00%	4,194,547,232	12.00%	18,402,364,832	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																dan Pariwisata
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	5.40%	5.00%	100,000,000	5.00%	200,000,000	5.00%	200,000,000	5.00%	200,000,000	5.00%	200,000,000	5.00%	900,000,000	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
JUMLAH TOTAL					12,476,466,274		13,391,885,333		14,298,233,725		15,268,026,505		16,315,525,179		71,750,137,016	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN															
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Kebudayaan yang Dikembangkan	10.00%	10.00%	3,265,000,000	10.00%	3,490,050,000	10.00%	3,729,000,000	-	-	10.00%	4,261,880,000	10.00%	14,745,930,000	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan,

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Olahraga dan Pariwisata
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pengembangan Kesenian Tradisional	-	15.00%	400,000,000	16.00%	428,000,000	17.00%	458,470,000	18.00%	490,512,900	20.00%	1,964,000,000	20.00%	3,740,982,900	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola	7.00%	7.00%	600,000,000	7.00%	642,000,000	7.00%	687,450,000	7.00%	735,521,500	8.00%	787,398,005	8.00%	3,452,369,505	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
JUMLAH TOTAL					4,265,000,000		4,560,050,000		4,874,920,000		1,226,034,400		7,013,278,005		21,939,282,405	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA															
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	40.00%	40.00%	4,420,000,000	40.00%	4,960,000,000	40.00%	4,956,425,000	40.00%	4,520,475,000	40.00%	4,236,178,250	40.00%	23,093,078,250	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	35.00%	35.00%	1,862,250,000	35.00%	1,505,000,000	35.00%	1,249,000,000	35.00%	1,733,730,000	35.00%	1,530,000,000	35.00%	7,879,980,000	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	Persentase EKRAF yang Dikembangkan	-	30.00%	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual															aan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan SDM Pariwisata dan EKRAF	30.00%	30.00%	700,000,000	25.00%	485,500,000	32.00%	941,735,000	32.00%	983,756,450	25.00%	546,000,000	25.00%	3,656,991,450	Disparpora / Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
JUMLAH TOTAL					7,082,250,000		6,950,500,000		7,147,160,000		7,237,961,450		6,312,178,250		34,730,049,700	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83.6(A)	84(A)	27,692,094,770	84.4(A)	29,387,346,607	84.8 (A)	29,977,268,333	85.2 (A)	30,629,814,729	85.6 (A)	31,273,472,563	85.6 (A)	148,959,997,002	Dinas Pertanian
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang Digunakan	20.00%	20.00%	2,733,500,000	21.00%	2,924,845,000	22.00%	3,129,584,150	23.00%	3,348,655,041	24.00%	3,583,060,893	24.00%	15,719,645,084	Dinas Pertanian
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Prasarana Pertanian yang Digunakan	20.00%	20.00%	1,377,500,000	20.00%	3,162,500,000	20.00%	2,102,000,000	20.00%	2,065,099,000	20.00%	2,444,850,000	20.00%	11,151,949,000	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian Penyakit Hewan Menular	47.00%	47.00%	1,115,000,000	47.00%	1,006,500,000	48.00%	1,079,100,000	49.00%	1,157,557,000	49.00%	1,242,380,000	49.00%	5,600,537,000	Dinas Pertanian
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian	60.00%	60.00%	845,000,000	60.00%	929,500,000	60.00%	977,700,000	60.00%	1,026,525,000	60.00%	1,078,685,000	60.00%	4,857,410,000	Dinas Pertanian
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usulan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian Kabupaten / Kota yang Terasilitasi	-	90.00%	18,000,000	90.00%	19,800,000	95.00%	21,500,000	95.00%	23,700,000	95.00%	25,900,000	95.00%	108,900,000	Dinas Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Score Kelas Kelompok Tani	3.50%	4.00%	3,171,250,000	4.00%	3,356,875,000	5.00%	3,240,220,000	5.00%	3,088,250,000	5.00%	3,301,250,000	5.00%	16,157,845,000	Dinas Pertanian
JUMLAH TOTAL					36,952,344,770		40,787,366,607		40,527,372,483		41,339,600,770		42,949,598,456		202,556,283,086	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN															
3.30.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83.6	84(A)	7,542,959,285	84.4(A)	8,006,707,249	84.8(A)	8,475,952,612	85.2(A)	8,967,426,242	85.6(A)	9,477,991,154	85.6(A)	42,471,036,542	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran	Tingkat Ketersediaan Perusahaan yang Memiliki Fasilitas	-	10.00%	20,000,000	15.00%	20,000,000	20.00%	20,000,000	25.00%	20,000,000	30.00%	20,000,000	30.00%	100,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Perusahaan	Pemenuhan Komitmen														
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terstandar	92.86%	93.00%	5,671,525,000	93.00%	6,068,531,750	93.00%	6,493,328,973	93.00%	6,947,862,001	93.00%	7,434,212,341	93.00%	32,615,460,065	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	27.00%	29.00%	150,250,000	29.00%	165,275,000	29.00%	210,080,000	29.00%	265,000,000	29.00%	320,000,000	29.00%	1,110,605,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase Pertumbuhan Ekspor	5.00%	5.00%	383,890,000	15.00%	404,000,000	16.00%	414,000,000	16.00%	424,000,000	17.00%	424,000,000	17.00%	2,049,890,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Prosentase Alat Utp Bertanda Tera Sah Yg Berlaku	94.37%	94.00%	1,665,030,000	94.00%	1,781,582,100	95.00%	1,906,292,847	95.00%	2,039,733,346	95.00%	2,182,514,681	95.00%	9,575,152,974	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Umkm yang Berkembang Omzetnya	60.00%	60.00%	667,781,000	60.00%	690,000,000	61.00%	756,000,000	60.00%	801,000,000	60.00%	650,000,000	60.00%	3,564,781,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH TOTAL					16,101,435,285		17,136,096,099		18,275,654,432		19,465,021,589		20,508,718,176		91,486,925,581	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN															
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Tingkat Pertumbuhan Industri	1.00%	1.00%	1,184,403,634	2.00%	1,225,000,000	2.00%	1,325,000,000	3.00%	1,360,000,000	3.00%	1,397,000,000	3.00%	6,491,403,634	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Tingkat Kepatuhan Industri untuk Tertib Laport Data Industri	-	50.00%	116,862,000	55.00%	118,862,000	60.00%	119,862,000	65.00%	128,252,340	70.00%	137,230,004	70.00%	621,068,344	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tingkat Ketersediaan Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	-	45.00%	200,000,000	50.00%	220,000,000	55.00%	240,000,000	60.00%	260,000,000	70.00%	280,000,000	70.00%	1,200,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
JUMLAH TOTAL					1,501,265,634		1,563,862,000		1,684,862,000		1,748,252,340		1,814,230,004		8,312,471,978	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4.01	SEKRETARIAT DAERAH															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95.00%	95.00%	27,799,521,943	95.00%	27,799,521,943	95.00%	30,366,389,137	95.00%	30,415,562,477	95.00%	30,440,562,477	95.00%	146,821,557,977	Bagian Perencanaan dan Keuangan
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95.00%	95.00%	17,540,000,000	95.00%	15,190,000,000	95.00%	15,185,000,000	95.00%	16,100,000,000	95.00%	15,960,000,000	95.00%	79,975,000,000	Bagian Umum
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang Dievaluasi	98.00%	98.00%	15,100,500,000	98.00%	16,157,535,000	98.00%	17,288,562,450	98.00%	18,498,761,822	98.00%	19,793,675,149	98.00%	86,839,034,421	Bagian Kesejahteraan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah yang laporan kerjanya berstatus ST dan T	95.00%	95.00%	1,476,475,000	95.00%	1,600,000,000	95.00%	1,850,000,000	95.00%	1,750,000,000	95.00%	1,800,000,000	95.00%	8,476,475,000	Bagian Pemerintahan
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Usulan Produk Hukum dari PD yang ditindaklanjuti	99.00%	99.00%	2,965,000,000	99.00%	3,495,000,000	99.00%	4,750,000,000	99.00%	5,400,000,000	99.00%	6,050,000,000	99.00%	22,660,000,000	Bagian Hukum
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Di Lingkungan / Wilayah Kabupaten Mojokerto	100.00%	100.00%	1,672,100,000	100.00%	1,789,147,000	100.00%	1,914,387,290	100.00%	2,048,394,400	100.00%	2,191,782,008	100.00%	9,615,810,698	Bagian Administrasi Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95.00%	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	2,393,500,000	95.00%	11,967,500,000	Bagian Organisasi
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Diimplementasikan	90.00%	90.00%	2,400,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	2,500,000,000	90.00%	12,400,000,000	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Presentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	95.00%	95.00%	3,000,000,000	95.00%	2,127,500,000	96.00%	2,447,200,000	97.00%	2,814,305,000	98.00%	3,236,468,000	98.00%	13,625,473,000	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengadaan barang dan Jasa yang dihasilkan UKPBJ	97.00%	97.00%	735,000,000	97.00%	835,000,000	97.00%	935,000,000	97.00%	985,000,000	97.00%	985,000,000	97.00%	4,475,000,000	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
JUMLAH TOTAL					75,082,096,943		73,887,203,943		79,630,038,877		82,905,523,699		85,350,987,634		396,855,851,096	
4.02	SEKRETARIAT DPRD															
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,88 (BB)	76,18 (BB)	49,619,273,607	77,48 (BB)	53,092,622,759	78,78 (BB)	56,809,106,353	80,08 (A)	60,785,743,797	81,38 (A)	65,040,745,863	81,38 (A)	285,347,492,379	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentuka	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pembentuka	60.00%; 90.00%	60.00%; 90.00%	40,405,630,000	65.00%; 90.00%	43,234,024,100	65.00%; 90.00%	46,260,405,787	70.00%; 90.00%	49,498,634,192	70.00%; 90.00%	52,963,538,586	70.00%; 90.00%	232,362,232,665	Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	dan Fungsi DPRD	n Peraturan Daerah; Persentase Peraturan DPRD yang Terasilitasi														
JUMLAH TOTAL					90,024,903,607		96,326,646,859		103,069,512,140		110,284,377,989		118,004,284,449		517,709,725,044	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															
6.01	INSPEKTOR AT DAERAH															
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,12 (A)	83,14 (A)	15,241,305,745	83,16 (A)	16,308,197,148	83,18 (A)	17,449,770,948	83,20 (A)	18,671,254,914	83,22 (A)	19,978,242,758	83,22 (A)	87,648,771,513	Inspektoral

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	86.00%	87.00%	2,693,000,000	87.00%	2,881,510,000	88.00%	3,083,215,700	88.00%	3,299,040,799	89.00%	3,529,973,655	80.00%	15,486,740,154	Inspektoral
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	2+	3	3,404,300,000	3	3,642,601,000	3	3,897,583,070	3+	4,170,413,885	3+	4,462,342,857	3+	19,577,240,812	Inspektoral
JUMLAH TOTAL						21,338,605,745		22,832,308,148		24,430,569,718		26,140,709,598		27,970,559,270	122,712,752,479	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5.01	PERENCANAAN															
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.96 (A)	82.56 (A)	8,526,181,257	83.16 (A)	9,123,013,945	83.76 (A)	9,761,624,921	84.36 (A)	10,444,938,666	84.96 (A)	11,176,084,372	84.96 (A)	49,031,843,161	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Kabupaten / Kota															unan Daerah
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data Perencanaan Pembangunan	100.00%	100.00%	1,795,000,000	100.00%	1,920,650,000	100.00%	2,055,095,500	100.00%	2,198,952,185	100.00%	2,352,878,838	100.00%	10,322,576,523	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Presentase Keselarasan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan	Persentase Dokumen Perencanaan yang Tersusun	100.00%	100.00%	4,013,000,000	100.00%	4,293,910,000	100.00%	4,594,483,700	100.00%	4,916,097,559	100.00%	5,260,224,388	100.00%	23,077,715,647	Badan Perencanaan Pembangunan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	an Pembangunan Daerah															unan Daerah
JUMLAH TOTAL					14,334,181,257		15,337,573,945		16,411,204,121		17,559,988,410		18,789,187,598		82,432,135,331	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN															
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Penelitian / Kajian yang Ditindak Lanjuti	100.00%	100.00%	600,000,000	100.00%	650,000,000	100.00%	700,000,000	100.00%	750,000,000	100.00%	800,000,000	100.00%	3,500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
JUMLAH TOTAL					600,000,000		650,000,000		700,000,000		750,000,000		800,000,000		3,500,000,000	
5.02	KEUANGAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.6(A)	84 (A)	115,633,495,735	84.40 (A)	123,727,840,436	84.80 (A)	132,388,789,267	85.20 (A)	141,656,004,516	85.60 (A)	151,571,924,832	85.60 (A)	664,978,054,786	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan sesuai SAP	100.00%	100.00%	564,199,315,100	100.00%	603,693,267,157	100.00%	645,951,795,858	100.00%	691,168,421,568	100.00%	739,550,211,078	100.00%	3,244,563,010,761	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang melaksanakan pengelolaan Barang Milik daerah sesuai ketentuan	100.00%	100.00%	3,400,000,000	100.00%	3,638,000,000	100.00%	3,892,660,000	100.00%	4,165,146,200	100.00%	4,456,706,434	100.00%	19,552,512,634	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
JUMLAH TOTAL					683,232,810,835		731,059,107,593		782,233,245,125		836,989,572,284		895,578,842,344		3,929,093,578,181	
5.02	KEUANGAN															
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.6(A)	84 (A)	25,329,693,100	84.40 (A)	27,102,771,617	84.80 (A)	28,999,965,630	85.20 (A)	31,029,963,224	85.60 (A)	33,202,060,650	85.60 (A)	145,664,454,221	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Capaian Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100.00%	100.00%	7,207,172,725	100.00%	7,711,674,815	100.00%	8,251,492,052	100.00%	8,829,096,496	100.00%	9,447,133,251	100.00%	41,446,569,339	Badan Pendapatan Daerah
JUMLAH TOTAL					32,536,865,825		34,814,446,432		37,251,457,682		39,859,059,720		42,649,193,901		187,111,023,560	
5.03	KEPEGAWAIAN															

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.60 (A)	84 (A)	6,645,553,434	84.40 (A)	7,165,603,380	84.80 (A)	7,981,993,380	85.20 (A)	8,239,959,307	85.60 (A)	8,773,252,670	85.60 (A)	38,806,362,171	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Penempatan Pegawai sesuai Kompetensi	87.00%	77.00%	5,364,754,000	78.00%	5,518,050,000	79.00%	5,891,857,000	81.00%	6,231,289,950	83.00%	6,661,318,500	83.00%	29,667,269,450	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Daya Manusia
		Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN	71.00%	72.20%		77.20%		83.00%		89.00%		95.60%		95.60%		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Peningkatan Kinerja ASN	99.74%	99.75%		99.76%		99.78%		99.80%		99.83%		99.83%		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	0.24%	0.25%		0.24%		0.22%		0.20%		0.17%		0.17%		Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Daya Manusia
JUMLAH TOTAL					12,010,307,434		12,683,653,380		13,873,850,380		14,471,249,257		15,434,571,170		68,473,631,621	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Peningkatan Kompetensi ASN	60.00%	60.10%	5,258,280,000	64.70%	9,369,109,600	69.53%	9,874,947,272	74.46%	10,002,193,580	79.97%	10,602,347,130	79.97%	45,106,877,582	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
																Daya Manusia
JUMLAH TOTAL					5,258,280,000		9,369,109,600		9,874,947,272		10,002,193,580		10,602,347,130		45,106,877,582	
7	UNSUR KEWILAYAHAN															
7.01	KECAMATAN															
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.76 (BB)	78.66 (BB)	3,482,699,705	79.56 (BB)	3,489,075,745	80.46 (A)	3,508,075,745	81.36 (A)	3,538,075,745	82.26 (A)	3,595,075,745	82.26 (A)	17,613,002,685	Kecamatan Sooko

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Sooko
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sooko
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Sooko

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	81.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Sooko
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.27 (BB)	78.17 (BB)	3,317,012,598	79.07 (BB)	3,549,203,480	79.97 (BB)	3,797,647,724	80.87 (A)	4,063,483,064	81.77 (A)	4,347,926,879	81.77 (A)	19,075,273,745	Kecamatan Trowulan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Trowulan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trowulan
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trowulan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Trowulan
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.72 (A)	81.42 (A)	3,482,699,705	82.12 (A)	3,489,075,745	82.82 (A)	3,508,075,745	83.52 (A)	3,538,075,745	84.22 (A)	3,595,075,745	84.22 (A)	17,613,002,685	Kecamatan Puri
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Puri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Puri
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Puri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Puri
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77 (BB)	77 (BB)	3,627,104,667	78 (BB)	3,879,931,994	79 (A)	4,151,527,233	80 (A)	4,442,134,140	81 (A)	4,753,083,529	81 (A)	20,853,781,563	Kecamatan Bangsal
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Bangsal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bangsal
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Bangsal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Bangsal
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.7 (A)	84.1 (A)	3,482,699,705	84.5 (A)	3,689,238,648	84.9 (A)	3,919,435,392	85.3 (A)	4,169,595,869	85.7 (A)	4,461,117,580	85.7 (A)	19,722,087,194	Kecamatan Gedeg
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Gedeg

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gedeg
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gedeg

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	8200.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Gedeg
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.92 (A)	81.62 (A)	3,413,232,978	82.32 (A)	4,155,503,900	83.02 (A)	4,232,708,210	83.72 (A)	4,315,316,823	84.42 (A)	4,403,708,037	84.42 (A)	20,520,469,948	Kecamatan Kemlagi
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Kemlagi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kemlagi
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kemlagi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Kemlagi
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74.18 (BB)	75.48 (BB)	2,945,942,954	76.78 (BB)	2,958,942,954	78.08 (BB)	2,956,942,954	79.38 (BB)	2,967,942,954	80.68 (A)	2,997,942,954	80.68 (A)	14,827,714,770	Kecamatan Jetis
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Jetis

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	85.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jetis
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jetis

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	86.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Jetis
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75.28 (BB)	76.58 (BB)	3,438,625,145	77.88 (BB)	3,679,424,905	79.18 (BB)	3,937,068,649	80.48 (A)	4,213,730,454	81.78 (A)	4,506,935,586	81.78 (A)	19,775,784,739	Kecamatan Dawarblandong
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Dawarblandong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dawarblondong
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dawarblondong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Dawarblandong
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71.85 (A)	71.85 (B)	6,914,851,627	72.85 (B)	7,606,337,000	73.85 (B)	8,366,971,000	74.85 (B)	9,203,670,000	75.85 (B)	10,124,039,000	76.85 (B)	42,215,868,627	Kecamatan Mojosari
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	82.00%	82.00%	35,000,000	83.00%	38,500,000	84.00%	42,350,000	85.00%	46,585,000	85.00%	51,244,000	85.00%	213,679,000	Kecamatan Mojosari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	81.00%	3,951,315,000	81.00%	4,346,500,000	81.00%	4,781,200,000	81.00%	5,259,400,000	81.00%	5,785,400,000	81.00%	24,123,815,000	Kecamatan Mojosari
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mojosari

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Mojosari
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.9 (BB)	78.8 (BB)	3,112,097,039	79.7 (BB)	3,329,943,831	80.6 (A)	3,563,039,899	81.5 (A)	3,812,452,692	82.4 (A)	3,812,452,692	82.4 (A)	17,629,986,153	Kecamatan Pungging
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	8100.00%	40,000,000	8200.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Pungging

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pungging
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pungging

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	86.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Pungging
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.93 (BB)	79.73 (BB)	3,816,143,773	80.53 (A)	4,083,273,837	81.33 (A)	4,369,103,006	82.13 (A)	4,674,940,571	82.93 (A)	5,002,186,411	82.93 (A)	21,945,647,598	Kecamatan Ngoro
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Ngoro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Ngoro
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Ngoro

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	85.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Ngoro
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.76 (BB)	79.66 (BB)	3,292,922,261	80.56 (A)	3,523,426,819	81.46 (A)	3,770,066,697	82.36 (A)	4,033,971,365	83.26 (A)	4,316,349,361	83.26 (A)	18,936,736,503	Kecamatan Kutorejo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Kutorejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kutorejo
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Kutorejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.50%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Kutorejo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.17 (A)	80.97 (A)	2,828,497,727	81.77 (A)	3,489,075,745	82.57 (A)	3,508,075,745	83.37 (A)	3,538,075,745	84.17 (A)	3,595,075,745	84.17 (A)	16,958,800,707	Kecamatan Dlanggu
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Dlanggu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dlanggu
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Dlanggu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Dlanggu
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.56 (BB)	78.46 (BB)	3,592,020,990	79.36 (BB)	3,288,026,819	80.26 (A)	3,518,188,697	81.16 (A)	3,764,461,905	82.06 (A)	4,027,974,239	82.06 (A)	18,190,672,650	Kecamatan Gondang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Gondang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gondang
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Gondang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Gondang
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.28 (A)	81.08 (A)	3,250,604,517	81.88 (A)	3,270,024,517	82.68 (A)	3,284,604,517	83.48 (A)	3,301,104,517	84.28 (A)	3,316,604,517	84.28 (A)	16,422,942,585	Kecamatan Jatirejo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Jatirejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatirejo
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Jatirejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Jatirejo
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.85 (A)	81.55 (A)	2,654,834,302	82.25 (A)	2,850,136,991	82.95 (A)	3,047,449,304	83.65 (A)	3,252,055,980	84.35 (A)	3,471,050,122	84.35 (A)	15,275,526,699	Kecamatan Trawas
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Trawas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trawas
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Trawas

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Trawas
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.28 (A)	81.08 (A)	3,023,043,602	81.88 (A)	3,048,063,602	82.68 (A)	3,084,063,602	83.48 (A)	3,104,063,602	84.28 (A)	3,168,063,602	84.28 (A)	15,427,298,010	Kecamatan Pacet
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	80.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Pacet

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	81.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pacet
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Pacet

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	80.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Pacet
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77.98 (BB)	78.88 (BB)	3,053,593,378	79.78 (BB)	3,078,563,602	80.68 (A)	3,100,063,602	81.58 (A)	3,124,063,602	82.48 (A)	3,178,063,602	82.48 (A)	15,534,347,786	Kecamatan Mojoanyar
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai	81.00%	81.00%	40,000,000	82.00%	45,000,000	83.00%	50,000,000	84.00%	55,000,000	85.00%	60,000,000	85.00%	250,000,000	Kecamatan Mojoanyar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Pelayanan Publik	Standar Pelayanan														
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindak Lanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mojoanyar
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam Satu Tahun Bidang Ketenteraman dan	80.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Mojoanyar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Ketertiban Umum														
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	81.00%	81.00%	340,000,000	82.00%	360,000,000	83.00%	380,000,000	84.00%	400,000,000	85.00%	420,000,000	85.00%	1,900,000,000	Kecamatan Mojoanyar
JUMLAH TOTAL					73,514,941,673		78,087,270,134		82,136,657,721		86,498,199,773		91,089,369,346		411,326,438,647	
TOTAL					2,766,561,714,594		2,949,611,034,615		3,190,613,807,038		3,370,476,773,531		3,595,170,147,678		15,871,214,752,456	



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH



Penetapan indikator kinerja daerah diperlukan agar dapat mengukur tolak ukur capaian dari tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026. Selain itu juga sebagai baha nuntut mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021 – 2026. Berikut adalah Tabel 8.1 yang merupakan penetapan indikator kinerja Utama Kabupaten Mojokerto (IndikatorTujuan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 -2026).

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mojokerto

No	Indikator	Satuan	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,33	75,03	75,73	76,23	76,93	77,63
2	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	65,38	66,06	66,74	67,42	68,10	68,78
3	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	0,01-2,35	1,17-4,70	3,53-5,29	4,41-5,88	4,52-5,99	4,63-6,10
4	Indeks Gini	Indeks	0,322	0,317	0,312	0,309	0,304	0,299
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	70,5	71	71,5	72	72,5
6	Indeks Infrastruktur	Indeks	13,019	13,089	13,160	13,233	13,304	13,374



Tabel 8.2

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto

No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
				2021	2022	2023	2024	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1	Ketenagakerjaan								
	Angka TPT	5.75	5.62	5.42	5.09	4.76	4.43	4.1	4.1
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69.79	69.79	70.09	70.39	70.69	70.99	71.29	71.29
2	Sosial								
	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	64.07	65.38	66.06	66.74	67.42	68.1	68.78	68.78
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	69.48	70.68	71.88	73.08	74.28	75.48	76.68	76.68
	Indeks Daya Beli	0.776	0.78	0.789	0.798	0.801	0.81	0.819	0.819
	Nilai Tukar Petani	-	116.69	116.71	116.73	116.75	116.77	116.79	116.79
	Persentase Penduduk Miskin (PO)	10.57	10.37	9.97	9.77	9.57	9.37	9.17	9.17
	Indeks Gini	0.33	0.322	0.317	0.312	0.309	0.304	0.299	0.299
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1	Pendidikan								
	Harapan Lama Sekolah	12.88	13.05	13.11	13.17	13.23	13.29	13.35	13.35
	Rata-rata Lama sekolah	8.51	8.64	8.88	9.12	9.36	9.6	9.84	9.84
2	Kesehatan								
	Angka Harapan Hidup	72.53	72.63	72.73	72.83	72.93	73.03	73.12	73.12
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	Indeks infrastruktur	3.95	13.019	13.089	13.160	13.233	13.304	13.374	13.374
	Persentase Infrastruktur kondisi baik	71.38%	71.88%	72.38%	72.88%	73.38%	73.88%	74.38%	74.38%



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
			2021	2022	2023	2024	2026	2026	
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat								
	Persentase penurunan tingkat kejadian konflik Poleksosbud								
	Indeks Resiko Bencana	120.70	117.68	114.67	111.65	108.63	105.61	102.60	102.60
5	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	70 (B)	70(B)	70.5(B)	71(B)	71.5(B)	72(B)	72.5(B)	72.5(B)
	Indeks Profesionalisme ASN	73.05	81	81	81.5	82	82.5	83	83
	NilaiOpini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP	75.38 (BB)	76(BB)	80.5(A)	81(A)	81.5(A)	82(A)	82.5(A)	82.5(A)
	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	30.135%	30.135%	30.135%	30.135%	30.135%	30.135%	30.135%	30.135%
	Nilai IKM	79.05	82	84	85	86	87	88	88
	Nilai Survey Penilaian Integritas (SPI)	-	70	70.1	70.2	70.3	70.4	70.5	70.5
	Fokus Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup								
1	Lingkungan Hidup								
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64.158	63.88	64.2	64.53	64.86	65.2	65.52	65.52
	Persentase RTLH	13.92%	14.56%	16.40%	18.39%	20.54%	22.84%	25.30%	25.30%
2	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	Indeks Desa Membangun (IDM)	0.715	0.738	0.750	0.769	0.785	0.800	0.816	0.816
3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
				2021	2022	2023	2024	2026	
	Indeks Pembangunan Gender	91.1	91.14	91.18	91.2	91.22	91.24	91.26	91.28
4	Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil								
	Perhubungan								
	Tingkat Keselamatan Transportasi	4.30%	5.10%	6.21%	7.46%	8.52%	9.67%	10.74%	10.74%
5	Komunikasi dan Informatika								
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	2.5	2.6	2.7	2.9	3	3.2	3.2
	ASPEK DAYA SAING								
	Fokus Kemampuan Ekonomi								
	PDRB (ADHB) Dalam juta rupiah	81,940,857.90	82,938,979.94	83,938,979.94	88,297,868.99	92,656,758.04	97,202,508.52	101,748,259.00	101,748,259.00
1	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
	Persentase pertumbuhan koperasi dan UM berkualitas	-	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
	Pertumbuhan Ekonomi	-1,1	0.01 - 2.35	1.17 - 4.70	3.53 - 5.29	4.41 - 5.88	4.52 - 5.99	4.63 - 6.10	4.63 - 6.10
	Persentase IKM yang naik kelas	-	2.50%	3.00%	3,50%	4.00%	4,50%	5.00%	5.00%
2	Penanaman Modal								
	Jumlah Nilai Investasi - PMDN (Juta Rupiah) - PMA (USD)	-	3,187,916,340,000	3,339,721,880,000	3,491,527,420,000	3,643,332,960,000	3,795,138,500,000	3,946,944,040,000	3,946,944,040,000
3	Kelautan dan Perikanan, Pertanian								
	PDRB (ADHB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (dalam juta rupiah)	6,522,865	6,668,825	6,862,645	7,236,623	7,687,741	8,178,544	8,712,762	8,712,762
4	Perindustrian								



No	Aspek / Fokus / Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Tahun-0	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
				2021	2022	2023	2024	2026	
	PDRB (ADHB) Sektor Industri Pengolahan (dalam juta rupiah)	44,708,444.30	45,003,318.80	47,019,003.40	49,841,586.20	53,203,929.30	56,850,929.40	60,809,848.20	60,809,848.20
5	Perdagangan								
	PDRB (ADHB) Sektor Industri Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (dalam juta rupiah)	8,254,290.30	8,743,296.10	9,117,355.00	9,645,136.90	10,276,739.30	10,962,580.70	11,707,820.10	11,707,820.10
	Angka PDRB sektor perdagangan (Ekspor Impor)	-	4.50%	5.00%	5.50%	6.00%	6.50%	7.00%	7.00%
	Angka Perdagangan Daerah (ekspor)	-	4.50%	5.00%	5,5%	6,0%	6,5%	7,0%	7,0%
6	Pariwisata								
	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.50%	2.50%	2.69%	2.83%	2.96%	3.09%	3.21%	3.21%
7	Pemerintah Fungsi Penunjang								
	Persentase Peningkatan Laba BUMD	4.04%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%



BAB IX

PENUTUP



9.1 Penutup

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang strategis bagi pembangunan Kabupaten Mojokerto yang menerjemahkan cita-cita Kepala Daerah terpilih yang dijelaskan dalam visi dan misi. RPJMD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Keterpaduan langkah yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan, sasaran dan program pembangunan, lalu upaya-upaya yang harus dilakukan, serta penentuan keterlibatan dan peran dari berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RPJMD ini.

Karena itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai keidah pelaksanaan secara umum meliputi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

9.2 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 merupakan lanjutan kesinambungan rencana pembangunan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Terdapat irisan tahun rencana 2021 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021 sebagai kondisi awal mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026 sekaligus menuntaskan permasalahan yang terjadi pada periode sebelumnya. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto dan mencegah terjadinya kekosongan perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun 2025-2026, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2026-2027 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mojokerto dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Timur untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026-2027 Kabupaten Mojokerto akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026-2027. Selanjutnya RKPD Tahun 2026-2027 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya.



9.3 Kaidah Pelaksanaan

Dalam melaksanakan penyusunan RPJMD Kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 perlu diatur beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah (PD) lingkup pemerintah Kabupaten Mojokerto menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2022 sampai dengan 2026 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021-2026, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan KUA PPAS dan RAPBD.
3. Seluruh perangkat daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 - 2026 dan Renstra-PD dengan sebaik-baiknya dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil evaluasi RPJMD. Hal ini selaras dengan pengendalian dan evaluasi Renstra-PD yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
5. DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

